Dr. H. M. Dimyati Huda, M.Ag.

RETHINKING PERAN PEREMPUAN DAN KEADILAN GENDER

Sebuah Konstruksi Metodologis
Berbasis Sejarah dan Perkembangan Sosial Budaya

cendekia

IAIN
KEDIRI

Dr. H. M. Dimyati Huda, M.Ag.

RETHINKING PERAN PEREMPUAN DAN KEADILAN GENDER

Sebuah Konstruksi Metodologis
Berbasis Sejarah dan Perkembangan Sosial Budaya

Penerbit ***Cendekia Press*** - Bandung

RETHINKING PERAN PEREMPUAN DAN KEADILAN GENDER

Sebuah Konstruksi Metodologis
Berbasis Sejarah dan Perkembangan Sosial Budaya

Copyright ©2020 - Dr. H. M. Dimyati Huda, M.Ag.

Penulis: Dr. H. M. Dimyati Huda, M.Ag.
Editor: Dr. Limas Dodi, M.Hum.
Desainer sampul: Toto Rianto
Layout & Proofreader: Adri Tri Yuliansyah

CP.PK075-2020
ISBN: 978-623-6659-75-5
Cetakan pertama, November 2020

Diterbitkan oleh:

CV CENDEKIA PRESS
NIB: 8120107982776
Komp. GBA Barat Blok C-4 No 7 Bandung
Email: penerbit@cendekiapress.com
Website: www.cendekiapress.com

Anggota IKAPI No 328/JBA/2018

Hak cipta dilindungi undang-undang pada penulis, dan hak penerbitan pada CV Cendekia Press. Dilarang memperbanyak tulisan ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Kata Pengantar

Perempuan merupakan sosok yang selalu menarik untuk dikaji baik eksistensi, karakteristik maupun problematikanya yang senantiasa timbul seiring dengan laju perkembangan masyarakat. Makna yang terbayang apabila menyebut kata perempuan adalah satu makhluk yang halus, lembut, lemah gemulai dengan wajah yang cantik, suatu jenis makhluk yang sedemikian indahnya. Karena keindahannya itu, maka para laki-laki menganggap bahwa perempuan cukup berdiam di rumah saja, mengurusi dapur dan mengasuh anak sehingga tidak perlu turut campur urusan di luar rumah.

Perempuan dalam budaya tradisional masyarakat tanpa disadari memiliki harkat dan martabat yang setingkat lebih tinggi di atas laki-laki dalam meneruskan garis keturunan, istilah yang memegang peranan penting. Penghormatan kepada perempuan tampak dalam ungkapan *surga berada di bawah telapak kaki ibu.* Perempuan sebagai warga masyarakat mempunyai hak, kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria untuk memantapkan kehidupan bangsa dan bernegara serta kehidupan beragama.

Peranan perempuan dalam pembangunan berkembang selaras dan serasi dengan perkembangan tanggung jawab dan peranannya dalam mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia Termasuk pengembangan generasi muda, terutama anak-

anak dan remaja dalam upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Perempuan mempunyai kelebihan menyambung silaturahmi dalam proses mendidik anak untuk memperkokoh jati diri bangsa.

Buku yang berjudul *Peran Perempuan dan Strategi Pemberdayaan Sosial* merupakan sebuah pemaparan atas emansipasi kaum wanita yang dikaitkan dengan partisipasi kebangsaan dan dinamika masyarakat dengan harapan agar perjuangan kesetaraan *gender* di Indonesia segera dapat direalisasikan dalam rangka membangun tatanan sosial yang lebih berkeadilan. Selain hal tersebut juga sangat penting bagi para pembaca untuk dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbedaan laki-laki dan perempuan yang masih menyimpan masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan itu menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) melahirkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut *gender*. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut dapat berupa marginalisasi perempuan, penempatan perempuan pada subordinasi, *stereotype* (pelabelan), kekerasan *(violence)* terhadap perempuan, serta beban kerja yang tidak proporsional. Keadaan yang seperti ini sudah kerap sekali terjadi di negara-negara belahan dunia. Secara teoretis, permasalahan *gender* mendapat sorotan dari beberapa kalangan. Banyak teori-teori yang menyatakan bahwa perbedaan *gender* merupakan ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan yang tidak bisa di ubah kembali. Tetapi, teori-teori ini mendapat pertentangan dari kelompok lain. Mereka menganggap bahwa perbedaan itu merupakan konstruksi sosial yang dipertahankan kelangsungannya dan teori terbaru yang menyatakan tidak setuju dengan masalah perbedaan *gender* adalah teori feminis.

Dalam faktanya memang permasalahan *gender* ini sangat memengaruhi pembangunan suatu Negara. Perempuan seharusnya menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan tersebut seperti halnya yang dikatakan oleh Marx yang dilengkapi Friderich Engels bahwa perbedaan dan ketimpangan *gender* antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan dari kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Hubungan suami istri tidak ada bedanya dengan hubungan budak dan majikan, pemeras dan yang diperas. Dengan kata lain, ketimpangan peran *gender* dalam masyarakat bukan karena faktor biologis atau pemberian Tuhan, tetapi karena konstruksi masyarakat.

Ringkasnya, bahasan tentang peran perempuan selalu menarik untuk dikaji ulang, *wa bil akhos,* pada masyarakat kultural di Indonesia. Tipe masyarakat yang oleh Cliford Geertz digambarkan sebagai *cultural human, cultural broker,* sangat meyakini betul terhadap warisan tradisi dan budaya nenek moyang, baik normative maupun intelektual. Penggambaran tipe masyarakat demikian, memosisikan perempuan semakin tersudut dan berdiri pada posisi yang tidak seimbang. Berbagai ide pembaruan, reposisi sampai pada penggalian normatif dengan segala pemikiran kontemporernya namun belum mampu mengkontekskan perempuan pada posisi determinan. Di sinilah peran buku ini sebagai tawaran konseptual implementatif yang kaya dialektika.

Kediri, 1 November 2020

Dr. H. M. Dimyati Huda, M.Ag.

Daftar Isi

Kata Pengantar — iii

Daftar Isi — vii

Bab I Perempuan dan Gender: Kajian Sosiologis — 1

A. Problematika Gender dan Perempuan — 1
B. Realitas Ketidakadilan Gender di Masyarakat — 6
C. Ketidaksetaraan Gender di Indonesia — 10
D. Periodesasi Gender dalam Pusaran Sejarah — 14
E. Gender dan Pembangunan Manusia — 21

Bab II Teori-Teori Gender: Klasik hingga Kontemporer — 27

A. Teori Psikoanalisa — 27
B. Teori Fungsionalis Struktural — 30
C. Teori Sosio-Biologis — 31
D. Teori Konflik — 34
E. Teori Feminisme — 36

Bab III Hakikat Perempuan dan Kosmologi — 41

A. Hakikat Perempuan: Kajian Filosofis — 41
B. Problematika Perempuan — 44
C. Perempuan dan Peradaban Nusantara — 47
D. Kodrat Perempuan — 49

Bab IV Tokoh Revolusi Perempuan dan Ideologi Modern — 57
A. Tokoh Pejuang Perempuan — 57
B. Kultur Perempuan Jawa — 69
C. Tradisi dan Modernisasi — 72

Bab V Perempuan dan Abad Modernitas — 75
A. Perempuan dan Akulturasi Budaya — 75
B. Perempuan dan Materialistis — 79
C. Modal Budaya — 81

Bab VI Dinamika Gerakan Perempuan Berbias Gender di Indonesia — 83
A. Kongres Perempuan Indonesia — 83
B. Kongres Perempuan di Yogyakarta — 89
C. Kongres Perempuan di Bandung — 99
D. Kongres Perempuan di Semarang — 105

Bab VII Dinamika Perjuangan dan Pergerakan Perempuan di Indonesia — 109
A. Embrio Organisasi Perempuan — 109

Bab VIII Perempuan di Era Revolusi Kemerdekaan — 117
A. Berjuang Membela Kemerdekaan — 117
B. Persatuan Wanita Indonesia — 121
C. Wanita Negara Indonesia (WANI) — 122
D. Pusat Tenaga Perjuangan Wanita Indonesia (PTPWI) — 123
E. Perkumpulan Pekerja Putri Surakarta (PPPS) — 124
F. Inspektorat Wanita — 125
G. Wanita di Daerah — 126
H. Laskar Wanita — 128
I. Laskar Gabungan — 138
J. Terbentuknya Polisi Wanita — 138

Bab IX Pergolakan Perempuan Pasca Kemerdekaan — 141
A. Membantu Komite Nasional — 141
B. Kongres Wanita di Madiun — 146
C. *All Asean Women Conference — 148*
D. Kongres Wanita di Magelang — 149
E. Kongres Wanita di Solo — 150

Bab X Perempuan pada Masa Demokrasi Liberal — 161
A. Republik Indonesia Serikat — 161
B. Kongres Wanita di Jakarta — 168
C. Kongres Wanita di Bandung — 172
D. Kongres Wanita di Palembang — 180
E. Kongres Wanita di Surabaya — 187
F. Masa Demokrasi Terpimpin — 198

Bab XI Konsolidasi Organisasi Perempuan di Indonesia — 213
A. Dewan Pimpinan Kongres — 213
B. Anggota Kowani — 216
C. Ikatan Pegawai Wanita Antar Departemen — 217
D. Badan Kerja sama Dharma Pertiwi — 219
E. Peranan Wanita dalam pengganyangan Gestapu/ PKI — 220
F. Wanita Sekretariat Bersama Golkar — 223
G. Era Orde Baru — 224

Bab XII Gerakan Perempuan Berbasis Masyarakat — 235
A. Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita — 235
B. Komisi Nasional Kedudukan Wanita — 240
C. Dharma Wanita — 247
D. Women's International Club — 253
E. Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak — 254

F. Badan Pembina Kegiatan Sosial — 255
G. *Asean Women Circle* — 259

Bab XIII Pemberdayaan Perempuan Kontemporer — 263
A. Perempuan dalam Budaya Tradisional — 263
B. Strategi Pembinaan Sosial — 266
C. Refleksi Masalah Perempuan — 268
D. Pentingnya Pendidikan dan Pelatihan bagi Kaum Perempuan — 272

Daftar Pustaka — 275

Indeks — 295

Tentang Penulis — 297

Bab I

Perempuan dan Gender: Kajian Sosiologis

A. Problematika Gender dan Perempuan

Kosa kata perempuan dalam al-Quran dapat disebutkan sebagai *Al mar'ah salehah* (perempuan salihah), *mar'ah as Sayyi'ah* (perempuan durhaka) dan *mar'ah wa musyarakatuha fil ijtima'iyyah* (perempuan yang mempunyai peran di masyarakat).[1] Adapun perempuan salihah dalam sejarah diceritakan tentang kesetiaan yang dimiliki Ibu Hawa yaitu surat Al-Baqarah ayat 34-38, juga istri Nabi Ibrahim yang terdapat dalam Surah Hud: 71-72, Ibrahim: 37, al-Hijr: 29-30, Istri Nabi Zakariya dalam Surat Ali Imran 35-36. Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan masalah,

1 Pembagian tipologi perempuan dalam Islam ini, bukan berarti untuk membeda-bedakan perempuan secara *definitive*, namun lebih kepada pengakuan peran perempuan yang juga sama dengan tipologi laki-laki. Seperti yang diungkap oleh Agustin Hanapi (2019), bahwa perempuan memiliki tempat istimewa dalam al-Quran, Islam memosisikan perempuan di tempat yang mulia, tidak ada dikotomi ataupun diskriminasi. Karena tipe perempuan ada yang bersifat baik, buruk dan suka berinteraksi dengan masyarakat layaknya posisi seseorang dalam interaksi sosial. Sehingga ayat al-Quran sama sekali tidak menjustifikasi dan menguraikan bahwa antara perempuan dan laki-laki terdapat perbedaan dalam berkiprah di masyarakat sosial. Seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Hujurat ayat 13 bahwa *"hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenai. Sesungguhnya orang yang lain mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"*. Masih banyak ayat al-Quran yang menyatakan sama posisi laki-laki dan perempuan dalam perannya di masyarakat. Lihat penjelasan lebih lengkap dalam Agustin Hanapi, "Peran Perempuan dalam Islam", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1) 2019, 15-19.

baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas akan tetapi efek yang timbul akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) melahirkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut *gender.*

Kata *gender* berasal dari bahasa Inggris, yang berarti "jenis kelamin". Dalam *Webster's New World Dictionary*, *gender* diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Istilah *gender* lazim digunakan dalam masyarakat yang artinya sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan.[2] *Gender* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli dapat disimpulkan bahwa *gender* adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. *Gender* dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.[3]

2 Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Dadang Jaya menemukan beberapa hal penting terkait dengan pemaknaan gender dalam masyarakat. Hasil penelitiannya mengatakan beberapa hal; 1) dalam masyarakat, makna kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi antara laki-laki dengan perempuan untuk mendapatkan haknya sebagai manusia dan mampu berpartisipasi dalam segala kegiatan sosial, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan ketahanan nasional; 2) gender memiliki perbedaan dengan feminisme, gender adalah pemosisian jenis kelamin di masyarakat sedangkan feminisme adalah gerakan perempuan yang menuntut kesamaan gender antara laki-laki dan perempuan; 3) perempuan menuntut kesamaan hak dengan laki-laki. Namun beberapa kondisi tidak dapat sama, yakni perempuan dapat mengandung, hamil dan menyusui. Dadang Jaya, "Gender and Feminism: A Research from the Perspective of Islamic Studies", *at-Tatbiq: Jurnal al-Ahwal al-Syakhshiyyah*, 4(1) 2019, 37-39.

3 Pemaknaan gender secara biologis, memang lebih tepat dibandingkan dengan pemaknaan gender secara non biologis atau kerangka struktur sosial. Penelitian Muhammad Ali Murtadho (2019), konsekuensi pemaknaan gender secara non biologis berpengaruh terhadap aturan hukum *normative* yang telah ditentukan. Seperti dalam masalah waris misalnya, keadilan gender dengan konsep 2:1 diklaim menghilangkan status kesamaan antara laki-laki dengan perempuan, namun sepintas jika hanya dihitung secara matematis terlihat tidak berimbang karena yang dihitung adalah angka. Akan tetapi, perspektif matematis tersebut bukan tujuan sara, melainkan sisi keadilanlah yang diinginkan. Di mana perempuan, mendapatkan keadilannya ketika telah berkeluarga. Inilah yang dimaksud dengan gender berkeadilan. Lihat lebih lengkap dalam Muhammad Ali Mustadho, "Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif the

Sejarah perbedaan *gender (gender difference)* antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses sosialisasi, penguatan dan konstruksi sosial kultural, keagamaan, bahkan melalui kekuasaan Negara.[4] Melalui proses yang cukup panjang sehingga *gender* lambat laun menjadi seolah-olah ketentuan Tuhan atau kodrat dan ketentuan biologis yang tidak dapat diubah lagi. Karena itu saat ini orang sering menyebutnya dengan kodrat. Misalnya: sifat lemah lembut, sifat memelihara dan sifat emosional yang dimiliki oleh kaum perempuan dikatakan sebagai kodrat perempuan.

Akan tetapi sebaliknya sosialisasi konstruksi sosial tentang *gender* ini secara evolusi akhirnya mempengaruhi perkembangan masing-masing jenis kelamin. Misalnya: sifat *gender* laki-laki harus kuat dan agresif sehingga konstruksi sosial itu membuat laki-laki terlatih dan termotivasi menuju dan mempertahankan sifat yang ditentukan tersebut yakni laki-laki lebih kuat dan lebih besar. Sebaliknya, karena konstruksi sosial bahwa kaum perempuan harus lemah lembut, maka sejak kecil, sosialisasi tersebut mempengaruhi emosi, visi dan ideologi kaum perempuan, serta perkembangan fisik dan biologis mereka. Karena proses sosialisasi yang berjalan secara mapan, akhirnya sulit dibedakan apakah sifat *gender* tersebut dikonstruksi atau kodrat biologis ketentuan Tuhan.[5] *Gender* dalam perkembangannya di Indonesia saat ini

---

Theory of Limit Muhammad Syahrur", *Gender Quality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(1) 2018, 173.

4 Alice H. Eagly; Christa Nater dkk., "Gender Stereotypes have Changed: A Cross-Temporal Meta-Analysis of U.S. Public Opinion Polls from 1946 to 2018", *American Psychologist*, 75(3) 2020, 301-315.

5 Persoalan gender sebenarnya lebih kepada konstruk sosial yang dipaksakan. Dalam beberapa penelitian tentang posisi perempuan di masyarakat, sebenarnya tidak ditemui perbedaan penting antara perlakuan laki-laki dan perempuan. Semisal dalam hal kepemimpinan atau posisi di pemerintahan, anggapan perempuan tidak mendapatkan porsi yang sama hanyalah dari asumsi peneliti saja, kenyataan di masyarakat tidak demikian. Faktanya, perempuan bukan tidak mau sama dengan laki-laki, melainkan mereka memilih dengan keinginannya sendiri terlepas dari kodrat maupun konstruk sosial. Dengan pernyataan tersebut, jelas bahwa istilah gender lahir dari konstruk sosial saja, bukan perbedaan anugerah biologis yang tidak seimbang, namun sebenarnya bukan tidak seimbang melainkan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Lihat lebih jelas dalam Muhammad Juni Beddu, "Nilai-Nilai Gender dalam Perspektif Histori Pewarisan dari Era Pra-Islam hingga Era Islam", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 18(1) 2019, 52-66.

tidak hanya pada wacana publik akan tetapi merambah pada perkembangan politik, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia

Persoalannya, jika konstruksi *gender* dianggap sebagai kodrat, akibatnya *gender* mempengaruhi keyakinan manusia serta budaya masyarakat tentang bagaimana laki-laki dan perempuan berpikir bertindak sesuai dengan ketentuan sosial tersebut. Perbedaan yang dilakukan oleh aturan masyarakat dan bukan perbedaan biologis itu dianggap sebagai ketentuan Tuhan. Masyarakat sebagai kelompok yang menciptakan perilaku pembagian *gender* untuk menentukan berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai keharusan, untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Keyakinan pembagian itu selanjutnya diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya penuh dengan proses, negosiasi maupun dominasi.[6] Akhirnya lama kelamaan pembagian keyakinan *gender* tersebut dianggap alamiah, normal dan kodrat sehingga bagi mereka yang mulai melanggar dianggap tidak normal dan melanggar kodrat.

Oleh karena itu, perlu diadakan pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan *gender* yang dengan pembahasan tersebut diharapkan masyarakat mempunyai pandangan dan pemahaman yang lebih luas dan lebih beragam mengenai relasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai kehidupan sosial, tanpa terpengaruh oleh keyakinan-keyakinan dari sebuah penafsiran yang salah. Selanjutnya, dengan modal pandangan dan pemahaman yang luas dan beragam itu pada gilirannya dapat diwujudkan suatu masyarakat yang adil, damai, dan egaliter tanpa adanya pembiasan gender.

Menurut seorang feminis Muslim dari India yang menyatakan bahwa konsep kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan adalah Pertama, dalam pengertian umum penerimaan martabat

6 Periksa dalam Qurratul Ainiyah, "Urgensi Pendidikan Perempuan dalam Menghadapi Masyarakat Modern", *Halaqa: Islamic Education Journal,* 1(2) 2017, 45.

jenis kelamin dalam ukuran yang setara. Kedua, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Keduanya harus mempunyai kedudukan yang setara untuk mengadakan kontrak perkawinan maupun memutuskannya. Keduanya mempunyai hak untuk mengatur hartanya tanpa mendapatkan campur tangan orang lain dan keduanya bebas memilih profesi atau cara hidup, keduanya setara juga dalam pertanggung jawaban dan kebebasan.[7]

Konstruksi sosial telah mengakar pada masyarakat tentang konsep perempuan yang dinyatakan bahwa perempuan itu lemah, emosional, sensitive, tidak dapat berperan dalam menentukan kebijakan dan keberadaannya hanya sebagai pelengkap saja. Bahkan mudah dieksploitasi.[8] Demi ketentraman dan kebahagiaan hidupnya bersedia menjadi selir atau istri simpanan yang menumbuhkan kontroversi di banyak kalangan. Perempuan yang dianggap sebagai *objek surga nunut neraka katut* menunjukkan ketidakbebasannya dalam menentukan pola pikir dan pola laku dalam mengisi kehidupan ini. Untuk hal tersebut perlu adanya pemahaman yang harus diubah tentang kedudukan dan peran perempuan.

7 Konsep kesetaraan peran antara laki-laki dengan perempuan telah tercipta semenjak lahir, hanya saja berbeda pada aspek biologis semata. Karena perbedaan biologis itulah, perempuan memiliki tugas biologis seperti mengandung dan menyusui yang hal demikian tidak dapat dimiliki oleh laki-laki. Pada aspek biologis pula, laki-laki dikaruniai fisik yang lebih daripada perempuan, sehingga laki-laki memiliki tanggung jawab mencari nafkah keluarga karena kekuatan fisiknya. Pembagian secara biologis tersebut telah diatur dengan jelas agar kehidupan manusia dapat berjalan stabil dan harmonis. Lihat Gusri Wandi, "Rekonstruksi Maskulinitas: Menguak Peran Laki-Laki dalam Perjuangan Kesetaraan Gender", *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, V(2) 2015, 239-255.

8 Lihat dalam Syafiq Hasyim, *Bebas dari Patriarkhisme Islam*, Depok: KataKita, 2010, 35-36; lihat juga dalam Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, 1-3; lebih umum dan bebas lagi dapat dilihat dalam Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, (terj.) Rahmani Astuti; M.S. Nasrullah, Bandung: Mizan, 1999, 54.

B. Realitas Ketidakadilan Gender di Masyarakat

Perbedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan *gender* dan perbedaan *gender* telah melahirkan berbagai ketidakadilan. Faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan atau ketidakadilan *gender* adalah akibat adanya gender yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Manifestasi ketidakadilan *gender* tersosialisasi kepada kaum laki-laki dan perempuan secara mantap, yang mengakibatkan ketidakadilan tersebut merupakan kebiasaan dan akhirnya dipercaya bahwa peran *gender* itu seolah-olah merupakan kodrat dan akhirnya diterima masyarakat secara umum. Bahkan tidak jarang masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan pembawa petaka, perempuan yang menyesatkan kaum pria masuk ke dalam neraka dan perempuan adalah penggoda sebagaimana jatuhnya Adam dari surga oleh rayuan Ibu Hawa.[9] Dalam pemahaman ini sebetulnya Hawa bukanlah simbol perempuan yang menjadi sumber malapetaka dan telah dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 36 yaitu:

فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ

9 Ahmad Mulyadi (2009) menegaskan bahwa dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan terhadap dua wilayah peran yang penting yaitu peran publik *(public role)* dan sektor publik *(public sphere)* dengan peran domestik *(domestic role)* atau sektor domestik, pada sektor publik diasumsikan sebagai wilayahnya kaum laki-laki, sementara pada sektor domestik diasumsikan wilayahnya perempuan. Dalam pemahaman kaum perempuan, terutama kaum feminis, mengatakan bahwa pemetaan ini adalah produk budaya saja, warisan kultural dari masyarakat primitive zaman tanpa intelektual dulu. Warisan tersebut pada tahapan selanjutnya diwariskan secara turun temurun dan dianggap jelmaan dari sumber keagamaan. Sehingga pada masyarakat modern sekalipun, sekat pemetaan budaya tersebut masih terjadi walaupun telah mulai tergeser oleh perkembangan teknologi. Terbukti dengan banyaknya kaum perempuan yang menggantikan peran laki-laki dalam pos-pos pekerjaan industri maupun jenis pekerjaan lain. Lihat dalam Achmad Mulyadi, "Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas)", *al-Ihkam*, VII(1) 2009, 249.

Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari (segala kenikmatan) ketika keduanya di sana (surga).

Mansour Fakih (1997) dalam bukunya Analisis gender dan Transformasi Sosial menegaskan bahwa ketidakadilan gender dapat mengakibatkan: marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, kekerasan, dan beban berlipat.[10]

1. Marginalisasi Perempuan

Proses marginalisasi perempuan dapat terjadi karena tidak adilnya penempatan sumber daya manusia yang diberikan oleh para pemilik modal kepada kaum perempuan dengan gaji di bawah laki-laki. Sebagai contoh di Pulau Jawa pekerja di sawah dengan waktu yang sama dari jam 07.00 sampai dengan jam 12.00 gaji seorang perempuan pasti di bawah laki-laki. Marginalisasi dalam lingkungan keluarga juga biasa terjadi di tengah masyarakat. Misalnya, anak laki-laki memperoleh fasilitas, kesempatan dan hak-hak yang lebih daripada anak perempuan.[11] Budaya semacam itu selalu diperkuat oleh penafsiran Agama yang berbeda dan adat istiadat yang telah bersatu dalam kehidupan masyarakat sehingga perempuan selalu menjadi korban ketidakadilan *gender* akibat marginalisasi tersebut.

10 Mansur Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, 12-24.

11 Hal demikian terpotret dalam penelitian yang dilakukan oleh Mufidah Ch () bahwa dalam konteks sosial ekonomi, ketidakadilan antara laki-laki dengan perempuan tercermin dari pemercayaan dan pemberian pekerjaan kepada perempuan yang minim. Anak laki-laki dianggap generasi tangguh yang pada nantinya dapat memberikan keteduhan kepada keluarga sehingga mereka mendapatkan fasilitas, pendidikan, layanan dan asuhan yang total dari orang tua, namun berbeda dengan perempuan yang hanya disibukkan dengan urusan dapur, sehingga dampaknya perempuan hanya menjadi istri, jadi untuk apa diberi pendidikan yang tinggi. Hal demikian telah mendarah daging di kalangan masyarakat. Lihat Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2013, 2-3.

2. Penempatan Perempuan pada Subordinasi

Sebuah pandangan yang tidak adil terhadap perempuan dengan anggapan dasar bahwa perempuan itu irasional, emosional, lemah dan lainnya, menyebabkan penempatan perempuan dalam peran-peran yang dianggap kurang penting. Potensi perempuan sering dinilai tidak *fair* oleh sebagian besar masyarakat kita mengakibatkan sulitnya mereka menembus posisi-posisi strategis dalam komunitasnya.[12]

3. *Stereotype* Perempuan

Stereotype adalah pelabelan terhadap kelompok, suku, bangsa tertentu yang selalu berkonotasi negatif sehingga sering merugikan dan timbul ketidakadilan. Pelabelan atau penandaan yang dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin tertentu (perempuan) akan menimbulkan kesan negatif yang merupakan keharusan disandang oleh perempuan. *Stereotype* itu merupakan salah satu bentuk ketidakadilan *gender.*

4. Kekerasan *(Violence)* Terhadap Perempuan

Salah satu bentuk ketidakadilan *gender* adalah tindak kekerasan terhadap perempuan baik yang berbentuk kekerasan fisik maupun psikis. Kekerasan itu timbul akibat beberapa faktor di atas, termasuk anggapan bahwa laki-laki pemegang supremasi dan dominasi terhadap berbagai sektor kehidupan.[13]

---

12 Subordinasi merupakan pandangan tidak adil atas salah satu jenis kelamin yang didasarkan pada stereotype gender, terjadi penempatan salah satu jenis kelamin terhadap status, peran dan relasi yang tidak seimbang. Dalam hal ini, laki-laki umumnya dipandang superordinat. Dampak paling rawan dari penganggapan subordinasi ini adalah dapat menghambat akses partisipasi, kontrol dan pengambilan keputusan. Sehingga perempuan akan lemah dan dilemahkan. Lihat dalam Munifah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 4.

13 Kekerasan bias gender tidak dapat dilepaskan dari pandangan yang menempatkan salah satu jenis kelamin menjadi superior dan lebih berkuasa, kemudian pada salah satu jenis kelamin yang lain bersifat inferior, ternyata penganggapan ini berdampak sangat signifikan terhadap hubungan hierarkis masyarakat tentang posisi laki-laki dan perempuan. Relasi yang timpang inilah, menyebabkan kekerasan di mana salah satu pihak menguasai dan dikuasai. Kekerasan berbasis gender ini cenderung lebih banyak terjadi pada perempuan karena dianggap tidak memiliki kemandirian. Lihat dalam Mayola Andika, "Reinterpretasi Aya Gender dalam Memahami Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual dalam Penafsiran)", *Musawa*, 17(2) 2018, 141.

5. Beban Kerja yang Tidak Proporsional

Budaya patriarki beranggapan bahwa perempuan tidak punya hak untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Sebaliknya, ia berhak untuk diatur. Pekerjaan domestik yang dibebankan kepadanya menjadi identik dengan dirinya sehingga posisi perempuan sarat dengan pekerjaan yang beragam macamnya, dalam waktu yang tidak terbatas dan cukup berat. Bahkan anggapan masyarakat kepada perempuan yang hanya bekerja di rumah dianggap sebagai perempuan yang tidak bekerja walaupun jika ditinjau pekerjaan dari bangun tidur sampai tidur lagi untuk mengurus rumah tangga adalah suatu pekerjaan yang memerlukan waktu penyelesaian dengan hasil dari pekerjaan tersebut namun tetap dianggap bahwa perempuan tersebut tidak bekerja.[14]

Bentuk-bentuk ketidakadilan *gender* melalui marginalisasi, penempatan perempuan pada *subordinat, stereotype,* tindak kekerasan, maupun beban kerja yang tidak proporsional dilakukan oleh laki-laki dalam segala komunitas yang ada. Hal itu dapat terjadi dalam lingkungan keluarga, di tempat-tempat kerja, di tempat-tempat umum, dan dapat pula dilakukan oleh siapa saja yang tidak peka pada persoalan *gender* dan kemanusiaan

Selama bertahun-tahun kelompok wanita di tempat kerja selalu menjumpai *glass ceiling* (atap kaca) yang menunjuk pada praktik diskriminatif dan mencegah kepada para wanita serta anggota golongan yang dilindungi lainnya untuk naik ke pekerjaan tingkat eksekutif. Para wanita cenderung naik dalam manajemen senior dengan area pendukung yang terbatas seperti pada sumber daya

14 Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan mengabaikan sisi keadilan pada salah satu pihak. Terkadang perempuan harus menanggung beban kerja yang berlebihan, selain harus bekerja menafkahi keluarga juga pekerjaan rumah yang menumpuk, ini memosisikan perempuan sebagai pihak yang diperdaya. Pola pembagian kerja yang tidak fleksibel, tidak adil dan berlipat-lipat menyebabkan perempuan menjadi tertindas. Lihat dalam Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Quran*. Yogyakarta: LKiS, 1999, 65.

manusia dan komunikasi korporasi karena pekerjaan dalam area pendukung memiliki gaji lebih rendah daripada pekerjaan bagian penjualan, pemasaran, operasional maupun keuangan. Pengaruh keseluruhannya untuk mengurangi karakter dan pendapatan wanita. Batasan yang menghalangi wanita dari kemajuan hanya dalam lapangan tertentu disebut sebagai *glass walls* (dinding kaca) atau *glass elevators* (elevator kaca).[15]

C. Ketidaksetaraan Gender di Indonesia

Pembangunan nasional selama Tiga Dasawarsa terakhir dalam modernisasi di berbagai sektor harus diakui telah memberikan manfaat yang besar terhadap upaya pemberdayaan perempuan. Akan tetapi kemajuan itu baru dapat dinikmati oleh sebagian kecil perempuan, khususnya mereka yang berada pada lapisan sosial ekonomi menengah sampai tinggi. Dengan perkataan lain, kemajuan tersebut belum tercapai. Status dan peranan perempuan dalam masyarakat Indonesia dewasa ini masih bersifat subordinatif dan belum sampai pada posisi sebagai mitra sejajar dengan laki-laki. Kondisi yang timpang itu tercermin terutama pada kualitas hidup. Kualitas hidup perempuan Indonesia menduduki peringkat paling rendah di *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.[16]

15 Dalam penelitian Zaini Ariff (2019) diungkapkan bahwa perempuan diberikan peran strategi dalam masyarakat, namun hal demikian sebatas pada perempuan-perempuan pilihan. Begitu juga dalam Negara, perempuan diberikan peran dengan batasan 30 persen. Pemberian peran semacam ini dinamakan dengan pemberian peran fiktif. Terbukti, perempuan lebih banyak diberikan peran dalam industry dengan status tidak tetap, artinya mirip seperti buruh. Lihat dalam Zahra Zaini Arif, "Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia", *Indonesian Journal of Islamic Law,* 1(2) 2019, 97-126.

16 Hal demikian dikutip oleh Siti Rokhimah (2014) dalam artikelnya yang berkesimpulan bahwa posisi perempuan di Indonesia tertulis dilematis, sebab angka perempuan di Indonesia yang dua kali lipatnya laki-laki, tidak mampu memberikan pemosisian yang seimbang dengan laki-laki. Walaupun penelitian yang dilakukan oleh Siti Rokhimah dilakukan pada tahun 2013, namun hingga kini fenomena ketidakadilan gender terhadap perempuan tidak juga berkembang. Banyaknya perempuan lebih banyak ditempatkan pada posisi domestik. Lihat dalam Siti Rokhimah, "Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender", *Muwazah,* 6(1) 2015, 132-135.

Berikut ini akan diuraikan secara singkat kondisi ketimpangan yang dimaksud.

Pertama, aspek kesehatan. Kesehatan dan status gizi perempuan sampai saat ini masih merupakan masalah utama dan semakin memprihatinkan dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Angka Kematian Ibu (AKI) jumlahnya mencapai sekitar 308 per 100.000 kelahiran atau rata-rata 15.000 ibu meninggal setiap tahun karena melahirkan dan ini merupakan peringkat tertinggi di ASEAN. Meningkatnya AKI disebabkan oleh kawin muda, hamil muda, terlalu sering hamil, atau terlalu tua hamil serta terbatas atau belum meratanya sarana prasarana dan kualitas petugas pertolongan persalinan.[17]

Kedua, aspek pendidikan. Ketidaksetaraan *gender* di bidang pendidikan antara lain ditunjukkan oleh masih tingginya angka buta huruf di kalangan perempuan dan rendahnya jumlah perempuan di jenjang pendidikan tinggi yakni kurang dari 5 %. Sementara itu, diperoleh pula fakta-fakta masih adanya materi bahan ajar yang bias *gender* serta proses pengelolaan pendidikan yang bias *gender* sebagai akibat dari masih dipegangnya sebagian besar penentu kebijakan pendidikan oleh laki-laki.[18]

Ketiga, aspek ketenagakerjaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih sangat kecil yaitu sebanyak 51,2 %, itupun sebanyak 80 % terserap di sektor informal sebagai pembantu

17 Data lain yang ditemukan oleh Kementerian Pembangunan dan Pendayagunaan Perempuan tahun 2002 mengungkapkan bahwa Bank Dunia merangkum tentang pembangunan dalam kajian gender yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan gender di bidang kesehatan terjadi pada perempuan kalangan miskin. Seperti Negara-negara berkembang berpenghasilan rendah, terjadi penurunan perbedaan pelayanan kesehatan. Lihat alam Kementerian Pembangunan dan Pendayagunaan Perempuan, *Rangkuman Pembangunan Perspektif Gender*, Jakarta: Dian Rakyat, 2002, 1-19.

18 Dilansir dari data akurat lainnya, oleh UNICEF menyatakan bahwa data Departemen Pendidikan melansir bahwa telah terjadi kesenjangan pendidikan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Dari sepuluh anak yang putus sekolah di semua tingkatan, terdapat enam anak perempuan dan empat anak laki-laki. Bahkan pada tingkatan SLTA perbandingan anak laki-laki dengan anak perempuan yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi adalah 7:2. Indonesia termasuk pada Negara berkembang dengan penduduk terbanyak nomor dua se Asia Tenggara, namun dari aspek pendidikan mengalami kerentanan yang diakibatkan oleh penghasilan rendah. Lihat dalam UNICEF, *Fact Sheet on Girls Education in Indonesia*, diunduh dari laman www.unicef.org/indonesia.pdf, 78.

rumah tangga (PRT). Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan.[19]

Keempat, aspek ekonomi. Peningkatan partisipasi perempuan dalam usaha ekonomi produktif dilaksanakan khususnya melalui program perluasan kesempatan kerja. Akan tetapi kenyataan menunjukkan masih rendahnya kemampuan perempuan untuk memperoleh peluang kerja dan usaha serta rendahnya akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti teknologi, informasi pasar, kredit dan modal kerja. Kenyataan lain menunjukkan pekerja perempuan mendapatkan gaji yang rendah. Semakin tinggi tingkat gaji semakin kecil proporsi perempuan. Hal ini juga diperburuk oleh masih adanya bias *gender* dalam proses rekrutmen, seleksi, dan promosi bagi kerja perempuan. Implikasinya ditandai oleh masih banyaknya perempuan yang bekerja pada jenis-jenis pekerjaan yang marginal, sebagai buruh lepas dan pembantu rumah tangga. [20]

Kelima, aspek hukum. Posisi perempuan di bidang hukum saat ini masih sangat lemah dan terdiskriminasi, terutama dalam kasus-kasus pemerkosaan, perzinaan, pelecehan sexual, kekerasan dan pekerjaan. Ketidakadilan *gender* dalam substansi hukum tersebut juga didukung oleh permasalahan pada tingkat struktur hukumnya yang ditandai oleh masih rendahnya sensitivitas *gender* di kalangan penegak hukum.[21]

19 Prihatin Effendi; Deve Ratnasari, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Pro Hukum*, 7(2) 2018, 1-3; bisa juga diperiksa dalam tulisan Jimmi Joses Sembiring, *Hak dan Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru*. Jakarta: Visimedia, 2016, 35.

20 Ketidaksetaraan gender terlihat kentara pada aspek ini, aspek ekonomi yang menempatkan perempuan pada ruang-ruang domestic saja, hal ini didukung oleh kajian normatif keagamaan dan warisan nenek moyang tentang keutuhan rumah tangga. Bahkan efek dari ketidaksetaraan ini adalah berpengaruh pada ketidaksetaraan biang lain seperti pendidikan, politik dan sosial. Lihat Riant Nurgroho, *Gender dan Strategi Pengurus Utamanya di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 8.

21 Badri (2018) melihat bahwa sejak tahun 2015 sampai sekarang, pemosisian perempuan telah seimbang dengan laki-laki, hal ini terlihat dalam putusan-putusan hakim yang berbasiskan gender. Perempuan tidak lagi subordinan dan menjadi pihak yang selalu dirugikan. Sekalipun dalam beberapa aspek tetap tidak dapat ditangkap bahwa secara fitrah, perempuan masih terabaikan semisal kasus pemerkosaan yang tidak dapat diadili secara an sich. Lihat Badri, Pembangunan Hukum Perspektif Gender melalui Kesetaraan Hak, Sumber Daya dan Aspirasi. *Jurnal Justisia,* 3(2) 2018, 12-14.

Keenam, aspek hak asasi manusia (HAM). Ketimpangan *gender* dalam bidang HAM muncul pada bentuk penindasan dan eksploitasi, kekerasan serta diskriminasi hak dalam keluarga dan masyarakat yang memprihatinkan berkaitan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan adalah bahwa hal itu baru dilihat dari kekerasan fisik semata belum melihat kekerasan kejiwaan *(psychological violence)* atau kekerasan seksual. Masalah ini semakin sulit terdeteksi karena pada umumnya kasus-kasus kekerasan terkait dengan pola relasi kekuasaan.[22]

Ketujuh, aspek politik. Posisi penting perempuan dalam berbagai lembaga pemerintahan, badan legislatif, dan yudikatif masih sangat lemah. Angka keterwakilan perempuan sangat kecil dibandingkan dengan angka keterwakilan laki-laki, padahal partisipasi perempuan sebagai pemilih lebih besar daripada laki-laki. Walaupun pada dasarnya UU Pemilihan Umum juga telah menempatkan posisi perempuan agar terpenuhinya kuota 20 persen perempuan yang duduk sebagai anggota legislatif namun pada kenyataannya ketika Pemilihan Umum berlangsung kuota itu tidak terpenuhi.[23]

Gambaran umum tentang kondisi perempuan Indonesia yang disorot dari ketujuh aspek di atas menjelaskan betapa masih terpuruknya posisi sosial perempuan di Indonesia. Karena itu, sangat relevan untuk membincangkan kembali upaya-upaya emansipasi di kalangan perempuan walaupun dalam Sumber Hukum al-Quran disebutkan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan karena mendapat kemuliaan yang sama di hadapan Sang Pencipta sebagaimana Surat al-Isra' (17) ayat 70 sebagai berikut:

22 Triastuti Handayani, "Mewujudkan Keadilan Gender melalui Perlindungan Hukum terhadap Perempuan", *Jurnal Rechtstaat Nieuw*, 1(1) 2018, 23-25.

23 Dalam hal politik, porsi perempuan di Indonesia hanya diberikan kursi 30 persen dari seluruh kursi parlemen di setiap daerah, ini berarti perempuan dengan laki-laki berbanding 7:3. Namun bukan berarti peran dan fungsi perempuan menjadi terhimpit pada angka 30 tersebut, sejarah mencatat bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin atau orang nomor satu bahkan sebagai pimpinan di beberapa lembaga legislatif. Lihat Kunthi Tridewiyanti, "Gender Equality and Justice in Field of Politics: the Importance of Participation and Representation of Women in Legislative", *Journal Legislasi Indonesia*, 9(1) 2012, 78-79.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم
مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا

Dan sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Sejak tahun 1966 telah terbentuk "*National Organization for women"* kaum perempuan bersatu mengkampanyekan persamaan upah dan kesempatan kerja serta kesehatan kerja. Amanah UUD 1945 pasal 28 ayat H menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Undang-undang tersebut telah memberi kekuatan hukum atas kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam persamaan hak sebagai warga negara. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam pulau yang berdasar pada Pancasila dan sebagai landasan konstitusional UUD 1945 menetapkan pertanggung jawaban laki-laki dan perempuan yang sejajar karena dalam setiap pasal batang tubuh UUD 1945 tersebut tidak terbesit untuk peraturan khusus bagi laki-laki atau perempuan tetapi langsung pada "warga negara".[24]

24 Berbagai gerakan perempuan memang telah lahir sejak Indonesia belum merdeka, segala gerakan ini dimaksudkan untuk menyetarakan dan menuntut hak adil atas keberdayaan perempuan sebagai ulah penafsiran-penafsiran yang subordinatif. Dalam sejarah mencatat, pada Era Orde Baru tahun 1978 terbentuk Kementerian Urusan Peranan Wanita dalam kabinet yang berideologi *"Panca Dharma Wanita"*. Peran wanita ini menandakan bahwa keadilan dan kesetaraan gender pada masa ini cukup dibilang suatu keberhasilan. Pada tahun 1970-1980 gerakan kontemporer perempuan mulai bersemi di kancah intelektual yang dikenal dengan gerakan *Non-Government Organization*. Lihat lebih jelas dalam Very Wahyudi, "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender", *Politea*, 1(1) 2018, 63-83.

D. Periodesasi Gender dalam Pusaran Sejarah

Realitas ketidakadilan *gender* sudah sering kita dengar dan kita lihat dalam kehidupan sekarang ini. Namun sifat dari ketidakadilan itu sangat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain dan antara waktu yang satu dengan waktu yang lain. Umumnya keadaan tidak adil tersebut kerap sekali muncul dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan baik dalam bentuk subordinatif, marginalisasi maupun dalam bentuk-bentuk lain. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa gambaran ketidakadilan *gender* dalam masyarakat kapitalis, sosialis, negara dunia ketiga dan juga masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru hingga masa transisi menuju Orde Reformasi yaitu sebagai berikut.

1. Masyarakat Kapitalis Industri

Dalam masyarakat kapitalis industri yang bertanggung jawab membawa kaum wanita kembali ke lingkungan produksi ekonomi, masih banyak aspek pola peran seks-agraria lama yang digunakan. Kaum wanita masih melakukan pekerjaan rumah tangga dan kaum pria masih mendominasi politik, pekerjaan yang paling berprestise dan yang dibayar tinggi dan lingkungan kehidupan di luar rumah lainnya. Kaum perempuan terutama masih tetap di batasi pada pekerjaan berprestise rendah dan dibayar rendah misalnya pekerjaan tulis menulis, kesekretariatan dan jasa. Hanya sedikit saja kesempatan yang diperoleh kaum perempuan untuk masuk ke dalam posisi-posisi manajerial dan eksekutif dalam kehidupan perusahaan.[25] Dalam situasi laki-laki

25 Seperti yang diungkap oleh Syaifuddin Zuhri (2018), pada masyarakat industri perempuan ditempatkan pada sektor-sektor informal. Umumnya mereka tidak memiliki perlindungan sosial sehingga rentan terjadi kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Bahkan ironisnya, pekerja perempuan upah yang didapatkan 30% lebih rendah dari pekerja laki-laki. Selain itu juga akses yang terbatas dan peluang pasar sangat rendah dibandingkan laki-laki. Selain itu, Zuhri juga menemukan bahwa perempuan lebih banyak dipandang dari aspek kodrati saja yakni sebagai pekerja domestik, walaupun pada masyarakat industri hal tersebut telah mulai bergeser. Peran perempuan dalam hal keterkaitan dengan ekonomis yang awalnya domestik, kini menjadi ranah publik.

dan perempuan memegang pekerjaan yang sama atau serupa, kaum perempuan biasanya dibayar sangat rendah.

Banyak ilmuwan sosial, aliran Marxis khususnya menggambarkan kapitalisme adalah sesungguhnya yang menimbulkan konsekuensi negatif bagi posisi sosial kaum wanita. Meskipun mereka mempunyai status bawahan, pada umumnya dalam lingkungan kehidupan sosial kaum perempuan dalam banyak hal telah beremansipasi sejak timbulnya kapitalisme.[26] Sebagai contoh mereka telah mencapai persamaan politik dan hukum dengan kaum laki-laki dan kaum perempuan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai rendah dan bergantung pada pria. Dibandingkan dengan kaum perempuan di hampir semua masyarakat agraris maupun dengan kaum perempuan dalam masyarakat holtikultura dan gembala, maka kaum perempuan di bawah kapitalisme telah mencapai peningkatan dramatis dalam status dan kemampuan mengontrol kehidupan sendiri bebas dari tirani laki-laki.

2. Masyarakat Sosialis

Negara-negara sosialis juga menjalankan suatu proses industrialisasi walau berbeda ideologi, pembangunan negara-negara sosialis memiliki sejumlah kesamaan dengan pembangunan negara industri barat. Terbentuk satu kelas (perbedaan kelas berdasarkan kepemilikan pribadi lenyap secara perlahan-lahan). Pendidikan dan keterampilan tampil sebagai unsur penting bagi berfungsinya masyarakat industri maju. Negara mengakui kegiatan produktif kaum perempuan, namun berbeda dengan

Pergeseran tersebut diakibatkan oleh dampak partisipasi perempuan pada ranah ekonomi industrial sehingga mereka menjadi masyarakat yang *money oriented*. Lihat dalam Syaifuddin Zuhri, "Membincang Peran Ganda Perempuan dalam Masyarakat Industri", *Jurisprudence*, 8(2) 2018, 85-86.

26 Kapitalisme memang menjadi momok paling kejam terhadap dunia industri perempuan, bagaimana tidak sebagaimana diutarakan oleh Asmaeny Aziz (2008) bahwa perempuan memang diberikan ruang untuk bekerja, namun ruang tersebut lebih parah dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Perempuan hanya menjadi pajangan marketing untuk menarik konsumen ataupun memajukan industry tertentu, bahkan terkadang pada sisi tertentu melewati batas-batas moral. Tentu ini bukan suatu keadilan gender yang diharapkan. Lihat penuturan lebih jelas dalam Asmaeny Aziz, *Feminisme Profetik*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008, 167.

negara-negara Barat, dalam hal ini, posisi laki-laki dan perempuan dianggap setara dan sama penting.[27] Hal tersebut dipertegas melalui praktik industrialisasi yang meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Diskriminasi berdasarkan *gender* diselesaikan dengan *"emansipasi"* lewat lapangan kerja mendorong perempuan masuk dan membanjiri pasar tenaga kerja.[28] Masalah *gender* dilihat dalam konteks ketidaksetaraan masyarakat pada umumnya. Pendekatan semacam itu justru membuat kesenjangan antara prinsip yang tercantum secara resmi dalam dokumen negara dengan tingkat kualitas hidup kebanyakan perempuan bertambah lebar.

Kesetaraan laki-laki dan perempuan di negara sosialis merupakan bagian dari program kesetaraan sosial. Kesetaraan bisa dicapai melalui kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Namun hal itu agaknya sulit terwujud. Laki-laki dan perempuan Bulgaria era Sosialisme, misalnya berjenjang pendidikan setingkat namun posisi dan kualifikasi pekerja perempuan dinilai lebih rendah daripada laki-laki. Karena dipandang rendah, penghasilan yang diperoleh perempuan juga rata-rata lebih rendah daripada laki-laki.[29]

---

27 Sosialisme datang untuk menambal luka yang ditimbulkan oleh kaum kapitalis. Sebagaimana disampaikan oleh Widyastuti (2016) bahwa peran perempuan pada masyarakat sosialis lebih terbuka dibandingkan dengan masyarakat kapitalis yang tersentral pada kekuatan mesin dan laki-laki. Era industri menjadi lebih santun dan menghargai peran perempuan, sehingga perempuan mendapat perlindungan yang sama dari aspek lisensi pembangunan, berdiri sejajar dengan laki-laki. Dalam pembagian kerja-pun, perempuan memiliki hak dan porsi yang sama, sebab masyarakat sosialis melihat manusia dari aspek kemampuan, bukan perbedaan jenis kelamin. Lihat dalam D.A.R. Widyastuti; Nuswantoro; T.P. Sidhi, "Literasi Digital pada Perempuan Pelaku Usaha", *Jurnal Aspikom*, 3(1) 2016, 1-15.

28 Di era digital, penemuan dari penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Suarmini (2016) bahwa perempuan tidak cukup hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga dituntut untuk mampu berperan di luar domestik seperti membangun bisnis maupun karier. Tantangan yang dihadapi kaum perempuan di era digital, adalah dituntut memiliki sikap permisif dan membangun bangsa. Lihat dalam Ni Wayan Suarmini; Siti Zahrok; Dyah Satya Yoga Agustin, "Peluang dan Tantangan Peran Perempuan di Era Revolusi Industri 4.0", *Prosiding SEMATEKSOS* 3 2016, 53-54.

29 Beberapa Negara, seperti Bulgaria, masih mengikuti pola-pola kolot dalam memandang perempuan, terutama pada ranah pendidikan. Perempuan masih ditempatkan sebagai pekerja domestik dan ini berimbas pada pendidikan yang ditempuh, rata-rata perempuan tidak sampai mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Sementara di sisi lain, status pendidikan sangat dihargai untuk mendapatkan pekerjaan di sana, alhasil perempuan jarang sekali yang bekerja pada industri-industri besar. Lihat dalam Ann Oakley, *Sex and Society*. England: Gower Publishing Company, 2012, 91.

Rezim sosialis juga mempengaruhi relasi keluarga. Pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi memang membawa perubahan signifikan terhadap struktur dan ukuran keluarga. Kesetaraan di dalam keluarga juga di dukung oleh aturan perundang-undangan. Perempuan mendapat perlindungan hukum dalam kasus perceraian dan hukum mengakui kesetaraan *gender* di dalam keluarga. Namun pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin tidak mengalami perubahan substansi. Walaupun jenjang pendidikan kaum perempuan makin tinggi dan partisipasinya dalam dunia kerja kian meningkat, pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga tetap menjadi tanggung jawab perempuan. Waktu luang yang tersisa makin sedikit akibat kerja yang harus dicurahkan di sektor kerja (publik) dan keluarga.[30] Hal itu membuat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan penting, baik berkaitan ekonomi maupun politik kian terbatas.

3. Masyarakat di Dunia Ketiga

Kedudukan perempuan dan gadis-gadis di negara dunia ketiga berada dalam keadaan yang tidak memuaskan dibandingkan dengan laki-laki di setiap ukuran konvensional pembangunan, misalnya kemampuan membaca, masuk sekolah, kehadirannya di Klinik, rata-rata upah dan jabatan politik di semua tingkat. Hak atas kesempatan kerja, hak atas keselamatan sosial, hak atas hukum, hak atas milik dan bahkan kebebasan sipil dan politik perempuan tergantung pada satu-satunya yaitu yang membedakan manusia laki-laki dengan perempuan. Kaum perempuan yang jumlahnya sekitar 50 % dari populasi dunia

30 Mariatul (2015) memberikan tawaran dari hasil penelitian perempuan Madura untuk melakukan *rethinking* peran perempuan di era kontemporer. Menurutnya, perbedaan jenis kelamin yang berimplikasi pada peran dan fungsi laki-laki dan perempuan tidak dapat dipersalahkan kalau memang lahir dari konstruk internal dan kewajaran. *Rethinking* yang ditawarkan adalah 1) banyak perempuan yang menempuh pendidikan tinggi dan berhasil sukses di atas laki-laki, dan hal ini terjadi ke setiap perempuan tanpa memandang status; 2) kajian normatif keagamaan, memberikan makna yang baru bahwa perempuan dianugerahi kekuatan yang sama dengan laki-laki sebagai makhluk. Dengan *rethinking* ini, maka pendidikan bagi perempuan dinilai seimbang dengan laki-laki. Lihat penelitiannya lebih lengkap Mariatul Qibtiyah, "Rethinking Peran Perempuan dalam Keluarga", *Journal Karsa,* 23(1) 2015, 17-33.

diperkirakan mengerjakan dua pertiga dari pekerjaan. Namun mereka itu hanya menerima 10 % dari pendapatan global, berarti banyak diantara pekerjaan mereka itu tidak dibayar dan sering dikaitkan dengan tugas-tugas keluarga.

4. Perempuan di Era Orde Baru

Status atau keadaan kaum perempuan Indonesia sejak setengah abad sebelumnya sampai dengan tahun 1970-an. Perhatian semula tertuju pada soal persamaan hak dalam konteks peranan perempuan sebagai istri dan ibu, sedangkan mulai tahun 1970-an berkisar soal integrasi perempuan dalam konteks peranan perempuan sebagai sumber daya manusia. Status, peran, dan partisipasi ekonomi perempuan memakan porsi cukup besar pada waktu itu.[31] Definisi peran perempuan dalam pembangunan mulai dimasukkan ke dalam dokumen garis-garis besar haluan Negara (GBHN) namun apakah model pembangunan yang diterapkan oleh rezim Orde Baru menguntungkan atau justru makin merugikan kaum perempuan Indonesia, hal itu patut untuk dipertanyakan.

Di era Orde Baru peran perempuan dirumuskan dalam *Panca Dharma Wanita.* Rumusan ini mengadopsi nilai-nilai tradisi, Agama, dan budaya *petite bourgeise* Eropa, membatasi tugas perempuan pada peran-peran. Pertama, wanita sebagai istri pendamping suami; kedua, wanita sebagai ibu pendidik dan pembina generasi muda; ketiga, wanita sebagai pengatur ekonomi rumah tangga; keempat, wanita sebagai pencari nafkah tambahan; dan kelima, wanita sebagai anggota masyarakat,

31 Namun dalam penelitian Kathryin (2000) perempuan juga ikut andil dalam program pendidikan yang diluncurkan oleh pemerintah orde baru melalui program Sekolah Dasar Inpres di daerah-daerah terpencil, hal ini berlangsung pada pertengahan tahun 1970an yang juga menjalankan program wajib belajar minimal 6 tahun pada tahun 1973. Alhasil, tingkat pendidikan di SMP untuk anak laki-laki dan perempuan berumur 7-12 tahun meningkat dari 83 menjadi 94 persen. Baru pada tahun 1980'an, Indonesia mengubah orientasi dari basis ekonomi pertanian menjadi industrialisasi dengan membuka lapangan kerja untuk perempuan. Hasilnya, perempuan mengalami peningkatan keterampilan. Kebijakan ini tidak lepas dari Konferensi Tingkat Dunia di PBB tentang perempuan di Meksiko tahun 1975 yang mensosialisasikan program women in development. Lihat dalam Kathryin Robinson, *Women in Asia: Tradition, Modernity Globalisation*. Australia: Allen and Unwin, 2000, 98-99.

terutama organisasi wanita, badan-badan sosial dan sebagainya yang menyumbangkan tenaga kepada masyarakat. Rumusan tersebut memperlihatkan peran sebagai istri menduduki peringkat primer, setelah itu baru ibu. Perempuan apabila bekerja atau menjadi anggota organisasi, tetap tidak boleh melupakan tugas utama istri sebagai pendamping suami dan ibu yang melayani kebutuhan seluruh anggota keluarga. Organisasi perempuan pada saat itu hanya melayani kepentingan birokrasi Negara.[32]

Di era Orde Baru ini, menggunakan paradigma berorientasi pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi dalam menggerakkan roda pembangunan. Sistem politik otoritarian Orde Baru yang berpadu dengan perspektif *developmentalis* itu menghasilkan ideologi *gender* yang dipakai untuk menunjang hierarki Negara masyarakat sipil. Perempuan sekadar objek yang perlu diintegrasikan ke dalam pembangunan demi meraih target yang telah ditentukan. Perempuan semata-mata dilihat sebagai sumber daya potensial. Perempuan dimanfaatkan untuk membangun perekonomian. Perempuan diposisikan sebagai istri pendukung karier suami, terutama di kalangan Pegawai Negeri Sipil.[33] Perempuan dimobilisasi untuk memenangkan salah satu partai politik dalam pemilihan umum. Perempuan diskursus tersebut tidak diberlakukan sebagai warga negara independen. Dia sumber daya milik Negara. Dia seorang istri yang diharuskan mendukung karier suami sekaligus menjaga kekuasaan Negara.

32 Persis yang disampaikan oleh Carla Bianpoen yang menyimpulkan bahwa tahun 1998 merupakan tahun kebangkitan peran perempuan di Indonesia di area publik. Hal ini dipengaruhi oleh ideologi gender yang disebut *stat ibuism* sebagai ideologi yang bertumpu pada pembangunan. Selain itu, posisi perempuan didukung oleh berbagai kebijakan internasional yaitu melalui konferensi dunia IV PBB tentang Perempuan di Beijing tahun 1995 yang dihadiri 168 negara termasuk Indonesia. Lihat dalam Kurniawati Hastuti Dewi, "Demokratisasi dan Dekonstruksi Ideologi Gender Orde Baru", *Musawa*, 16(1) 2017, 64-65.

33 Hal ini diteliti oleh Julia (1996) bahwa keberadaan perempuan setelah meletupnya industri menyebabkan dominasi laki-laki semakin kentara, lapangan kerja yang terbuka lebar, membuat pemahaman baru di kalangan masyarakat termasuk tugas seorang istri atau perempuan berada di rumah dan laki-laki bekerja di pabrik-pabrik lokomotif internasional. Lihat Julia I Surkusuma, *"the State and Sexuality in New Order Indonesia"*, London: Duke University Press, 1996; lihat juga dalam Hastuti Dewi, "Demokratisasi dan Dekonstruksi Ideologi Gender Orde Baru", *Musawa*, 16(1) 2017, 60.

5. Orde Baru Menuju Reformasi

Krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak bulan November tahun 1997, memukul perempuan secara telak. Mulai dari putus hubungan kerja (PHK) besar-besaran yang dilakukan industri tekstil, garmen, sepatu, lem yang sebagian besar pekerjanya adalah perempuan. Saat itu (tahun 1998) perempuan merupakan 38 % dari keseluruhan angkatan kerja yaitu 35 juta orang.[34] Dalam pengetatan keuangan, perusahaan-perusahaan besar mengambil kebijaksanaan mem-PHK terutama perempuan dengan alasan bahwa suami-suami mereka masih berpenghasilan. Diskriminasi seperti ini berlangsung sejak terjadinya krisis ekonomi, akan tetapi sudah menjadi penyakit lama. Selain krisis ekonomi, tindak kekerasan Negara juga menjadi masalah bagi perempuan di Indonesia.

Peristiwa pemerkosaan massal terhadap ratusan perempuan etnis Tionghoa yang terjadi di Jakarta pada bulan Mei merupakan pukulan keras bagi keberadaan perempuan pada waktu itu. Sekitar 150 perempuan dari etnis China menjadi korban pemerkosaan, puluhan orang meninggal dunia, ribuan orang luka-luka, ratusan toko rusak dan ludes akibat penjarahan hanya dalam waktu kurang dari 50 jam.[35]

Trauma dan depresi menghantui para korban pemerkosaan akibat tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini merupakan penindasan terhadap hak-hak perempuan yang seharusnya dihormati. Dari beberapa gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa belum terjadi pergantian paradigma dari Orde Baru ke Orde Reformasi dalam hal kesetaraan *gender* dan yang terlihat adalah adanya kontinuitas Orde Baru, bukanlah pergantian. Bila ini fakta, sangat

34 Siti Ruhaini Duhayatin, "Wacana Perempuan dalam Muhammadiyah", *Media Inovasi, 45(3) edisi khusus,* 2005, 52.

35 Julia I Suryakusuma, *Sex, Power and Nation: an Anthology of Writings 1970-2003*. Jakarta: Metafor Publishing, 2004, 156.

sulit untuk berbicara hak-hak perempuan dalam realitas politik yang masih represif.

E. Gender dan Pembangunan Manusia

Meskipun langkah kearah keadilan *gender* sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1970-an, banyak perempuan masih hidup dalam kemiskinan dibanding dengan laki-laki dan kesenjangan antara keduanya semakin lebar selama beberapa tahun terakhir ini yang disebutkan dalam laporan *The State of World Population 2002*, dikatakan dalam laporan tersebut bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan terus meningkat seiring dengan ketidakadilan *gender* dalam setiap langkah kehidupan termasuk di dalamnya akses ke institusi-institusi sosial dan hukum, sumber daya, pekerjaan dan penghasilan, begitu juga dalam partisipasi sosial dan politik.[36] Laporan ini mengingatkan bahwa ketidakadilan meningkatkan kemiskinan bagi perempuan dan mungkin dapat menjadi konsekuensi serius bukan hanya untuk perempuan sendiri tetapi juga untuk keluarga dan lingkungan sosial mereka.

Menurut laporan PBB yang mengurusi masalah kependudukan bahwa menurunnya kesenjangan *gender* dalam bidang kesehatan dan pendidikan dapat menurunkan secara signifikan kemiskinan rumah tangga dan individu menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Dampaknya dapat lebih terasa di negara-negara miskin, di mana pelaksanaan ekonomi lemah sangat berkaitan erat dengan ketidakadilan *gender.* Dibandingkan dengan Asia Timur dan Asia Selatan diantara tahun 1960 dan 1992, laporan menunjukkan

36 Sejak tahun 1998 sampai dengan 2005 akhir, peran perempuan di dunia global dipotret terus mengalami penurunan, data terakhir pada tahun 2005 menyebut bahwa kebutuhan tenaga kerja perempuan dalam pusaran industri dan politik kenegaraan merosot akibat bias pelecehan gender dan profesionalisme. Laporan ini kemudian ditanggapi oleh Grade (2013) sebagai masa paceklik perempuan dalam kancah politik dan industri. Kemerosotan ini bukan tanpa alasan, tapi berdasar pada laporan UNICEF yang menempatkan pekerja perempuan lebih banyak di wilayah informal dan domestik. Lihat lebih lengkap dalam Grade O Imoh, "Application of Development Communication in Africa's Rural Development-Need for A Paradigm Shift", *Global Journal of Arts Humanities and Sosial Sciences*, 6(1) 2013, 98.

bahwa di Asia Selatan berlangsung kesenjangan *gender* yang semakin besar dalam bidang kesehatan dan pendidikan serta membatasi mereka secara perlahan-lahan. Jika kesenjangan *gender* dihentikan pada tingkat rata-rata di 2 wilayah, Asia Selatan akan meningkatkan angka pertumbuhan per kapita di GNP dari 0,7 ke 1,0 persen.[37]

Perempuan di beberapa Negara bekerja dengan jam kerja yang lebih lama daripada laki-laki dan kemungkinan ½ dari jumlah waktu kerja perempuan yang dipergunakan merupakan pekerjaan yang tidak dibayar. Penghasilan perempuan merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas kehidupan dan secara langsung berdampak pada kesehatan, perkembangan dan kesejahteraan menyeluruh di dalam keluarga mereka. Namun suara perempuan jarang didengar dalam pembicaraan mengenai keuangan dan perkembangan justru mengarah ke status sosial perempuan yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.[38] Ketidaksamaan ini menyebabkan terjadinya kesenjangan *gender* dalam mengakses sumber-sumber daya kehidupan.

Dikatakan juga dalam laporan, masalah reproduksi kesehatan berada terutama di antara ketidaksamaan yang berhubungan dengan kemiskinan. Perempuan miskin lebih banyak memiliki anak yang tidak diinginkan karena mereka kurang mendapatkan akses terhadap pelayanan dan informasi kesehatan reproduksi. Kemungkinan terkena infeksi menular seksual, termasuk HIV/ AIDS, menambah risiko yang akan dihadapi oleh perempuan. Ketidakadilan *gender* sering menghilangkan kemampuan perempuan untuk menolak praktik-praktik berisiko yang mengantarkan

37 Hal ini didukung oleh laporan BBC bahwa rata-rata perempuan memiliki tingkat kelemahan psikologis yang fisik yang tidak proporsional dalam percaturan bisnis ataupun industri, banyak perempuan yang mengalami gangguan psikologi akibat kebijakan pemerintah di Asia Selatan. Oleh karena itu, pemerintah di sana melakukan peningkatan relasi gender dengan menaikkan asumsi bisnis menjadi 1.8 setiap tahun. Lihat dalam Fiona Macdonald, *"Hijra: Gender Ketiga yang unik dari Asia Selatan"*, diakses tanggal 23 Oktober 2020, https://www.bbc.com/indonesia/vert-cul-42053739

38 O, Abtrobus, *the Global Momen's Movement. Bangladesh*: the University Press, 2004, 13-18.

mereka kepada kekerasan seksual dan perilaku seksual membuat perempuan tidak mendapat informasi mengenai pencegahan dan menempatkan mereka di urutan terakhir dalam pelayanan dan tindakan untuk menyelamatkan kehidupan. Perempuan mewakili ½ dari jumlah HIV positif seluruh usia dewasa pada tahun 2001 naik dari 41 persen di tahun 1997. [39]

Negara maju yang sukses telah menginvestasi pelayanan kesehatan universal, termasuk kesehatan reproduksi dan pendidikan. Mereka mengambil tindakan untuk menurunkan ketidakadilan *gender* dan menghapus rintangan-rintangan dalam partisipasi perempuan di lingkungan kemasyarakatan yang lebih luas. Rencana kesehatan reproduksi yang efektif untuk masyarakat miskin harus berdasar pada suara-suara atau pendapat mereka dan mengikutsertakan mereka dalam merancang dan menyampaikan program-program dengan target sasaran diri mereka sendiri. Hal ini sangat penting bagi perempuan yang mempunyai keinginan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi dan kemasyarakatan.

Peningkatan pendidikan perempuan telah terbukti mempunyai kontribusi yang sangat besar untuk menurunkan angka anak kurang gizi, lebih penting lagi dari perubahan dalam ketersediaan makanan. Pendidikan ibu memberikan peningkatan gizi. Menghilangkan kesenjangan *gender* dalam pendidikan juga membantu perempuan untuk menurunkan tingkat kesuburan dan meningkatkan ketahanan anak. Di negara yang jumlah anak perempuan pergi ke sekolah hanya ½ dari jumlah anak laki-laki ternyata rata-rata mempunyai jumlah kematian bayi per 1000

39 Data lain menyebutkan bahwa penderita AIDS pada perempuan terus meningkat dengan rasio laki-laki dibandingkan perempuan pada tahun 2009 adalah 3:1, tahun 2010 2:1 dan tahun 2011 menjadi 3:2, sesuai dari laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011. Sejumlah kasus AIDS di Indonesia ditularkan melalui suami atau pasangan mereka ketika melakukan hubungan layaknya suami istri. Sebagaimana dilaporkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2008. Lihat lebih lengkap pada kutipan data tersebut pada artikel yang ditulis Desak Made Sintha Kurnia Dewi; Luh Putu Lila Wulandari; D.D. Wirawan, "Determinan Sosial Kerentanan Perempuan terhadap Penularan IMS dan HIV", *JPH Recode*, 2(1) 2018, 22-35.

kelahiran hidup 21.1 kali lebih tinggi dari Negara yang tidak mempunyai kesenjangan *gender.*[40]

Dikatakan lebih lanjut bahwa hal yang sangat penting dilakukan sekarang adalah perlindungan dan peningkatan kesehatan perempuan, termasuk kesehatan reproduksi dan penyediaan informasi serta pelayanan bagi mereka sangat penting juga untuk mempersempit kesenjangan *gender* dalam pendidikan, peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, peningkatan partisipasi politik, melindungi mereka dari kekerasan dan memungkinkan mereka mencapai hak seksual dan kesehatan reproduksi serta pengambilan keputusan sendiri.

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwasannya ketidaksetaraan *gender* di suatu negara akan mampu mempengaruhi laju pembangunan negara tersebut. Dengan kata lain, pembangunan tidak akan berjalan lancar apabila masih ada ketimpangan *gender* dalam berbagai hal.

40 Data ini merupakan data random yang diambil di Negara-negara berkembang. Setengah dari perempuan lebih banyak di pekerjaan domestik dan setengahnya menempuh pendidikan sampai tingkat SLTA dan Perguruan Tinggi. Data ini diambil dari *World Healt Organization, Momen's Healt*. Diakses dari www.who.Int/entity/mediacentre/factsh/

Bab II

Teori-Teori Gender: Klasik hingga Kontemporer

A. Teori Psikoanalisa

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud menjelaskan kepribadian seseorang tersusun atas tiga struktur, yaitu *id, ego,* dan *superego.* Tingkah laku seseorang menurut Freud ditentukan oleh interaksi ketiga struktur itu. Pertama, *id*, sebagai pembawaan sifat-sifat fisik biologis seseorang sejak lahir, termasuk nafsu seksual dan insting yang cenderung selalu agresif. *Id* bagaikan sumber energi memberikan kekuatan terhadap kedua sistem berikutnya. *Id* bekerja di luar sistem rasional dan senantiasa memberikan dorongan untuk mencari kesenangan dan kepuasan biologis. Kedua, *ego*, bekerja dalam lingkup rasional dan berupaya menjinakkan keinginan agresif dari *id. Ego* berfungsi mengatur hubungan antara keinginan subjek individual dan tuntutan objektif realitas sosial. *Ego* membantu seseorang keluar dari berbagai problem subjektif individual dan memelihara agar bertahan hidup dalam dunia realitas. Ketiga, *superego,* berfungsi sebagai aspek moral dalam kepribadian berupaya mewujudkan kesempurnaan hidup lebih dari sekadar mencari

kesenangan dan kepuasan. *Superego* juga selalu mengingatkan *ego* agar selalu menjalankan tugasnya mengontrol *id.*[1]

Individu yang normal, menurut Freud ialah ketika ketiga struktur tersebut bekerja secara proporsional, satu diantaranya lebih dominan maka pribadi yang bersangkutan mengalami masalah. Jika *id* lebih menonjol maka diri yang bersangkutan cenderung *hedonistis.* Sebaliknya jika *super ego* yang lebih menonjol maka yang bersangkutan sulit mengalami perkembangan karena selalu dibayangi rasa takut dan lebih banyak berhadapan dengan dirinya sendiri. Perkembangan dan kepribadian seseorang terpengaruh oleh satu di antara apa yang disebut Freud dengan "lima tahapan psikoseksual." Pada setiap tingkat terdapat kepuasan seksual yang disebut Freud sebagai kepuasan insting seksual dihubungkan dengan anggota badan tertentu.[2]

Kelima tingkatan psikoseksual adalah seperti berikut. *Pertama*, tahap kesenangan berada di mulut *(oral stage),* terjadi sepanjang tahun pertama seorang bayi. Kesenangan seorang bayi adalah mengisap susu melalui mulut. Kedua, tahap kesenangan berada di

1 Freud mengaku sebetulnya bukan orang pertama yang mencetuskan teori psikoanalisa, namun ada salah seorang dokter yaitu Dr. Josep Breur. Hal ini disampaikan Freud dalam salah satu ceramah saat konsursium civitas akademika Clark University dengan mengatakan *"if you think that the person who first discovered the theory of psychoanalysis is praiseworthy, then do not give me that credit. At first, I didn't take part. I was still a student and was preparing for the final exam, when a doctor of ilia, namely Dr. Josep Bruer used this method for the first time to treat a young woman suffering from hysteria"*. Sementara pada aspek ide psikoanalisa, Freud mengaku memang telah mengembangkan menjadi lebih ilmiah dan factual, Freud mengatakan ide psikoanalisa memiliki ide tentang alam sadar *(conscious mind)*, alam pra sadar *(pre-conscious mind)* dan alam bawah sadar *(unconscious mind)* yang menjadi bagian dari struktur logika teorinya. Menurut Freud, bagian terbesar dalam pikiran seorang adalah alam bawah sadar. Pada bidang ini mencakup segala sesuatu yang sangat sulit, seperti insting dan segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh jiwa, motivasi dan dorongan hasrat. Lihat Sigmund Freud, *The Ego and the Id*, New York, US: Norton, 1960, 3; lihat juga dalam C. George Boeree, *General Psychology*. Yogyakarta: Prismasphie, 2008, 12.

2 Freud mengatakan bahwa dalam teori psikoanalitik-nya, struktur kepribadian manusia terdiri dari *id, ego* dan *superego*. *Id* merupakan system kepribadian yang asli, tempat sumber *ego* dan *superego* berkembang. Dengan pemahaman ini, maka Freud secara tidak langsung menganggap bahwa manusia adalah makhluk yang berenergi, karena seluruh sikap dan perilakunya menguasai zona ketidaksadaran. *Ego,* bertugas sebagai pelaksana di mana seluruh sistem kerjanya adalah untuk menilai realita dan hubungannya dengan dunia dalam bentuk dorongan *id* agar tidak melanggar *superego*. Lebih jelas lihat kutipan dari pernyataan Kluytmans tentang arah pengembangan teori psikoanalisanya Freud, dalam Frits Kluytmans, *Perilaku Manusia: Pengantar Singkat tentang Psikologi*, (terj.) Samsunuwiyati Mar'at, Bandung: Refika Aditama, 2006, 64.

dubur *(anal stage),* yaitu tahun kedua seorang bayi memperoleh kesenangan saat mengeluarkan kotoran. Ketiga, tahap kesenangan seorang anak pada saat mengidentifikasi alat kelaminnya (*phallic stage*), yaitu anak laki-laki memperoleh kesenangan *erotis* pada penis dan *klitoris* pada anak perempuan. Keempat, tahap remaja (*talency stage)*, yaitu kelanjutan dari tingkat sebelumnya, ketika kecenderungan *erotis* ditekan sampai masa pubertas. Kelima, tahap puncak kesenangan berada pada daerah kemaluan (*genital stage*), yaitu ketika kematangan seksualitas seseorang.[3]

Menurut Freud, sejak tahap *phallic,* yaitu anak usia 3-6 tahun, perkembangan kepribadian anak laki-laki dan anak perempuan mulai berbeda. Perbedaan ini melahirkan pembedaan formasi sosial berdasarkan identitas *gender*, yakni bersifat laki-laki dan perempuan. Pada tahap *phallic,* seorang anak laki-laki berada dalam puncak kecintaannya terhadap ibunya dan sudah mempunyai hasrat seksual. Ia melihat ayahnya sebagai saingan karena ia ingin memperoleh kasih sayang dari ibu melebihi yang diterima ayahnya. Ketika anak tersebut tidak memperoleh kasih sayang dari ibunya ia mulai menganggap ayahnya sebagai saingan. Namun karena anak itu takut dikebiri oleh ayahnya dan karena ia masih berada dalam tahap *phallic,* tahap puncak kesenangan berada di penisnya maka ia tidak bisa melawan ayahnya. Meskipun demikian, anak laki-laki merasa bangga karena tidak semua orang mempunyai penis, termasuk ibunya. Pada akhir tahap ini ia kembali mengidentifikasi ayahnya bukan sebagai rival tetapi menerima ia sebagai idola.[4] Teori Freud di atas menimbulkan protes keras dari kalangan perempuan.

3 Hans Kung, *Freud and the Problem of God*, New Heaven: Yale University Press, 1990, 3.
4 Lihat dalam Sigmund Freud, *New Introductory to Psychanalysis,* New York: W. Nortan, 1965, 3-5.

B. Teori Fungsionalis Struktural

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh dalam masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat.[5] R. Dahrendolf, salah seorang pendukung teori ini memaparkan teori ini sebagai berikut:

1. Suatu masyarakat adalah suatu kesatuan dari berbagai bagian.
2. Sistem-sistem sosial senantiasa terpelihara karena mempunyai perangkat mekanisme kontrol.
3. Ada bagian-bagian yang tidak berfungsi tetapi bagian-bagian itu dapat dipelihara dengan sendirinya atau hal itu melembaga dalam waktu yang cukup lama.
4. Perubahan terjadi secara berangsur-angsur.
5. Integrasi sosial dicapai melalui kesepakatan mayoritas anggota masyarakat terhadap seperangkat nilai dan sistem nilai adalah bagian yang stabil di dalam suatu sistem masyarakat. [6]

Harmoni dan stabilitas suatu masyarakat, menurut teori ini, sangat ditentukan oleh konsensus nilai-nilai. Dalam hal peran *gender,* penganut teori ini menunjuk masyarakat pra industri sebagai contoh masyarakat tersebut terintegrasi dalam suatu

5 Banyak sosiolog yang mengatakan bahwa pencetus teori struktural fungsional adalah Telcot Person, dari beberapa teori fungsionalisme sebelumnya memang yang dikemukakan oleh Person lebih sistematis dan ilmiah. Asumsi dasar teori Person berpegang teguh pada "fungsi" yakni sekumpulan kegiatan atau aktivitas masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sistem sosial. Sehingga fungsi dalam teori ini setidaknya memiliki empat hal; 1) *adaptation*, yaitu suatu sistem yang dapat menanggulangi situasi eksternal yang genting, sistem ini akan menyatu dengan cepat sesuai dengan lingkungannya. 2) *goal attainment*, yaitu pencapaian tujuan dari suatu sistem yang diupayakan. 3) Integration, suatu system yang mengatur hubungan bagian-bagian penting dalam aktivitas sosial menjadi hal yang bersatu; 4) *Latency*, yaitu sistem harus saling melengkapi, memperbaiki dan memotivasi. Lihat dalam Talcott Parsons, *the Present Status of Structural Functional Theory in Sociology*. New York: the Pass Press, 1975, 15-18.

6 Lihat dalam Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*. California: Standford University Press, 1959, 12; lihat juga dalam artikel yang mengutip pendapat Dahrendorf dan pemikiran Talcott Parson, yaitu Akhmad Rizqi Turama, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons", *OUFONI,* 13(2) 2020, 58-67.

sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu *(hunter)* dan perempuan sebagai peramu *(gatherer).* Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggung jawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah untuk urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil.[7] Dalam masyarakat seperti ini stratifikasi peran *gender* sangat ditentukan oleh jenis kelamin *(sex).*

Para penganut teori ini berpendapat bahwa teori fungsionalis struktural tetap relevan diterapkan dalam masyarakat modern. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih fungsi antara satu dengan yang lain, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. Teori ini mencoba menjelaskan bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi untuk mewujudkan suatu keseimbangan dalam suatu masyarakat. Keseimbangan ini dapat terwujud apabila tradisi peran *gender* selalu mengacu pada posisi semula. Dengan kata lain, kerancuan peran gender menjadi unsur penting dalam suatu perceraian.

C. Teori Sosio-Biologis

Teori ini dikembangkan oleh Pierre Van Den Berghe, Lionel Tiger dan Robin Fox yang intinya bahwa semua pengaturan jenis kelamin tercermin dari dasar yang diwarisi manusia modern dari nenek moyang *primat* dan *hominid* mereka. Intensitas keunggulan laki-laki tidak saja di tentukan faktor biologis tetapi

7 Konsep pembagian kerja ketika dikaitkan dengan teori struktural fungsional berarti peran laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari system sosial yang terpotret dari peletakan peran masing-masing, keseimbangan peran antara laki-laki dengan perempuan adalah bentuk fungsi stabilitas sosial dalam masyarakat. Lihat dalam George Ritzer, *Modern Sociological Theory,* New York: McHraw-Hill, 1996, 3-8.

elaborasi kebudayaan atas biogram manusia.[8] Teori ini disebut bio-sosial karena melibatkan faktor biologis dan sosial dalam menjelaskan relasi *gender.*

Laki-laki dominan secara politis dalam semua masyarakat karena *predisposisi* biologis bawaan mereka. *Biogram hominid* kuno hidup terus dalam diri manusia kontemporer, mengarahkan jenis kelamin kepada jenis kegiatan yang berbeda secara mendasar. Pengamatan terhadap perilaku *primat infra human,* penelitian lintas budaya atas perbedaan jenis kelamin, dan penelitian atas pengaruh jenis kelamin dalam perkembangan perilaku manusia, semuanya memperkuat kesimpulan bahwa biologi manusia adalah suatu komponen yang penting dalam perilaku yang berbeda antara jenis-jenis kelamin.[9]

Dalam kehidupan binatang, jenis jantan memperlihatkan perilaku kasar, mengancam, dan unggul daripada betina. Kenyataan lain bahwa laki-laki umumnya lebih besar dan kuat fisiknya secara konstan dibanding perempuan yang sewaktu-waktu mengandung dan mengalami menstruasi. Kenyataan ini memainkan peranan penting dalam aspek pembagian kerja menurut jenis kelamin. Masyarakat akan lebih diuntungkan kalau laki-laki bertugas sebagai pemburu daripada perempuan. Mengandung, melahirkan dan menyusui adalah tugas perempuan

8 Teori ini banyak dikritik oleh para antropolog pada awalnya, karena menggabungkan antara biologis dengan latar sosial masyarakat adalah yang berbeda lempeng. Biologis berhubungan dengan kerangka fisik manusia, sedangkan sosial tidak demikian. Sosial merupakan hubungan di luar fisik manusia. Namun menurut Wilson (1975), menemukan temuan autentik bahwa biologis berpengaruh terhadap konstruk sosial. Salah satu contoh paling mudah adalah, kegagahan fisik seorang pemimpin dapat menjadi symbol ketegasan dari cara Ia memimpin, sebaliknya kondisi tubuh yang kerdil dan lemah, melahirkan prasangka masyarakat pada charisma dan kepemimpinannya. Penelitian ini telah dibuktikan dengan penelitian terhadap banyak sampel di masyarakat, termasuk USA dan Israel. Lebih jelas lihat E.O. Wilson, "Biologi and the Sosial Sciences", *Daedalus*, 106(4) 1977, 132.

9 Lebih jelas A. Kuper (1983) sebagaimana dikutip oleh Stanley Khu (2016) *"Man are politically dominant in all societies because of their innate biological predisposition. The ancient hominid biology persist in contemporary humans, directing gender to a fundamentally different kind of activity. Observations of primate infra-human behavior, cross-cultural research on sex differences, and research on the influence of sex on the development of human behavior, all reinforce the conclusion that human biology is an important component in the different behaviors of the sexes".* Lihat dalam Stanley Khu, "Teka teki Poliandri: Kritik Antropologi atas Sosiologi", *UMBARA: Indonesian Journal of Antropology*, 1(1) 2016, 1-12.

yang tidak dapat digantikan kaum laki-laki. Atas dasar praktis ini berbagai kelompok masyarakat mengadakan pembagian kerja, laki-laki lebih tepat sebagai pemburu dan perempuan lebih tepat bertugas di sekitar rumah.

Berkaitan dengan hal tersebut J.C. Friederich menggambarkan kekhususan perempuan ialah mengalami siklus menstruasi, secara jelas bagaimana pengaruh sindrom menjelang menstruasi *(pre menstruation syndrome)*, yaitu masa menjelang menstruasi perempuan selalu mengalami depresi dan berbagai bentuk stres. Lamanya masa sindrom itu tergantung dari daya tahan fisik dan psikis seorang perempuan. Terkadang ada yang menjalani sekitar 17 atau 18 hari. Jika masa itu ditambahkan dengan lamanya menstruasi sekitar tujuh hari, berarti masa stabil seorang perempuan hanya sekitar 8-10 hari. Kenyataan ini dapat dijadikan alasan untuk memperkuat anggapan bahwa faktor biologis berpengaruh pada perilaku manusia, khususnya masa-masa produktif seseorang. Oleh karena laki-laki tidak mengalami siklus menstruasi, dengan sendirinya tidak mengalami sindrom tersebut. Tidak heran kalau faktor menstruasi dan berbagai mitos di sekitarnya dijadikan salah satu alasan penting untuk memojokkan perempuan di sektor domestik atau non-produktif.[10]

Teori sosio-bilogis agaknya akan menggabungkan teori lama, *nurture* sebagai pembentuk perilaku manusia dan teori

10 Sebagaimana diutarkan oleh Frederich bahwa kondisi fisik perempuan yang berbeda dengan laki-laki membuat perempuan diarahkan untuk peran khusus sebagai prakarsa domestic karena factor biologisnya yang yang menginginkan. Perempuan menanggung keharusan mengandung, menyusui dan mengalami menstruasi, yang mengakibatkan harus tersisih dari porsi peran sosial baik di masyarakat maupun negara. lebih jelas Frederich mengatakan *"he is particularity of women is experiencing the menstrual cycle, clearly how the influence of the pre-menstruation syndrome, namely the period before menstruation, women always experience depression and various forms of stress. The length of the syndrome depends on the physical and psychological endurance of a woman. Sometimes some go for about 17 or 18 days. If that period is added to the menstrual length of about seven days, it means that a woman's stable period is only about 8-10 days. This fact can be used as an excuse to reinforce the notion that biological factors influence human behavior, especially one's productive period. Because men do not experience menstrual cycles, by themselves do not experience the syndrome"*, di sinilah Frederich menambah asumsi kuat bahwa perempuan secara biologis berpengaruh terhadap penilaian dan pemosisian peran di masyarakat. Lihat lebih jelas dalam M.A. Frederich, *Phychological Changes During Pregnancy*. Contemporaro, 27(2) 1977, 123.

ini berkembang luas serta dapat diterima banyak pihak tetapi sering kali dibesar-besarkan untuk membenarkan politik *gender* yang bercorak patriarki. Teori ini membubuhi pemakluman di beberapa aspek, bahwa perempuan secara biologis berperan ganda sebagai makhluk yang mampu secara akal dan memikul lebih pada aspek biologis.

D. Teori Konflik

Dalam soal *gender,* teori konflik kadang diidentikkan dengan teori Marx karena begitu kuatnya pengaruh Karl Marx di dalamnya. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa susunan di dalam suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Siapa yang menguasai dan memiliki sumber-sumber produksi dan distribusi merekalah yang memiliki peluang untuk memainkan peran utama di dalamnya.[11]

Marx yang dilengkapi Friderich Engels mengemukakan suatu gagasan menarik bahwa perbedaan dan ketimpangan *gender* antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari konstruksi sosial masyarakat. Menurut Engels, perkembangan akumulasi harta benda pribadi dan kontrol laki-laki terhadap produksi merupakan sebab paling mendasar terjadinya subordinasi perempuan.[12] Seolah-olah Engels

11 Menurut paparan Turner (1998) asumsi teori konflik yang dicetuskan oleh Karl Mark berbeda dengan teori konflik yang lain, Mark lebih menekankan pada posisi konflik pada ranah sosial, dibandingkan individu maupun politik. Sehingga pembagian konflik sosial terklarifikasi ke dalam kelas-kelas yang saling merebut simpati dan pengaruh. Modal pengaruh yang tercipta juga bukan hanya pada ranah keagamaan maupun kelas, melainkan menggunakan kaca pandang ekonomi yakni produksi dan distribusi. Inilah hebatnya Karl Mark, dengan komposisi seperti ini, maka perempuan diberikan peluang besar untuk meraih pengaruh karena mampu bersaing dalam hal ekonomi sebagai basis karakternya. Dengan demikian, maka akan tercipta keseimbangan dan kesetaraan gender pada ranah sosial, bahkan perempuan bisa saja menjadi superior. Lihat H.J. Turner, *The Structure of Sociological Theory*. Belmont: Wadsworth Publishing, 1998, 258-260.

12 Friedrich Engels, *the Origin of the Family, Private Property and the State*. New York: International Publishers, 1972, 89-90; pendapat ini juga dikutip oleh Sumartono, "Dinamika Perubahan Sosial dalam Teori Konflik", *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis,* 5(1) 2016, 4-9.

ingin mengatakan bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan merupakan hasil keunggulan kaum kapitalis dan kaum pekerja. Penurunan status perempuan mempunyai korelasi dengan perkembangan produksi perdagangan. Jika benar generalisasi Engels tersebut, maka ada suatu hal yang dapat disangsikan, yaitu kontrol laki-laki atas produksi di dalam masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam beberapa kelas adalah karena kepentingan kelas *borjuis.* Sedangkan menurut Marxisme, persoalan relasi *gender* yang timpang di dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan revolusi sosial untuk menghapuskan pembagian pekerjaan domestik.[13] Banyak faktor lain yang terlibat dalam pembentukan stereotip *gender* di dalam masyarakat.

Menurut Marxisme dalam kapitalisme, penindasan perempuan diperlukan karena mendatangkan keuntungan. Pertama, eksploitasi perempuan di dalam rumah tangga akan membuat buruh laki-laki di pabrik lebih produktif. Kedua, perempuan juga berperan dalam reproduksi buruh murah, sehingga memungkinkan harga tenaga kerja menjadi lebih murah. Murahnya upah tenaga kerja menguntungkan kapitalisme. Ketiga, masuknya buruh perempuan sebagai buruh dengan upah lebih rendah menciptakan buruh cadangan. Melimpahnya buruh cadangan memperkuat posisi tawar-menawar para pemilik modal (kapitalis) dan mengancam solidaritas kaum buruh. Kesemuanya ini akan mempercepat akumulasi kapital bagi kaum kapitalis.[14]

13 Sebagaimana dikutip oleh Ritzer (2008) bahwa Marxisme berpandangan bahwa persoalan relasi gender merupakan persoalan yang kompleks, menyangkut seluruh aspek kebudayaan, politik, sosial dan bahkan faktor keagamaan masyarakat. Persoalan gender tergantung pada bagaimana tipe dan karakter masyarakat, bukan pada aspek gendernya. Lihat George Ritzer; Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*. Jakarta: Kencana, 2008, 12-19.

14 Sebagaimana disebutkan oleh Prof J.S. Ooshuizen (2009) bahwa relasi gender terkait erat dengan kapitalisme, terutama bagi negara atau pada skala mikro desa atau perkotaan. Tipe masyarakat berkarakter mesin dan mekanik, memandang pengaruh dari aspek kapitalistik. Namun bagi pedesaan yang tidak mekanis, memandang relasi gender dari sisi yang lain seperti keagamaan, produksi dan moral. Lihat dalam Ooshuizen, "Manifestasies Van Marxisme in Die Suid-Afrikaanse Samelewingsverband"; bisa juga dilihat dalam Soejonon Soekanto; Sulistywati, *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, 12-19.

Teori konflik mendapat kritik dari sejumlah ahli, karena terlalu menentukan faktor ekonomi sebagai basis ketidakadilan yang selanjutnya melahirkan konflik. Dahrendorf dan Randall Collins, yang dikenal pendukung teori konflik modern, tidak sepenuhnya sependapat dengan Marx dan Engels. Menurut mereka, konflik tidak hanya terjadi karena perjuangan kelas dan ketegangan antara pemilik dan pekerja, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, seperti senior-junior, atasan-bawahan, kakak-adik dan lain-lain.[15]

E. Teori Feminisme

Epistemologi penelitian *gender* secara garis besar bertitik tolak pada paradigma feminisme yang mengikuti dua teori, yaitu Fungsionalisme Struktural dan Konflik. Dua teori ini menjadi dasar terbentuknya gerakan feminis. Dari dua teori tersebut, melahirkan aliran-aliran feminisme berikut ini.

1. Feminisme Liberal

Pokok pikiran aliran ini bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan, diciptakan seimbang dan serasi, semestinya tidak terjadi penindasan. Sekalipun, keduanya ada perbedaan dengan kekhususan-kekhususannya tetapi secara ontologi, keduanya sama.[16]

15 Hal tersebut dikutip Ruth A. Wallace; Alisan Wolf, *Contemporary Sociological Theory Continuing the Classical Tradition*. New Jersey: Englewood Cliffs, 1995, 98-101; lihat juga dalam pengutipan pendapat tersebut dalam Mas'udi, "Akar-Akar Teori Konflik: Dialektika Konflik; Core Perubahan Sosial dalam Pandangan Karl Mark dan George Simmel", *FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 3(1) 2015, 177-200.

16 Istilah feminism berasal dari kata latin yaitu *"femina"* yang berarti perempuan yang digunakan pada tahun 1890'an. Lahirnya teori feminism dipelopori oleh kaum perempuan, diawali oleh gelombang besar di Eropa, yaitu Lady Mary Wortley Montagu Marquis de Condoracet yang memperjuangkan *universal sisterhood*, yakni gerakan yang menghapus perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan. Gerakan feminism liberal bertujuan untuk membebaskan perempuan dari rasisme, *stereotyping*, seksisme, penindasan dan phalogosentrisme. Salah satu gerbong ide yang ditonjolkan adalah sebagai penguasa, tidak boleh memihak kepentingan kelompok atau lebih condong kepada laki-laki. Sebagaimana dikumandangkan oleh bapak teori feminism liberal yaitu Naomi Wolf mengatakan *"Women are rational beings, have the same abilities as men, so they must be given the same rights as men. Likewise with the rulers of a country, they cannot choose one of the parties. In the 18th century there was a demand for women to receive the same education allocation, in the following century women fought for opportunities for civil and economic rights and in the present century many women's*

Dalam beberapa hal terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, aliran tersebut masih membedakan antara keduanya karena fungsi reproduksi membawa konsekuensi logis bagi perempuan dan perannya di dalam masyarakat. Aliran tersebut mengupayakan agar perempuan diberi peran publik, bekerja di luar rumah. Sumber ketidakadilan terhadap perempuan adalah pemisahan privat dan publik.[17] Jika perempuan diberi peluang bekerja di sektor publik maka tidak ada lagi jenis kelamin yang lebih dominan. Teori Liberal lebih cenderung mengikuti aliran Fungsionalisme Struktural. Sasaran gerakannya adalah keterlibatan (partisipasi) perempuan dalam bidang pembangunan tanpa menata terlebih dahulu relasi laki-laki dan perempuan atas dasar keadilan dalam menegakkan hak dan tanggung jawab.[18]

2. Feminisme Marxis

Karl Marx membuat teori yang disebut *Materialist Determinisme* yang mengatakan bahwa budaya dan masyarakat berakar dari basis material atau ekonomi. Selanjutnya Karl Marx mengatakan bahwa basis kehidupan masyarakat berdasarkan pola relasi material dan ekonomi yang selalu menimbulkan konflik.[19]

organizations have begun to be formed to oppose sexual discrimination in all fields. So, liberal feminism is made to make women aware that they are the oppressed group. Women's work in the logistics sector is campaigned as unproductive and puts women in oppressive positions. Therefore, I urge all women to get out of the zone of oppression", Naomi Wolf, *Mitos Kecantikan: Kala Kecantikan Menindas Perempuan*. Bandung: Niagara, 2004, 162.

17 Banyak filosof yang mengatakan bahwa feminism liberal hamper sama dengan filsafat ekstensialisme, di mana landasan teoretis yang digunakan adalah kesamaan hak antar manusia dengan memandang sudut eksistensi kemanusiaannya. Begitu juga dengan feminism liberal yang memiliki landasan filosofis kesamaan antara perempuan dengan laki-laki, namun berhubungan kiprah domestik yang diembankan kepadanya, muncul pola ketimpangan yang tidak terpikirkan. Hal demikian diutarakan oleh Nuril Hidayati dalam artikelnya berjudul, "Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer", *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 14(1) 2018, 21-29.

18 Robi'ul Afif Nurul 'Aini, "Analisa Kritis Teori Feminisme Liberal dalam Konstruksi Pendidikan Islam Perspektif Kesetaraan Gender", *Tahdzib*, 19(2) 2018, 12-18.

19 Dalam literature yang ditulis oleh Saulnier Christine Flynn (2011), dijelaskan bahwa sebenarnya teori feminism Marxis juga dikenal dengan sebutan feminism sosialis, yaitu memandang bahwa perempuan sebagai penghulu kelas ekonomi domestik dalam bentuk kelas seks, sebagaimana yang diistilahkan oleh Shulamith Firestone yang berarti perempuan dapat menampilkan pelayanan berharga bagi kaum kapitalis baik secara pekerja buruh, istri maupun kerja domestik lainnya. Dalam feminism sosialis, perempuan dipandang dari sudut sistem patriarkhi dan kapitalis. Lihat dalam Christine Flynn, *Feminist Theories and Sosial Work: Approaches and Applications*. New York: The Haworth Press, 2011, 292.

Basis material itu juga berlaku pada kehidupan keluarga dan masyarakat. Negara Jerman dan Rusia merupakan basis gerakan Feminisme Marxis Sosialis dengan tokoh-tokohnya, antara lain Clara Zetkin (1859-1933) dan Rosa Luxemburg (1871-1919). Akar masalah ketimpangan laki-laki dan perempuan menurut aliran ini adalah sistem kelas yang berdasarkan kepemilikan pribadi, secara inheren bersifat menindas dan laki-laki kulit putih mempunyai keistimewaan di dalamnya. Penindasan kelas oleh kapitalis terhadap perempuan yang digunakan sebagai buruh cadangan, tenaga perempuan sangat murah atas dasar perbedaan *sexis* untuk menentukan skala upah. Menurut Feminis Marxis bahwa hanya dengan penghapusan kelas secara ekonomis dan penindasan ekonomi, penindasan patriarkis dapat diselesaikan.[20] Untuk itu perlu dilakukan perubahan penindasan struktur ekonomi dan membangkitkan kesadaran kelas dalam masyarakat.

3. Feminisme Radikal

Sumber ketidakadilan terhadap perempuan menurut aliran ini adalah seksisme dan ideologi patriarkis. Dalam perspektif analisis feminisme radikal digambarkan bahwa perempuan ditindas oleh sistem sosial patriarkis, rasisme, eksploitasi fisik, *heteroseksisme* dan klasisme terjadi secara signifikan.[21] Upaya yang harus dilakukan adalah mengubah masyarakat yang berstruktur patriarkis. Menurut aliran feminisme radikal yang lebih ekstrim adalah menuntut tidak hanya mendapatkan hak tapi juga seks, seperti keputusan seks

20 Harold J. Laski, *the State in Theory and Practice*. New York: the Viking Press, 8-9; lihat juga dalam Siti Dana Panti Retnani, "Feminisme dalam Perkembangan Aliran Pemikiran dan Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Principium*, 1(1) 2017, 97-98.

21 Aliran feminism radikal sebenarnya mengembangkan konsep feminis yang lebih bebas dan merdeka sepenuhnya sehingga dapat mencegah subordinan pada gender tradisional. Aliran ini menolak setiap kerja sama dan melakukan langkah praktis dan teoretis untuk menumbangkan aliran gender. Karena fenomena yang terjadi di masyarakat adalah pandangan kolektif bahwa perempuan menjadi tumpuan penindasan akibat patriarki. Intinya, aliran ini berupaya untuk menghancurkan sistem patriarki yang terfokus terkait biologis tubuh perempuan. Lihat dalam kutipan Abdul Karim, "Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan)", *Fikrah*, 2(1) 2014, 65.

bisa dilakukan sesama perempuan *(lesbi).*[22] Lembaga perkawinan dan heteroseksual dipandang sebagai bentuk penindasan dan perbudakan terhadap perempuan. Aliran tersebut menuai banyak kritik dari berbagai pihak bukan hanya dari kalangan sosialis dan agamawan, tetapi juga dari kalangan feminis sendiri. Perjuangan ideologi dengan melakukan persaingan mengatasi kaum laki-laki yang tanpa beban organ reproduksi, secara umum, akan sulit diimbangi oleh perempuan yang secara biologis memang beda.

4. Feminisme Sosialis

Juliet Mitchell dalam buku *Women's Estate* telah meletakkan dasar-dasar pengembangan Feminisme Sosialis. Ia menggambarkan bahwa politik penindasan sebagai suatu konsekuensi, baik penindasan kelas maupun penindasan patriarkis. Ia memperkenalkan konsepsi dasar Feminisme Sosialis untuk menganalisis dimensi-dimensi penindasan seperti produksi, reproduksi, sosialisasi dan seksualitas. Bentuk Feminisme Sosialis merupakan perpaduan antara aliran Feminisme Marxis, Feminisme Radikal dan pemikiran Psikoanalisis.[23] Menurut aliran tersebut sumber-sumber ketidakadilan terhadap perempuan adalah konstruk sosial. Kerangka analisisnya adalah membongkar ideologi patriarkis dan perlawanan kelas melalui analisis *gender* agar dapat diketahui seberapa besar peran, akses kontrol dan manfaat yang diperoleh perempuan dibandingkan

22 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mawadah Mus (2018), bahwa feminism radikal memiliki beberapa ciri sesuai kerangka sosiologis yang tercipta di masyarakat. 1) ketidakadilan gender bersumber penganggapan dari seorang figur, tokoh atau pihak yang berpengaruh, karena figur tersebut berperan penting untuk menciptakan stigma atau persepsi sosial; 2) posisi rendah perempuan dikarenakan ulah dan pemikiran perempuan sendiri; 3) ketidakadilan gender dalam bentuk beban ganda tergambar dari tanggung jawab dan peran. Ketiga ciri tersebut masuk pada kategori feminism radikal. Lihat dalam Mawaddah Mus, "Analisis Feminisme Radikal Novel Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari", *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra,* 3(1) 2016, 45.

23 Sebagai antitesa dari feminism marxis, teori feminism sosialis ini mengatakan bahwa patriarki sudah muncul jauh sebelum kapitalisme dan tetap tidak akan berupa meski kapitalisme muncul. Menurut Jangger (1987), mazhab ini berawal dari sintesa pendekatan historis-materialis *"the personal is political"* yang tidak mendukung sama sekali terhadap penindasan dan perbudakan perempuan. Lihat lebih jelas dalam penjelasan Ruth A. Wallace (ed.), *Feminism and Sociological Theory: Key Issues in Sociological theory*. London: Sage Publucation, 1989, 87; bisa juga dilihat dalam Sutan Siti Aminah, "Gender, Politik, dan Patriarki Kapitalisme dalam Perspektif Feminis Sosialis", *Jurnal Politik Indonesia,* 1(2) 2012, 1-5.

laki-laki dalam peran-peran sosial di masyarakat baik sektor domestik (keluarga) dan sektor publik (berbangsa dan bernegara). Dalam perkembangan lebih lanjut, sasaran gerakan Feminisme Sosial adalah upaya membangun visi ideologi. Kesetaraan *(gender)* dan memperbaiki struktur serta sistem menuju kesetaraan dan keadilan *gender.*

5. Feminisme Teologis

Bersumber pada mazhab Teologi Pembebasan *(Liberation Theology)* yang dikembangkan oleh James Cone pada akhir tahun 1960-an. Teologi Pembebasan memakai paradigma sosialis konflik atau marxis yang telah dimodifikasi. Berbeda dengan Teologi Marx murni yang menganggap Agama dipakai oleh pihak penguasa untuk melegitimasi kekuasaan yang selanjutnya dengan kekuasaan tersebut pihak penguasa sewenang-wenang melakukan penindasan, khususnya pada perempuan, sedangkan Teologi Pembebasan tetap mempertahankan keberadaan agama sebagai pembebas golongan tertindas.[24]

24 Lihat dalam Kenneth Allan, *Contemporrary Sosial and Sociological Theory: Visualizing Sosial Words*. London: Pine Forge Perss, 2006, 52.

Bab III

Hakikat Perempuan dan Kosmologi

A. Hakikat Perempuan: Kajian Filosofis

Kata perempuan berasal dari kata *empu* yang mempunyai arti dihargai. Perempuan mesti lemah lembut, cantik, menarik dan produktif sesuai dengan peran ganda dan menjadi mitra pria.[1] Perempuan adalah jenis makhluk manusia yang paling berjasa bagi spesiesnya secara biologis karena perempuanlah yang memungkinkan manusia bisa bertambah banyak dan berganti generasi.

Masyarakat merupakan kumpulan individu yang terikat oleh satu satuan adat, ritus atau hukum khas dalam hidup bersama. Oleh sebab itu, setiap masyarakat mempunyai ciri khas dan pandangan hidupnya yang melahirkan watak dan kepribadian yang khas. Perempuan sebagai bagian dari masyarakat tentu memiliki ciri khas yang tidak terdapat pada kaum laki-laki yaitu dalam hal kemampuannya sebagai penerus generasi.

1 Subhan (1999) mengistilah perempuan sebagai sosok makhluk yang dianugerahi tata letak keindahan biologis dan akal, sehingga perempuan identik dengan lembut dan indah. Namun kenyataan ini kerap tidak sebanding dengan asumsi yang terjadi di masyarakat, bahwa potensi perempuan tersebut disalah-kaprahkan menjadi momok dan dikomersialkan. Al-Quran dan hadist telah menegaskan bahwa keindahan dan kecantikan perempuan semata untuk menyenangkan suami. Tentu, hal demikian harus diubah kembali *mindset* yang telah ada. Lihat dalam Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 1999, 21.

Perempuan sebagai warga masyarakat mempunyai hak, kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria untuk memantapkan kehidupan bangsa dan bernegara serta kehidupan beragama berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[2] Peranan perempuan dalam pembangunan berkembang selaras dan serasi dengan perkembangan tanggung jawab dan peranannya dalam mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia. Termasuk pengembangan generasi muda, terutama anak-anak dan remaja dalam upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Tokoh pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kaum perempuan mempunyai kelebihan menyambung *"tali rasa"* dalam proses mendidik sang anak.[3]

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kedudukannya dalam masyarakat dan peranannya dalam pembangunan perlu ditingkatkan serta diarahkan sehingga dapat meningkatkan partisipasinya bagi pembangunan bangsa sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai perempuan. Perempuan dalam hidupnya memiliki peranan yang biasa disebut *Panca Darma Perempuan*, yakni sebagai pendamping suami, sebagai pengelola keluarga, penerus keturunan dan pendidik anak, pencari nafkah tambahan, dan sebagai warga masyarakat.[4]

---

2 Bahkan dalam UUD 1945 menegaskan bahwa "setiap orang berhak bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Pada ayat 2 Pasal 28 H lebih rinci dijelaskan bahwa perempuan termasuk pada sosok khusus yang harus diberikan kesempatan dan keadilan. "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan", Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,* edisi revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005, 5-9.

3 Dalam konsep pemahaman Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu tokoh pendidikan nusantara, menganggap perempuan sebagai bagian penting dari negara, maka dari itu pendidikan harus mengusung konsep memerdekakan hidup, anak, perempuan lahir dan batin. Sebab tujuan pendidikan, adalah memerdekakan yang hidup melalui prakarsa pembelajaran ilmu. Oleh karena itu, perempuan merupakan sosok hebat untuk mendapatkan hak kemanusiaannya. Baca Taufik Hendratmoko; Dedi Kuswandi; Punaji Setyosari, "Tujuan Pembelajaran Berlandaskan Konsep Pendidikan Jiwa Merdeka Ki Hajar Dewantara", *Jurnal Jinotep*, 3(2) 2017, 153-154.

4 Panca darma perempuan dalam bahasa normatif disebut dengan fitrah ilahi yang sengaja diberikan kepada perempuan. Lihat dalam dalam Kathryn Robinson, "Islam, Gender and Politics in Indonesia", dalam *Islamic Perspective on the New Millennium*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2004, tth.

Sebelum datangnya Islam perempuan diposisikan sangat rendah dan memprihatinkan. Bahkan menurut Mansoer Fakih (1997) kedudukan perempuan diabaikan dan suara perempuan tidak pernah didengar.[5] Islam kemudian merombak posisi perempuan yang tidak menguntungkan ini dan mengembalikan kembali jati diri kemanusiaan sebagaimana kedudukan lelaki yang dituliskan dalam al-Quran Surat Al Isra' ayat 70.

Perempuan jika melaksanakan peranannya dengan baik maka ia akan bisa mengembangkan sumber daya yang berkualitas. Fakta ini menunjukkan bahwa perempuan sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar dan kemampuan perempuan perlu dikembangkan melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan serta ketahanan mental spiritual agar dapat lebih memanfaatkan kesempatan berperan aktif di segala bidang kehidupan.

Istri Rasulullah dan para sahabatnya yang sering digunakan sebagai referensi dan *guidelines* untuk mengembangkan diri dalam berkiprah di ruang publik seperti pendidikan, bisnis, kepemimpinan, politik dan lain sebagainya.[6] Kerangka normatif dapat dirujuk pada Khadijah istri Nabi sebagai wirausaha perempuan yang dapat menopang perjuangan Nabi di awal kerasulannya, sedangkan Aisyah dikenang dalam sejarahnya sebagai penenun bulu domba dan piawai di bidang politik. Perempuan tersebut mampu melampaui ruang domestik menuju ruang publik yang aktif partisipatif dan berada pada pusat diri *(self-center)* dalam pengambilan kebijakan.

5 Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, 13.

6 Seperti yang diungkap oleh M. Quraisy Shihab sebagaimana dikutip oleh Agustin Hanafi (2018) bahwa pada masa Rasulullah sosok perempuan sangat tekun belajar, karena tugas penting perempuan salah satunya adalah mendidik anak (madrasah al-Ula). Perempuan benar-benar dididik dan diajarkan oleh Nabi, hal ini untuk menjaga generasi muslim yang berintelektual. Bahkan dalam hal berbisnis, perempuan kerap tampil di depan. Seperti Siti Khadijah tercatat sebagai perempuan paling sukses, Qilat Ummi bani Anmar sebagai perempuan yang mampu membuat rumusan jual beli yang adil, Raithah, Istri Abdullah Ibnu Mas'ud sangat giat bekerja dan sebagainya. Lihat dalam Agustin Hanapi, "Peran Perempuan dalam Islam", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1) 2015, 18-21.

B. Problematika Perempuan

Ridho Allah bergantung kepada ridho ibu. Durhaka kepada ibu dan bapak adalah termasuk *sab'il mubikat,* tujuh dosa yang sangat besar.[7] Penghormatan ini sebagaimana dilukiskan melalui salah satu sosok perempuan yang namanya tidak akan pernah lepas dari ingatan umat manusia yaitu Maryam, perempuan terbaik.

Dan ingatlah ketika malaikat (Jibril) berkata "*Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kau, mensucikan kau dan melebihkan engkau atas segala perempuan yang lain*" (Q.S. Ali-Imran: 42). Oleh sebab itu, keseluruhan kemampuan kaum perempuan harus diarahkan menjadi ibu yang ideal agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik sehingga akan mendapatkan sebutan sebagai perempuan utama.[8]

Jalan yang harus ditempuh dalam mencapai tataran perempuan utama, yaitu mampu mencapai *manunggaling kawula Gusti* artinya bersatunya hamba dengan Tuhan. Sarananya yaitu melalui latihan-latihan batin, seperti senantiasa bersikap *titi, teteg, tata*, dan *ngati-ati* serta menghilangkan sifat-sifat tercela yang disebut dengan *panca driya*, yakni *cengil sengitan, panasten, kemeren, dahwen, kumingsun, ewan cekak,* dan *rupak.*[9]

Berbakti kepada ayah ibu dengan cara mensucikan diri melalui sikap *eneng-ening, awas eling* dalam hati dan patuh kepada

7 Damardjati Supadjar, *Nawang Sari: Butir-Butir Renungan Agama, Spiritual dan Agama.* Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001, 169.

8 Hal tersebut didasarkan pada *statement* Amina Wadud yang ditawarkan sebagai sebuah metode yang harus dipegangi ketika akan menafsirkan al-Quran terutama ayat-ayat yang mengandung bias gender, aspek tersebut adalah: 1) dalam konteks apa ayat tersebut diturunkan dan keterkaitan dengan asbab an-nuzul; 2) komposisi bahasa bahasa teks atau ayat tersebut dilihat bagaimana pengungkapan dan apa yang dalalahnya; 3) bagaimana keseluruhan teks dari sudut pandang dunia, dan pandangan hidup. Lihat lebih lengkap dalam Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Women*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 1994, 84.

9 Perempuan utama dalam kajian yang dilakukan oleh Hasanatul Jannah (2011) dianalogikan sebagai *women qur'ani*, yaitu sosok perempuan utama yang mampu menjaga sifat tercela, menjaga kehormatan keluarga, sederhana, menjaga kehormatan dirinya, berhias sepantasnya saja dan berjiwa moral yang indah. Lihat dalam Hasanatul Jannah, "Pemberdayaan Perempuan dalam Spiritualitas Islam (Suatu Upaya Menjadikan Perempuan Produktif)", *Jurnal Karsa,* 19 (2) 2011, 137-139.

guru dengan cara menghilangkan prasangka yang tidak baik juga merupakan sarana dalam mendapatkan kepercayaan manusia dan kasih Tuhan. Latihan-latihan batin lainnya yang harus dilakukan oleh seorang perempuan adalah melakukan *tapa brata puja mantra* yang terdiri dari *angingirangi ing bukti* artinya mengurangi makan, *nyunyuda guling* artinya mengurangi tidur, *anyuda sanggama* artinya mengurangi bersenggama, *angampeta pangandika kang tanpa kardi* artinya menahan diri dari bicara yang tidak berguna, *ngilangna duka cipta* artinya menghilangkan duka nestapa.[10]

Tapa brata puja mantra tersebut hendaknya dilakukan dengan mengetahui dan memahami makna *empan papan* yaitu dalam kesunyian malam seorang perempuan diperintahkan untuk banyak memanjatkan doa karena pada malam hari terbukalah segala kehendak hati. Manusia dalam mencapai tingkat kehidupan yang tinggi tersebut harus menempuh jalan dengan cara memandang diri sedalam-dalamnya. Dengan jalan itu pikiran manusia dapat ditingkatkan ke arah *buddhi* yang akhirnya menemui Tuhan.

Perempuan diarahkan untuk menjalankan Agama dengan kesucian, baik, pantas, teliti dan mempertimbangkan isinya jangan sampai manusia seperti sampah yang hanya mengikuti arus laut. Hal ini karena Agama berisi ajaran-ajaran mengenai kebenaran yang tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan akhirat yaitu manusia yang takwa kepada Tuhannya, beradab dan manusiawi yang berbeda dari cara hidup hewan.[11]

Keutamaan perempuan juga dilihat dari keutamaan hatinya yaitu seperti dipaparkan pada pupuh Kinanthi bait 14, *di adining perempuan prabu utamaning tyas kang pinesthi tegese utama*

10 Agustijanto Indradjaja, "Ideal Perception of Javanese Women During Hindu-Buddhist Period: Reflection on the Statues of Women", *Purbawidya: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi*, 6(2) 2017, 105-116.

11 Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1999, 89.

sabar, artinya keutamaan perempuan raja adalah utama hatinya, yakni bersikap sabar. Sabar terhadap *pancabayaning ati* maksudnya sabar terhadap cobaan. Segala cobaan harus diterima dengan syukur dan rela. Dalam al-Quran diceritakan tentang perempuan utama seperti Maryam dan Ratu Bilqis.

Sikap sabar merupakan perbuatan utama yang harus dimiliki oleh setiap orang. Seorang yang sabar bisa diumpamakan sebagai samudra lautan karena dengan sabar ini manusia mampu menghadapi segala cobaan, tidak mudah berputus asa, memiliki kekuatan iman dan memiliki pengetahuan yang luas. Perempuan juga dituntut memiliki sikap *budi temen, tarima, legawa, lila, kandel-kumandel ing sukma, awas eling, betah ngangkah* dan *lembah manah*. Sikap-sikap di atas merupakan sikap hidup yang banyak dihayati dan diamalkan oleh masyarakat Jawa.[12]

Perempuan tidak hanya dipandang secara sempit terbatas pada sikap-sikap kereligiusannya. Perempuan sebagai makhluk sosial dituntut pula untuk mengabdikan dirinya sebagai anggota masyarakat melalui potensi-potensi yang dimilikinya. Hal ini tampak pada penghormatan terhadap perempuan mengenai empat keberuntungan manusia, yaitu apabila memiliki ilmu pengetahuan, keluhuran budi, kekayaan dan anak.

Kesempatan itu diberikan kepada seorang perempuan sebagai sarana untuk mencapai derajat keperempuanan yaitu perempuan yang memiliki keluhuran budi terutama bagi pendidikan anak-anaknya. Walaupun perempuan diberi kesempatan dalam mengembangkan potensinya dengan ilmu pengetahuan, kekayaan, keluhuran budi

12 Eksistensi perempuan Jawa dikemukakan oleh Rizky Pudjianto (2015) perempuan Jawa menjadi pengabdi dalam rumah tangga sekaligus menjadi lambang kultur masyarakat Jawa. Kedua peran ini tercipta melalui kebiasaan dan pengakuan sejati dari masyarakat terhadap eksistensi perempuan. Dari saking dihormatinya, perempuan Jawa melabelkan perempuan sebagai lambang kultural yang menjadi penentu terhadap tradisi dan budaya. Sekalipun dalam tempat lain, perempuan juga berperan pada ranah domestik, namun hal demikian tidak menjadi boomerang dalam menciptakan perbedaan. Bahkan peran perempuan dihormati, disegani dan disetarakan dengan adil. Lihat dalam Rizky Pudjianto, "Perempuan Jawa: Representasi dan Modernitas", *Indonesian Journal of Sociology and Education Policy*, 2(2) 2017, 126-132.

maupun dengan cara memberikan pendidikan kepada anaknya, pandangan inferioritas terhadap perempuan.

C. Perempuan dan Peradaban Nusantara

Peran perempuan dalam perkembangan peradaban sangat besar sehingga perempuan tidak perlu melepaskan fungsi-fungsi keperempuanannya. Masyarakat Indonesia yang memang mayoritas beragama Islam, tidak menutup kemungkinan adanya gerakan-gerakan perempuan Islam pun ikut mewarnai kancah pembangunan Indonesia. Perkembangan peradaban abad XXI bukanlah saatnya lagi menjadi dominasi pria di semua lini kehidupan namun sudah selayaknya menjadi partner mitra dalam mengurangi bahtera kehidupan dengan saling pengertian, membantu dan *sharing* dalam menyelesaikan tugas bersama, baik dalam keluarga, masyarakat, dunia kerja, maupun kehidupan global. Perempuan dewasa ini memang tidak hanya menjadi partner kerja pada pria untuk meraih keberhasilan institusi atau lembaga bekerja melainkan juga menjadi suporter yang aktif dan bermakna di balik keberhasilan suami.[13]

Peran perempuan pada abad XXI harus mampu berperan dan menggunakan seoptimal mungkin kesempatan yang tersedia pada abad XXI, perempuan dituntut memiliki sikap mandiri, di samping dibutuhkan kebebasan mengembangkan diri sebagai manusia sesuai dengan bakatnya. Profil perempuan Indonesia saat ini dapat dilukiskan sebagai manusia yang harus hidup

13 Peran perempuan bukan hanya pada wilayah domestik ataupun industri ketenaga kerjaan, namun juga sebagai partner suami dalam bekerja dan meraih sektor ekonomi. Sehingga betul apa yang disebut oleh Dwiantini (1995) sebagaimana dikutip oleh Dwi Edi Wibowo bahwa kemajuan ekonomi dan globalisasi membuat peran perempuan semakin kompleks, perempuan harus berperan sebagai duta informal sekaligus formal. Sebagai duta informal, perempuan berperan sebagai pelaku domestik dan juga pemberi *support* suami dalam keluarga, sedangkan faktor formalnya adalah ketika bekerja di suatu perusahaan. Banyak peran perempuan yang abstrak, tidak tampak tapi memiliki pengaruh dalam tatanan keluarga. Lihat dalam Dwi Edi Wibowo, "Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender", *Jurnal Mawazah*, 3(1) 2011, 357.

dalam situasi dilematis.[14] Kedilematisan ini karena di satu sisi perempuan dituntut untuk berperan dalam semua sektor, sedang di pihak lain muncul tuntutan agar tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan. Untuk hal ini kita harus cerdas mengidentifikasikan antara kodrat dan kultur (budaya) kehidupan perempuan. Kodrat yang melekat yang dimiliki perempuan adalah 4M yakni menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui. Dalam hal ini penulis menginterpretasikan bahwa setiap orang lahir sebagaimana kodrat yang telah melekat dan keempat kodrat tersebut pada intinya tidak bisa diganti oleh kaum laki-laki. Lain halnya dengan budaya atau kultur masyarakat setempat yang mendudukkan posisi perempuan tidak jarang telinga kita sering mendengar bahasa *pantes luwes dan gendes*.

Perempuan karier di satu sisi merasa terpanggil untuk mendarmabaktikan bakat dan keahliannya kepada bangsa tetapi di pihak lain perempuan dihantui oleh opini masyarakat yang melihat bahwa perempuan atau ibu karier adalah salah satu sumber kegagalan pendidikan anak, tidak pantas apabila perempuan itu bekerja di luar rumah dan menghabiskan waktunya hingga larut malam. Dalam urusan ini Islam memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkiprah di luar rumah apabila pada dasarnya masyarakat membutuhkan keahliannya dan upaya merealisaikan *wajibah Ijtima'iyyah.* [15]

Kekhawatiran masyarakat terhadap peran ganda perempuan ini tentu bukannya tidak beralasan, karena apabila melihat kenyataan bahwa dunia modern yang mengukir kisah secara materi dan

14 Penyematan posisi dilematis yang disandangkan pada perempuan menurut French (1985) bukan hanya sebagai imbas bias gender, melainkan faktor biologis dan kewajiban laki-laki untuk mencari nafkah keluarga. French mengatakan *"the philosophy that can offer us a new way of seeing is feminism but if feminism offers a new set of ends, human goals, new ideals of humanity, it does not yet posses a clear set of means which those ends can be attained"*. Lihat dalam M. French, *Beyond Power on Women, Men and Morals*. New York: Ballantine Books, 1985, 23; bisa juga dilihat dalam kutipan yang ditulis oleh Dwi Edi Wibowo, *"Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender"*, 360.

15 Nafsiyatul Luthfiyah, "Feminisme Islam di Indonesia", *Esensi*, 16(1) 2015, 2-3.

kaya ilmu pengetahuan serta teknologi agaknya tidak cukup memberikan bekal yang kokoh bagi manusia sehingga banyak manusia modern tersesat dalam kemajuan dan kemodernannya.

Masyarakat Indonesia saat ini memang belum sampai pada taraf kehidupan modern sebagaimana dialami bangsa-bangsa maju yang berada dalam proses rasionalisasi yang semakin nyata. Berkaitan dengan makin banyaknya peristiwa sadisme dan berbagai bentuk kekerasan serta kecongkakan dalam penyelesaian masalah sosial yang aktual dalam berbagai segi kehidupan di tanah air.[16] (Haidar Nashir, 1999: 42). Kecongkakan yang mengandalkan rasio dan keunggulan diri maka manusia modern menjadi tidak memahami makna dan konsep hidup yang sesungguhnya sebagai manusia sejati di tengah kemajuan yang luar biasa. Manusia tidak tahu lagi dari mana asal mula kehidupan untuk apa manusia hidup dan ke mana akhir hidup ini. Manusia tidak memahami *sangkan paraning dumadi,* kata orang Jawa.

Memperhatikan kenyataan tersebut, maka perlunya pendidikan etika dan agama dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk keseimbangan pendidikan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan.[17] Pendidikan ini tentunya pertama kali harus diperoleh dari keluarga.

D. Kodrat Perempuan

Memperhatikan pengertian di atas sudah selayaknya kalau perempuan dihargai, dijunjung tinggi derajatnya karena perempuan memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh kaum pria yaitu melahirkan anak yang akan menyambung cita-cita hidupnya. Namun kenyataannya tidak semua lapisan masyarakat memandang tinggi

16 Haedar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, 42-43.

17 D.. Ary Jacobs; L.C. Razavieh, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, A. Furchan (terj.), Surabaya: Usaha Nasional, 1982, 177; bisa juga dilihat dalam Nasrudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Quran*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010, 57.

keberadaan perempuan, sebagaimana terjadi pada peradaban masyarakat lampau.

Pada era modern ini perempuan menghadapi dua tantangan. Pertama, berasal dari dirinya sendiri yaitu berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam keluarga khususnya. Kedua, ilmu dan teknologi, terutama bagi perempuan yang berperan ganda.[18] Perempuan dituntut untuk meningkatkan peranan dan potensinya dengan melakukan berbagai cara salah satunya melalui pendidikan formal maupun non formal dalam negeri maupun di luar negeri.

Perempuan sebagai pendidik dituntut memberikan pendidikan kepada anak-anaknya atau bahkan kepada generasi muda dengan pendidikan yang lebih terarah terutama dalam mempersiapkan kepribadian anak sehubungan dengan gencarnya pendidikan yang hanya menekankan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan ilmu pengetahuan inilah maka diperintahkan pula seorang perempuan untuk menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru. Hal ini karena orang tua sebagai penyebab kehadiran manusia di dunia dan yang telah memberikan bekal kepada anak-anaknya. Guru merupakan orang yang telah memberi petunjuk tentang kebaikan. Apabila darma tersebut ditunaikan dengan sebaik-baiknya tanpa pamrih maka akan menjadi sarana mencapai ketenteraman batin. Dengan ilmu yang telah diperoleh itu manusia bisa mengembangkan potensinya dan dengan ilmu pula akan menambah produktivitas kerja.

Kepemilikan kekayaan bagi seorang perempuan kini juga merupakan suatu keharusan karena dituntut untuk ikut menunjang

18 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayati (2015) perubahan era seperti industri 4.0 menambah peran lain kepada perempuan, satu sisi tidak dapat lepas dari fitrahnya sebagai perempuan yang melahirkan dan menyusui serta mengurus urusan domestik, di sisi lain juga harus berpartisipasi sebagai bagian masyarakat industri. Karena bagaimanapun, peran ganda yang diterima perempuan adalah sesuai konstruksi yang tidak dapat diingkari. Seperti yang dinyatakan oleh Sri Hidayati (2001), perubahan yang paling kentara pada era globalisasi adalah perubahan status wanita sekaligus bertambahnya peran wanita. Lihat dalam Nurul Hidayati, "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)", *Muwazah*, 7(2) 2015, 108.

kehidupan perekonomian keluarga dengan cara bekerja. Perempuan yang ikut mencari nafkah tambahan juga merupakan salah satu pengembangan sumber daya manusia, karena suatu saat tidak jarang perempuan akhirnya menjadi pemimpin yang selalu siap terlibat dalam persaingan hidup yang semakin keras dan penuh tantangan.[19]

Perempuan tidak cukup hanya memiliki kekayaan, anak dan kepandaian, tetapi juga harus memiliki keluhuran budi. Keluhuran budi itu di antaranya keimanan perempuan terhadap Tuhannya, maksudnya: perempuan harus percaya penuh bahwa Tuhan itu nyata dan perempuan harus percaya penuh dengan kebulatan tekad bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh Maha Esa. Keimanan kepada Tuhan harus meresapi dan meliputi pikirannya, perasaannya, perkataannya dan perbuatannya.

Keimanan itu akan menumbuhkan rasa taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam arti perempuan harus selalu ingat pada sifat-sifat Tuhan. Ketaatan itu dapat mewujudkan sikap perempuan yang sabar dan tawakal terhadap segala yang diberikan Tuhan baik senang maupun susah. Orang yang hidupnya ditopang dengan sikap sabar dan akan mempunyai arah hidup yang jelas dan pada akhirnya akan menemukan kebahagiaan.

Kepasrahan kepada Tuhan merupakan salah satu sikap hidup orang Jawa yang sering dikenal dengan ungkapan *"nrimo ing pandum"* menerima apa yang telah diberikan karena segala sesuatu sudah diatur.[20] Sartono Kartodirdjo (1988) mengatakan bahwa nerima *refers to the state of being content or accepting*

19 Para ulama Islam berbeda pendapat tentang boleh-tidaknya perempuan menjadi pemimpin, hal tersebut disebabkan oleh adanya pandangan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan. Kata Qawwam dalam surat an-Nisa' ayat 34 ditafsirkan dengan pemimpin, pelindung dan pengatur. Laki-laki dianggap pemimpin karena memiliki keunggulan fisik dan akalnya, demikian seperti yang diungkap ar-Razi dalam tafsir al-Kabir. Lihat dalam artikel yang ditulis oleh Ida Novianti, "Dilema Kepemimpinan Perempuan dalam Islam", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(2) 2008, 255-261.

20 Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium*. Jakarta: Gramedia, 1988, 2.

something with fullness. Bagi masyarakat Jawa ungkapan nerima merupakan ungkapan terima kasih atas segala pemberian yang diperoleh dari Tuhan yang Maha Pemurah. Dengan prinsip hidup *nrimo ing pandum* seseorang tidak mempunyai sifat serakah atau iri hati.

Ungkapan *nrimo ing pandum* pada dasarnya merupakan adanya pengendalian diri dari seseorang agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Apabila manusia Jawa patuh terhadap ungkapan ini, tentu akan selalu *eling ingat* dan *waspada.*[21] Waspada agar apa yang diperoleh sesuai dengan kemampuan pada diri yang penting harus menerima apa adanya yang telah diberikan Tuhan.

Sikap pasrah yang dimaksudkan adalah penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan setelah melakukan upaya sehingga keputusan terakhir terletak di tangan Tuhan. Dalam masyarakat Jawa terdapat konsepsi bahwa *manungsa winenang ngupaya, purba wasesa ing astane Kang Maha Kuwasa atau manungsa winenang angudi, purba wasesa ing astane Gusti* artinya manusia berhak berusaha, kepastian terletak di tangan Tuhan. Oleh karena itu, untuk memperoleh kepastian terakhir, segalanya diserahkan kepada Tuhan.[22]

Sikap *nerima* ini menjadikan orang yang paling miskinpun dapat merasa bahagia karena kebahagiaannya tidak timbul dari benda materiil, melainkan disebabkan kepuasan hati terhadap apa yang telah dicapai. Nerima ini berarti ketenangan afektif dalam menerima segala sesuatu dari dunia luar, harta benda, kedudukan sosial, nasib malang maupun untung.

Masyarakat modern tidak begitu hirau lagi menjawab persoalan-persoalan metafisis tentang eksistensi manusia, asal mula kehidupan, makna dan tujuan hidup di jagad raya. Manusia

21 Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru…,* 4-5.
22 Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru…,* 7.

modern telah kehilangan aspek moral sebagai fungsi kontrol *the tyranny of purely material sains*. Modernisme telah gagal karena telah mengabaikan nilai-nilai *spiritual transendental* sebagai potensi kehidupan.[23] Untuk hal tersebut maka manusia modern termasuk juga perempuan harus membentengi diri.

Menurut Soemarsaid Moertono (1984) seorang perempuan harus mempunyai sikap *eneng, ening, awas, eling, tata, titi, teteg, ngati-ati,* artinya diam, jernih, waspada, ingat, teratur, teliti, teguh, dan hati-hati. Sikap ini diperlukan sebagai sarana untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin keras karena kemanusiaan orang itu akan selalu membawa godaan dan cobaan yang diwujudkan dalam segala macam dan tahap keinginannya sampai yang paling halus yang tidak terinsyafi.[24]

Salah satu ajaran yang menyampaikan bahwa perempuan memiliki kemampuan seperdelapannya laki-laki, sebagaimana dikatakan *nadyan wus kanthi pinasthi marang Hyang Kang Murbeng Titah, grahitaning para perempuan, saprahastaning pra putra, arantaraning pamikir, marmeng ngger away sireku, pasang sumeh jroning ati,* artinya walau sudah ditentukan oleh Tuhan Pencipta Alam bahwa akal perempuan seperdelapannya laki-laki, hendaklah engkau tetap menerima dalam hati.

Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang perempuan sebagai manusia yang kedudukannya lebih rendah dibandingkan laki-laki. *Keinferioritasan* (perempuan sebagai perempuan bawahan, rendah dan kurang baik), sedangkan pria adalah superioritas (manusia atasan, pimpinan) merupakan salah satu dari sekian banyak isu mengenai perempuan. Pandangan ini merupakan akibat dari pemahaman dan penafsiran atau interpretasi masa lalu yang sulit diterima pada masa sekarang.[25]

23 Haedar Nashir, *Pragmatisme Politik Kaum Elit*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999, iv.
24 Soermarsaid Moertono, *Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX*. Yogyakarta: Gramedia, 1984, 163.
25 Menurut penelitian Subhan (2004) ditemukan bahwa realitas perempuan pada masyarakat Indonesia memang telah diramalkan bahwa pada saatnya nanti perempuan

Kesalahpahaman tersebut merupakan akar dari berbagai masalah yang timbul tentang perempuan khususnya dalam kehidupan berkeluarga di samping kehidupan publik.

Untuk mengetahui sejauh mana batas kemampuan perempuan tentu terlebih dahulu diadakan pembahasan sehingga dapat diketahui letak kekurangannya serta ketidakmampuannya dan sejauh mana batas kekurangan tersebut. Pernah diadakan suatu pembahasan komprehensif tentang perbedaan karakter pria dan perempuan oleh Turman dan Melis; pada saat yang bersamaan ditemukan bahwa faktor kepriaan dan keperempuanan itu berkaitan dengan faktor-faktor pengetahuan yang didapat melalui pendidikan dan pengajaran, baik di rumah maupun di luar rumah.[26]

Perempuan dikatakan kurang akalnya bila hal itu benar maka akan timbul-lah pertanyaan mengapa para pria sejak dulu hingga sekarang mempercayakan kaum perempuan untuk mengasuh anak, mengatur keluarga dan lain-lain, jika perempuan itu benar-benar kurang akalnya ? Bila benar, kaum pria mungkin tidak mempercayakan kepada kaum perempuan yang lemah dan kurang akalnya untuk mengasuh, merawat serta mengatur belanja. Apalagi tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab yang berat yang semestinya harus dipikul berdua.

---

akan mampu mengambil semua peran pada sektor kehidupan, termasuk peran ganda yang dialami sejak masuknya era globalisasi berbau industri. Perempuan akan mampu masuk ke ranah publik, juga mampu berbicara banyak untuk melakukan pembangunan nasional. Lihat Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004, 1.

26 Dalam salah satu pendapat popular yang diutarakan oleh Asghar Ali Engineer bahwa perempuan adalah makhluk di luar nalar manusia biasa, karena selain bekerja selama 24 jam urusan domestik, juga berperan di wilayah publik. Engineer mengatakan *"In this modern era, women face two challenges, first, themselves are related to their role and function in the family in particular. Second, science and technology, especially for women who play a double role. Especially when the husband does not play a role and even becomes a person who should be taken care of. So the more challenging the challenges that women have to face. Many women are now highly educated so it must be acknowledged that the challenges, responsibilities and burdens are getting heavier. Even though the contribution of an educated woman who volunteered for the household was not priceless. They are housewives who are capable of producing pious and virtuous children. This is much more glorious than those who think in material. But in reality not all women live happily in the household environment. So this is not necessarily a natural for women"*, lihat Asghar Ali Engineer, *the Right of Woman in Islam*. Farid Wajidi; Cici Farkha Assegaf (terj.) *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Benteng Budaya, 1994, 61.

Pernyataan mengenai akal perempuan yang seperdelapan tersebut tentu sangat berlawanan bila melihat kenyataan masa kini tentang banyaknya peranan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan seperti dalam sains, kesusastraan, politik kenegaraan, pendidikan dan lapangan-lapangan lain yang sebelumnya dianggap di luar jangkauan kapasitas perempuan. Walaupun masyarakat masih memandang adanya sifat inferioritas terhadap perempuan, pada sisi lain masyarakat masih tetap memberikan penghargaan kepada perempuan yakni diberinya kesempatan untuk memiliki ilmu pengetahuan, keluhuran, kekayaan dan juga anak. Dengan keempat hal tersebut diharapkan perempuan mampu mengembangkan potensinya demi masa depan keluarga maupun bangsa.

Bab IV

Tokoh Revolusi Perempuan dan Ideologi Modern

A. Tokoh Pejuang Perempuan

Peranan perempuan sangat penting kedudukannya dalam masyarakat. Sejarah telah membuktikan arti penting kedudukan perempuan baik dalam keluarga, masyarakat, maupun Negara. Ibu Hawa sebagai perempuan pertama Ibu manusia yang dicontohkan dalam al-Qur'an sesosok perempuan setia. Dalam penciptaannya disebutkan Surat An-Nisa' (4) ayat 1:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan Allah menciptakan pasangan (Hawa) dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu

saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Selain hal tersebut surat al-A'raf (7) ayat 189 disebutkan:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ
بِهِۦ ۖ فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَٰلِحًا
لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah ia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata), "Jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur".

Di bawah ini disebutkan tokoh-tokoh perempuan yang mendukung adanya eksistensi dan legitimasi kekuasaan di dalam Negara. Perempuan mempunyai kedudukan sederajat dengan pria. Pada hakikatnya kaum perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum pria dalam ikut serta melaksanakan tugas-tugas Negara. Hal ini terbukti dengan contoh-contoh berikut ini.

1. Dewi Sima

Salah seorang raja yang memerintah Kerajaan Kalingga dengan adil adalah seorang perempuan yaitu Dewi Sima. Di dalam masa pemerintahannya Negara mengalami kemakmuran dan kebesaran atau dengan kata lain mengalami zaman keemasan. Pencuri dan

penjahat dihukum mati atau dihukum berat karena itu masyarakat merasa tenteram tidak ada gangguan suatu apapun.[1]

2. Lara Jonggrang

Di dalam pemerintahan Raja Baka di Mataram Kuna ada peristiwa yang kemudian lalu bernama Lara Jonggrang. la adalah Putri Raja yang dipinang oleh seorang satria yaitu Bandung Bandawasa. Meskipun Raja mempunyai kekuasaan yang sangat besar namun Lara Jonggrang tidak dipaksa menerima lamaran tersebut akan tetapi diberi kebebasan untuk menjawab dan menentukan sikap sendiri.[2]

3. Dewi Kilisuci

Setelah Raja Erlangga mengundurkan diri sebagai Raja, sebenarnya yang berhak menggantikannya sebagai Raja adalah Dewi Kilisuci. Akan tetapi ia tidak bersedia menjadi Raja dan lebih suka menjadi Pertapa di gunung Penanggungan. Ia dapat menentukan sikap dan menjalankan perbuatan sesuai dengan kehendak hati nuraninya sendiri. Ini berarti bahwa ia juga memberi kesempatan kepada kedua saudaranya untuk menggantikan ayahnya sebagai Raja Daha dan Jenggala.[3]

---

1 Dewi Sima memimpin kerajaan Kalingga, Sriwijaya pada tahun 474-695 M. kerajaan yang terletak di pantai utara Jawa Tengah ini dikenal dengan kerajaan yang kaya dan tenteram, kaya dalam artian memiliki perkebunan dan perdagangan yang menjadi pusat saat itu, berkah kepemimpinan Dewi Sima, masyarakat hidup sejahtera dan nyaris tanpa konflik. Berbagai jaringan perdagangan sampai pada wilayah semenanjung Melayu dan Sunda, kerajaan Kalingga sangat terkenal memiliki ratu yang cerdas. Fenomena mencatatkan bahwa perempuan mampu untuk memiliki suatu negara, bahkan dikenal lembut dan cerdas mengurus dan mengatur pemerintahan. Lihat *Kerajaan Kalingga di bawah Pemerintahan Ratu Shima*, dalam https://www.harianmerapi.com/kearifan/2020/04/05/94531/kerajaan-kalingga-di-bawah-pemerintahan-ratu-shima-1-pemeluk-hindu-syiwa-yang-taat diakses 2020.

2 Lara Jonggrang merupakan ratu Prambanan Jawa Tengah, dikenal dengan raja yang mampu mengembangkan cagar budaya kerajaan ke negeri-negeri seberang. Bahkan saat ini, patung ratu Lara Jonggrang masih terpasang di Candi Prambanan untuk mengingat kehebatan kedigdayaan memimpin Jawa Tengah. Lihat dalam Artino Dwi Nugroho, "Iconography Traditional Architecture in Java in Relief Lara Jonggrang temple Prambanan", *Literasi*, 2(1) 2012, 80-87.

3 Dewi Kilisuci merupakan pewaris tahta kerajaan Kediri, namun karena sifat baiknya, Ia menyerahkan kepemimpinan Kediri kepada saudaranya. Potret Dewi Kilisuci sebagai perempuan hebat karena sifat dan tabiatnya yang selalu merendah dan tidak haus kekuasaan. Lihat lebih jelas sejarahnya dalam Elva Novalia, "Perkembangan Objek Wisata Goa Selomangleng di Kota Kediri Tahun 1992-2007", *Avatara*, 3(2) 2015, 87.

4. Calon Arang

Meskipun Calon Arang melakukan perbuatan melawan Negara, namun ia sebagai contoh perempuan yang tekun dan karena dengan segala ketekunannya ia menjadi orang yang sakti. Hal ini menunjukkan bahwa pada waktu itu perempuan juga mendapat kesempatan mengembangkan kepandaiannya sesuai dengan kemampuannya. Kecakapan dan kepandaian bukan menjadi monopoli kaum pria saja.[4]

5. Dewi Sekartaji

Sejarah Jenggala dan Daha penuh dibiasi dengan cerita romantik antara Panji dengan Dewi Sekartaji. Nampak sekali bahwa wanita dalam hal ini Dewi Sekartaji mempunyai hak untuk menentukan pilihannya sendiri demi kebahagiaannya. Cerita-cerita roman tersebut misalnya berbentuk cerita Dewi Kleting Kuning dan cerita tentang Cinde Laras. Dari cerita ini nampak bahwa ketenteraman Negara sebagian juga tergantung kepada ketenteraman keluarga Raja.[5]

6. Tribuwana Tungga Dewi Jayawisnuwardhani

Di dalam pemerintahan Majapahit tercatat adanya beberapa perempuan yang menduduki jabatan tertinggi yaitu Raja Tribuwana Tungga Dewi Jayawisnuwardhani sebagai Raja Putri yang sangat terkenal karena memerintah dengan baik dan merintis kebesaran kerajaan Majapahit. Di samping itu ada lagi Raja Putri yaitu Dewi

4 Legenda Calon Agung menyohor sejarawan pada abad ke-18, sosok perempuan yang memperjuangkan keluarga dan kehormatan. Calon Agung sekilas adalah perempuan yang bertipe keras dan mangkir dari sifat kemanusiaan, namun sebenarnya Calon Agung adalah perempuan yang ditindas oleh adat istiadat masyarakatnya. Selain itu, Calon Agung juga mematuhi titah raja Erlangga ketika hendak ditangkap. Lihat lebih lengkap dalam Valentina Edellwiz Edwar; Sarwit Sarwono; Yayah Chanafiah, "Perempuan dalam Cerita Calon Arang Karya Pramoedya Ananta Toer Perspektif Feminis Sastra", *Jurnal Ilmiah Korpus*, 1(2) 2017, 225-226.

5 Rizky Febrian; Eko A.B. Oemar, "Analisis Visual Tokoh Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji Wayang beber Pacitan melalui Pendekatan Semiotika", *Jurnal Pendidikan Seni Rupa*, 4(3) 2016, 393-403.

Suhita yang semasa tampuk pemerintahannya diwarnai oleh terjadinya perang saudara yaitu perang Paregreg. Setelah perang ini dapat diatasi oleh ayahnya yang bertahta kembali, akhirnya Dewi Suhita menjadi Raja lagi untuk kedua kalinya mengganti ayahnya.[6]

7. Ratu Kalinyamat

Setelah Sultan Trenggana wafat terjadi pembunuhan terhadap Sunan Kalinyamat dan Sunan Prawata. Pembunuhan ini dilakukan oleh Ariya Penangsang yang menjadi Adipati Jipang. Ia adalah putra Pangeran Sekar Seda Lepen. Pangeran Sekar Seda Lepen adalah putra Sultan Demak dan kakak Sultan Trenggana. Pangeran Sekar Seda Lepen wafat dibunuh oleh seseorang di sungai karena itu namanya terkenal dengan Pangeran Sekar Seda Lepen artinya yang meninggal di sungai. Karena ia wafat maka yang menggantikan menjadi Raja ialah Sultan Trenggana. Karena itu sejak wafatnya Sultan Trenggana, Penangsang merasa bahwa sebenarnya yang berhak menjadi Raja adalah dia. Ayahnya dahulu dibunuh oleh Sunan Prawata, maka ia lalu membalas tidak hanya membunuh Sunan Prawata tetapi juga Sunan Kalinyamat. Ia juga mencoba membunuh Adipati Pengging akan tetapi tidak berhasil. Untuk membalas pembunuh suaminya, maka Nyai Kalinyamat pergi bertapa tanpa berpakaian, sampai merasa mendapat petunjuk bahwa pembunuh tersebut akan mendapat balasan setimpal. Dalam hal ini sedikit banyak ia ikut serta menentukan arah dan nasib kerajaan selanjutnya. Walaupun perbuatannya hanyalah suatu protes terhadap ketidakadilan dan perbuatan sewenang-wenang terhadap suaminya, tetapi hal ini mengundang simpati dan rasa kasihan masyarakat untuk membantu menghancurkan sumber kejahatan itu.[7]

6 Ririn Darini, "the Gait of Majapahit Women in Political Space", *Patrawidya*, 20(1) 2019, 103-109.

7 Ratu Kalinyamat adalah tokoh perempuan nusantara yang memberikan sumbangsih pada abad ke-16. Selama 30 tahun berkuasa, ratu Kalinyamat berhasil membawa Jepara pada puncak kejayaannya. Armada laut yang tanggung, menguasai Portugis di malaka. Beliau adalah ratu yang memimpin ekspedisi militer terhebat. Lihat

8. Putri Pembayun

Pada waktu Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senapati menghadapi Utan melawan Ki Ageng Mangir, salah satu cara untuk mengalahkan musuh tersebut adalah menjadikan putra Putrinya sendiri sebagai istri Ki Ageng Mangir. Diceritakan bahwa Ki Ageng Mangir orang yang sakti dan mempunyai senjata tombak bernama Kyai Baruklinting. Dengan kekuatan senjata Mataram tidak berhasil mengalahkan musuhnya. Karena itu lalu dicari jalan yang sebaik-baiknya untuk mengalahkan Ki Ageng Mangir. Putri Raja Dewi Sekar Pembayun dijadikan pemain teledek bersama-sama dengan rombongan penabuh gamelan yang telah diatur. Ki Ageng Mangir berkenan menanggap dan setelah melihat kecantikan pemain Putri tersebut ia jatuh cinta. Kemudian teledek tersebut dijadikan istrinya. Setelah selang beberapa lama tahulah Ki Ageng Mangir bahwa istrinya adalah putra musuhnya yaitu Raja Mataram. Nasi telah menjadi bubur. Ia bersama istrinya menghadap Raja dengan maksud menunjukkan kesetiaannya kepada Raja. Sesampainya di Istana, ia menghadap dan menyembah Raja. Pada waktu itulah Raja menghantamkan kepala Ki Ageng Mangir ke lantai dan wafatlah ia.[8]

9. Prabu Putri Dewi Suhita

Setelah Wikramawardhana meninggal dunia, maka dia digantikan oleh seorang putri, Dewi Suhita. Seperti dikatakan di awal bahwa putra mahkota meninggal dunia pada tahun

---

sejarahnya dalam Chusnul Hayati, "Ratu Kalinyamat: Ratu jepara yang Pemeberani", dalam https://core.ac.uk/download/pdf/11704325.pdf

8 Dalam sejarahnya, Putri Pembayun adalah pewaris tahta ke 2 kerajaan Mataram. Nama panjang putri Pembayun adalah Roro pembayun merupakan Putri sulung dan putri kesayangan Panembahan Senopati sebagai raja pertama Dinasti Mataram Islam. Tradisi kerajaan Mataram sama seperti kerajaan Majapahit, di mana perempuan juga bisa mewarisi tahta kerajaan dan sebagai Putri mahkota. Kehebatan Putri Pembayun diakui sebagai putri yang cerdas dan pintar, satu-satunya yang dapat mengalahkan Ki Agend Mangir saat itu adalah Putri Pembayun. Sehingga sosok perempuan begitu dihormati. Lihat paparan sejarah dalam artikel yang diteliti oleh salah satu peneliti tersohor yaitu Thomas Benmetan, "Analisis Framing Sosok Gusti Kanjeng Ratu Pembayun dalam Majalah Digital Detik Edisi 182", *Jurnal e-Komunikasi*, 4(1) 2016, 1-7.

1409. Wikramawardhana memang memiliki saudara laki-laki, yakni Bre Tumapel. Akan tetapi, Suhita dianggap lebih pantas daripada Bre Tumapel. Ibu Dewi Suhita adalah Bre Mataram, keturunan Wirabumi dengan Negarawardhani. Dengan demikian, golongan Wirabumi sangat bersenang hati. Mereka merasa mendapat kesempatan untuk berkuasa di Keraton. Dewi Suhita banyak mengambil Punggawa dari pengikut Wirabumi. Dendam politik ini muncul kembali sehingga akhirnya Raden Gadjah yang dahulu membunuh Wirabumi pada tahun 1433 mendapat balasannya hingga tewas. Balas-membalas dendam ini rupanya membuat suasana Majapahit semakin kacau. Dalam suasana demikian, bentangan tangan Majapahit tidak luas lagi. Kekuasaan Majapahit semakin kecil dan angkatan laut Majapahit juga mengecil jumlahnya.[9]

Pemerintahan Majapahit setelah meninggal Wikramawardhana adalah anak perempuannya yaitu Suhita (1429-1447), di mana ibunya adalah anak dari Wirabhumi. Masa pemerintahannya ditandai berkuasanya kembali anasir-anasir Indonesia, antara lain didirikannya berbagai tempat pemujaan dengan bangunan-bangunan yang disusun sebagai punden berundak-undak di lereng-lereng gunung (misalnya *Candi Sukuh* dan *Candi Ceta* di Lereng Gunung Lawu). Selain itu terdapat pula batu-batu untuk persajian, tugu-tugu batu seperti menhir, gambar-gambar binatang ajaib yang memiliki arti sebagai lambang tenaga gaib, dan lain-lain. Di Daha ia digantikan anaknya, Ranawijaya yang bergelar Bhatara Prabu Girindrawardhana, yang berhasil menundukkan Kertabhumi dan

9 Ratu Dewi Suhita merupakan pemimpin perempuan terakhir di Jawa Timur. Dalam catatan sejarah Majapahit pada abad ke-13, setidaknya ada dua ratu yang pernah memimpin kerajaan besar di Jawa Timur ini, pertama adalah Ratu Tribhuwana Tunggadewi (1328-1350) dan yang kedua adalah Ratu Dyah Suhita (1429-1447) yang merupakan perempuan terakhir di Jawa Timur. Secara politik, naiknya tahta Dya Suhita terkait dengan kekisruhan yang terjadi di majapahit sepeninggal ditinggal Raja Hayam Wuruk. Terjadilah politik keras antar kerajaan dan memanas pada puncak sukses kepemimpinan. Lihat lebih jelas dalam Iswara N. Raditya, "Sejarah Kerajaan: Dyah Suhita, Pemimpin Perempuan Terakhir di Jawa Timur", dalam https://tirto.id/dyah-suhita-pemimpin-perempuan-terakhir-di-jawa-timur-cDmn

merebut Majapahit di tahun 1474. Menurut prasastinya di tahun 1486 ia menamakan dirinya Raja Wilwatika Daha Janggala Kadiri, namun kapan berakhirnya memerintah tidak diketahui. Demikian tentang riwayat Majapahit semakin gelap, kecuali berita-berita dari Portugis bahwa Majapahit di tahun 1522 masih berdiri dan beberapa tahun kemudian kekuasaannya berpindah ke kerajaan Islam di Demak.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, masih ada juga kerajaan-kerajaan yang meneruskan corak kehinduan Majapahit misalnya Pajajaran yang akhirnya lenyap setelah ditundukkan oleh Sultan Yusuf dari Banten di tahun 1579, juga Balambangan yang di tahun 1639 baru bisa ditundukkan oleh Sultan Agung dari Mataram, di samping masyarakat di Pegunungan Tengger yang sampai saat ini masih mempertahankan corak Hindunya dengan memuja Brahma dan Bali yang masih tetap dapat mempertahankan kebudayaan lamanya. Penerus Majapahit yang tetap di Majapahit (selain Purbawisesa yang berkeraton di Kahuripan) adalah Kertabumi/Brawijaya, yang memerintah di tahun 1453-1478. Tidak diketahui mengenai perjalanan kerajaannya namun ia mempunyai salah satu putra yang bernama Raden Patah atau Jin Bun yang diberi kedudukan sebagai Bupati Demak dan ia mengundurkan diri kemudian pindah ke Gunung Lawu dan kemudian masuk agama Islam. Pada tahun 1437 terjadi peristiwa unik Bre Daha diangkat menjadi Ratu Majapahit.[10] Keadaan ini menunjukkan adanya ketegangan yang memuncak sementara Dewi Suhita tidak berdaya mengatasi kekacauan tersebut.

10. Ratu Mas Balitar

Kanjeng Ratu Mas Balitar adalah *garwa dalem sinuwun* Paku Buwana I. Gelar Ratu Balitar lainnya adalah Kanjeng Ratu

10 Ririn Darini, "Kiprah Perempuan Majapahit di Ruang Politik", *Patrawidya,* 20(1) 2019, 101-104.

Ibu atau Sang Aprabu Nini. Berhubung kepribadiannya yang luhur dan agung, Ratu Balitar dihormati sebagai *Putri Amardika jimate wong nusa Jawa.* Sikap Ratu Balitar yang bijak bestari ini mampu meredakan krisis politik yang selalu bergolak pada masa awal kerajaan Kartasura dan Surakarta. Hal ini bukan suatu kebetulan, karena beliau adalah seorang tokoh putri yang gemar akan ilmu pengetahuan.

Ratu Balitar terlibat dalam pembuatan karya sastra yang berjudul *Serat Iskandar, Serat Menak,* dan *Serat Yusuf. Serat Iskandar* masih berkaitan dengan Hikayat Iskandar Zulkarnain berbahasa Melayu yang dibuat oleh Ratu Balitar di samping untuk syiar Islam juga demi kemajuan pendidikan masyarakat saat itu yang selalu menghadapi pergolakan politik. Bagi kebanyakan para putri sekarang, kiranya patut apabila mau meniru kebijaksanaan dan kepandaian Kanjeng Ratu Mas Balitar dalam menyikapi perubahan dan pergolakan di pentas kenegaraan.[11]

11. Raden Ajeng Kartini

Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Untuk mengetahui kehidupan Raden Ajeng Kartini, bisa ditelusuri lewat museum Kartini. Museum R.A. Kartini berada di lingkungan rumah dinas Bupati Rembang (Jl. Gatot Subroto 8 Rembang) merupakan bangunan asli yang dulu dihuni R.A. Kartini beserta suaminya Djojodiningrat, Bupati Rembang (1889-1912). Sampai sekarang bangunan tersebut masih dipergunakan sebagai rumah dinas Bupati Rembang. Museum R.A Kartini menempati salah satu kamar yang dulu ditempati R.A Kartini untuk melakukan aktivitas, menulis buah pikiran dan ide-ide beliau, juga sebagai tempat beliau melahirkan putra satu-satunya yang bernama R.M. Susalit, dan sebagai kamar pribadi sampai beliau wafat.

11 Alex Sudewa, "Sastra dan Perkembangan Politik di Jawa Abad XVIII", *Jurnal Humaniora,* XIII (3) 2001, 240-245.

Di sini pengunjung dapat melihat beberapa perabot yang dulu dipergunakan R.A Kartini; seperti bak mandi, *bothekan* tempat jamu, kotak jahitan, meja makan, meja merawat bayi, lukisan karya R.A Kartini berupa tiga ekor angsa, naskah tulisan tangan, sepasang *rono* penyekat ruangan dari kayu berukir hadiah dari ayahandanya, foto-foto kenangan semasa hidupnya di sekitar museum, di sebelah timur gapura komplek rumah dinas Bupati, masih berdiri dengan kokoh, bangunan kuno yang dahulu digunakan R.A Kartini untuk mengajar anak-anak bumi putra.[12]

Beliau dimakamkan di desa Bulu, 17,5 Km dari kota Rembang ke arah selatan jurusan Blora. Di tempat ini pada tanggal 17 September 1904 dimakamkan pahlawan Pergerakan Wanita Indonesia. Areal makam tersebut merupakan makam keluarga Bupati Rembang R.M.A.A. Djojodiningrat dan putra R.A. Kartini, R.M Soesalit. Pada bulan April tepatnya tanggal 21 April untuk memperingati hari kelahiran R.A Kartini, puluhan ribu pengunjung berziarah ke Makam tersebut.[13]

12. Dewi Sartika

Raden Dewi Sartika dilahirkan di Cicalengka Jawa Barat pada tanggal 4 Desember 1884. Meskipun beliau tidak berpendidikan tinggi cita-citanya sangat tinggi, terutama untuk menjunjung derajat kaum wanita. Di Bandung beliau mendirikan sekolah istri pada tahun 1904, untuk memberi kesempatan kepada anak-anak perempuan menuntut ilmu pengetahuan. Murid-muridnya diberi pelajaran berhitung, membaca, menulis, menjahit, merenda, menyulam dan agama. Pada tahun 1910, sekolah ini bertambah maju dan memiliki gedung sendiri, kemudian namanya diganti menjadi "Sekolah Keutamaan Istri". Selain itu, mata pelajarannya

12 Fuad Hasan, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: Delta Pamungkas, 2004, 195; lihat juga dalam Sri Suhandjati, *Ensiklopedi Islam dan Perempuan: dari Aborsi hingga Misogini*. Bandung: Nuansa, 2009, 180.

13 Armijn Pane, *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007, 5-6.

juga ditambah dengan pelajaran yang ada hubungannya dengan pembinaan rumah tangga yang terampil dan baik.

Untuk membiayai sekolah itu beliau bekerja keras dengan berbagai kegiatan di Bandung kegiatan beliau itu banyak menarik pula perhatian kaum perempuan di daerah lainnya, sehingga di Tasikmalaya, Garut, Purwakarta dan kota-kota lainnya, berdiri "Sekolah Keutamaan Istri". Oleh karena itu, suaminya ikut membantu, baik pikiran maupun tenaga. Para pejabat pemerintah sering mengunjunginya, bahkan pemerintah juga menghadiahkan sebuah "Bintang Perak" sebagai penghargaan atas jasa-jasanya.

Kendati selama perang Dunia 1 sulit mencari uang, pada tahun 1929 "Sekolah Keutamaan Istri" mampu memiliki gedung sendiri dan mengubah namanya menjadi "Sekolah Dewi Sartika" karena semasa perang kemerdekaan kota Bandung diduduki Belanda, maka Dewi Sartika menghentikan kegiatannya. Beliau mengungsi ke Cinean dan wafat di sana pada tanggal 11 September 1947. Jenazahnya semula dimakamkan di sana, tapi kemudian dipindahkan ke Bandung.[14]

13. Cut Nyak Dien

Dalam sejarah nasional Cut Nyak Dien dikenal sebagai pejuang perempuan yang tangguh dalam memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Baik kawan maupun lawan sangat segan dan menaruh hormat terhadap kegigihan pejuang perempuan dari Aceh ini. Beliau mempunyai integritas dan moralitas yang tinggi dalam hal kepemimpinan. Bujuk rayu dan iming-iming yang

14 Raden Dewi Sartika adalah salah satu sosok emansipasi perempuan, sama halnya dengan R.A. Kartini. Ia dilahirkan oleh seorang priayi bernama Raden Somanegara. Pada tanggal 16 Januari 1904, Dewi Sartika mulai mendirikan sekolah yang didukung oleh kakeknya, Raden Agus A Martanegara seorang ahli bahasa dan pengajar. Sekolah tersebut dinamakan dengan sekolah istri yang hanya memiliki 20 murid wanita, tidak hanya belajar membaca, menulis ataupun jenis hitungan-hitungan lainnya, melainkan juga pengajaran kreativitas seperti menjahit, merenda dan belajar agama yaitu al-Quran dan hadist. Lihat lebih lengkap Farhan, *R.A. Kartini*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2010, 9-13; lihat juga dalam Gadis Arivia, *Feminisme: sebuah Kata Hati*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006, 43.

bersifat material duniawi tidak pernah menggoyahkan semangat perjuangannya. Demi kepentingan bangsa dan negaranya, Cut Nyak Dien rela berkorban.

Nama harum Cut Nyak Dien menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya untuk selalu menjaga kehormatan dan harga diri bangsa. Kepentingan umum harus diutamakan dibandingkan dengan kepentingan keluarga atau golongan. Semangat dan tekad Cut Nyak Dien yang membara itu tetap dijadikan teladan oleh bangsa kita, baik untuk cermin masa lalu, perjuangan masa kini dan proyeksi ke masa depan. Semangat yang tinggi sangat relevan untuk dijadikan refleksi dan introspeksi bagi kita semua.[15]

14. Maria Martha Tiahahu

Pahlawan perempuan yang lahir dari kawasan Indonesia Timur, khususnya dari daerah Maluku adalah Maria Martha Tiahahu. Beliau sangat peduli pada nasib bangsa dan negaranya. Akibat sikap penjajah yang sewenang-wenang, telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang panjang. Mereka adalah kaum lemah yang perlu dibela nasibnya.

Penghisapan, penghinaan dan penindasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial menyebabkan Maria Martha Tiahahu untuk tampil memimpin perjuangan demi mengentaskan penderitaan rakyat. Dengan segala daya upaya dan pikiran, perjuangannya dilakukan di tengah-tengah rakyat. Ketulusan dan keteladanan Maria Martha Tiahahu patut dikenang sampai sekarang.[16]

15. HR. Rasuna Said

Bangsa Indonesia pantas mengenang perjuangan yang dilakukan oleh HR. Rasuna Said. Jasa-jasanya terutama dalam

15 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Cut Nyak Din*. Jakarta: Publishing, 1996, 56; lihat juga Lina Meilinawati Rahayu; Aquarini Priyatna; Ani Rachmat; Baban Banita, "Pemahaman Peristiwa Sejarah melalui Visualisasi Kisah Cut Nyak Dien sampai di Kabupaten Sumedang", *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(5) 2018, 4-8.

16 Lihat dalam https://www.merdeka.com/martha-christina-tijahahu/profil/ diakses 2020.

bidang keagamaan, kemasyarakatan dan keilmuan. Beliau percaya bahwa kemajuan dapat dicapai hanya dengan melalui lapangan pendidikan. Rakyat yang cerdas tentu bisa menolong dirinya sendiri dan memperoleh kemandirian. Oleh karena itu perlu didirikan lembaga pengajaran yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pada masa pergerakan nasional, HR. Rasuna Said selalu tampil di berbagai organisasi dan forum. Tidak jemu-jemunya beliau menyampaikan aspirasi agar hak-hak rakyat sebaiknya dipenuhi oleh Pemerintah Kolonial. Sungguh tidak etis rakyat pribumi sebagai pemilik sah negerinya justru hidupnya penuh dengan penderitaan. Rupa-rupanya idealisme beliau mendapat dukungan dari sesama rekan perjuangan. Kini nama beliau diabadikan untuk nama jalan utama di Ibu Kota Negara.[17]

B. Kultur Perempuan Jawa

Pekerti putri sejati sebagaimana yang dicontohkan dalam uraian di atas sesungguhnya tampak pada jasa-jasanya dalam keluarga, masyarakat dan negara. Hidupnya selalu penuh dengan pengabdian dan keikhlasan. Dia lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dalam kehidupan keluarga Jawa tidak terdapat kesamaan kedudukan antara suami dan istri. Suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan penting serta mempunyai kekuasaan yang lebih besar. Kita berpendapat bahwa istri juga mempunyai peranan yang penting bahkan dalam hal-hal tertentu lebih besar dari peranan suami. *Mangun bale wisma* merupakan harapan bagi orang Jawa mengenai masa depan yang berhubungan dengan rumah tangga. Masa kini adalah masa yang dipenuhi oleh berbagai gelombang permasalahan,

17 Esti Nurjanah, "Peran Hajjah Rangkayo Rasuna Said dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Indonesia", dikutip dari buku Adi Sudirman, *Sejarah Lengkap Indonesia*. Yogyakarta: Diva Press, 2014, 15.

satu sama lain saling berkait yang jalinan kaitannya cenderung menyeluruh berkat jaringan komunikasi modern sebagai salah satu hasil ilmu pengetahuan modern.[18]

Konsep-konsep besar oleh pemikir-pemikir kaliber dunia A. Tofler, khususnya mengenai: Gelombang Ketiga. Dialog-dialog internasional juga makin berkembang, bukan saja dialog Timur–Barat, melainkan juga Utara–Selatan, bahkan Selatan–Selatan. Kita perhatikan sekali lagi ucapan Dwight D. Eisenhower:

> *…Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired signifies, in the final sense, a shaft from those who hunger and are not fed, those who are cold and are not clothed …*
> *The cost of one modern heavy bomber is this: a brick school in more than 30 cities. It is two electric power plants, each serving a town of 60.000 population. It is two fine, fully equipped hospitals. It is some 50 miles of concrete highway. We pay for a single fighter plane with a half million bushels of wheat. We pay for a single destroyer with a new homes that could have housed more than 8.000 people. This is not a way of life at all, in any true sense. Under the cloud of threatening war, it is humanity hanging from a cross of iron. Is there no other way the world may live?*[19]

Sungguh tepatlah apabila para ahli memikirkan tentang Etika Profesional. Ketika Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan

18 Meminjam bahasa Handayani (2004) mengistilah perempuan Jawa sebagai Kanca Wingking yang berarti "teman di dapur" sedangkan suami diistilahkan dengan swarga nunut, neraka katut (ke surge ikut, ke neraka ikut). Maka secara kultural, perempuan dalam kecamatan budaya Jawa memandang bahwa perempuan sebagai gender bermental pahlawan dalam keluarga, keberadaannnya sebagai pengasuh anak, pengurus rumah tangga sekaligus pendatang rezeki. Maka dari itu, wajar bila perempuan sangat dihormati bagi kalangan orang Jawa. Lihat dalam C.S. Handayani; A. Novianto, *Kuasa Wanita Jawa*. Yogyakarta: LKiS, 2004, 11-12.

19 Pidato sekaligus instruksi dari Presiden AS ini dikutip oleh Janis (1979), pidato yang mengungkap bahwa perempuan harus memiliki kebebasan dari semua aspek, politik, ekonomi, sosial, keluarga ataupun budaya. Lihat lebih rinci dalam L.I. Janis; L. Mann, *Decision Making: a Psychological Analysis of Conflict, Choice and Commitment*. New York: the Free Press, 1979; bisa juga dilihat dalam Yolanda Imelda Fransisca Tuapattinaya; Sri Hartati, "Pengambilan Keputusan untuk Menikah Beda Etnis: Studi Fenomenologis pada Perempuan Jawa", *Jurnal Psikologi Undip*, 13(1) 2014, 34-41.

suatu diskusi panel mengenal hal itu, dalam salah satu dialognya terdapat pertanyaan, "Kita ini makin etis atau tidak?" E. Yohannes menjawab: Dari gelombang I ke gelombang II, kita makin tidak etis; mudah-mudahan saat-saat sekarang ini, kita makin etis". Kesemuanya itu mengingatkan kita kepada pesan lama pada buku lama, karya Pujangga Jawa:

Jagra angkara winangun,
Sudira marjayeng westhi,
Puwara kasub kuwasa,
Sastraning jre Weddha muni:
Sura dira jayaningrat,
Lebur dening Pangastuti.[20]

Tiga baris pertama dari syair tersebut yang juga mengacu pada baris ke-5, benar-benar senada dengan keluhan Eisenhower: *This is not a way of life at all, in any true sense.* Sementara itu baris penutupnya menyebutkan *way of life* yang dipujikan, yaitu *"Pangastuti".* Bahwa kata-kata, *"Sura dira jayaningrat, lebur dening Pangastuti"* membuktikan bobot kualitatif kandungan isinya, sekaligus membuktikan pula kesinambungan nilainya dahulu dan masa kini. Kalau *"Pangastuti"* atau *abon-aboning panembah*, tersebut dapat dipandang sebagai salah satu Etika Jawa, yang berkesinambungan dahulu dan untuk masa kini.[21]

Sinuhun P.B. IX ketika menguraikan *"Filsafat" Hanacaraka,* mengatakan bahwa caraka *(cipta, rasa dan karsa)* sebagai utusan Tuhan menyatu di dalam nafas, *ambegan* jadi bukan sekadar pengetahuan melainkan juga *laku,* maka nilai kemanusiaan Jawa diukur dari: Ambeg-nya: *ambeg satria-inandhita, ambeg jatmika ambeg candhala ing budi* dan lain sebagainya. Kata-kata Jawa memang mempunyai konotasi *gandha*

20 Damardjati Supadjar, *Nawangsari,* Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1993, 3-8.
21 Damardjati Supadjar, *Nawangsari..,* 9.

(lahir–batin). *Ambegan* (napas); tapi lebih dari itu, *ambegan* mengacu kepada kriteria etis: *ambe wungon* tidak saja berarti: *bangun* (berjaga), tapi juga menambah kadar sinar: *wungu* (ultraviolet), suatu unsur terpenting bagi daya ke-*washitha*-an. Apakah ini hanya suatu: *othak-athik-mathuk*? mengapa tidak? Sebagai suatu metode bahkan memasukkan cara-cara Frobel dan Montessori: namun masalahnya, seharusnya tidak hanya berhenti pada rekonstruksi atau konstruksi teoretis, melainkan memverifikasikannya kepada realitas dalam hal ini laku–perbuatan (*way of life:* cara hidup).[22]

C. Tradisi dan Modernisasi

Etiket berhubungan erat dengan tradisi pada masa kini karena modernisasi, lalu menampakkan sifat kelenturan. Dengan berpegang pada azas Tri-Kon, mengamati Etika, dalam rangka: Tradisi dan Modernisasi. Pergeseran ajaran komoslogi (*ningrat*) menjadi perwatakan *socio-kultural-ekonomis* (feodal), sungguh merupakan objek telaah yang amat menarik. Peringatan Kepala Negara, agar, "Pemuda jangan terbelenggu oleh sejarah masa lampau", memberi isyarat agar kita selalu korektif.[23] Sifat korektif demikian bahkan juga disadari oleh pihak kolonial dahulu, yaitu ketika mereka melanjutkan kolonisasi secara "etis": irigasi (etika lingkungan); edukasi (etika individual) dan transmigrasi (etika sosial), masih relevan untuk diperhatikan.

Dibicarakan Etika dan Tata Krama Jawa (seiring dengan

22 Sebagaimana hasil penelitian Esti Ismawati (2018) tentang etika perempuan Jawa sejak dahulu hingga sekarang masih terjaga dengan sangat kuat, melanggar etika perempuan Jawa dianggap tidak etis dan mendapat sanksi sosial jika dilanggar. Selanjutnya, penelitiannya menemukan bahwa 1) status dan peran perempuan Jawa mengalami perubahan dari masa ke masa, namun norma dan etika perempuan Jawa tetap terjaga; 2) perkembangan teknologi dan industry tidak mengubah status perempuan, namun memberikan variasi baru yang lebih proporsional; 3) pola pikir perempuan masyarakat Jawa berkarakter keibuan namun juga digitalis. Lihat dalam Esti Ismawati, "Mapping Status and Roles of Javanese Women in Indonesian Literary Texts", *Jurnal Masyarakat dan Budaya,* 20(2) 2018, 235.

23 Damardjati Supadjar, *Nawangsari..,* 10-19.

Sunda dan Bali) dahulu dan masa kini dalam rangka Seminar (Festival) Bahasa dan Sastra, Etika dan Seni Tradisional) tidak dapat dilepaskan dari momentum Alih Generasi dan Alih Teknologi khususnya dan momentum pembangunan pada umumnya. Bangsa Indonesia sedang melakukan pembangunan di berbagai bidang kehidupan yaitu ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pendidikan dan lain-lain.[24] Pembangunan dan perkembangan masyarakat berjalan saling terkait karena pembangunan mempunyai pengaruh terhadap perkembangan masyarakat, sebaliknya perkembangan masyarakat menuntut pembangunan di segala bidang. Sudah tidak asing lagi bahwa dalam rangka pembangunan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi memegang peranan penting. Bahkan sementara orang berpendapat bahwa masyarakat sekarang dan mendatang akan dipimpin oleh pengetahuan termasuk teknologi ekonomi.

Kaum positivisme misalnya menolak nilai-nilai teologi dan kosmologi serta mengagungkan nilai positif yaitu yang berlaku kini dan di sini. Kaum positivist juga dihadapkan pada kenyataan, bahwa masyarakat dalam fase positif juga menghadapi berbagai masalah yang cukup rumit. Dalam fase ini ternyata masyarakat belum hidup aman tenteram dan sejahtera, tetapi dihadapkan pada berbagai peperangan, bentrokan, pembajakan dan teror serta penindasan baru. Bangsa Indonesia sudah bertekad bulat bahwa pembangunan di segala bidang ini diarahkan untuk merealisasi tujuannya berupa masyarakat adil makmur, material spiritual berdasarkan nilai luhur budaya bangsa. Meskipun demikian kita sadar bahwa dalam rangka pembangunan nasional kita dihadapkan

24 Pembangunan yang paling ditonjolkan oleh negara Indonesia saat itu adalah pembangunan sumber daya manusia, termasuk diantaranya adalah penguatan gender terhadap perempuan, pembukaan lowongan pekerjaan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan mengedepankan kepentingan sipil. Dengan pembangunan ini, perempuan mulai diberikan tempat dan ruang untuk berkiprah dan membangun demokrasinya di Indonesia, sehingga banyak perempuan yang berpartisipasi secara publik. Lihat dalam Muhammad al-Hafidz, "Rasisme dalam Masyarakat Pascakolonial: Analisis Wacana Kritis terhadap Novel-Novel Woodson", *Jurnal Humanus*, 4(1) 2016, 98-99.

pula pada berbagai masalah antara lain berupa pengaruh yang berasal dari dalam dan dari luar negeri.[25]

Masalah yang berasal dari dalam antara lain berupa sikap hidup dan perbuatan hidup manusianya sendiri, misalnya sikap pasrah yang pasif, terserah pada nasib, menutup diri dan secara apriori menolak segala bentuk yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Pengaruh dari luar juga menyangkut berbagai bidang misalnya politik, ekonomi, sosial, budaya.

25 Asumsi ini berdasar pada penelitian yang dilakukan oleh Ratna Asmarani (2017) bahwa pembangunan manusia dimulai dari beberapa elemen yang dapat mendukung kesuksesannya, diantaranya adalah pembangunan budaya lokal sebagai identitas bangsa dan negara. kemudian, pada tahap selanjutnya adalah pembangunan kualitas perempuan dengan memberikan ruang khusus dalam hal politik dan ekonomi. Lihat dalam Ratna Asmarani, "Perempuan dalam Perspektif Kebudayaan", *Jurnal Sabda*, 12(1) 2017, 1-16.

Bab V

Perempuan dan Abad Modernitas

A. Perempuan dan Akulturasi Budaya

Akulturasi kebudayaan diantara bangsa-bangsa dunia sebagian besar terpengaruhi oleh perkembangan politik. Begitu pula pengaruh bangsa Barat atas dunia Timur ini tidak lepas dari faktor politik. Sedang tendensi dari politik tidak lain adalah perebutan kekuasaan sesuai dengan arti politik itu sendiri, dengan kata lain segala sesuatu yang berhubungan dengan tata negara. Hakikat politik ialah penjelmaan kegiatan untuk membentuk kekuasaan yang dimaksudkan untuk menyusun struktur ekonomi dan sosial sebaik mungkin menurut cita atau pandangan (filsafat) tertentu. Untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi itu terbentuklah kekuasaan, organisasi, lembaga dan badan yang menyusun, mengatur, memimpin kegiatan usaha-usaha ke arah yang dicita-citakan.

Berbicara mengenai akulturasi kebudayaan, hal ini memang sudah menjadi suatu kenyataan bahwa setiap kebudayaan selalu dalam proses perubahan. Oleh karena itu maka kehidupan kebudayaan di suatu daerah berbeda dari zaman ke zaman. Hanya saja perubahan itu ada yang cepat sekali geraknya dan ada pula yang lamban. Sedangkan perubahan tersebut disebabkan

oleh adanya akulturasi. Akulturasi ialah penyesuaian diri antara manusia dan golongan-golongan manusia yaitu bangsa-bangsa yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Akulturasi antara dua kebudayaan yang berbeda tingkatnya, tingkat yang lebih tinggi memimpin tingkat yang rendah.[1]

Suatu hal yang telah menjadi realitas bahwa bangsa-bangsa Barat yang secara politis dan ekonomis lebih kuat atas negeri-negeri Timur telah menjadi suatu penarik yang keras serta mempengaruhi dunia Islam dalam bidang intelektual dan kemasyarakatan sedang dunia Barat yang lebih kuat itu sendiri tidak dipengaruhi oleh dunia Timur. Jadi kebudayaan modern yang dimiliki negara-negara Barat menduduki posisi yang dominan dan menjadi pemimpin bagi kebudayaan negara-negara Timur yang mempunyai tingkat kebudayaan lebih rendah. Sedangkan perlu diketahui bahwa "kebudayaan modern dibentuk oleh kerja sama ilmu dan teknologi.

Tentang akulturasi kebudayaan Eropa atas dunia Timur tersebut ternyata membawa pengaruh yang amat besar dalam tata cara kehidupan manusia. Sadar atau tidak, mau atau tidak, bangsa Timur sudah mengarah terhadap kebudayaan Eropa, ilmu dan teknik sebagai idealnya yang pada hakikatnya berasal dari kebudayaan Barat.[2] Dalam melengkapi tulisan kehidupan di abad modern ini penulis sengaja membahas tentang kehidupan yang rasionalistis dan materialistis, sehingga sampai menimbulkan paham kapitalis.

1 Sebagaimana diungkap oleh Paul N. Lakey (2002) bahwa akulturasi merupakan suatu yang dihasilkan oleh perbedaan kultural kelompok individu dalam suatu masyarakat, yang kemudian menggantikan pola kultur pribumi menjadi bercampur dengan kultur yang baru datang. Akulturasi Lakey ini bersifat gradualistik, artinya proses perubahan kultur terjadi pada tahapan-tahapan dan berproses secara sedikit demi sedikit, tidak instan. Lihat dalam Paul N. Lakey, "Acculturation: a Review of the Literature", *Intercultural Communication Studies*, 12(2) 2002, 104.

2 Kebudayaan Eropa, dalam catatan sejarah, telah lama melakukan akulturasi dengan Indonesia serta wilayah-wilayah tenggara seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Sehingga bentuk kebudayaan Eropa yang berubah nama ketika telah dilakukan oleh pribumi nusantara menjadi kebudayaannya sendiri. lihat dalam Siti Muslifah, "Akulturasi Budaya Timur Tengah ke Indonesia dan Pengaruhnya dalam Kesusastraan (Studi Kasus pada Serat Centhini)", *Jurnal CMES*, VI(1) 2013, 105.

Kehidupan yang rasionalistis ditandai dengan kemajuan dan kemenangan ilmu pengetahuan modern diantaranya adalah disebabkan terutama oleh kegunaan ilmu. Ilmu pengetahuan praktik (yang disebut kemudian dengan ilmu teknologi), maju setahap demi setahap dengan semboyan untuk menundukkan alam sekitar manusia. Dalam usaha menundukkan alam ini teknologi modern telah berhasil mendatangkan kebahagiaan, nilai taraf kehidupan rakyat sangat meningkat dan kemakmuran meningkat.[3]

Dengan lahirnya Renaissance, Eropa bangkit kembali untuk mengejar ketinggalan mereka pada masa kebodohan dan kegelapan. Mereka menjelajah dunia yang sebelumnya masih diliputi kegelapan, banyak penemuan-penemuan dalam segala lapangan ilmu pengetahuan dan kehidupan yang mereka peroleh. Lautan yang semula menakutkan dapat ditembus dengan mudah, sungai dan banjir yang semula membawa petaka dapat ditampung dan dijadikan sumber tenaga. Kemajuan berpikir orang-orang Barat seperti yang kita lihat masa kini telah menghantarkan mereka ke arah perkembangan kebudayaan yang amat pesat sekali dalam berbagai segi, baik dalam kehidupan sosial, politik, militer, ekonomi, kesenian, maupun kesusastraan.[4]

Rasionalisme mendorong bangsa Barat untuk menguasai alam. Sedangkan Tuhan dan hal-hal gaib seperti: surga, neraka, hari kiamat dan lain sebagainya bukanlah menjadi pusat perhatian mereka lagi. Kebenaran segala sesuatu diukur dengan rasio manusia apa saja yang dianggap tidak masuk akal manusia maka tidak akan diterima dan dianggap tidak benar. Selanjutnya banyak yang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kalau yang dahulu setiap persoalan selalu penyelesaiannya kepada Tuhan, tetapi kini

3 Sodiq Anshori, "Konstribusi Pengetahuan Sosial dalam Pendidikan Karakter", *Jurnal Edueksos*, III(2) 2014, 59.60.

4 Amri Marzali, "Agama dan Kebudayaan", *Umbara: Indonesian Journal of Antropology*, 1(1) 2016, 59-62.

telah berubah dengan menggunakan pikirannya sendiri. Sebab menurut mereka segala hukum atau kejadian alam semesta hanya tunduk kepada hukum alam. Manusia dapat mencapai kebahagiaan dan memperbaiki kehidupannya, apabila dapat menambah pengetahuan yang rasional atas penemuan-penemuan rahasia kekuatan alam. Dengan demikian lambat laun kepercayaan mereka terhadap Agama menjadi berkurang. Ilmu dimungkinkan oleh sistem berpikir rasional dan objektif.

Ilmu memberikan kekuasaan kepada manusia untuk membuka rahasia alam. Setapak demi setapak alam dikuasai dan dimanfaatkan manusia untuk kepentingan dirinya sendiri. Perkembangan yang pesat dari ilmu-ilmu alam, yaitu ilmu yang menguasai materi di kurun Aufklarung mempengaruhi sistem berpikir ke arah materialisme. Makin banyak rahasia alam berhasil dibuka oleh ilmu, makin menciutlah kegaiban yang tadinya penuh meliputi alam. Sebelumnya tiap-tiap yang gaib, dipulangkan kepada Agama. Peristiwa-peristiwa alam, penyakit-penyakit dan rasio manusia yang tidak dapat diterangkan, dipercayai datangnya dari yang gaib dan di belakang dunia gaib itu bertahta yang Maha Gaib yaitu Tuhan.[5]

Manusia mempunyai hak kemerdekaan dan kemampuan berpikir untuk merencana serta membangun hidupnya sesuai dengan kemampuannya sendiri. Kemerdekaan inilah di antaranya yang mengawali terbukanya rahasia-rahasia alam. Di dalam perkembangan selanjutnya di Eropa Barat telah banyak yang membebaskan diri dari belenggu-belenggu ajaran Agama dan ini tidak lain adalah bertujuan untuk kemerdekaan pribadi sendiri supaya dapat menggunakan kemampuannya yaitu kekuatan akal pikiran.

5 Dalam filsafat ketuhanan, maha gaib disebut dengan kekuatan supranatural yang keberadaannya tidak dapat dilogikakan, namun dapat dirasakan secara batiniyah. Rasionalitas manusia sehebat apapun tidak dapat menjelaskan tentang Tuhan, kecuali ayat dan sifat-sifatnya. Karena batas rasionalitas manusia dicipta dengan garis batas dan berujung. Begitu juga dengan kebudayaan, keilmuan dan logika, seperti hal yang abstrak untuk dipahami, meminjam istilahnya Socraters disebut dengan *the power of supranatural* oleh manusia. Lihat dalam tulisan Mohammad Muslih, "Integrasi Keilmuan: Isu Mutakhir Filsafat Ilmu", *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. 4(2) 2016. 255.

Negara Barat mampu mengubah wajah seluruh dunia dan membedakan dari dunia zaman sebelumnya. Jalan-jalan raya, alat pengangkutan samudra, pesawat udara atau ruang angkasa serta radio juga televisi hampir telah membuat seluruh dunia ini tidak ada jaraknya, satu perubahan cepat yang tidak pernah dialami orang dalam jangka ribuan tahun sebelumnya. Dengan demikian jelaslah bahwa rasionalis ini dapat mendorong manusia untuk menguasai alam semesta berdasarkan akal pikiran. Hal ini telah membawa dampak kemajuan yang sangat pesat terhadap industri pelayaran armada dagang dan tentu juga pada armada perang negeri-negeri Eropa umumnya. Artinya bahwa kehidupan yang rasionalistis dalam perkembangannya telah mendorong untuk hidup secara materialistis.

B. Perempuan dan Materialistis

Dengan ditemukannya tenaga mesin yang menggantikan tenaga manusia, maka terjadilah revolusi besar dalam kehidupan umat manusia di atas bumi ini. Dalam pelaksanaannya manusia tidak mengalami kesulitan untuk melakukan pekerjaannya karena semua sudah digerakkan oleh mesin sehingga manusia tinggal mengamati saja. Dengan ini manusia seakan-akan mengalami hidup baru. Negara-negara Eropa hidup dalam kesejahteraan rakyat, hal ini bisa dikatakan nasib baik telah diraih bangsa Eropa. Sementara bangsa-bangsa Timur masih harus bekerja dengan menggunakan tenaga manusia.[6]

Negara-negara Eropa yang semula merupakan negara pertanian, maka setelah ditemukannya berbagai mesin tersebut, berubahlah

6 Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi hadir dari Negara-negara Eropa bagian Barat, mereka menjadi rujukan dari semua Negara dalam hal penemuan dan pembuatan robot serta tenaga mesin. Saat di daratan Eropa telah mampu membuat mesin, Negara Timur masih menggunakan manusia sebagai tenaga untuk bekerja. Perbedaan mencolok ini disebabkan oleh beberapa hal; 1) basis pengetahuan Eropa lebih terbuka dan global, sedangkan wilayah Timur tertutup atau mengekang di beberapa aspek; 2) teknologi menjadi tujuan utama dalam merumuskan ilmu pengetahuan, karena karakter masyarakatnya menyenangi ekspektasi dan hipotesis. Periksa dalam Hendra Suwardana, "Revolusi Industri 4.) Berbasis Revolusi Mental", *Jurnal Ilmiah Teknik dan Manajemen Industri*, 1(2) 2018, 13.19.

menjadi negara industri yaitu diiringi dengan pendirian pabrik-pabrik baru. Barang-barang yang diproduksi oleh pabrik dijual ke Luar Negeri, sementara industri dalam Negeri membutuhkan bahan-bahan mentah sekaligus pembeli barang-barang pabrik. Berdasar itulah negara-negara industri berlomba-lomba menguasai sebanyak-banyaknya daerah-daerah yang terdapat bahan-bahan mentah serta yang dapat pula membeli barang-barang dari hasil pabriknya. Artinya mereka berebut untuk mendapatkan pasaran dunia dari hasil perindustriannya. Inilah titik tolak adanya kebebasan berdagang dan berusaha yang cenderung kepada kehidupan materialisme. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kehidupan materialistis telah menimbulkan paham yang mengajarkan bahwa benda dan kesenangan duniawi adalah tujuan hidup manusia.[7]

Selanjutnya dengan berdasarkan pandangan hidup seperti tersebut di atas, seakan-akan segala tindakan manusia tidak ada batasnya. Maka menjadi terbukalah jalan untuk mengadakan penjajahan terhadap masyarakat dan bangsa lain guna mendapatkan kekuasaan dan mengeruk kekayaan yang sebesar-besarnya. Terdorong dari kekuatan, kecepatan, kelajuan dan kemajuan produksi yang dimotivasi oleh harapan untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah-ruah di satu pihak dan standar kehidupan yang rendah dari bangsa lainnya membuat masyarakat tidak mampu untuk membeli produk-produk dan mengkonsumsikannya. Semua ini membuat produsen-produsen besar sangat membutuhkan pasar-pasar yang baru untuk menjual

7 Penelitian banu Prasetyo (2018) menyimpulkan bahwa perubahan teknologi dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin disebabkan oleh keterbukaan pikiran keilmuan, peradaban dan kebudayaan dari suatu Negara tersebut. Keterbukaan wacana, adalah kunci untuk mengembangkan teknologi secepat mungkin. Kemudian, perkembangan teknologi juga tidak dapat dipungkiri memiliki ketergantungan kepada perubahan dan cita-cita sosialnya. Perubahan industri tidak dapat terjadi, jika konsensus sosialnya tidak mendukung. Maka dari itu, menurut penelitian Prasetyo antara perubahan teknologi dengan perubahan sosial tidak dapat dipisahkan. Ilmu-ilmu eksakta berperan terhadap pengembangan teknologi dengan mengambil sampel empiris di masyarakat, kamajuan teknologi dan perubahan sosial merupakan anak kandung dari segala ilmu pengetahuan dan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan kemanusiaan. Banu Prasetyo; Umi Triyanti, "Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial", *Prosiding SEMATEKSOS*, 2018, 22-25.

produksi surplusnya. Mendapatkan pasar-pasar itu berarti memikirkan untuk merebut tanah-tanah baru baik dengan secara halus atau dengan bentuk kekerasan maka lahirlah kolonialis.[8]

Begitulah paham kebendaan yang semua berupa gagasan atau pandangan, telah terwujudkan menjadi suatu kebebasan dalam memproduksi yang berakhir menjadi suatu penguasaan dalam produksinya dengan jalan merebut daerah-daerah baru agar dapat mengkonsumsikan barang produknya dengan lancar.

C. Modal Budaya

Dalam rangka pembangunan nasional, bangsa Indonesia telah mempunyai modal dasar yang cukup lengkap dan tangguh. Salah satu diantaranya adalah modal budaya yakni budaya bangsa Indonesia yang telah berkembang sepanjang sejarah bangsa. Dengan modal ini seharusnya bangsa Indonesia akan mampu menghadapi tantangan bahkan dapat memberikan jawaban yang tepat. Kenyataan menunjukkan bahwa nilai budaya bangsa agaknya berada dalam kedudukan yang rawan dan perlu mendapat perhatian kita. Nilai-nilai yang berlaku di dalam tata kehidupan keluarga dan masyarakat pada umumnya telah mendapat gempuran berat dari berbagai penjuru.[9] Berbagai norma yang berlaku di dalam keluarga dan masyarakat mengalami kepudaran dan bila tidak mendapat perhatian dikhawatirkan akan runtuh dalam beberapa generasi mendatang.

8 Menurut paparan Larry Summers (2016), factor yang melatarbelakangi kegagalan politik ekonomi global terhadap eksploitasi negara kolonialis adalah 1) kemampuan sumber daya manusia yang terbatas, manusianya tidak mampu berinovasi dan kompetitif secara global; 2) kepedulian Negara terhadap produksi aset; 3) kepentingan politik ekonomi nasional yang dipaksa harus melakukan hubungan kebijakan. Lihat dalam Larry Summers, *the Age of Secular Stagnation: What it Is and What to Do About it*, dalam artikel Refli Zulfikar, "Tantangan Turbulensi Ekonomi Global terhadap Ekonomi Politik Internasional Indonesia", *JIEP*, 17(2) 2017, 90-92.

9 Nyoman Ratna Kutha, *Sastra dan Cultural Studies: Representasi Fiksi dan Fakta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005; bisa juga diperiksa dalam Abd Mu'id Aris Shofa, "Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia dalam Bingkai Pancasila", *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1) 2016, 34-38.

Perhatikan adat sopan santun yang berlaku dalam keluarga, hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara anak dengan anak, hubungan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain hubungan antara pimpinan dengan anggota, hubungan antara anggota dengan anggota dalam suatu organisasi. Nilai-nilai yang semula dianggap sakral telah kehilangan maknanya, karena tidak lagi mendapat dukungan dan pengakuan serta tidak lagi ditaati sebagaimana mestinya.

Timbul pertanyaan di dalam diri kita sendiri mengapa demikian, apa sebabnya. Apakah memang sudah zamannya, yaitu zaman tidak dipatuhinya norma-norma yang secara tradisional berlaku dalam keluarga dan masyarakat. Apakah struktur keluarga dan masyarakat telah mengalami pergeseran? Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Kita dapat mengemukakan berbagai penjelasan mengenai hal tersebut misalnya disebabkan oleh pengaruh luar yang cukup kuat, pergaulan yang kompleks, tidak dilaksanakan norma itu oleh anggota keluarga dan masyarakat telah mendapat nilai baru yang dianggapnya lebih sesuai tradisi yang berlaku sudah dianggap ketinggalan zaman atau generasi sekarang sudah tidak banyak yang memahami ajaran atau norma tradisional itu.

Bab VI

Dinamika Gerakan Perempuan Berbias Gender di Indonesia

A. Kongres Perempuan Indonesia

Sesudah berlangsungnya Kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 kemudian 7 organisasi perintis pergerakan perempuan Indonesia menginisiatifkan diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia. Kongres tersebut pertama kali dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928. Kongres ini merupakan lembaran sejarah baru bagi pergerakan perempuan Indonesia karena organisasi perempuan mewujudkan kerja sama untuk kemajuan perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ciri utama kesatuan pergerakan perempuan Indonesia dalam masa ini ialah berasaskan kebangsaan dan menjadi bagian dari pergerakan kebangsaan Indonesia.[1]

1 Dalam sejarah, organisasi perempuan pertama di Indonesia adalah bernama Poetri Mardika yang dibentuk atas bantuan Boedi Oetomo. Kelahiran organisasi perempuan pertama ini tidak dapat dijelaskan dari gerakan nasional bahkan internasional yang memperjuangkan perihal emansipasi, kebebasan dari penjajahan dan nasionalisme. Baru setelah itu kemudian, muncul organisasi-organisasi perempuan lainnya yang merupakan gerakan organisasi nasional seperti Jong Java Meiskering, Wanita Oetomo, Aisyiah, Wanito Muljo, Jong Islamieten Bond dan sebagainya. Pada masa penjajahan, perempuan dan gerakan perempuan bersama-sama dengan gerakan nasional memperjuangkan hak-hak rakyat dan perempuan agar sejajar dan dihormati. Sukanti Suyochondro, *"Perkembangan Gerakan Wanita di Indonesia"*, Jakarta: Gramedia, 2000, 27.

Kesatuan pergerakan perempuan Indonesia tidak bersifat feministis dalam arti konfrontatif terhadap kaum pria, tetapi pergerakan perempuan mengutamakan kerja sama karena menyadari bahwa untuk menghadapi penjajah dan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia diperlukan persatuan. Kongres Perempuan Indonesia tidak menjalankan politik aktif sebagai suatu partai, namun setiap kegiatan senantiasa sejalan dengan pergerakan kebangsaan Indonesia. Hal ini nampak antara lain ketika Kongres Perempuan Indonesia mendukung aksi GAPI (Gabungan Politik Indonesia) menuntut "Indonesia Berparlemen" dan penolakan GAPI terhadap "ordonansi wajib militer terbatas".[2]

Kesatuan pergerakan perempuan dalam masa penjajahan banyak mengalami rintangan karena berada dalam situasi masyarakat yang dualistik. Di satu pihak penjajah berusaha menekan rasa kebangsaan dan di lain pihak pergerakan Indonesia membangkitkan dan memupuk rasa kebangsaan. Dengan demikian perjuangan pergerakan perempuan Indonesia pada masa itu meliputi 2 (dua) hal:

1. Berjuang bersama-sama kaum pria menuju cita-cita kemerdekaan.
2. Meningkatkan kedudukan perempuan dalam bidang-bidang pendidikan, sosial dan kebudayaan.[3]

Pada masa tentara Jepang semua organisasi pergerakan dibubarkan. Kemudian oleh Jepang dibentuk organisasi-organisasi yang menjalankan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan Jepang, antara lain di kalangan perempuan dibentuk Fujinkai. Pemimpin-pemimpin pergerakan perempuan masa itu berjuang sejalan

2 Selain GAPI, kongres perempuan pertama yang berlangsung mulai tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta juga memunculkan nama baru sebagai gabungan dari organisasi-organisasi perempuan yang diberi nama Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPII). Agenda pertama PPII adalah memberikan pendidikan kepada perempuan, yatim piatu, janda dan anak-anak. Lihat dalam Muhadjid Darwin, "Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa ke Masa", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(3) 2004, 283-294.

3 Kedua cita-cita ini dirumuskan secara politis di Mataram dan Yogyakarta pada kongres perempuan pertama. Kongres tersebut digagas oleh tiga orang perempuan yaitu Soejatin, Nyi Hadjar Dewantoro dan R.A. Soekonto. Lihat pada Susan Blackburn, *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, 12-16.

dengan pemimpin-pemimpin Nasional Sukarno-Hatta dan Pergerakan Nasional yang bekerja sama dengan tentara pendudukan Jepang yang bermaksud mempergunakan kesempatan itu untuk mempercepat persiapan kemerdekaan. Hal ini didasarkan atas semboyan Jepang "Asia untuk bangsa Asia, Burma untuk bangsa Burma, dan Indonesia untuk bangsa Indonesia".[4]

Dengan demikian pergerakan perempuan Indonesia selalu bahu membahu dengan kaum pria, sambil memanfaatkan semua sarana dan kesempatan yang ada untuk meningkatkan kecakapan dan keterampilan dalam bidang kemiliteran dan kemasyarakatan. Pergerakan perempuan Indonesia dalam masa penjajahan dapat dibagi dalam 2 periode yaitu, masa pemerintahan Hindia Belanda dan masa pendudukan Tentara Jepang.

Dalam masa pemerintahan Hindia Belanda, kaum perempuan Indonesia mengusahakan persatuan dan kerja sama antara organisasi perempuan untuk mencapai cita-citanya. Dijiwai oleh Sumpah Pemuda tahun 1928 dan atas inisiatif tujuh organisasi perempuan Indonesia pada tanggal 22 Desember 1928, diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta, Salah satu keputusannya ialah mendirikan badan federasi dengan nama "Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia" (PPPI) yang kemudian namanya berubah menjadi "Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia" (PPII).[5]

4 Namun organisasi perempuan bukan kerupuk bawang yang mudah lapuk, mereka bergabung sebagai perserikatan perempuan Indonesia dengan semangat totalitas memperjuangkan hak-hak dan kemerdekaan Indonesia. Para perempuan saat itu, benar-benar melawan dan tidak gentar terhadap colonial Jepang, sehingga banyak perempuan yang berani memberontak dan gugur sebagai pahlawan. Lihat perjuangan perempuan dalam Farida Nurland, "Strategies for Improving Women's Participation in Politics and Sosial Life", dalam A.W. Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Kompas, 2005, 78-88.

5 Bambang Suwondo dkk., *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978, 71. Bisa juga dilihat dalam Marwati Djoenet P; Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009, 425.

Antara Kongres Perempuan Indonesia I Tahun 1928 dan Kongres Perempuan Indonesia II tahun 1935 selalu mendapat perhatian pada setiap Kongres ialah:

1. Kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan (Islam).
2. Perlindungan perempuan dan anak-anak dalam perkawinan.
3. Mencegah perkawinan anak-anak.
4. Pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Khususnya bagi anak-anak gadis didirikan Yayasan "Seri Derma" untuk membantu anak-anak gadis yang tidak mampu membayar biaya sekolahnya.[6]

Hal yang terpenting dalam perkembangan PPPI/PPII ialah keputusan bahwa kesatuan pergerakan perempuan Indonesia berasaskan kebangsaan dan menyatakan diri sebagai bagian dari pergerakan kebangsaan Indonesia. Kemudian ternyata ada organisasi perempuan baru yang belum menggabungkan diri dalam PPII. Oleh karena itu timbul inisiatif untuk kembali mengadakan Kongres Perempuan Indonesia seperti Kongres tahun 1928, untuk menampung dan menyatukan tenaga dan pikiran kaum perempuan Indonesia.

Kongres Perempuan Indonesia II yang diadakan di Jakarta bulan Juli tahun 1935 lebih menekankan pada persatuan dan kesatuan pergerakan perempuan Indonesia. Pada Kongres ini dibentuk badan "Kongres Perempuan Indonesia" (KPI). Karena sudah terbentuk badan tersebut, PII kemudian dibubarkan pada bulan September 1935. Dalam Kongres Perempuan Indonesia ke II soal buruh perempuan mendapat perhatian dari Kongres tersebut, antara lain karena kejadian di perusahaan batik di Lasem karena buruh perempuan diperlakukan tidak wajar.

Kongres Perempuan Indonesia memegang teguh cita-cita kesatuan dan persatuan antara lain terlihat ketika pemerintah Hindia Belanda menawarkan rancangan ordonansi perkawinan

6 Lihat dalam bab lampiran Rachel Rinaldo, Ironic Legacy: the New Order and Indonesian Women's Groups. *Journal Outskirts,* 10(2) 2002, 20-39.

tercatat tahun 1937. Menurut rancangan ordonansi tersebut, bagi mereka yang mencatatkan perkawinan mereka secara sukarela, setelah dilangsungkan perkawinan, berlaku asas monogami. Meskipun sebagian besar organisasi perempuan yang tergabung dalam Kongres Perempuan Indonesia dapat menerima rancangan ordonansi tersebut, namun karena ada sebagian yang tidak menerimanya dan karena ditolak juga oleh golongan Islam, maka Kongres tidak mengeluarkan pendapatnya, demi persatuan dan kesatuan dalam pergerakan perempuan Indonesia. Dalam kenyataannya pemerintah Hindia Belanda menarik kembali rancangan ordonansi tersebut.[7]

Pada tahun 1937 atas usaha beberapa perkumpulan perempuan didirikan ”Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-anak Indonesia” (KPKPAI). Komite tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak dalam perkawinan, merencanakan suatu peraturan perkawinan dan mendirikan Biro Konsultasi. KPKPAI yang semula berdiri sendiri, pada Kongres Perempuan Indonesia ke III di Bandung bulan Juli 1938, dijadikan suatu badan dan Kongres dengan nama ”Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan” (BPPIP).

Kaum perempuan Indonesia juga ikut serta dalam Perkumpulan Pemberantas Perdagangan Perempuan dan anak-anak (P4A). Kongres P4A yang diadakan dalam bulan April 1940, mengusulkan supaya wanita Indonesia juga menjadi anggota polisi kesusilaan. Untuk memajukan kaum perempuan Indonesia, didirikan ”Badan Pemberantasan Buta Huruf” (BPBH) di kalangan perempuan

7 Ordonansi perempuan pada kongres ke II mengalami banyak kepentingan politik oleh Jepang dan sekutunya, pasalnya, kekuatan perserikatan perempuan benar-benar tidak dapat dibendung untuk mengabulkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Hal ini memang telah diprediksi oleh Jepang, karena mulai dijajah, perempuan jarang sekali diberikan kesempatan mengenyam pendidikan yang sama dengan laki-laki, perempuan lebih banyak ditempatkan sebagai pembatu dan istri-istri para menteri. Sehingga mereka merasa terzalimi dalam waktu yang panjang. Dengan didukung oleh organisasi nasionalis lainnya, organisasi perempuan mampu mencetak perempuan seperti R.A. Kartini, Cut Nyak Dien dan lain sebagainya. Lihat ANRI, *Laporan-Laporan tentang Gerakan Protes di Jawa pada Abad XX*. Jakarta: Arsip Nasional RI, 1981, tth.

dewasa untuk mendidik perempuan Indonesia menjadi Ibu Bangsa. Dengan demikian diharapkan akan tumbuh generasi baru yang lebih sadar akan kebangsaannya.[8]

Sebagai hasil dari pembicaraan dalam Kongres Perempuan Indonesia ke III tahun 1938 yang tidak menjadi keputusan Kongres, Pemerintah Hindia Belanda telah memberikan ”hak untuk dipilih” kepada kaum perempuan. Sehubungan dengan itu telah dipilih 4 orang perempuan sebagai anggota Dewan Kota, antara lain:

1. Ny. Emma Puradiredja di Bandung
2. Nn. Sri Oemiyati di Cirebon.
3. Ny. Sunaryo Mangunpuspito di Semarang.
4. Ny. Siti Sundari Sudirman di Surabaya.[9]

Ketika Komisi Visman dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda pada permulaan tahun 1941 untuk menyelidiki keinginan-keinginan Bangsa Indonesia akan perubahan tata negara, maka telah diminta pendapat 2 orang perempuan Indonesia, yaitu: Ny. Sunarjo Mangunpuspito yang mengajukan tuntutan “Indonesia Berparlemen” dan Ny. Sri Mangunsarkoro menuntut “Indonesia Merdeka”.[10]

Kongres Perempuan Indonesia ke IV di Semarang bulan Juli 1941, mengusulkan kepada anggota-anggota bangsa Indonesia dalam Dewan Rakyat *(Volksraad),* supaya bahasa Indonesia dimasukkan sebagai mata pelajaran tetap pada semua sekolah Menengah. Tuntutan “Indonesia Berparlemen” merupakan salah satu putusan Kongres. Di samping itu Kongres menuntut supaya perempuan Indonesia diberi hak untuk memilih *(actief kiesrecht).*

8 J. Burhanuddin; O. Fathurahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, 14-17. Lihat juga pada asumsi yang lain bahwa gerakan perempuan dalam bidang pendidikan adalah sekolah perempuan yang didirikan oleh R.A Kartini yang kemudian membentuk komunitas lisan intelektual yang diberi nama Gerakan Pemberantasan Buta Huruf. Lihat H. Ida, “Feminisme Indonesia dalam Lintasan Sejarah”. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial,* 8(2) 2018, 29.

9 A.B. Lapian, *Indonesia dalam Arus Sejarah: Masa Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011, 109.

10 C. Stuers (pen.) *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*. Depok: Komuntas Bambu, 2008, 5-6.

Kongres juga mendukung penolakan GAPI terhadap "rancangan ordonansi wajib militer terbatas" yang ditawarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Alasan penolakan tersebut ialah karena Perang Dunia II sudah diambang pintu dan jika wajib militer diadakan, maka berarti putra-putra Indonesia yang baru atau sedang dilatih sudah harus berhadapan dengan tentara Jepang yang jauh lebih tangguh.[11]

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa kegiatan pergerakan perempuan Indonesia di masa pemerintahan Hindia Belanda meliputi bidang-bidang: pendidikan, sosial, budaya, hukum dan politik. Kerja sama bahu membahu dengan kaum pria dan meningkatnya ruang lingkup perjuangan pergerakan perempuan lebih tampak lagi dalam perkembangan kongres-kongres yang berikut.

B. Kongres Perempuan di Yogyakarta

1. Kongres Perempuan Indonesia ke I

Kongres ini diadakan di Pendopo Joyodipuran, Yogyakarta, pada tanggal 22-25 Desember 1928 dipimpin oleh Ny. R A. Sukonto atas inisiatif 7 organisasi perintis pergerakan wanita Indonesia; Wanito Utomo, Wanita Taman Siswa, Indonesia, Aisyiyah, Jong Islamieten Bond Bagian Wanita, Wanita Katolik, Jong Java Bagian Wanita dan diprakarsai oleh Ny. Sukonto (Wanito Utomo), Nyi Hadjar Dewantara (Wanita Taman Siswa) dan Nn. Sujatin (Putri Indonesia). Kongres tersebut dihadiri oleh 30 Organisasi wanita.[12] Berikut naskah keputusan kongres tersebut.

11 Sebagaimana dikutipkan oleh Budi Sujati (2020) yang mengatakan bahwa dulu pernah dibentuk polisi moral, yang terdiri dari polisi perempuan untuk menangkis ketidakadilan terhadap hak perempuan, anak-anak dan rakyat miskin. Namun kemudian, pada masa colonial Jepang, perempuan yang tergabung ke dalam serikat organisasi perempuan sedikit demi sedikit untuk melemahkan kekuatan organisasi perempuan dijanjikan posisi polisi perempuan yang dilatih seperti latihan militer. Lihat lebih lengkap dalam Budi Sujati; Ilfa Harfiatul Haq, "Gerakan Perempuan di Jawa (1912-1941)", *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, 2(1) 2020, 16-20.

12 Tyas Retno Wulan, "Pemetaan Gerakan Perempuan di Indonesia dan Implikasinya terhadap Penguatan Publik Sphere di Pedesaan", *Jurnal Studi Gender*, 3(1) 2008, 120-139.

a. Maksud dan Tujuan:
   1) Supaya menjadi pertalian antara perkumpulan-perkumpulan Wanita Indonesia.
   2) Supaya dapat bersama-sama membicarakan soal-soal kewajiban, keperluan dan kemajuan wanita.

b. Keputusan-keputusan Kongres:
   1) Mengirimkan mosi kepada Pemerintah Kolonial untuk menambah Sekolah bagi anak perempuan.
   2) pemerintah wajib memberikan sirat keterangan pada waktu nikah (undang-undang perkawinan)
   3) Memberikan beasiswa bagi siswa perempuan yang memiliki kemampuan belajar tetapi tidak memiliki biasa pendidikan, Lembaga itu disebut *studies fonds*
   4) Mendirikan suatu lembaga dan mendirikan kursus pemberantasan buta huruf, kursus kesehatan serta mengaktifkan usaha pemberantasan perkawinan kanak-kanak.

c. Susunan pengurus Kongres Perempuan Indonesia ke I, sebagai berikut:

Ketua	:	Ny. R.A. Sukonto (Wanito Utomo)
Wakil Ketua	:	Nn. St. Mundjiah (Aisyiyah)
Penulis I	:	Nn. St. Sukaptinah (Ny. Suaryo Mangunpuspito) (JIBD)
Penulis II	:	Nn. Sunarjati (Ny. Sukemi) (Putri Indonesia)
Bendahari I	:	Ny. Hardjodiningrat (Wanita Katolik)
Bendahari II	:	Nn. R.A. Sujatin (Ny. Kartowijono) (Putri Indonesia)
Anggota	:	Nyi Hadjar Dewantara (Wanita Taman Siswa)
Anggota	:	Ny. Drijowongso (Wanita PSII)
Anggota	:	Ny. Muridan Noto (Wanita PSII)
Anggota	:	Ny. Umi Salamah (Wanita PSII)
Anggota	:	Ny. Djohanah (Aisyiyah)
Anggota	:	Nn. Badiah Murjati (Jong Java Dames Afdeeling)

Anggota : Nn. Hajinah (Ny. Mawardi) (Aisyiyah)
Anggota : Nn. Ismudijati (Ny. A. Saleh) (Wanito Utomo)
Anggota : Ny. R.A. Mursandi (Wanito Katolik)

d. Hal-hal lain:
   1) Hadir dalam Kongres Perempuan Indonesia ke I wakil-wakil dari 30 organisasi wanita:
      1. Putri Budi Sejati, Surabaya
      2. Putri Indonesia, Surabaya
      3. Wanita Katolik, Solo
      4. Rukun Wanodiyo, Jakarta
      5. Wanita Sejati, Bandung
      6. Putri Indonesia, Mataram
      7. Darmo Laksmi, Salatiga
      8. Budi Rini, Malang
      9. Margining Kautaman, Kemayoran (Jakarta)
      10. Karti Woro, Solo
      11. Budi Wanito, Solo
      12. Wanita Katolik, Mataram (Yogyakarta)
      13. Jong Java, Mataram
      14. Jong Java, Salatiga
      15. Jong Islamieten Bond, Jakarta
      16. Wanito Kencono, Banjarnegara
      17. Sarekat Istri Buruh Indonesia, Surabaya
      18. Hoofdbestuur Aisyiyah
      19. Sancoyo Rini, Solo
      20. Aisyiyah, Solo
      21. Wanita Utama, Mataram
      22. Wanita Mulyo, Mataram
      23. Wanita Taman Siswa, Mataram
      24. Panti-Krido-Wanito, Pekalongan
      25. Jong Islamieten Bond, Mataram
      26. Jong Java, Jakarta

27. Jong Islamieten Bond, Tegal
28. Natdatul Fataat, Kudus
29. Istri Sumatera.

2) PPPI yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1928 mempunyai usaha-usaha antara lain:
   a) Mengadakan Kongres pada setiap tahun untuk memperbincangkan kedudukan wanita Indonesia.
   b) Menerbitkan surat kabar yang merupakan sarana untuk memperbincangkan soal-soal wanita.
   c) Menjadi hakim pemisah untuk mendamaikan anggota-anggota yang berselisih.
   d) Tempat kedudukan pengurus PPPI ditetapkan menurut jumlah banyaknya anggota untuk pertama kalinya Mataram (Yogyakarta) menjadi tempat kedudukan pengurus.
   e) Susunan pengurus PPPI tahun 1928 sampai dengan Kongres PPPI tahun 1929 ialah:
      Ketua : Ny. R.A. Sukonto
      Wakil Ketua : Nn. R.A. Sujatin (Ny. Kartowijono)
      Penulis I : Nn. St. Sukaptinah (Ny. Mangunpuspito)
      Penulis II : Nn. Mugarumah
      Bendahari : Ny. R.A. Hardjodiningrat
      Komisaris : Nyi Hadjar Dewantara
      Komisaris : Nn. St. Mundjijah.
   f) Keanggotaan belum sepenuhnya diatur sehingga ada kemungkinan beberapa cabang dari satu organisasi menjadi anggota PPPI, antara lain:
      1. Wanita Katolik, Mataram
      2. Taman Siswa, Mataram
      3. Aisyiyah, Mataram
      4. Jong Islamieten Bond Bagian Wanita, Mataram
      5. Putri Indonesia (Pemuda Indonesia Bagian Wanita), Mataram.

6. Jong Islamieten Bond Bagian Wanita, Jakarta
7. Jong Islamieten Bond Bagian Wanita, Tegal
8. Wanita Katolik, Solo
9. Karto Woro, Solo
10. Aisyiyah, Solo
11. Panti Krido Wanito, Pekalongan
12. Budi Wanito, Solo
13. Kesumo Rini, Kudus
14. Darmo Laksmi, Salatiga
15. Putri Indonesia, Surabaya
16. Wanita Sejati, Bandung
17. Margining Kautaman, Kemayoran
18. Putri Budi Sejati, Surabaya[13]

2. Kongres Perempuan Indonesia ke-II

Kongres ini diadakan di Jakarta pada tanggal 20-24 Juli 1935 dengan pimpinan Ny. Sri Mangunsarkoro dengan dibantu oleh Ny. Sh. Suparto dan dihadiri oleh perwakilan dari organisasi-organisasi wanita.

a. Maksud dan Dasar:

Maksud Kongres Perempuan Indonesia ke II adalah merapatkan persaudaraan antara organisasi perempuan Indonesia untuk memperbaiki nasib kaum perempuan. Indonesia dan rakyat Indonesia umumnya. Sedangkan dasar Kongres Perempuan Indonesia ke-II adalah kenasionalan, kesosialan, kenetralan, dan keperempuanan.

b. Keputusan-keputusan
   1) Mengenai Organisasi
      a) Dibentuk badan perikatan dengan nama **"**Kongres Perempuan Indonesia".

13 Disalin total dari bagian lampiran buku Siti Hasanah Syaiful Mufty, *Kongres Wanita Indonesia dalam Pergerakan dan Perjuangan Wanita Indonesia selama 70 Tahun*. Jakarta: C.V. Agung Lestari, 1999, tth.

b) Tiap-tiap Tiga tahun sekali diadakan Kongres Perempuan Indonesia.
c) Kongres yang akan datang diadakan di Bandung. Susunan badan persiapan kongres itu diserahkan kepada Ny. Emma Puradiredja.
d) Dasar-dasar dan rancangan organisasi Kongres Perempuan Indonesia ke-II dengan beberapa perubahan diterima baik dan akan dipakai sebagai pangkal pekerjaan kongres untuk seterusnya.
e) Kekurangan ongkos untuk *congresnummer* harus dipikul oleh segenap anggota Kongres.
f) Perkumpulan-perkumpulan yang mencarikan uang untuk kongres harus diberi *congresnummer* dengan cuma-cuma.
g) Kongres mendirikan suatu komisi yang diberi hak untuk memberikan keterangan resmi tentang segala hal yang mengenai Kongres. Komisi ini antara lain terdiri dari:
    - Ny. Sri Mangunsarkoro
    - Ny. Sh. Suparto
    - Ny. Suhara
    - Ny. Mr. Maria Ulfah Santoso.
h) Tiap-tiap Kongres dipimpin oleh Pengurus Kongres yang baru.

2) Usaha perbaikan nasib perempuan Indonesia
Kongres mengadakan suatu "Badan Penyelidikan Perburuhan Perempuan Indonesia" (BPPPI) yang berkewajiban menyelidiki keadaan buruh wanita di seluruh Indonesia. Susunan badan itu diserahkan kepada Ny. Sri Mangunsarkoro.
a) Badan tersebut agar dalam penyelidikannya menyebarkan angket masal yang terutama menyelidiki keadaan buruh yang gajinya kurang

b) Biaya untuk Badan Penyelidikan tersebut berasal dari iuran anggota Kongres yang ditetapkan berdasar banyaknya hak suara.

c) Kongres menganjurkan kepada anggota-anggotanya supaya menyelidiki "Kedudukan Wanita dalam Hukum Islam" dan menyokong "Badan Penyelidikan Talak dan Nikah" yang sudah diadakan oleh Pasundan Istri di Bandung.

d) Kongres menerima mosi yang mewajibkan semua anggota Kongres untuk memberikan bantuan yang semestinya kepada orang yang mengalami ketidakadilan dalam perkawinan sehubungan dengan penerapan hukum Islam yang salah.

3) Dalam usaha meningkatkan Pergerakan Wanita Indonesia, Kongres menetapkan:

a) Bahwa kewajiban utama wanita Indonesia ialah menjadi "Ibu Bangsa" yang berarti berusaha menumbuhkan generasi baru yang lebih sadar akan kebangsaannya.

b) Agar anggota kongres mengadakan hubungan yang baik dengan generasi muda, sehingga tercipta saling pengertian dalam rangka keseimbangan antar generasi, oleh karena itu perlu sikap saling menghargai dan tidak menonjolkan diri.

4) Usaha Pemberantasan Buta Huruf

a) Tiap-tiap anggota Kongres diwajibkan mengadakan usaha pemberantasan buta huruf. Untuk kelancaran usaha tersebut Kongres membentuk "Biro Pendaftaran" yang bertugas menetapkan target yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. Diharapkan pada Kongres yang akan datang yaitu 3 tahun lagi telah berhasil membebaskan 5000 wanita dewasa dari buta huruf.

Badan tersebut terdiri dari:

- Ny. S. Sumadi (Ny. S. Aruji Kartawinata)
- Ny. Husni Thamrin
- Ny. Sh. Suparto

b) Biaya Biro Pendaftaran dibebankan kepada iuran anggota-anggota Kongres.

c) Badan tersebut ditugaskan untuk menyusun peraturan pelaksanaan pemberantasan buta huruf.

5) Saran-saran kepada Kongres:

a) Karena Kongres belum dapat mengusahakan surat kabar untuk wanita, maka dianjurkan supaya anggota mengirimkan pandangannya mengenai berbagai soal kepada surat-surat kabar lain.

b) Supaya hanya ada 3 hal yang dibahas pada Kongres yang akan datang.

c) Supaya memperhatikan kesehatan wanita Indonesia.

d) Supaya orang yang hidupnya berkecukupan melaksanakan hidup sederhana, sehingga kelebihan uang dapat dipergunakan untuk keperluan kebangsaan.

c. Hal-hal lain:

Organisasi dan Badan/Lembaga yang menjadi anggota Kongres Perempuan Indonesia ke-II, antara lain:

1) Kaum Ibu Tuban, Tuban
2) Mardi Putri, Pemalang
3) Pasundan Istri, Bandung
4) Sarikat Rukun Istri, Makasar
5) Perkumpulan Rukun Istri, Tangerang
6) PARMI (Partai Muslimin Indonesia) Bagian Istri, Padang
7) Persatuan Istri Andalas, Bandung
8) Istri Sedar, Mataram
9) Wanita Taman Siswa, Bandung
10) Persaudaraan Istri, Bandung

11) Kemajuan Istri, Jakarta
12) Istri Indonesia, Jakarta
13) Wanito Utomo, Mataram
14) Putri Budi Sejati, Surabaya
15) Sancoyo Rini, Solo
16) Persatuan Istri Indonesia, Surabaya
71) Aisyiyah, Mataram
18) Darmo Laksmi, Salatiga
19) Kautamaan Istri, Medan
20) Wanito Iencono, Banjarmasin
21) Seri Derma, Solo
22) Partai Sarekat Islam Indonesia Bagian Istri, Garut
23) Wanito Sejati, Bandung
24) PIKAT (Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya), Manado

Jumlah ini ditambah lagi dengan komite gabungan guru-guru sekolah Islam Perempuan dan Sekolah Diniyah Padang Panjang.

d. Peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan penting sesudah Kongres Perempuan Indonesia ke-II tahun 1935

1) Konferensi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PM)

Pada tanggal 14-15 September 1935 di Mataram (Yogyakarta) diadakan konferensi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII). Dalam Konferensi ini telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

a) Mengingat telah terbentuknya badan Kongres Perempuan Indonesia yang maksudnya sama dengan PPII bahkan lebih luas daerah pekerjaannya, diputuskan membubarkan PPII.
b) Semua harta benda PPII diserahkan kepada badan Kongres Perempuan Indonesia tersebut.
c) Keuangan "Seri Derma" sebesar F 1751,28 yang dulu disediakan untuk beasiswa gadis-gadis Indonesia,

diserahkan kepada badan "Kongres Perempuan Indonesia" untuk biaya pemberantasan Buta Huruf di kalangan kaum ibu Indonesia.

2) "Istri Sedar" yang didirikan tahun 1930 dan diketuai oleh Ny. Suwarni Pringgodigdo, pada mulanya mengikuti Kongres Perempuan Indonesia ke II tahun 1935. Tetapi kemudian Istri Sedar keluar dari Kongres karena perselisihan faham dengan wakil dari PERMI bagian Istri (Persatuan Muslimin Indonesia) dari Sumatra Barat mengenai kedudukan wanita dalam "Hukum Perkawinan Islam". Istri Sedar tidak lagi masuk Kongres Perempuan Indonesia oleh karena Istri Sedar lebih menekankan kepada persamaan hak dan kedudukan pria dan wanita untuk mempercepat memperoleh kemerdekaan.
3) Kongres Perempuan Indonesia memegang teguh cita-cita kesatuan dan persatuan antara lain terlihat ketika pemerintah Hindia Belanda menawarkan rancangan ordonansi perkawinan tercatat Tahun 1937, di mana Kongres tidak mengeluarkan pendapatnya. Menurut rancangan ordonansi tersebut, bagi mereka yang mencatatkan perkawinan mereka secara sukarela, setelah dilangsungkan perkawinan, berlaku asas monogami. Meskipun sebagian besar organisasi wanita yang tergabung dalam Kongres Perempuan Indonesia dapat menerima rancangan Ordonansi tersebut, namun karena ada sebagian yang tidak menerimanya dan juga, karena ditolak oleh golongan Islam, maka Kongres tidak mengeluarkan pendapatnya, demi persatuan dan kesatuan pergerakan wanita Indonesia. Dalam kenyataannya pemerintah Hindia Belanda menarik kembali rancangan tersebut. Pada tahun 1937 atas usaha beberapa perkumpulan didirikan "Komite Perlindungan Kaum perempuan dan

Anak-anak Indonesia" (KPKPAI). Komite tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada wanita dan anak-anak dalam perkawinan, merencanakan suatu peraturan perkawinan dan mendirikan biro konsultasi. Komite tersebut dipimpin oleh Ny. Sri Mangunsarkoro dan Biro konsultasi oleh Ny. Maria Ulfah Santoso SH. KPKPAI yang semula berdiri sendiri, dalam Kongres Perempuan Indonesia ke III di Bandung bulan Juni 1938, dijadikan suatu badan dari Kongres dengan nama " Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan"(BPPIP).[14]

C. Kongres Perempuan di Bandung

Kongres diadakan di Bandung pada tanggal 23-27 Juli 1938 dengan pimpinan Ny. Emma Puradireja.

a. Maksud, Asas dan Usaha-usaha:
   1) Maksud Kongres Perempuan Indonesia:
      Merapatkan hubungan antara perkumpulan-perkumpulan perempuan Indonesia, untuk menguatkan usaha memperbaiki nasib kaum perempuan Indonesia khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya.
   2) Asas-asas Kongres Perempuan Indonesia:
      a) Kebangsaan
      b) Kesosialan
      c) Sikap harga menghargai
      d) Keperempuanan.

14 Kongres perempuan saat itu juga menolak seluruh Ordonansi hukum dari kolonial seperti Ordonansi Hukum Perkawinan, Hukum Zakat Fitrah dan Ordonansi kepenghuluan. Penolakan ini menandakan bahwa Kongres perempuan menolak keras segala aturan yang dibuat oleh Belanda, apalagi berhubungan dengan agama dan Negara. Disadur dari bagian lampiran buku yang ditulis oelh Suzanna Mulyani, *Kongres Wanita Indonesia Merdeka Melaksanakan Dharma*. Jakarta: Warta Kowani, 2015, iv.

3) Usaha-usaha Kongres Perempuan Indonesia:

Untuk mencapai maksud itu maka Kongres akan:

a) Menyelidiki keadaan masyarakat Indonesia terutama yang berhubungan dengan kehidupan wanita.
b) Mempelajari kehidupan dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, politik, agama, dan lainnya, agar dapat memperbaiki kedudukan wanita Indonesia.
c) Jika perlu mengadakan aksi bersama atau per kelompok ke arah perbaikan nasib.
d) Mendirikan badan-badan penyelidikan.
e) Mengumpulkan semua catatan-catatan kegiatan dari anggota biasa dan badan-badan Penyelidikan tersebut.
f) Menerbitkan majalah, risalah dan jika dianggap perlu.
g) Mengadakan komunikasi dengan organisasi wanita luar Indonesia.
h) Mengadakan segala usaha yang dapat meningkatkan kedudukan wanita Indonesia menurut asas-asas Kongres.

b. Keputusan-keputusan:

1) Menetapkan banyaknya suara anggota.
2) Merencanakan anggaran Rumah Tangga Kongres. Untuk itu dibentuk komisi yang terdiri dari wakil-wakil PSII Wanita, Istri Indonesia, PIPB (Perkumpulan Istri Pegawai Bumiputra) dan sebagai Penasihat hukum Ny. Maria Ulfah Santoso SH.
3) Kongres Perempuan Indonesia tidak menjadi Badan yang tetap.
4) Menetapkan anggaran dasar yang baru.
5) Mengenai Pemberantasan Buta Huruf
   a) Pekerjaan BPBH dijadikan Badan Kongres di bawah pimpinan Ny. Sh. Suparto dan berkedudukan di Jakarta.

b) Pimpinan diberi kuasa untuk menambah pengurus bila diperlukan.

c) Mendirikan Komisi Verifikasi *(Verificatie-Commissie)* untuk memeriksa Kas BPBH, terdiri dari Ibu-ibu Sarekat Istri Jakarta, PIPB dan PASI (Pasundan Istri), Jakarta.

6) Mengenai kedudukan wanita Indonesia dalam perkawinan:

a) Kongres Perempuan Indonesia ke III menyetujui usul Ny. Maria Ulfah Santoso SH, ditambah dengan usul yang dasarnya sama juga dari PASI, Istri Indonesia dan Majelis Pergerakan Perempuan PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia).

b) Mendirikan Komisi untuk membuat rancangan peraturan perkawinan yang berdasarkan usul-usul tersebut di atas, terdiri dari: Ny. Maria Ulfah Santoso SH, Ny. Datuk Tumenggung (PIPB), Ny. S. Sumadi (Ny. S. Arujikartawinata) (PSII Wanita), Ny. Zahara Gunawan (Sarekat Istri Jakarta), Ny. M. Wiria Atmaja (PASI), Ny. Kasman (JIBDA) dan seorang lagi dari Istri Indonesia Jakarta.

c) Pekerjaan Komisi ini harus selesai dalam satu tahun dan akan dirapatkan dalam konferensi Kongres Perempuan Indonesia.

d) Kongres Perempuan Indonesia akan mengirimkan wakilnya dalam persidangan "All Islam Congress" yang akan datang.

e) Mengirimkan mosi kepada All Islam Congress yang isinya sebagai berikut:

Minta dengan sangat agar ayat-ayat dari al-Qur'an yang bersangkutan dengan perkawinan hendaknya ditafsirkan dengan keterangan-keterangan yang

sebenarnya seperti maksud perintah Tuhan dan kehendak Nabi kita yang suci dan adil itu.

7) Mengenai Hak Pilih bagi wanita:

   Kongres menyerahkan kepada anggota-anggota untuk meneruskan tugas dan penyelidikan tentang hak untuk memilih.

8) Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-anak Indonesia (KPKPAI), dijadikan Badan Kongres Perempuan Indonesia dengan nama "Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan" (BPPIP).

9) Mengenai kaum buruh wanita Indonesia:
   a) Didirikan Badan tetap untuk menyelidiki keadaan kaum buruh wanita yang berkedudukan di Yogyakarta dipimpin oleh Ny. Sukemi, yang diberi wewenang untuk berhubungan dengan organisasi-organisasi lain di Mataram (Yogyakarta).
   c) Anggota-anggota Kongres harus memberikan data-data kepada Badan ini.
   d) Penetapan Iuran

10) Mengenai Hari Ibu:
   a) Hari Ibu diadakan tiap tanggal 22 Desember
   b) Menjual bunga putih pada hari tersebut
   c) Hasil-hasilnya diserahkan kepada Pengurus Kongres untuk dana "Hari Ibu" yang akan dipergunakan untuk badan-badan amal Kongres Perempuan Indonesia.
   d) Kegiatan lainnya terserah kepada anggota Kongres.

11) Mengenai Pendidikan Pemuda kita:
   a) Agar Kongres mengadakan komunikasi dengan organisasi organisasi pemuda.
   b) Anggota-anggota diharuskan meneruskan penelitian di bidang pendidikan.

12) Mengenai Tuna Susila:

Anggota-anggota Kongres diharuskan berusaha dengan sekuat tenaga memberantas pelacuran dan mendukung P4A (Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak).

13) Mengenai Kongres:
    a) Menetapkan bahwa Kongres Perempuan Indonesia ke-IV akan diselenggarakan di Semarang.
    b) Yang dipilih sebagai Ketua: Ny. Suparjo dan Wakil Ketua: Ny. Sunaryo Mangunpuspito.
14) Mengenai Pengurus Kongres:

Pengurus Kongres perempuan Indonesia ke-III tetap bekerja sampai Kongres yang akan datang.

15) Susunan Pengurus Kongres Perempuan Indonesia ke III:

Ketua	: Ny. Emma Puradireja Wakil
Ketua I	: Ny. A.Rahim
Wakil Ketua II	: Ny. Ratnawinadi
Penyurat I	: Ny. S. Tirtowiryo
Penyurat II	: Ny. Suwarni Miharja
Bendahari I	: Ny. Martakusumah
Bendahara II	: Ny. A. Joyopuspito
Pembantu	: Ny. Rumsari
	Ny. Leimena Ny. Satari
	Ny. H. Purwana Ny. Aisah Prikasih
	Ny. Sunodo
	Ny. Mariam Abdirlrachman
	Ny. Sumarjo
	Ny. Heerjan.

c. Hal-hal Lain:

1) Anggota-anggota Kongres Perempuan Indonesia ke-III:
    1. Sarekat Islam Jakarta, Jakarta
    2. Wanita Sedjati, Bandung

3. Penulung Wanodiyo, Bandung Pasundan Istri H.B., Bandung
4. Istri Kutaraja, Kutaraja
5. H.B. JIBDA, Semarang
6. PB Istri Indonesia, Semarang
7. PB Wanita Taman Siswa, Yogyakarta
8. HB Putri Budi Sedjati, Surabaya
9. PIPB (Persatuan Istri Pegawai Bumiputra), Jakarta Perukunan Istri Den Pasar, Denpasar
10. Persaudaraan Istri, Bandung Rukun Setia Istri, Bandung PSII Bagian Istri, Jakarta
11. Perserikatan Putri Setia Manado, Manado

2) Panitia Penyelenggara Kongres terdiri dari:
   Ketua : Ny. Rumsari
   Wakil Ketua : Ny. Leimena
   Penulis I : Ny. Komoh
3) Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-anak (KPKPAI) yang semula berdiri sendiri dijadikan suatu badan dari Kongres dengan nama "Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan" (BPPIP). Badan ini mempunyai biro konsultasi yang dipimpin oleh Ny. Maria Ulfah Santoso SH dengan tujuan memberi nasihat kepada kaum wanita mengenai perkawinan, perceraian, kedudukan anak-anak, jika perlu membawa perkara-perkara itu ke depan Raad Agama (Pengadilan Agama).
4) Kaum wanita Indonesia juga ikut serta dalam organisasi "Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (P4A), yaitu suatu organisasi yang beranggotakan kaum pria dan wanita, yang dibentuk sejak bulan April 1930. Kongres P4A yang diadakan pada bulan April 1940, mengusulkan kepada pemerintah agar anggota Polisi Kesusilaan ditambah dan agar wanita

Indonesia juga ikut duduk dalam keanggotaan Polisi Kesusilaan. Selanjutnya Kongres Perempuan Indonesia ke-III menyarankan supaya impor film dilaksanakan lebih teliti dan dalam badan pemeriksa (sensor) film duduk pula kaum wanita Indonesia.

d. Peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan penting sesudah Kongres Perempuan Indonesia ke-HI tahun 1938
   1) Sebagai tindak lanjut pembicaraan yang tidak menjadi keputusan Kongres ini, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1938 telah memberikan hak untuk dipilih kepada kaum wanita Indonesia untuk menjadi anggota Dewan Kota maka 4 orang wanita telah terpilih sebagai anggota Dewan Kota, yaitu:
      a) Ny. Emma Puradireja di Bandung
      b) Nn. Sri Umiyati di Cirebon
      c) Ny. Sunaryo Mangunpuspito di Semarang
      d) Ny. Siti Sundari Sudirman di Surabaya.
   2) Pada permulaan tahun 1941, Komisi Visman *(Commissic Visman)*, yang menyelidiki keinginan-keinginan bangsa Indonesia akan perubahan-perubahan tata negara, telah meminta datang 2 orang wanita Indonesia. Yaitu: Ny. Sunaryo Mangunpuspito yang menuntut ”Indonesia Berparlemen” dan Ny. Sri Mangunsarkoro menuntut ”Indonesia Merdeka”.[15]

D. Kongres Perempuan di Semarang

Kongres diadakan di Semarang pada tanggal 25-28 Juli 1941 dengan pimpinan Ny. Sunaryo Mangunpuspito dan dihadiri oleh wakil-wakil organisasi wanita. Maksud dan tujuannya sama dengan Kongres Perempuan Indonesia ke III.

15 Disalin total dari buku T. Abdullah dkk., Indonesia dalam Arus Sejarah 5 : Masa Pergerakan Kebangsaan. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2010, lampiran.

a. keputusan-keputusan sebagai berikut:
   1) Pilihan Ketua Kongres Perempuan Indonesia ke V jatuh pada Ny. Sudirman dari Putri Budi Sedjati, Surabaya.
   2) Kongres Perempuan Indonesia ke V direncanakan diadakan di Surabaya.
   3) Kongres menganjurkan kepada anggota-anggota Dewan Rakyat (Volksraad), supaya mengusulkan agar bahasa Indonesia dimasukkan sebagai mata pelajaran tetap pada sekolah menengah (HBS dan AMS).
   4) Kongres setuju dan akan membantu aksi GAPI "Indonesia Berparlemen", pelaksanaannya diserahkan kepada anggota-anggota Kongres.
   5) Kongres setuju dengan penolakan GAPI dan organisasi lainnya terhadap ordonansi wajib militer terbatas buat bangsa Indonesia.
   6) Kongres tidak menyetujui putusan yang tidak menerima prinsip hak untuk dipilih bagi kaum Ibu Indonesia.
   7) Mengirimkan mosi kepada pemerintah: Kongres Perempuan Indonesia ke IV berpendapat bahwa hak untuk memilih anggota Dewan Kota dari golongan Indonesia juga diberikan kepada Wanita Indonesia.
   8) Mengirim telegram kepada Dewan Rakyat, Fraksi Nasional Indonesia (Tn. Suroso) dan Gubernur Jendral di Jakarta, sebagai berikut:

      "Mengingat bahwa asas dan tujuan maupun keputusan-keputusan Kongres Perempuan Indonesia ke I, II, III dan IV, semua bermaksud menjunjung tinggi dan mempersamakan derajat dan kedudukan kaum wanita dan setelah mendengar pembicaraan-pembicaraan dalam Dewan Rakyat, di mana sebagian besar anggotanya telah menyetujui hak untuk memilih bagi wanita, Kongres

Perempuan Indonesia ke IV mohon agar hak untuk memilih bagi kaum wanita dikabulkan".

9) Susunan Pengurus Kongres Perempuan Indonesia ke IV:
   Ketua : Ny. Sunaryo Mangunpuspito
   Wakil Ketua : Ny. Darmowinoto
   Penulis I : Ny. Pujotomo
   Penulis II : Ny. Retnomaendro
   Bendahari : Ny. Munandar
   Pembantu : Ngamdani
   Ny. Sujono S. Pusponegoro
   Ny. Suyatno
   Ny. Kridoharsoyo

b. Hal-hal lain:
   1) Anggota-anggota Kongres Perempuan Indonesia ke IV
      1. Pasundan Istri
      2. Puspo Rinonce
      3. Sarekat Istri Indonesia
      4. Budi Rini
      5. Putri Budi Sejati
      6. Wanito Taman Siswa
      7. Sancoyo Rini
      8. Persatuan Putri
      9. Pengurus Besar Aisyiyah Hoofdbestuur Jong Islamieten Bond Dames Afd. (JIBDA)
      10. Majelis Dept. Pergerakan Istri Partai Sarekat Islam Indonesia
      11. Susilo Retno
      12. PB Istri Indonesia.

2) Panitia Penyelenggara Kongres Perempuan Indonesia ke IV

Ketua	: Ny. Suyadi
Wakil Ketua	: Ny. Mustajab
Penulis I	: Nn. Siti Mulyati
Bendahari I	: Ny. Moh. Rasid
Bendahari II	: Ny. Sumarjo
Pembantu	: Ny. Juhana
	Ny. Suryatin
	Ny. Moh. Husin
	Ny. Sindusuwarno
	Ny. Slamet Ny. Munadi
	Nn. Wahyujatmiko
	Nn. Alimah

c. Peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan penting sesudah Kongres Perempuan Indonesia ke IV tahun 1941:
Kongres Perempuan Indonesia ke V, yang telah diputuskan akan diadakan di Surabaya, tidak dapat dilangsungkan karena pada tahun 1942. Tentara Jepang telah menduduki Hindia Belanda.[16]

16 Disalin lengkap dari buku Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999, 102.

Bab VII

Dinamika Perjuangan dan Pergerakan Perempuan di Indonesia

Embrio Organisasi Perempuan

Dalam masa penundukan tentara Jepang, semua organisasi pergerakan Indonesia dibubarkan. Jepang membentuk organisasi-organisasi yang menjalankan kegiatannya untuk kepentingan Jepang, dalam rangka mencapai kemenangan perang terhadap Sekutu. Pada masa ini umumnya pemimpin-pemimpin Nasional Indonesia bekerja sama dengan Jepang, maksudnya memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan yang ada untuk tujuan persiapan kemerdekaan Indonesia. Sejalan dengan strategi tersebut para pimpinan pergerakan perempuan Indonesia juga berusaha mempergunakan kesempatan itu.

Pada permulaan, tindakan Jepang untuk sementara sangat berhati-hati, karena masih ingin mempergunakan tenaga rakyat Indonesia. Untuk mempengaruhi rakyat Indonesia, Jepang memberikan janji-janji dan semboyan yang muluk-muluk, antara lain: “Untuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya” dan “Asia untuk bangsa Asia, Birma untuk bangsa Birma, dan Indonesia

untuk bangsa Indonesia".[1] Oleh karena itu pengawasan terhadap organisasi masih sangat lunak dan tidak terlalu ketat.

Pada bulan April 1942, dibentuk organisasi "Gerakan Tiga A" yang dipimpin oleh Mr. Rd. Samsudin dan berkedudukan di Jakarta. Organisasi ini telah membentuk beberapa cabang di kota-kota lain dan merupakan suatu badan propaganda tentara Jepang, sebagai pemimpin Asia Timur Raya dengan semboyan: "Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pemimpin Asia". Kemudian gerakan Tiga A dibubarkan oleh Jepang dan dalam bulan Maret 1943 didirikan gerakan baru dengan nama "Putra" (Pusat Tenaga Rakyat) di bawah pimpinan empat serangkai yaitu: Sukarno-Hatta, Ki Hajar Dewantara dan Kyai Haji Mas Mansur serta berpusat di Jakarta.[2]

Pada pertengahan tahun 1943, posisi Jepang dalam perang Pasifik makin lemah. Indonesia dijadikan front depan dalam menghadapi Sekutu. Karena itu Jepang yang menyadari kelemahannya menjadi makin kejam terhadap rakyat Indonesia.

Dalam rangka ini pula Jepang membutuhkan tenaga-tenaga pemuda Indonesia untuk keperluan perang. Maka dibentuklah organisasi para militer, antara lain: *Keibodan* (Barisan Bantu Polisi) dan *Seinendan* (Barisan Pemuda) serta organisasi yang bersifat militer, antara lain: *Heiho* (Pembantu Prajurit) dan PETA (Tentara Sukarela Pembela Tanah Air). Pada tanggal 1 Maret 1944 organisasi Putra yang dicurigai Jepang dilebur dalam organisasi

1 Politik pembekuan politik Jepang untuk membubarkan perserikatan perempuan di Indonesia dilakukan melalui strategi banyak hal, diantaranya adalah 1) menurunkan kesejahteraan perempuan sebagai bagian dari warga Negara yang dijajah, perempuan ditempatkan pada ruang yang timpang dan tidak diberikan tempat untuk menempuh pendidikan, politik dan jalur perdagangan makro; 2) isu perempuan sebagai momok negara disuarakan sedemikian rupa agar perempuan tidak mampu berkembang dan sibuk memikirkan nasib keluarga dan anaknya; 3) mengklaim bahwa organisasi perempuan sebagai organisasi pemberontak; 4) Jepang memberikan janji-janji perdagangan Asia Timur Daya kepada organisasi perempuan untuk memecah belah. Lihat dalam penelitian pustaka yang dilakukan oleh Sri Hidayati Djoeffan, "Gerakan Feminisme di Indonesia: Tantangan dan Strategi Mendatang", *Jurnal Mimbar*, 3(XVII) 2001, 284-285.

2 Saskia E. Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya, 1999, 88-89.

gerakan baru yaitu: ”Jawa Hokokai” atau Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa.[3]

Organisasi wanita pada waktu itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari organisasi-organisasi umum tadi. Pergerakan wanita masa pendudukan Jepang tidak mendapat kemajuan, karena kegiatan dibatasi oleh pemerintah Jepang. Kedudukan wanita, baik dalam hukum perkawinan maupun mengenai hak untuk tidak dibicarakan lagi. Pergerakan wanita sangat prihatin terhadap gadis-gadis korban tentara Jepang, tetapi mereka tidak berani menentang terus terang tindakan-tindakan tersebut.[4]

Namun demikian pada masa tersebut sebagian besar kaum wanita karena dalam keadaan terpaksa ikut dalam pergerakan, sehingga gerakan wanita merata sampai di pelosok-pelosok daerah. Bermacam-macam kegiatan seperti latihan kemiliteran, PPPK, memasak untuk dapur umum, dan lain-lain, telah menambah dan memperluas pengalaman wanita sebagai pimpinan organisasi dan masyarakat. Organisasi wanita yang merupakan bagian dan organisasi-organisasi umum tadi, adalah sebagai berikut:

1. Gerakan Istri Tiga A

Gerakan Tiga A yang dibentuk bulan April, 1942, mempunyai bagian perempuan, yaitu: “Gerakan Istri Tiga A”, di antaranya dipimpin oleh Ny. Artinah Samsudin. Bagian pemudinya di Jakarta disebut “Barisan Putri Asia Raya”. Sebagai bagian dari Gerakan Tiga A, organisasi ini tidak lama usianya.[5]

3 Lihat dalam Mursidah, “Gerakan Organisasi Perempuan Indonesia dalam Bingkai Sejarah”, *Muwazah*, 4(1) 2012, 88-92.

4 Menurut catatan sejarah, organisasi perempuan digerakan oleh penguasa bala tentara Nippon yang membantu Jepang untuk memenangkan peperangan. Keberadaan perempuan dalam hukum maupun ekonomi kerakyatan dianggap hal yang tabu oleh Jepang, karena pergerakan atau organisasi perempuan mudah terpecah, mati dan kemudian tumbuh lagi, begitu seterusnya sampai Indonesia merdeka. Lihat Audra Jovani, “Perkembangan Gerakan Politik Perempuan di Indonesia”, *Jurnal Pamator*, 7(1) 2014, 21-28.

5 Faktor bubarnya Gerakan Istri Tiga A ini dilatarbelakangi oleh tidak kuatnya kelompok yang membangun komunitas ini dari gangguan dan ditentang oleh Belanda sebab tidak memiliki arah yang jelas. Tujuan utama dari Gerakan Istri Tiga A ini adalah posisi politik di pemerintahan Indonesia yang pada saat itu masih belum merdeka.

2. Barisan Pekerja Perempuan Putra

Setelah Gerakan Tiga A dibubarkan, dibentuk organisasi baru yang bernama "Putra" (Pusat Tenaga Rakyat) pada bulan Maret 1943. Organisasi Putra di Pusat maupun di Daerah, mempunyai bagian wanita yang bernama "Barisan Pekerja Perempuan Putra". Organisasi ini di tingkat Pusat dipimpin oleh Ny. Sunaryo Mangunpuspito dan dibantu oleh Ny. Sunaryati Sukemi, Ny. Sukanti Suryocondro, Ny. Burdah Yusupadi dan Ny. S.K. Trimurti. Hampir di semua kota di pulau Jawa didirikan Barisan Pekerja Perempuan Putra, yang menyelenggarakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf, memintal benang dan macam-macam kerajinan tangan lainnya.[6]

Di samping Barisan Pekerja Perempuan Putra, di beberapa tempat oleh pemerintah daerah didirikan organisasi wanita setempat dengan nama "Fujinkai", diketuai oleh Istri kepala daerah yang bersangkutan dan harus menggerakkan tenaga-tenaga wanita di tempatnya masing-masing. Misalnya di Jakarta pada tanggal 3 November 1943 didirikan "Jakarta Tokubetsu Si Fujinkai" yang diketuai oleh Ny. R.A. Abdurachman. Juga di beberapa kabupaten (Ken) didirikan Ken Fujinkai, seperti Bogor, Semarang, dan lain-lain. Sedangkan di kota-kota (Si) didirikan Si Fujinkai.[7]

Jakarta Tokubetsu Si Fujinkai memandang perlu untuk membentuk "Barisan Putri". Untuk membentuk kader-kader, dihubungi Nn. Siti Dalima yang kemudian menjadi pimpinannya dan wakilnya Nn. Nursyamsu. Adapun Staf dan pembantu-pembantunya antara lain, ialah: Nn. Setiati, Nn. Partinah, Nn. Malidar (Ny. Hadiyowuno) dan anggotanya antara lain: Nn. Paramita (Yo) Abdurachman.

Lihat dalam Ryadi Gunawan, dimensi-dimensi Perjuangan Kaum Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sejarah; lihat juga dalam Fauzie Ridjal; Lusi Margiani; Agus Fahri Husein, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993, 99-106.

6 Sukanto, Suryochondro, Perkembangan Gerakan Wanita di Indonesia, dalam Mayling Oey Gardiner; Mildred Wagemann; Evelyn Suleeman; Sulastri, *Perempuan Indonesia Dulu dan Kini*. Jakarta: Gramedia, 2000, 109.

7 Muhadjir Darwin, "Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa ke Masa", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(3) 2004, 283-294.

Peserta-pesertanya terdiri dari pemudi-pemudi, wakil-wakil dari berbagai kecamatan di daerah Jakarta. Mereka diasramakan (di sebuah rumah dekat gedung bioskop Megaria) dan mendapat gemblengan latihan-latihan militer yang diberikan antara lain oleh Daan Mogot, latihan Palang Merah, macam-macam keterampilan antara lain masak-masak untuk dapur umum, jahit-menjahit, kerajinan, memintal dan menenun, menyanyi dan deklamasi untuk siaran-siaran radio dan ceramah-ceramah politik yang diberikan setiap 2 hari sekali oleh pimpinan Nasional, antara lain: St. Syahrir dan Moh. Hatta. Latihan-latihan ini kemudian dilanjutkan untuk anggota Barisan Putri secara intensif, tiap kali sejumlah kurang lebih 50 orang pemudi-pemudi. Latihan-latihan juga diikuti oleh anggota dari luar Jakarta.[8]

Usaha dan kegiatan tersebut di atas adalah sebagai kedok belaka, sebetulnya pemudi-pemudi ini memanfaatkannya untuk mempersiapkan diri dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi Putra dibubarkan tanggal 1 Maret 1944, karena Jepang khawatir akan semangat Nasionalisme yang makin meluap. Demikian pula halnya nasib Barisan Pekerja Perempuan Putra.[9]

3. Jawa Hokokai Fujinkai

Setelah organisasi Putra pada tanggal 1 Maret 1944 dilebur dalam organisasi baru ”Jawa Hokokai” (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa), maka dibentuk Departemen Perempuan dari Jawa Hokokai yang disebut ”Jawa Hokokai Fujinkai”. Fujinkai-Fujinkai yang telah ada di daerah-daerah, menjadi bagian wanita dari Jawa Hokokai daerah.[10] Pengurus Pusat dari Jawa Hokokai Fujinkai, yang merupakan Pusat Tata Usaha terdiri dari:

8 S. Blackburn, *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, 66-67.
9 S. Blackburn, *Kongres Perempuan Pertama…*, 69.
10 A.B. Lapian, *Indonesia dalam Arus Sejarah; Masa Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: Ichiar Baru Van Hoeve, 2011, 11-12.

Ketua : Ny. Sunaryo Mangunpuspito
Wakil Ketua I : Ny. Ios Wiriaatmaja
Wakil Ketua : Ny. Maskun
Penulis I : Ny. Maryati Adnan
Penulis II : Ny. Rosnah Jamin
Anggota : Ny. Siti Maryam
Pembantu : Ny. Sutarman
Ny. S.R. Tambunan
Ny. Artinah Samsudin
Ny. Hafni Abuhanifah.

Usaha-usaha Fujinkai pada masa ini, antara lain:

a. Mengobarkan semangat cinta Tanah Air dan Bangsa di kalangan wanita dan menanamkan Nasionalisme.
b. Menganjurkan agar suka berkorban dan rela menderita untuk Tanah Air dan Bangsa.
c. Menyiapkan tenaga untuk ikut serta di belakang garis peperangan
d. Menganjurkan hidup dan berhemat
e. Memperbanyak hasil bumi dengan menanami semua tanah yang terluang dengan tanaman penghasil bahan makanan dan pakaian, antara lain: ubi, ubi kayu, kapas, jarak, dan lain-lain
f. Menghidupkan pekerjaan tangan dan industri di rumali antara lain: memintal benang, membuat kaos kaki.
g. Mengadakan latihan-latihan yang diperlukan.
h. Menghidupkan pekerjaan untuk memberantas pengangguran.[11]

Untuk lebih meningkatkan partisipasi kaum wanita dalam Perang Asia Timur Raya, Jepang kemudian membentuk "Barisan Srikandi" sebagai bagian dari Fujinkai. Anggota-anggotanya adalah putri-putri yang berumur antara 15-20 tahun dan belum bersuami.

11 H. Ida, *Feminisme Indonesia dalam Lintasan Sejarah…*, 34-37.; bisa juga dilihat dalam tulisan sejarawan M. Oey Gardiner, *Perempuan Indonesia: Dulu dan Kini*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996, 109-110.

Barisan Srikandi itu apabila diperlukan benar-benar disiapkan oleh pemerintah Jepang untuk menjadi pasukan tempur.[12]

Pada mulanya Jawa Hokokai Fujinkai menjadi satu bagian dari urusan pendidikan tetapi pada bulan Januari 1945 bagian perempuan dijadikan suatu bagian sendiri dengan nama "Jawa Hokokai Fujinkai Limukyoku", yang menjadi Pusat Tata Usaha Fujinkai. Jawa Hokokai Fujinkai membentuk bagian pemudi dengan nama "Joshi Seinenkai." Bagian Pemudi ini dipimpin oleh:

a. Nn. Siti Maryono
b. Ny. Maryati Adnan
c. Ny. Rosnah Jamin[13]

Namun Barisan Putri tetap ada dan dalam rangka persiapan ikut serta perempuan di belakang garis peperangan, mengikuti latihan-latihan, antara lain:

a. Palang Merah, membela diri, berbaris dan memegang senjata.
b. Latihan bahaya udara, kunjungan ke Rumah Sakit Tentara, Dapur Umum dan membuat makanan tahan lama.
c. Mengadakan dapur umum, dapur keliling, dapur tetap dan dapur pembelaan.[14]

Maksud Jepang bekerja sama dengan pimpinan nasional Indonesia untuk menanamkan kekuasaannya, sebaliknya pimpinan Nasional Indonesia memanfaatkan semua sarana Jepang yang ada untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

12 H. Ida, *Feminisme Indonesia dalam Lintasan Sejarah…*, 39.
13 HM. N. Anshoriy, *Matahari Pembaruan: Rekam Jejak KH. Ahmad Dahlan*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2010, 30-31.
14 HM. N. Anshoriy, *Matahari Pembaruan: Rekam Jejak KH. Ahmad Dahlan…*, 34.

Bab VIII

Perempuan di Era Revolusi Kemerdekaan

A. Berjuang Membela Kemerdekaan

Dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, perjuangan rakyat Indonesia memasuki tahap baru. Membela dan mempertahankan kemerdekaan menjadi tugas dan kewajiban seluruh rakyat. Pada waktu itu Pemerintah Jepang *de facto* masih berkuasa, tetapi menyatakan tidak berwenang lagi untuk mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas mereka hanya menjaga keamanan sampai Sekutu datang. Mereka telah diperintahkan mempertahankan *"Status quo"* pada waktu mereka menyerahkan kekuasaan pada Sekutu. Hal ini berarti bahwa Indonesia masih dianggap sebagai jajahan.

Pada tanggal 15 Oktober 1945 tentara Inggris (dengan Ghurkanya) yang diboncengi tentara Belanda mendarat di Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Medan, dan tempat-tempat lain. Mereka ditugaskan menerima penyerahan dari Jepang. Panglima tentara Inggris mengumumkan bahwa mereka mewakili Sekutu untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan, tidak akan mencampuri soal politik.[1]

1 Akhirnya Jepang mengalihkan perhatiannya ke bagian Asia Tenggara setelah membebaskan Indonesia dari penjajahan, dan saat itu, Jepang menganggap Inggris

Dengan berkedok sebagai tentara Inggris, tentara Belanda melakukan penembakan-penembakan dan pembunuhan terhadap rakyat Indonesia. Tawanan bekas KNIL *(Koninklijke Nederlands Indische Leger)* dipergunakan kembali oleh Belanda untuk melakukan terornya menghadapi rakyat Indonesia. Kekerasan dibalas dengan kekerasan, pertempuran timbul di mana-mana bukan hanya melawan Belanda dengan KNIL-nya, tetapi juga melawan tentara Inggris dengan Ghurka-nya.[2] Pertempuran yang paling dahsyat terjadi pada tanggal 10 November 1945 ketika seluruh rakyat terutama para pemuda di Surabaya menolak ultimatum Jenderal Mansergh dari tentara Sekutu untuk menyerahkan semua senjata.

Awal pecahnya pertempuran ini sekarang dikenal sebagai hari Pahlawan. Para pemuda dan pemudi benar-benar bahu-membahu sepanjang medan perjuangan. Pemerintah Indonesia selalu mengusahakan taktik diplomasi (jalan perundingan) dalam menyelesaikan sengketa-sengketanya dengan Sekutu dan perundingan serta pertempuran silih berganti.

Dalam persetujuan Linggarjati Belanda Mengakui kekuasaan *de facto* Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera. Pada tanggal 21 Juli 1947 terjadi Clash ke-I, yang oleh Belanda disebut Aksi Polisional ke-I (kemudian kita kenal sebagai Perang Kemerdekaan ke-I). Sementara itu keadaan politik dan ekonomi dalam negeri yang makin memburuk dipersulit lagi dengan meletusnya pemberontakan Madiun oleh PKI-Muso pada tanggal 18 September 1948.[3]

sebagai Negara bebuyutan sehingga dari aspek perdagangan, politik dan kenegaraan tidak pernah menjalin kerja sama dengan Inggris. Lihat dalam G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke XX*. Yogyakarta: Canisius, 1992, 29.30.

2 Supartono Widysiswoyo, *Sejarah Indonesia dan Sejarah Dunia*. Jakarta: Intan Pariwara, 1991, 198.

3 Perjanjian Linggarjati dalam kajian sejarawan dahulu ditafsiri bukan semata-mata suatu perjanjian damai atau bertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan dari penjajah, atau bisa jadi strategi para pejuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Namun menurut penelusuran Hoesin (2010), perjanjian Linggarjati adalah bertujuan untuk mengangkat nasib perempuan dan rakyat akibat dijajah agar mereka dapat melaksanakan kebangsaannya secara wajar. Lihat dalam Rushdy Hoesin, *"Terobosan*

Pada tanggal 19 Desember 1948, tentara Belanda menyerbu Yogyakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia dan menangkap pimpinan Negara. Agresi ini merupakan perang kemerdekaan ke-II (*Clash* ke-II), yang oleh Belanda disebut Aksi Polisional ke-II. Dalam suasana yang demikian, wanita Indonesia merasa terpanggil untuk ikut berjuang membela dan mempertahankan kemerdekaan.[4] Organisasi-organisasi wanita pada umumnya ditujukan kepada usaha-usaha perjuangan, baik di garis belakang dengan mengadakan dapur umum dan pos-pos Palang Merah, maupun di garis depan dengan nama satu badan perjuangan maupun tergabung dengan organisasi-organisasi lain. Timbul laskar-laskar wanita dan badan-badan perjuangan, terutama di Jawa dan Sumatra. Tugas-tugas mereka sangat luas: di garis depan, di medan pertempuran, melakukan kegiatan inter, menjadi kurir, menyediakan dan mengirimkan makanan ke garis depan, membantu kaum pengungsi, memberi penerangan, dan lain-lain.

Dasar keterampilan untuk tugas-tugas ini sebagian didapat pada masa pendudukan Jepang, wanita dalam Fujinkai diharuskan mengikuti latihan-latihan guna menghadapi segala kemungkinan untuk membantu Jepang di garis belakang. Keadaan dan latihan-latihan tersebut di atas telah dimanfaatkan untuk menanamkan jiwa nasionalisme, memberikan latihan-latihan kemiliteran, PPPK (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan), masak untuk dapur umum dan lain-lain, semua sebagai persiapan menyongsong kemerdekaan.[5]

Soekarno dalam Perundingan Linggarjati", Jakarta: Buku Kompas, 2010, 209.

4 Serangan tentang Belanda ke Yogyakarta dinamakan dengan Operatie Kraai yang terjadi pada 19 Desember 1948. Sehingga Soekarno, Mohammad Hatta dan Sjahrir serta beberapa tokoh lainnya ditangkap, persoalan ini kemudian menyebabkan terbentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Operasi penyerangan II di Yogyakarta terjadi di Pangkalan Udara Maguwo yang saat itu Yogyakarta menjadi ibu kota RI. Lihat lebih jelas dalam Ki Nayono, *Yogya Benteng Proklamasi*. Yogyakarta: Badan Musyawarah Musea, tth, 129.

5 M.T. Thoyeb, *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta: Upakara Sentosa Sejahtera, 2004, 410-414.

Dalam kesibukan ikut serta baik dalam perjuangan fisik maupun dalam bidang sosial politik, pergerakan wanita berbenah diri untuk menggalang persatuan yang kuat. Kongres yang pertama kali diadakan oleh organisasi-organisasi wanita setelah Proklamasi, diselenggarakan di Klaten pada bulan Desember 1945. Maksud Kongres terutama adalah mempersatukan ideologi dan membentuk badan persatuan. Persatuan Wanita Indonesia (Perwani) dan Wanita Negara Indonesia (Wani) dilebur menjadi badan fusi dengan nama Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari).[6]

Pada bulan Februari 1946, dilahirkan Badan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI). Pada bulan Juni 1945 diselenggarakan Kongres Wanita Indonesia di Madiun, yang merupakan Kongres Wanita Indonesia ke-V. Sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk menembus blokade ekonomi dan politik, Kongres memutuskan antara lain mulai mengadakan hubungan dengan luar negeri. Maka dari itu Kongres Wanita Indonesia menjadi anggota WIDF *(Women's International Democratic Federation).*[7]

Kongres Wanita ke-VI yang diadakan di Magelang pada tahun 1947 dan Kongres ke-VII di Solo pada tahun 1948 terutama memperhatikan penyatuan tenaga dan penyempurnaan organisasi, selain membantu perjuangan.[8] Dijiwai oleh tekad untuk ikut serta dalam pembangunan, pergerakan wanita selanjutnya menyusun program-program kerja, yang tidak hanya meliputi bidang pembelaan

6 Rahmawati, "Potret Kuota Perempuan di Parlemen", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 7(3) 2004, 295.

7 Kongres Wanita Indonesia membuat eskalasi politik perdagangan luar negeri menjadi menyempit, kongres tersebut juga menghasilkan beberapa hasil yang penting untuk Indonesia, diantaranya adalah; 1) berhentinya jalur perdagangan ke luar negeri; 2) dibubarkannya berbagai organisasi bentukan penjajah; 3) perempuan nusantara bersatu dengan membentuk komunitas dengan menggandeng beberapa tokoh perempuan di berbagai lembaga perempuan setiap komunitas maupun kerajaan. Lihat dalam penelitian pustaka dan ertafek yang dilakukan oleh Kristi Poerwandari, *Indonesian Women in a Changing Society*. Seoul: Ewha Women University Press, 2005, 309-310.

8 Dalam sejarah, organisasi perempuan membantu perjuangan pada dataran merumuskan beberapa ideology dan pergerakan nasional menghadapi penjajah, hubungan diplomatik dan peran perempuan. Periksa Saskia Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI*. Yogyakarta: Galang Press, 2010, 22.

negara, tetapi juga bidang-bidang sosial, politik, pendidikan, dan lain-lain sesuai dengan derap perjuangan pada waktu itu.

B. Persatuan Wanita Indonesia

Dalam menjalankan tugas pertahanan pada masa ini, Wanita Indonesia bergabung dalam bentuk-bentuk kegiatan perjuangan sebagai berikut:

1. Badan-badan perjuangan
2. Kelaskaran atau kesatuan yang seluruhnya terdiri dari wanita dan bekerja sama dengan kesatuan-kesatuan lain seperti Laskar Wanita Indonesia, Laskar Putri dan sebagainya.
3. Kelaskaran bersama Pria (Tentara Pelajar Wanita, Corps Mahasiswa Wanita, Corps Polisi Militer dan sebagainya).
4. Secara perorangan.
5. Lain-lain.[9]

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Fujinkai pimpinan Ny. Siti Sukaptinah Soenaryo Mangunpuspito dibubarkan. Dalam amanat pembubaran dianjurkan supaya di kota-kota dan kabupaten didirikan lagi organisasi wanita dengan nama Persatuan Wanita Indonesia (PERWANI). Maksud dan Tujuan PERWANI adalah menyediakan dan mengerahkan tenaga wanita guna mempertahankan dan memelihara Kemerdekaan. Kegiatan PERWANI antara lain:

1. Mengucapkan salam dengan pekik Merdeka.
2. Mengibarkan Bendera Merah Putih.
3. Memakai lencana merah putih.
4. Membantu KNI (Komite Nasional Indonesia) di daerah.[10]

9 Berbagai upaya mempertahankan negara, kebebasan dan hak perempuan dilakukan untuk memantik nafsu materialistis para penjajah Belanda dan Jepang. Posisi perempuan yang ditempatkan pada oknum khusus, menyebabkan perempuan yang sadar akan nasionalisme membentuk dan berkumpul menyatukan visi dan tujuan menjadi suatu badan, lascar, organisasi sampai pada komunitas di pedesaan. Lihat sejarah perempuan dalam Wasisto Raharjo Jati, "Historisitas Politik Perempuan Indonesia", *Jurnal Paramita,* 24(2) 2014, 200-210.

10 Wasisto Raharjo Jati, *"Historisitas Politik Perempuan Indonsia"…,* 45.46.

C. Wanita Negara Indonesia (WANI)

Tugas pertama yang diberikan pada Ny. Suwarni Pringgodigdo yang diangkat sebagai anggota DPA (Dewan Pertimbangan Agung), adalah menyediakan tenaga-tenaga pimpinan wanita yang sanggup bekerja di Jakarta atau tempat lain untuk menyelenggarakan dapur-dapur umum atau tugas-tugas sosial. Untuk itu pada bulan Oktober 1945 di bawah pimpinan Ny. Suwarni Pringgodigdo dan Nn. Erna Djajadiningrat (sekarang Ny. Sutoto) dibentuklah Wanita Negara Indonesia (WANI).[11]

Berbeda dengan dapur umum lain, dapur-dapur umum WANI menyediakan juga makanan bagi Pegawai Negeri yang tidak dapat pulang oleh karena suatu pertempuran, tembak-menembak atau lain-lain. Pada waktu itu, jika ada pertempuran tidak ada orang yang berjualan, toko-toko tutup dan lalu lintas terhalang, kadang-kadang sampai beberapa hari. Dalam keadaan demikian dapur umum WANI, yang menyediakan bahan makanan untuk pejuang-pejuang, berperan pula sebagai "Pos Republik".

Di samping dapur umum, wanita-wanita di Jakarta mendirikan tempat "Penjahit Umum" di mana mereka menyumbangkan tenaganya untuk menjahitkan perlengkapan pejuang-pejuang di "Pedalaman". Untuk jasa-jasa dalam WANI tersebut Nn. Erna Djajadiningrat merupakan wanita pertama yang mendapat penghargaan Bintang Gerilya.

Terkenal pula perjuangan Wanita Jakarta dalam memperingati Hari Ulang Tahun pertama Proklamasi Kemerdekaan dengan mengadakan demonstrasi berupa pawai, yang sebetulnya dilarang oleh Tentara Inggris (yang berkuasa pada waktu itu). Tugu

11 WANI bertugas sebagai lembaga otonomi di bawah naungan masyarakat langsung tanpa ada keterkaitan dengan lembaga pemerintahan, sekalipun saat itu, Indonesia belum membentuk kabinet pemerintahan namun arah ke sana dalam proses pembentukan pada musyawarah pembentukan dasar Negara dan UUD. Sebagai gerakan komunitas, WANI membentengi kesewenang-wenangan terhadap perempuan baik dari aspek internal maupun eksternal. Lihat lebih dalam Cokrominoto, *Analisa Situasi Wanita Indonesia*. Jakarta: Kantor Menteri Negara UPW, 209.210.

peringatan Proklamasi yang didirikan di Pegangsaan Timur 56 adalah berkat perjuangan mereka. Nama-nama seperti antara lain Ny. Yos Masdani, Ny. Setiati Surasto, Ny. Maria Ulfah Santoso SH, Ny. Sukemi dan masih banyak lagi, tidak dapat dipisahkan dari peristiwa itu.[12]

D. Pusat Tenaga Perjuangan Wanita Indonesia (PTPWI)

Badan ini dibentuk pada konferensi organisasi-organisasi Wanita Indonesia di Surakarta pada tanggal 26 Februari 1946. Pusat tenaga perjuangan Wanita Indonesia berkedudukan di Yogyakarta dan bersifat sementara yaitu selama Kemerdekaan belum tercapai sepenuhnya, serta dipimpin oleh Ny. Sri Mangkunsarkoro.

Tujuan badan ini adalah membantu Pemerintah dengan memusatkan tenaga wanita untuk menegakkan Kemerdekaan RI dengan:

1. Mempertinggi dan memperkuat pendidikan batin untuk memperkokoh semangat pembelaan negara.
2. Pembagian pekerjaan untuk memperkuat mobilisasi dengan mengingat kekuatan dan kecakapan masing-masing badan perjuangan.
3. Tuntutan secara hakim perang kepada yang tidak menurut komando.
4. Mengadakan badan pengawas terhadap keadilan dan kebenaran.[13]

12 Ibid., 211.

13 Setelah berdirinya WANI, kemudian terbentuk laskar-laskar perempuan yang ada di daerah-daerah seperti Surakarta, Jakarta, Bandung, Kalimantan dan menyebar di hampir setiap propinsi. Berdirinya laskah ini ditengarai oleh beberapa hal penting, termasuk diantaranya adalah menjaga negara Indonesia agar aman jika se waktu-waktu penjajah datang kembali. Laskar perempuan di setiap daerah memiliki tugas khusus, yakni menjaga daerahnya dari indikasi adanya penjajah sampai nanti ketika Indonesia telah stabil dan berdiri sendiri dengan adanya ideologi dasar negara, presiden dan menteri. Lihat Fauzie; Lusi Margiani' Agus Fahri, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993, 50.

Pusat Tenaga Perjuangan Wanita Indonesia beranggotakan:

a) Ketentaraan:
   1) Laskar Wanita Indonesia Bandung.
   2) Laskar Putri Indonesia Solo.
   3) Perjuangan Putri Rakyat Indonesia Yogyakarta.
   4) Badan Pemberontakan Rakyat Indonesia bagian Putri Yogyakarta.
b) Keagamaan:
   1) Muslimat Yogyakarta.
   2) Aisyiyah.
   3) Persatuan Wanita Kristen Surakarta.
   4) Partai Katolik RI bagian Wanita Yogyakarta.
   5) Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Putri Yogyakarta
c) Perburuhan:

   Barisan Buruh Wanita Indonesia.
d) Sosial:
   1) Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) Yogyakarta.
   2) Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) Yogyakarta.
   3) Pemuda Putri Indonesia (PPI).[14]

E. Perkumpulan Pekerja Putri Surakarta (PPPS)

Organisasi ini dibentuk pada bulan Juli 1945 di bawah pimpinan Nn. Sutijah (Ny. Suryohadi) dan wakilnya Nn. Sumarni. Di dalam perebutan kekuasaan dengan Jepang, PPPS ikut aktif membuat Bendera Merah Putih dan ikut dalam barisan yang menurunkan Bendera Jepang di Balai kota Surakarta. Latihan Kemiliteran didapat dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) atau Tentara Keamanan Rakyat (TKR), yang meliputi pelajaran baris-berbaris,

14 Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya, 1999, 160-161.

bersembunyi, melempar granat, menggunakan senjata (senapan, revolver), mengemudi dokar, dan sebagainya.[15]

Sewaktu Surabaya diserbu, PPPS mengirim anggota - anggotanya ke Mojokerto, PPPS kemudian berganti nama menjadi Barisan Penolong, yang juga menyiapkan tenaga untuk *front* (garis depan) Ambarawa dan Salatiga. Adapun tugas Barisan Penolong adalah antara lain merawat korban pertempuran, mengorganisir pengiriman makanan ke *front*, membentuk dan melaksanakan tugas dapur umum di daerah operasi.

Kongres Pekerja Wanita di Kediri membentuk Barisan Buruh Wanita dengan pimpinan Ny. S. K. Trimurti. Barisan Buruh Wanita ini kemudian membentuk Laskar Buruh Wanita yang dipimpin oleh Nn. Sutiyah (Ny. Suryohadi). Laskar Buruh Wanita memberi bantuan ke berbagai front.[16]

F. Inspektorat Wanita

Pada bulan September 1946 dalam organisasi Kementerian Pertahanan dibentuk Biro Perjuangan sebagai suatu wadah dari badan-badan kelaskaran dan badan-badan perjuangan. Dalam Biro perjuangan ini dibentuk inspektorat-inspektorat. Dalam hubungan ini di Yogyakarta terbentuk Inspektorat Wanita di bawah pimpinan Nn. Supijah. Dengan dibentuknya Biro Perjuangan dengan Inspektorat Wanita, maka dewan-dewan Perjuangan dan kesatuan-kesatuan yang terbentuk di daerah, dimasukkan dalam inspektorat-inspektorat cabang. Adapun tugas-tugas Inspektorat Wanita ialah antara lain:

15 Lihat dalam lembaga sejarah Negara yakni Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Daerah Jawa Barat*. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1979, 172-173.

16 Dalam KOWANI, *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986, 101. bisa juga dilihat dari artikel yang mengutip yaitu Wulan Sondarika, "Peranan Wanita dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Masa Pendudukan Jepang", *Jurnal HISTORIA*, 5(2) 2017, 207-209.

a) Membantu memperhatikan kesejahteraan prajurit di garis depan, mengurus makanan, obat-obatan, pakaian, bingkisan untuk garis depan dari organisasi-organisasi.
b) Membantu menginterogasi tahanan-tahanan wanita yang dicurigai sebagai mata-mata.[17]

G. Wanita di Daerah

1. Tapanuli

Setelah Proklamasi Kemerdekaan di Sidikalang (Tapanuli) berdiri perkumpulan PERWANI (Persatuan Wanita Indonesia). Pada waktu itu wanita bekerja di dapur-dapur umum, menolong korban-korban perjuangan yang ditawan dalam penjara dan membantu palang merah.[18]

2. Tanjungkarang

Pada tanggal 27 Oktober 1945 di Tanjungkarang dibentuk Gerakan Putri Indonesia (GERPI). GERPI mengusahakan dapur umum untuk para bekas romusha (tenaga kerja paksa) dari seluruh Sumatra yang akan dipulangkan ke Jawa dan singgah di Tanjungkarang, juga penolong pemudi-pemudi yang akan pulang ke Jawa, setelah mereka dengan tipu muslihat dibawa oleh Jepang ke Singapura dan Sumatra.[19]

3. Kalimantan

Pada tanggal 17 Desember 1946 di Kalimantan didirikan Persatuan Wanita Indonesia (PERWANI) diketuai oleh Ny. N.

17 H.N. Ima; Hadi Soewito, *Lahirnya Kelaskaran Wanita dan Wirawati Catur Panca,* Jakarta: Yayasan Wirawati Catur Panca, 1992, 38-39.
18 Lihat dalam bab laskar perempuan Indonesia pasca kemerdekaan, PERWANI membentuk cabang di setiap daerah seperti di Tapanuli dan sebagainya. Menurut Condronagoro, laskar perempuan di daerah-daerah menambah kekuatan Indonesia sekaligus membuktikan bahwa kartini nusantara tidak mau tinggal diam dijajah oleh negara lain. Lihat penjelasan lengkap R.T. Condronagoro, *Riwayat Laskar Putri Indonesia di Surakarta*. Surakarta: Wirjowitono, 1976, 3-4.
19 R.T. Condronagoro, *Riwayat Laskar Putri Indonesia…*,, 5.

Djohansyah. Pembentukan ini mendapat sambutan di daerah-daerah terbukti dengan berdirinya cabang-cabang PERWANI di Banjarmasin dan Hulu Sungai. PERWANI yang mula-mula berfungsi sebagai badan perjuangan, selanjutnya banyak bergerak dalam bidang sosial politik.[20]

4. Nusa Tenggara

Proklamasi Kemerdekaan disambut di Bali dengan langkah-langkah untuk menyusun tenaga dan kekuatan membela dan mempertahankan Kemerdekaan. Semula langkah persiapan ini hanya dapat dilaksanakan di Sunda Kecil (sekarang Nusa Tenggara), tetapi kemudian meluas sampai Lombok dan Sumbawa. Karena daerah-daerah sebelah timur diduduki oleh Tentara Sekutu dari Australia dan Belanda, maka praktis hanya di Bali ada perjuangan menentang penjajahan. Dalam semua kegiatan, wanita tidak ketinggalan.

Dalam perang puputan di mana di desa Margarana pada tanggal 29 November 1946 Letkol I. Gusti Ngurah Rai gugur, peranan perempuan tidak dapat dikecilkan. Perjuangan bisa bertahan berkat bantuan kaum Ibu yang menyelenggarakan dapur umum di masa para pejuang menyingkir dan mengadakan perlawanan.[21]

Tidak sedikit perempuan yang menjadi penghubung antara desa dan kota, memberi informasi tentang musuh dan membawa perbekalan yang diperlukan. Di antara mereka, seorang perempuan penghubung Mensawer tertangkap dan dibawa ke Banyuwangi untuk kemudian disiksa di luar perikemanusiaan karena tidak mau menerangkan perjuangannya.

20 Ricklerfs, *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: UGM Press, 2011, 77.

21 Menurut penelusuran Syahrul Amar (2017) perempuan mulai abad ke XIX telah menuntut banyak hal termasuk dalam bidang pendidikan, selain juga hak-hak keadilan dalam mempertahankan martabat sebagai seorang perempuan. Sehingga muncul perjuangan yang dilakoni oleh R.A. Kartini. Lihat dalam Syahrur Amar, "Perjuangan Gender dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia pada Abad ke XIX", *Fajar Historia*, 1(2) 2017, 118-119; lihat juga dalam Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengurus Utamanya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 89.

Masih banyak daerah-daerah yang menunjukkan bahwa perempuan ikut aktif dalam perjuangan, tetapi kurang data-data untuk dikemukakan di sini.

H. Laskar Wanita

1. Barisan Putri

Didirikan pada zaman Jepang (1944) sebagai bagian dari organisasi Jakarta Tokubetsu Si Fujinkai dan berpusat di Balai Kota Jakarta. Fujinkai dipimpin oleh Ny. R.A. Abdurachman, barisan Putri dipimpin oleh Nn. Siti Delima sebagai ketua dan wakil ketua Nn. Nursyamsu (Nn. Nursyamsu Nasution).

Setelah Proklamasi dibentuk pula Barisan Putri di Jawa Barat dan Jawa Timur. Staf pimpinan di Pusat antara lain Nn. Setiati, Nn. R. Paramita Abdurachman, Nn. Malidar (Ny. Malidar Hadiyuwono). Pimpinan di Bandung adalah Nn. Mies (Ny. Imron Rosyadi), di Garut Nn. Kartini Maulani (Ny. Kartini Tambunan), dan di Jawa Timur Nn. Lukitaningsih (Ny. Irsan Radjamin).[22]

Setelah Proklamasi Jepang *de facto* masih berkuasa dan berkewajiban menjaga keamanan, sampai Sekutu datang. Tugas Barisan Putri pada waktu itu antara lain mencuri senjata di kantor-kantor dan rumah-rumah orang Jepang, bersama-sama dengan pemuda-pemuda Menteng 31 mengadakan siaran-siaran radio untuk seluruh Indonesia dan Luar Negeri tentang telah merdekanya Indonesia, membantu dapur umum di mana-mana, membantu perawatan korban pertempuran di Rumah Sakit dan Palang Merah Indonesia.[23]

Sebagai kejadian yang penting dapat dikemukakan antara lain: pada saat menjelang Proklamasi sandang dan pangan semakin sukar didapat karena gudang-gudang selalu dijaga ketat oleh

22 Periksa dalam Kathryn Robinson, *Gender, Islam and Democracy in Indonesia*. London: Routledge, 2009, 209-210.

23 Ani Soetjipto, "Perempuan dalam Politik Formal: Perdebatan Kajian Teori Feminis", *Jurnal Perempuan*, 17(4) 2012, 21.

tentara Jepang, timbul inisiatif dari seorang anggota Barisan Putri untuk mencuri hanco atau cap/ stempel yang biasa digunakan pada surat-surat untuk mengeluarkan barang dan gudang. Dengan menggunakan hanco tersebut keluarlah barang-barang dari gudang yang sangat diperlukan yaitu beras, gula, garam, tepung, teh, dan sebagainya. Demikian pula dapat dikeluarkan puluhan blok kain putih dan kain merah yang kemudian dibuat menjadi bendera merah putih.

Pada tanggal 19 September 1945 Barisan Putri ikut serta dalam Rapat Raksasa di Lapangan Ikada. Di Surabaya Barisan Putri di bawah pimpinan Nn. Lukitaningsih (Ny. Irsan Radjamin) telah membuat dasar pembentukan satuan Corps Pemuda Putri Indonesia Pejuang 45. Dengan kelompoknya dia telah menunjukkan keberanian yang luar biasa menghadapi Belanda.[24]

2. Laskar Wanita Indonesia (LASWI)

LASWI dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1945 di Bandung (Jawa Barat) dipimpin oleh Ny. S.Y. Arudji Kartawinata dan bermarkas di Gedung Mardihardja Jalan Pangeran Sumedang 91 Bandung. Tujuan pembentukan LASWI adalah membantu pejuang-pejuang pria baik di garis depan maupun di garis balakang karena merasa terpanggil oleh Revolusi. Anggota-anggotanya terutama adalah Pemudi Pelajar. Sebelum terjun di medan tugas mereka mendapat latihan-latihan yang meliputi pembinaan fisik dan mental, kemiliteran (baris-berbaris, penggunaan berbagai senjata, taktik gerilya), palang merah, intel dan lain-lain. Persenjataan yang dimiliki pada waktu itu ialah bambu runcing, pistol mauser dan keris serta ditambah beberapa gerobag dan beberapa ekor kuda sebagai alat angkutan.[25]

24 Julia Suryakusuma, *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2011, 41-43.

25 LASWI dalam catatan Streurs (1960) disebutkan sebagai tentara wanita yang membawa aneka kebutuhan para pejuang saat di medan pertempuran. Dengan ungkapan

Kegiatan-kegiatan LASWI meliputi bidang sosial, intel dan pertempuran. Dalam bidang sosial antara lain pada waktu terjadi banjir besar akibat meluapnya kali Cikapundung (1946) anggota LASWI diperbantukan dan ditugaskan untuk menyediakan makanan pada Palang Merah. Dalam bidang intel antara lain menugaskan Nani Sumarni dan Siti Sabariah yang melakukan penyelidikan di Bandung Utara, di mana mereka pernah tertangkap pada bulan Januari 1946. Dalam pertempuran-pertempuran di Bandung LASWI dipencar dalam delapan regu.

Dalam peristiwa Bandung Lautan Api, LASWI ikut aktif dalam pembumihangusan. Penyelenggaraan dapur perjuangan untuk Sektor Bandung, mencari bahan makanan dan mengirimkannya ke garis depan ditugaskan pula pada LASWI. Markas LASWI pada waktu itu berpindah-pindah, mula-mula di Ciparay, kemudian ke Majalaya.[26]

Markas di Majalaya mendapat serangan dari udara yang mengakibatkan 5 anggota LASWI gugur ialah Siti Murwati (dari Madiun), Siti Fatimah (dari Garut), Ida Mursida (dari Bandung), Sutiyawati (dari Yogyakarta) dan Lela (dari PPI Garut).

Pada bulan Desember 1946 LASWI pindah ke Tasikmalaya. Berhubung dengan seruan Pemerintah supaya para pelajar kembali ke Bangku Sekolah, sebagian dari anggota dikembalikan pada orang tua masing-masing. Yang masih ingin berjuang digabungkan pada Inspektorat Wanita Biro Perjuangan di Garut. LASWI di sini tugasnya antara lain melatih kader-kader wanita dalam kemiliteran, menjahit pakaian seragam untuk tentara kita, membuat makanan tahan lama untuk garis depan dan membantu rumah sakit darurat.

---

demikian, Streurs mengatakan bahwa peran perempuan dalam membantu kemerdekaan Indonesia sampai sekarang tidak dapat dianggap remeh. Perempuan bukan hanya membantu setiap agenda perjuangan para pejuang, namun mendirikan lascar, organisasi sampai pada pendidikan anak bangsa, bahkan ikut menumpahkan darah adalah bukti kehebatan kartini nusantara. Catatan ini disampaikan oleh Cora Vreede De Steurs, *The Indonesian Woman, Struggles and Achievements*. Den Haag: Mouton, 1960, 210.

26 Amaliatulwalidain; Novia Kencana, "Peranan Politik Gerakan Perempuan dari Masa ke Masa (Studi: tentang Sejarah Organisasi PKK di Indonesia)", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Global,* 04(1) 2019, 3-4.

Sewaktu tentara kita hijrah ke Yogya, sebagian dari LASWI ikut bersama pasukan hijrah ke Yogya sebagian lagi bersama Ny. A.H. Nasution, membantu keluarga tentara yang mau ikut hijrah ke Yogya. Pimpinan LASWI cabang Yogya adalah Ny. Awibowo (dengan putrinya), Ny. Hadinegoro (Istri Pangeran Hadinegoro), Ny. Tabrani dan Ny. Siti Achiriyah Maskun. Di Yogya LASWI ikut dalam Panitya Sosial dengan Ny. Utami Suryadarma sebagai Ketua dan Ny. S.Y. Arujikartawinata sebagai Wakil Ketua. Panitia Sosial ini membantu para Gerilyawan serta keluarganya dengan menyelenggarakan dapur umum.[27]

Dapat dicatat bahwa ada anggota LASWI sengaja disiapkan untuk diterjunkan sebagai tenaga-tenaga di garis depan antara lain:

- Ny. Gusti Johan (Ny. Lilik Kusmiyati Sadikin) dari Markas Besar Pertempuran Divisi penggempuran di bawah Mayjen Drg. Mustopo dan Letkol Z. Lubis.
- Nn. Susilowati (Ny. Jamil) dari Polisi Tentara *Front*.
- Nn. Wiwik Atikah dari Pasukan Aksi Ilegal.[28]

3. Laskar Putri Indonesia (LPI) Surakarta

Ada dua pihak yang menjadi pemrakarsa LPI ialah Nn. Sudijem, Nn. Siti Hartinah, dan Nn. Sayem pada satu pihak dan Nn. Srini (terkenal sebagai Ibu Srini, karena dapat menolong orang sakit dengan kekuatan batin), Nn. Prasasti, Nn. Sarwenten, Nn. Mastuti dari pihak kedua. Mereka ini kemudian bergabung dan dengan izin PMC (Plaatselijk Militair Commandant = Komandan Militer Setempat) mendirikan LPI pada tanggal 31 Desember 1945.[29]

Tujuan LPI adalah membentuk pasukan tempur wanita yang akan berjuang bersama pasukan pria dan pasukan bantuan untuk garis depan dan garis belakang. Anggota LPI berjumlah

27 Susan Balckbburn, *Women and the State in Modern Indonesia.* Cambridge: Cambridge Universitas Press, 2004, 11-14.
28 Susan Balckbburn, *Women and the State in Modern Indonesia…*, 15.
29 M. Zainal Anwar, "Organisasi Perempuan dan Pembangunan Kesejahteraan", *Jurnal Sosiologi Reflektif,* 8(1) 2013, 134-142.

lebih kurang 200 orang terdiri terutama dari pelajar putri yang semuanya diasramakan. Markas LPI berada di Komplek Balai Prajurit Batangan, Kelurahan Kedunglumbu Surakarta.[30]

LPI disusun dalam susunan seperti Kompi dengan staf dan pasukan. Pimpinan pertama adalah Komandan Nn. Sudijem (Ny. Mardowo). Wakil Komandan: Nn. Siti Hartinah (Ny. Tien Suharto istri Presiden Suharto), Komandan Kompi: Nn. Ontosinah Mangkubumi. Komandan-komandan seksi adalah Nn. Dartiyah, Nn. Prasasti dan Nn. Suripni. Pembina LPI adalah Mayor Suharto (sekarang Mayjen Suharto) dan Mayor Mardowo (sekarang Purnawirawan).[31]

Pada tahun 1946 diadakan penggantian pimpinan, menjadi sebagai berikut:

Komandan : Nn. Dartiyah (Ny. D. Suripto)
Wakil Komandan : Nn. Prasasti (Ny. Suwarno)
Sekretaris : Nn. Sri Suwarni (Ny. Rugito)
Staf terdiri dari : Nn. Pramani, Nn. Sri Wulan (Ny. Sri Suyitno), Nn. Mastuti dan Nn. Sarwenten, sesepuh Ny. S. Kumpul. Ny. Sukartono dan Ny. Suparjo.[32]

Kegiatan-kegiatan LPI meliputi antara lain:

1) Mengirimkan regu-regunya ke berbagai front seperti di Jawa Tengah di Mranggen, Salatiga, Bandaredjo, Demak, dan di Jawa Timur di Surabaya dan Ngampel. Pengiriman diatur secara bergantian sedang tugas yang dijalankan disesuaikan dengan situasi, antara lain membantu menyelenggarakan dapur umum, penerangan, membantu Staf Komando Teritorial, kesehatan.
2) Ikut menjaga tempat persediaan air minum *(water reservoir)* di Jebres Sala, membantu sebagai pengawas ekonomi, menjaga

30 Julia Suryakusuma, *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Depok: Komunitas Bambu, 2011, 87-103.
31 M. Zainal Anwar, *"Organisasi Perempuan dan Pembangunan Kesejahteraan"*…, 145.
32 Habib Shulton Asnawi, "Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Mengembalikan Keadilan HAM Kaum Perempuan", *Jurnal al-Ahwal*, 12(2) 2011, 88.

percetakan uang negara, membantu membuat kubu-kubu pertahanan.

3) Dalam kegiatannya bekerja sama dengan LASWI yang berkedudukan di Yogyakarta. Membantu membuat senjata di Persenjataan Negara di Gedung Gunung Kidul.
4) Ikut bergerilya di pedalaman setelah Solo diduduki Belanda; Menyusup ke Semarang dan Salatiga untuk gerakan di bawah tanah.[33]

Dengan adanya seruan Pemerintah pada Desember 1946 agar semua pelajar kembali ke bangku sekolah, sebenarnya LPI harus bubar, tetapi secara resmi LPI baru membubarkan diri pada tanggal 27 Oktober 1948.

4. Wanita Pembantu Perjuangan (WPP)

WPP dibentuk di Bintaran Tengah No. 3 Yogyakarta pada tahun 1946 sebagai organisasi Laskar Wanita. Tujuan pembentukan adalah menyiapkan tenaga wanita muda, untuk membantu perjuangan kemerdekaan baik di garis depan maupun di garis belakang. Anggota-anggotanya terdiri dari siswa SD dan SMP serta SMA yang setelah ada seruan pada para pemudi untuk ikut berjuang mendaftarkan diri untuk menjadi anggota WPP.

Pimpinan WPP adalah:

- Ketua: Dr. Sulianti (sekarang Prof. Dr. Sulianti Saroso)
- Sekretaris: Ny. Pudji Armyn Pane dengan pembantu Ny. Gusti Mayor, Staf lainnya adalah Ny. Ali Sastroamidjojo (Bendahara), Ny. Djoko Asmo (Usaha), Ny. Jo Chairul Saleh (Komandan Latihan), Ny. Pudji Armyn Pane (Wakil Komandan). Latihan diadakan secara teratur, tiap rombongan selama 3 bulan.[34]

33 Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, 120-121.

34 Lyn Ford Michele; Parker, "Introduction: thingking about Indonesian Women and Work", *Woment and Work in Indonesia*. New York: Routledge, 2008, 99.100; lihat juga dalam Himawan Soetanto, *Yogyakarta 19 Desember 1948 Jenderal Spoor (Operatie Kraai) Versus Jenderal Sudirman (Perintah Siasat No. 1)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, 106-107.

Latihan meliputi ilmu kemiliteran (di Akademi Militer Nasional Yogya) PPPK dengan praktik di rumah sakit Petronella, memasak untuk dapur umum, pemberantasan buta huruf, sejarah Indonesia, tata negara dan kesadaran nasional, budi pekerti dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa.

Tenaga pengajar adalah Ny. Siti Sundari Yamin, Ny. Supeni, Nn. Yetty Zain (drg. Ny. Yetty Rizali Noor), Ny. Sri Unun (Ny. Soebekti), Ny. Selo Soemardjan dan Ny. Sari Soelistiardjo. Pengajar dari Akademi Militer adalah antara lain Bapak Djatikusumo, Bapak Sutopo Juwono, Bapak Soeparman, Bapak Ismail.

Tenaga-tenaga perempuan yang telah dilatih ditugaskan di garis depan, untuk Palang Merah dan Dapur Umum; mereka ditugaskan juga untuk memberantas buta huruf di desa-desa sekitar Mranggen, Mojokerto, Bekasi, Karawang, dan lain-lain. Dalam tugas, mereka ditampung dan diawasi oleh Biro Perjuangan (Bagian dari Departemen Pertahanan). Setelah Yogyakarta diduduki oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, anggota WPP menggabungkan diri dengan Biro Perjuangan di luar Yogyakarta.[35]

5. Laskar Muslimat

Partai Islam di samping mendirikan LASMI (Laskar Muslimin Indonesia) juga membangun Laskar wanitanya ialah Laskar Muslimat, berpusat di Bukittinggi. Laskar Muslimin dididik/dilatih seperti LASMI ialah: baris-berbaris, hidup berdisiplin tentara dan menggunakan senjata (senjata api dan bambu runcing).

Pelantikan-pelantikan Laskar Muslimat ini diadakan di berbagai kota di Sumatra Tengah, umpamanya di Bukittinggi, Padang, Solok, Sawahlunto, Bangkinang, Kampar, dan Kerinci. Dalam pelantikan-pelantikan ini mereka memakai pakaian seragam sarung batik, baju dan kerudung putih. Tugas Laskar Muslimat ini antara lain

35 Julia Suryakusuma, *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru…*, 90.

ikut serta berjuang di garis depan, masuk hutan ke luar hutan, masuk kampung ke luar kampung dan ikut "Long March" dari bukit ke bukit dan dari gunung ke gunung.[36]

Medan pertempuran Padang luar kota mengenal benar perjuangan Laskar Muslimat di Sumatra Tengah. Beberapa nama pemuka-pemuka Laskar Muslimat adalah antara lain Rosni Zainal, Norma Alamsudin (sekarang Norma Aminuddin). Haji Sariani, Maljani Manan, Rohana Thaib, Nurjani Tanjung Barulak, Sulijah Batipuh, Jaura Muara. Labuh, Nurijah Ahmad, Lawijah Batusangkar, Ramani Nurisan, Latifah Bonjol, dan sebagai penasihat umumnya adalah Umi H. Salima.[37]

6. Sabil Muslimat

Laskar Sabil Muslimat dibentuk pada tanggal 2 Oktober 1945 di Sumatra Tengah dan berpusat di Padang Panjang. Anggotanya Laskar tersebut terdiri dari gadis-gadis antara lain pelajar-pelajar sekolah menengah seperti: Kuliyatul Mubalighaat, Normal School Padang Panjang, Diniyah Putri, Ma'ahad Payakumbuh, Sekolah Menengah Putri Muhammadiyah, Normal Islam Padang, *Kweekschool* Bukittinggi. Juga pemudi-pemudi putus sekolah ada yang menjadi anggota Sabil Muslimat. Mereka menjadi anggota Sabil Muslimat karena merasa terpanggil oleh cinta tanah air untuk membela kemerdekaan.[38]

Dari tiap kabupaten di Sumatra Tengah dipanggil lima orang yang fisik dan mentalnya baik, untuk mengikuti latihan sebagai persiapan tugas mereka nanti. Mereka ini menjadi Komandan/ Staf di daerahnya masing-masing. Latihan diadakan selama tiga bulan dan dalam latihan mereka diberi latihan perang, latihan

36 Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Kesetaraan Kaum Perempuan dalam Organisasi Masyarakat Islam di Indonesia", *Jurnal Masawa*, 11(1) 2012, 90..

37 Santi Wijaya Hesti Utami, Kesetaraan Gender "Langkah Menuju Demokratisasi Desa, Yogyakarta: IP. Lappera Indonesia, 2001, 209; lihat juga dalam Julia Suryakusuma, *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru…*, 97.

38 Tjandraningsih Indrasari, "Mengidentifikasi Persoalan Perempuan", *Jurnal Analisis Sosial. AKATIGA*, 3(2) 1996, 39-40.

intel, dapur umum, latihan Palang Merah (termasuk PPPK), salat di Medan Perang, semuanya dengan disiplin ketentaraan.

Setelah mengikuti latihan, mereka disebar ke daerah untuk membentuk Laskar Sabil Muslimat di Daerahnya masing-masing. Pimpinan Sabil Muslimat berpusat di Padang Panjang dengan Komandannya Nn. Syamsiyah. Syam (Dra. H. Syamsiyah Syam). Di samping itu yang duduk dalam pimpinan adalah antara lain Asniah Asir, Nuraini, Nudiai, Zawiyah, Rohani, Istom, Ibu khodijah, Syamsidar, Maiipunah, Rosna Rais, Norma Karim, Yuniar, Zainar, dan Rosjidah.[39]

Laskar Sabil Muslimat tersebar di seluruh Sumatra Tengah, di front Padang luar kota, Bukittinggi, Payakumbuh, Lintau, Batusangkar, Teluk Bayur, Pariaman, Sei Liman, Sei Tiku Painan, Solok, Kerinci, Maninjau, Sulit Air, Jambi, Matur, dan Sawahlunto.

Aktivitas Laskar dibagi dua, ialah di garis depan dan garis belakang. Untuk garis depan *(front)* diambil mereka yang telah dilatih perang gerilya dan berasal dari daerahnya sendiri serta ditambah dari luar daerah. Tugas mereka adalah mempertahankan sebagai palang merah, menyelenggarakan dapur umum, tugas intel (masuk daerah musuh) memberi penerangan dan membina mental anggota.[40]

Di garis belakang mereka melatih kader-kader mencari dan mengumpulkan bahan makanan, menjaga keamanan selama orang bersalat Jum'at (seluruh Sumatra Tengah setiap hari Jum'at mengerahkan semua orang untuk bersembahyang Jumat di masjid-masjid, sehingga pasar, toko-toko dan lain-lain tempat kosong), memberi penerangan dan membagi serta mengangkut makanan ke *front* Padang luar kota. Kejadian-kejadian yang dapat dicatat antara lain:

39 M. Zainal Anwar, *"Organisasi Perempuan dan Pembangunan Kesejahteraan"…,* 45.
40 Dian Farricha, *Sosiologi Hukum dan Gender, Interaksi Perempuan dalam Dinamika Norma dan Sosio Ekonomi,* Malang: Bayumedia Publishing, 2010, 1-3;

1) Sewaktu pada tanggal 3 Maret 1947 terjadi clash antara Laskar dan TNI, Sabil Muslimat membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan mengadakan rapat antara pihak-pihak yang bersengketa dipimpin oleh Komandan Sabil Muslimat Nn. Syamsiyah Sjam.
2) Ketika Komisi Tiga Negara (KTN) mengirimkan konsul-konsulnya meninjau keadaan Republik Indonesia di Bukittinggi, Sabil Muslimat mengumpulkan anggota-anggotanya di seluruh Sumatera Tengah untuk berdemonstrasi di muka KTN bersama-sama Laskar lain. Tujuan demonstrasi adalah ingin membuktikan pada KTN bahwa rakyat tidak ingin dijajah kembali. Pada waktu itu (September 1947) Sabil Muslimat dapat mengumpulkan masa 10.000 orang termasuk anggotanya lengkap dengan pakaian seragamnya (celana dan kemeja serta tutup kepala abu-abu).
3) Pada bulan Desember 1948 Laskar Sabil Muslimat ikut membumihanguskan kota Bukittinggi (pada waktu itu tempat kedudukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia) dan ikut menyiapkan Pemerintahan Darurat ke Payakumbuh.
4) Pada tanggal 6 Januari 1949 Syamsiah Syam ditangkap Belanda dan mendapat tahanan rumah sampai peletakan senjata.
5) Sabil Muslimat juga ikut membantu menggagalkan usaha membentuk Daerah Sumatera Barat terlepas dari republik Indonesia Serikat (RIS). Setelah pengakuan kedaulatan, Sabil Muslimat dibubarkan.[41]

41 Habib Shulton Asnawi dkk. *Hak Asasi Manusia di Indonesia; Kajian Terhadap Hak-hak Pendidikan Kaum Perempuan di Indonesia, dalam Ni'matul Huda dan Suparman Marzuki (ed.),* Yogyakarta: Pascasarjana FH UII dan FH UII Press, 2011, 105.

I. Laskar Gabungan

Data-data tidak banyak didapatkan tetapi yang jelas pemudi/ pelajar putri tidak sedikit yang menggabungkan diri dalam TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar) serta Korps Mahasiswa. Tugas mereka pada umumnya sama dengan yang dilaksanakan wanita-wanita dalam badan-badan perjuangan atau kelaskaran.

Nama-nama yang diketahui antara lain: Nn. Sudijati (sekarang Ir. Kimia pada perindustrian Angkatan Darat dengan pangkat Letkol Kowad), Ny. M. Hamzah (Istri Laksamana Muda Hamzah), Nn. Supraptinah (Ny. Sunarso SH), Ny. Prakoso (istri Brigjen Dr. Prakoso).[42]

Di samping badan-badan perjuangan tersebut di berbagai tempat kaum wanita Indonesia juga banyak yang bekerja secara spontan tidak di bawah satu badan perjuangan atau organisasi, melainkan secara perorangan atau bersama-sama, menyelenggarakan dapur umum, palang merah, menyiapkan dan mengirimkan makanan untuk garis depan.

J. Terbentuknya Polisi Wanita

Pada tahun 1948 Jawatan Kepolisian Negara di Yogyakarta bermaksud menerima untuk pertama kali siswa Polisi Wanita. Gagasan ini mendapat dukungan penuh dari pimpinan KOWANI. Dalam rangka maksud ini Jawatan Kepolisian Negara di Sumatera Barat pada tanggal 1 September 1948 menerima 6 orang calon untuk dididik sebagai Inspektur Wanita di Bukittinggi yaitu: Ny. Nelly Paung Sitomurang, Ny. Jasmaniar Husein, Ny. Rosmaliana Pramono, Ny. Maria Mufti, Ny. Rosalia Taher dan Ny. Dahniar Sukoco karena hubungan dengan Jawa putus tidak diketahui

42 Suhartono. 2001. *Sejarah Pergerakan Nasional: dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945,* 17.

apakah Yogyakarta masih meneruskan penerimaan calon, namun penerimaan di Sumatera Barat diteruskan.

Penerimaan Polisi Wanita ini didukung oleh organisasi wanita setempat, lebih-lebih karena daerah-daerah yang fanatik Islam tidak dapat menerima adanya petugas-petugas pria melaksanakan pemeriksaan badan terhadap wanita (pada umumnya pelarian dari Singapura, Riau dan lain-lain).

Dalam *Clash* ke-II (Perang Kemerdekaan II) Polisi Wanita meninggalkan tugasnya sebagai petugas keamanan dan beralih menjadi alat perjuangan bangsa yang mempertahankan kemerdekaan. Pada tahun 1950 Polisi Wanita dilatih kembali di Sukabumi. Tugas Polisi Wanita di samping tugasnya sebagai Angkatan Kepolisian juga mempunyai tugas khusus untuk mencegah serta memberantas segala kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan terhadap anak-anak remaja dan wanita. Dalam perkembangan selanjutnya KOWANI ikut memperjuangkan berlangsungnya dan dibukanya pendidikan-pendidikan Polisi Wanita.[43]

43 Ratih, I G.A.A. "Jejak-Jejak Perbincangan Perempuan dalam Sejarah", *Jurnal Perempuan*, 6(3) 2009, 63.

Bab IX

Pergolakan Perempuan Pasca Kemerdekaan

A. Membantu Komite Nasional

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI organisasi Fujinkai sebagai satu-satunya organisasi wanita dibubarkan oleh Ketuanya Ny. Sunaryo Mangunpuspito. Dalam maklumat pembubaran dianjurkan agar di Kabupaten-Kabupaten dan Kota-Kota dibentuk lagi organisasi dan untuk sementara diberi nama Persatuan Wanita Indonesia (PERWANI). PERWANI bertugas antara lain membantu Komite Nasional di Daerah, mengobarkan semangat Kemerdekaan. Ny. Suwarni Pringgodigdo, anggota Dewan Pertimbangan Agung mendapat tugas menyediakan tenaka pimpinan wanita yang sanggup bekerja di Jakarta. Untuk itu dibentuk Wanita Negara Indonesia (WANI).[1] Mengenal WANI selanjutnya telah diuraikan pada bagian bidang pertahanan.

Dalam suasana Proklamasi Kemerdekaan ini timbullah di daerah berbagai organisasi wanita antara lain di Yogyakarta:

1. PERWANI di bawah pimpinan Ny. D. M. Hadiprabowo dan Ny. D.D. Sutanto.

1 Sri Suhandjati Sukri, *Ragam Pemberdayaan Perempuan Versi Organisasi Perempuan Islam Indonesia,* Semarang: Balai Penerbit dan Pengembangan Agama, 2010, 55.56.

2. Persatuan Pemudi Indonesia (PPI) di bawah pimpinan Nn. Astuti. Dalam proses perkembangannya menjadi Pemuda Putri Indonesia.
3. Persatuan Pegawai Putri Indonesia (PPPI) dipimpin oleh Nn. Widajati Soegarda (Ny. Soetardjo), organisasi ini berdiri beberapa bulan sebelum Jepang menyerah.[2]

Persatuan Pegawai Putri Indonesia (PPPI) dan Pemuda Putri Indonesia (PPI) mengambil tugas yang sama dengan PERWANI ialah membantu perjuangan. Sehubungan dengan pengertian Pegawai yang identik istilah "Buruh", timbul pikiran bahwa PPPI semestinya menggabungkan diri dengan organisasi yang secorak yaitu organisasi buruh.[3]

Setelah mengadakan hubungan dengan Barisan Buruh Indonesia (BBI), PPPI diakui sebagai barisan dari BBI. Nama PPPI diubah menjadi Barisan Buruh Wanita (BBW). BBW berkembang cepat dalam waktu singkat sudah mempunyai 17 Cabang. Dalam perkembangannya kedudukan BBW dalam lingkungan perjuangan buruh adalah sebagai persemaian kader-kader buruh wanita dan menjadi organisasi yang berafiliasi dengan BBI (Barisan Buruh Indonesia/PBI (Partai Buruh Indonesia).[4] Peristiwa-Peristiwa penting menjelang Kongres Wanita Indonesia ke-V

a. Setelah Proklamasi Kemerdekaan organisasi-organisasi wanita mengadakan kongres pertama di Klaten pada tanggal 15-17 Desember 1945.
   1) Prakarsa diambil oleh PERWANI Yogyakarta yang kepengurusannya terdiri dari:
      Ketua : Ny. M.D. Hadiprabowo
      Wakil Ketua : Ny. Reksosiswo

2 Azyumardi Azra, *Biografi Sosial-Intelektual Ulama Perempuan: Pemberdayaan Historiografi,* dalam Jajat Burhanuddin, *Ulama Perempuan Indonesia.* Jakarta: PPIM, 2001, 11-12.
3 Sri Suhandjati Sukri, *Ragam Pemberdayaan Perempuan Versi Organisasi Perempuan Islam Indonesia…,* 58.
4 Marzuki Wahid, *Kebangkitan Ulama Perempuan dalam Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia: Kumpulan Tulisan Terkait Materi Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Cirebon: Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017, 11-13.

Penulis : Ny. Sukono
Bendahara : Ny. Hertog
Pembantu : Ny. Hadikusumo
Ny. D. Susanto
Ny. Hadiwinoto
Ny. Mudjono

2) Panitia Penyelenggara diketuai oleh Ny. D. Susanto. Hadir pada Kongres tersebut ialah:
   a) PERWANI (Persatuan Wanita Indonesia).
   b) WANI (Wanita Negara Indonesia).
   c) PPI (Pemuda Putri Indonesia).
   d) PB Aisyiyah.
   e) PB Persatuan Wanita Taman Siswa.
3) Tujuan Kongres
   a) Mempersamakan ideologi.
   b) Membentuk Badan Persatuan.
   c) Merundingkan hal-hal yang perlu.
4) Keputusan-Keputusan antara lain:
   a) Melebur PERWANI dan WANI menjadi satu dengan nama "Persatuan Wanita Republik Indonesia" (PERWARI) yang diketuai oleh Ny. Sri Mangunsarkoro. Perkumpulan ini adalah perkumpulan sosial yang berasaskan Ketuhanan, Kebangsaan dan Kerakyatan, tetapi kepada para anggotanya diberikan pendidikan politik umum, agar mereka sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan sebagai ibu bangsa.
   b) Tempat kedudukan di Yogyakarta.
   c) Menetapkan urgensi program sebagai berikut:
      (1) Program kerja jangka pendek yaitu: mengadakan latihan persenjataan, dapur umum dan lain-lain.

(2) Program kerja jangka panjang yaitu: bidang sosial, pendidikan dan lain-lain.

b. Di Solo pada tanggal 24-26 Februari 1946 diadakan Konferensi organisasi-organisasi Wanita Indonesia. Konferensi tersebut, diadakan atas prakarsa Ny. Suwarni Pringgodigdo dan Ny. S. Kartowijono dan disokong oleh PERWARI (Ny: Sri Mangunsarkoro) dengan maksud mendirikan badan penghubung untuk organisasi-organisasi Wanita.

c. Keputusan yang diambil ialah:
   1) Mendirikan badan gabungan yang diberi nama "Badan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) yang diketuai oleh Ny. Supardjo dan berkedudukan di Solo.
   2) Cabang-cabang dapat dibentuk di tempat-tempat yang perlu.
   3) Susunan Pengurus Badan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI):
      Ketua : Ny. Soepardjo Wakil
      Ketua I : Ny. S. Kartowijono Wakil
      Ketua II : Ny. Sutarman Wakil
      Ketua III : Ny. S. Sukemi
      Penulis : Ny. Sukarso
      Bendahari : Ny. Purwoatmodjo
   4) Anggota KOWANI
      1. PERWARI
      2. Pemuda Putri Indonesia (PPI).
      3. Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI).
      4. Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) bagian wanita.
   5) Menetapkan urgensi program di dalam bidang pembelaan sosial, pendidikan, ekonomi, penerangan dan lain-lain dengan membentuk badan-badan keahlian antara lain:
      1. Sosial: dengan pengurus Dr. Ani Sosrohadikusumo dan Ny. Hadinoto.

2. Pendidikan : dengan pengurus Ny. Sukartini
3. Kesehatan dengan pengurus dr. Mudinem
4. Politik/ Ekonomi dengan pengurus Ny. Suwarni Pringgodigdo
5. Hukum/adat: dengan pengurus Ny. Maria Ulfah Santoso SH
6. Kebudayaan/Kesenian: dengan pengurus Ny. Sri Mangunsarkoro
7. Perhubungan: dengan pengurus Nn. Popy Saleh (Ny. St. Syahrir)

6) Mengadakan badan, Pusat Tenaga Perjuangan Wanita Indonesia (PTPWI) yang berkedudukan di Yogyakarta dan dipimpin oleh satu Komando dengan menunjuk Ny. Sri Mangunsarkoro sebagai pimpinannya. PTPWI bersifat sementara dan merupakan badan perjuangan semata-mata untuk menghimpun dan memusatkan tenaga dengan perjuangan yang membantu pemerintah untuk menegakkan Republik Indonesia yang terdiri dari organisasi-organisasi perjuangan dan bersifat kelaskaran, keagamaan, perhubungan, sosial.
7) Kewajiban KOWANI yang penting:
   1. Menyelenggarakan Kongres.
   2. Mengadakan pertemuan-pertemuan antara pengurus-pengurus besar organisasi-organisasi yang tergabung dalam KOWANI dan antara badan-badan yang dibentuk oleh KOWANI.
   3. Mewakili pergerakan wanita Indonesia keluar dan kedalam negeri.
8) Menetapkan mosi menuntut Kemerdekaan 100 % dan berdiri di belakang Pemerintah.[5]

5 Lihat dalam lembar lampiran tentang keputusan Kontres Perempuan dalam Helmi Ali Yafie, *Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan Indonesia*. Jakarta: KUPI, 2017, 302-309.

B. Kongres Wanita di Madiun

a. Kongres diadakan di Madiun pada tanggal 14-16 Juni 1946.

b. Panitia Kongres diketuai oleh Ny. Susanto Tirtoprojo.

c. Nadir pada Kongres tersebut 14 organisasi ialah:
   1) Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari)
   2) Pemuda Putri Indonesia (PPI)
   3) Pejuang Putri Republik Indonesia (PPRI)
   4) Muslimat
   5) Aisyiah
   6) Gerakan Pemuda Islam Indonesia Putri (GPII Putri)
   7) Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PV(KI)
   8) Barisan Buruh Wanita (BBW)
   9) Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) bagian wanita
   10) Pemuda Indonesia Maluku (PIM) bagian Wanita
   11) Angkatan Muda Katolik Republik Indonesia (AMKRI) bagian wanita
   12) Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS) bagian wanita
   13) Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) bagian wanita
   14) Laskar Wanita Indonesia (LASWI)

d. Keputusan-Keputusan Kongres adalah:
   1) KOWANI menjadi badan federasi yang merupakan badan legislatif, dipimpin oleh Dewan Pimpinan yang terdiri dari wakil-wakil organisasi anggota.
   2) Untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari diadakan Badan Pekerja yang berkedudukan di Yogyakarta.
   3) Pimpinan KOWANI ditetapkan sebagai berikut:
      a) Dewan Pimpinan Pusat.
         Ketua Umum : Ny. Suyatin Kartowiyono
         Wakil Ketua : Ny. Sutarman

Anggota-anggota :

- Ny. Sugeng Winotosastro
- Ny. Aisyah Hilal
- Ny. Djuriah
- Ny. Sri Mentek
- Ny. Awibowo
- Ny. Tuti Harahap SH
- Ny. Kwari Sosroatmodjo
- Ny. Brotowirdoyo
- Ny. Sukarso
- Ny. Hariyati
- Ny. Hanah
- Ny. Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito
- Ny. Sutiyah Suryohadi

b) Pengurus Badan Pekerja.

Ketua : Ny. Burdah Yusupadi

Penults : Ny. Sukirno

Bendahari : Ny. Sunaryo Mangunpuspito

c) Pimpinan dilengkapi dengan pengurus bidang-bidang atau bagian-bagian sebagai berikut:

(1) Bagian Penerangan:

- Ny. Dr. Hurustiati Subandrio
- Nn. Yetti Zain (Drg. Ny. Yetti Noor)
- Ny. S. Suryohadi
- Ny. Utami Suryadarma

(2) Bagian Perjuangan:

- Ny. S. Pudjobuntoro
- Ny. Gusti Djohan
- Ny. Hadinegoro
- Ny. Hartijati dan lain-lain

(3) Bagian Sosial:
- Ny. Dr. Sulianto
- Ny. Aisyah Hilal
- Ny. Wachidal Sukidjo dan lain-lain

(4) Bagian Pendidikan:
- Nn. Sukartini
- Nn. Suritinah, dan lain-lain[6]

C. *All Asean Women Conference*

a. Mengirimkan delegasi ke *All Asean Women Conference* yang terdiri dari Ny. Maria Ulfah Santoso SH, Nn. Yetti Zain (Ny. Yetti Noor) dan Nn. Sutijah (Ny. S. Suryohadi).

b. Di Kalimantan pada tanggal 17 Desember 1946 didirikan Persatuan Wanita Indonesia (PERWANI) yang berkedudukan di Banjarmasin dan diketuai oleh Ny. N. Djohansyah dengan cabang-cabang di Banjarmasin dan Hulu Sungai.
Pada tanggal 16-18 Juni 1947 PERWANI mengambil prakarsa untuk mengadakan konferensi wanita seluruh Kalimantan. Dalam konferensi diambil beberapa keputusan antara lain:
1) Membentuk Panitia kongres panitia Kalimantan
2) Mengirim delegasi wanita ke tanah merdeka
3) Mendesak pada anggota-anggota partai agar istri dan putri mereka dianjurkan menjadi anggota persatuan wanita.
4) Memberantas kawin paksa dan perkawinan di bawah umur. Kongres wanita se-Kalimantan pertama diadakan pada tanggal 17-20 Februari 1948 di Kandangan dan dihadiri oleh utusan dari KOWANI Pusat.

Salah satu keputusan penting dalam Kongres ialah tergabungnya semua Organisasi Wanita se-Kalimantan dalam

6 Helmi Ali Yafie, *Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan Indonesia…,* 322.

satu federasi Persatuan Tindakan Wanita Indonesia (PERTIWI) dengan susunan pengurus sebagai berikut:

a. Ny. Gusti Djohansyah (Ketua Dewan Pimpinan)
b. Ny. GT. Hidajat (Pembantu-pembantu)
c. Ny. GT. Mastoto

PERTIWI hampir meliputi seluruh Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Dalam proses perkembangan PERWANI di Kalimantan, maka pada konferensi PERWANI tanggal 5 dan 6 Februari 1950, PERWANI dilebur dalam PERWARI.[7]

D. Kongres Wanita di Magelang

a. Untuk persiapan Kongres diangkat Ny. Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito sebagai Ketua Harian dibantu oleh Penulis Ny. Padmomarwoto dan Bendahara Ny. Aisyah Hilal.
b. Panitia Kongres di Magelang diketuai oleh Ny. Sumantri dibantu Ny. Marjaban, Ny. Sukatini, Nn. Darsini, Ny. Yudodifiroto, Ny. Partolegowo, dan lain-lain.
c. Tujuan Kongres adalah:
    1) Meninjau bentuk KOWANI dengan cabang-cabang di Daerah.
    2) Meninjau kembali program kerja dan meneliti hasil pekerjaan selama setahun.
d. Keanggotaan KOWANI tidak berubah.
e. Keputusan-keputusan Kongres adalah:
    1) Badan Pekerja dihapuskan.
    2) KOWANI dipimpin oleh Dewan Pimpinan.
    3) Dalam Dewan Pimpinan dibentuk Sekretariat Umum, yang mencakup seksi-seksi untuk menampung bagian-bagian dari badan pekerja.

7 Helmi Ali Yafie, *Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan Indonesia…,* 329-331.

4) Sekali 3 bulan atau bila perlu diadakan Dewan Permusyawaratan yang dihadiri oleh DPP lengkap dan pimpinan-pimpinan dari organisasi-organisasi yang menjadi anggota.
5) Mengirimkan resolusi kepada *"De Nederlandsche Vrouwen beweging"* untuk menyatakan simpati Wanita Indonesia terhadap aksi kaum Wanita Belanda yang menentang pengiriman pasukan-pasukan Belanda ke Indonesia.

f. Susunan Pengurus KOWANI ke-I

Ketua : Ny. Sunaryo Mangunpuspito
Wakil Ketua : Ny. Maria Ulfah Santoso SH
Penulis I : Ny. Tahir
Penulis II : Ny. Brotowerdojo
Bendahari : Ny. Sugeng Winotgsastro
Pembantu : Ny. Aisyah Hilal dan Ny. Wachidal Sukidjo.

Mengirimkan utusan ke *All Indian Women Conference* di Madras pada bulan November 1947 yang terdiri dari Ny. Siti Sukaptinah Sunarjo Mangunpuspito, Ny. Sulianti Saroso dan Ny. Utami Suryadarma.[8]

E. Kongres Wanita di Solo

a. Panitia Kongres diketuai oleh Ny. Kusban.

b. Tujuan Kongres:
Meninjau gerak dan usaha KOWANI untuk mengatasi perpecahan yang timbul sebagai akibat "Naskah Renville" yang terasa pengaruhnya pada KOWANI karena KOWANI mempunyai anggota dari berbagai aliran.

c. Keputusan-keputusan Kongres:
a) KOWANI tetap dipimpin oleh Dewan Pimpinan dan sebagai Ketua dipilih Ny. Supeni Pudjobuntoro (sekarang

8 Lihat dalam lampiran hasil kongres perempuan dalam Leila Ahmad, *Wanita dan Gender dalam Islam: Akar-Akar Historis Perdebatan Modern*. Jakarta: Lentera, 2000, tth.

Ny. S. Achmad Natakusumah), dan Wakil Ketua Ny. Maria Ulfah Santoso SH.

b) Sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretariat Umum.

c) Di samping Sekretariat Umum, dibentuk badan-badan otonom yang mengadakan perluasan secara vertikal bagi usaha-usaha jangka panjang, misalnya tentang urusan hukum waris dan perkawinan, urusan perburuhan wanita, hygiene sosial dan urusan pemberantasan buta huruf.

d) Azas KOWANI adalah:
   (1) Menebalkan persaudaraan antara organisasi-organisasi wanita.
   (2) Pancasila Negara Republik Indonesia.

e) Tujuan:
   (1) Menegakkan Negara Republik Indonesia.
   (2) Membawa wanita Indonesia ke arah terlaksananya UUD pasal 27 (persamaan hak warga Negara).
   (3) Menjelmakan dan melaksanakan keadilan sosial dan perdamaian dunia.

f) Usaha-usaha:
   (1) Ke dalam:
      - Mempersatukan tenaga wanita Indonesia dalam ikut menyelesaikan revolusi Nasional.
      - Mendidik wanita Indonesia ke arah terwujudnya tujuan KOWANI.
   (2) Ke luar:
      Selalu memelihara hubungan dengan dunia luar, terutama dengan *Women Internasional Democracy Federation* (WIDF).

d. Mengadakan seruan dan ajakan:
   1) Ke dalam:
      a) Menyerukan kepada rakyat se-Kalimantan dan Indonesia Timur umumnya, kaum wanita khususnya untuk meneruskan perjuangan Nasional.
      b) Mendukung dan memperkuat protes DPP KOWANI yang disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia, Delegasi Belanda, Delegasi Indonesia, WIDF tentang penembakan anak-anak pandu oleh serdadu-serdadu Imperialis Belanda pada tanggal 16-17 Agustus 1948 di Pegangsaan Jakarta.
      Blokade Belanda yang sangat kuat.
   2) Terhadap Pemerintah:
      a) Mendukung dan memperkuat protes Pemerintah RI kepada Dewan Keamanan PBB terhadap penembakan di Jakarta.
      b) Membenarkan pendirian Pemerintah untuk tidak mulai berunding dengan Belanda sebelum *immuniteit* (kekebalan) terjamin sebagai pelaksanaan perjanjian *(truce agreement)* dan hak demokrasi.
      c) Supaya Pemerintah menindak pengacau-pengacau ekonomi.
   3) Ke luar Negeri:
      a) Melalui WIDF menyampaikan protes kepada Dewan Keamanan PBB tentang tindakan-tindakan imperialis Belanda.
      b) Mengajak semua ibu dari segala Bangsa untuk selalu menjunjung tinggi dan mencintai perikemanusiaan sebagai sendi perdamaian dunia.

e. Lain-lain:

Aisyiyah, Muslimat dan GPII Putri mengusulkan: Agar KOWANI merupakan badan kontak *(Contact lichaam)* dan

supaya semua keputusan diambil dengan suara bulat, Karena kongres tidak dapat menerima usul ini, Aisyiah, GPII Putri dan Muslimat ke luar dari keanggotaan KOWANI.

Peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan penting setelah kongres ke VII:

a. Pemberontakan Madiun (tanggal 18 September tahun 1948).
b. Serbuan tentara Belanda ke Ibu Kota Republik Yogyakarta pada tanggal 19 Desember tahun 1948.
c. Larangan bersidang dan berkumpul oleh tentara pendudukan Belanda.
d. Dalam rapatnya yang diadakan pada bulan Mei 1949 KOWANI mengeluarkan pernyataan (statement) yang penting. Pernyataan tersebut merupakan suatu pemberitahuan akan adanya permusyawaratan organisasi-organisasi wanita seluruh Indonesia karena keadaan perang sukar berhubungan satu sama lain.

   Pernyataan tersebut didasarkan pada pendapat bahwa:

   1) Gerakan Wanita merupakan salah satu kekuatan dan alat perjuangan.
   2) KOWANI adalah satu-satunya organisasi yang menghimpun organisasi-organisasi Wanita.

   Adapun isi pernyataan antara lain adalah:

   1) KOWANI harus mengambil prakarsa untuk membangun kembali dan mempersatukan Organisasi Wanita seluruh Indonesia untuk melanjutkan perjuangan.
   2) Mengusahakan terselenggaranya kongres wanita seluruh Indonesia.
   3) KOWANI akan mengadakan persiapan di kalangan organisasi anggota supaya menghubungi cabang-cabangnya di Daerah.
   4) Menyusun persiapan untuk permusyawaratan di Yogyakarta.

Maksud permusyawaratan adalah:

a) Membawa wanita Indonesia ikut serta dalam perjuangan bangsa.
b) Meningkatkan perjuangan wanita.
c) Mempererat hubungan antara pergerakan-pergerakan wanita seluruh Indonesia.

5) Permusyawaratan harus mencakup:
   a) Pergerakan wanita merupakan faktor yang penting dalam perjuangan bangsa.
   b) Emansipasi rakyat harus disertai emansipasi wanita.
   c) Satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan pergerakan wanita adalah kemerdekaan bangsa yang berdaulat.

e. Permusyawaratan Wanita seluruh Indonesia diadakan pada tanggal 26 Agustus sampai 2 September 1949

1) Atas prakarsa KOWANI diadakan permusyawaratan wanita di Yogyakarta yang dihadiri oleh kurang lebih 82 orang organisasi wanita dari Sabang sampai Merauke. Panitia penyelenggara diketuai oleh Ny. Burdah Yusupadi dan anggota-anggota:

   Ny. Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito, Ny. Maria Ulfah Santoso SH, Ny. Supeni Pudjobuntoro (Ny, S. Achmad Natakusumah), Ny. Theodora Walandouw. Patut dicatat bahwa rombongan peserta kongres dari Jakarta di bawah pimpinan nyonya Abu Hanifah harus melalui daerah yang masih dikuasai tentara Belanda dan seluruh gerbang kereta api digeledah sedangkan peserta diinterogasi oleh tentara Belanda. Demikian pula yang dialami oleh para peserta di luar Jawa.

2) Pembicaraan meliputi:
   a) Fungsi daripada pergerakan wanita di dalam perjuangan rakyat oleh Ny. S. Pudjobuntoro (Ketua DPP Kowani).

b) Hak dan kewajiban wanita sebagai Warga Negara oleh Ny. Badilah Zuber dari Majelis Aisyiah.
c) Usul-usul kepada kongres Kowani oleh Ny. Lasmijah Tobing (Ny. Lasmijah Hardi) dari pekerja perempuan Indonesia Jakarta.

3) Keputusan-keputusan Permusyawaratan adalah:
a) Mengakui dasar-dasar pergerakan wanita Indonesia ialah:
Ketuhanan yang Maha Esa,
Perikemanusiaan,
Kebangsaan Indonesia,
Kerakyatan,
Kesejahteraan sosial.
b) Tujuan perjuangan wanita adalah:
Memperjuangkan dan mewujudkan Kemerdekaan yang penuh bagi seluruh Indonesia.
c) Membentuk Badan Kontak bernama "Permusyawaratan Wanita Indonesia" dan berkedudukan menurut keputusan permusyawaratan.
(1) Yang menjadi anggota Badan Kontak tersebut adalah:
(a) Organisasi Wanita yang berpusat.
(b) Bagian-bagian dari organisasi yang merupakan organisasi bagian wanita.
(c) Organisasi wanita setempat (lokal).
(2) Badan Kontak merupakan Sekretariat yang diketuai oleh Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum yang dipilih oleh permusyawaratan, pembantu-pembantu di mana perlu ditunjuk oleh Sekretaris Umum (Sekum) dan wakilnya.
(3) Sekretaris mempunyai bagian-bagian sebagai berikut:

(a) Surat menyurat
(b) Dokumentasi
(c) Keuangan
(d) Penerangan.

Badan kontak ini baru merupakan Sekretariat yang masih bersifat administratif dan merupakan biro informasi, maka KOWANI masih tetap dianggap perlu ada, karena KOWANI merupakan Badan Federasi yang bersifat legislatif dan eksekutif.

(4) Perlu adanya pembagian dan pembatasan pekerjaan antara KOWANI dan Badan Kontak (Sekretariat).

(5) Badan Kontak Permusyawaratan Wanita Indonesia ini berkedudukan di Yogyakarta dengan pengurus sebagai berikut:

Ketua : Ny. Maria Ulfah Santoso SH
Wakil Ketua : Ny. Artinah Samsuddin (merangkap Sekretaris).
Bendahari : Ny. Theodora Walandouw.
Pembantu : Ny. Hadiprabowo, Nn. Hariyati, Ny. Burdah Yusupadi, Ny. Supeni Pudjobuntoro, Ny. Aisyah Hilal, Ny. D. Sarsanto, Ny. Sunaryo Mangunpuspito, Ny. Brotowardojo, Ny. Mr. Tuti Harahap.

(6) Organisasi yang masuk Badan Kontak 19 buah ialah:

- PB Perkiwa
- PB Mualimat
- Persatuan Wanita Pekalongan
- PB Wanita Taman Siswa
- PB Putri Narpowandowo

- Budi Istri Bandung
- PB/Persatuan Wanita Kristen Indonesia
- PPNI Medan
- PERWARI Pangkal Pinang
- PERWARI Pontianak
- PB Partai Wanita Rakyat
- PB PSII Bagian Wanita
- Pucult Pimpinan Gerakan Pemuda Islam Indonesia Putri (GPII Putri)
- PB Aisyiyah
- FB Persatuan Wanita Katolik Indonesia
- PB Pemuda Putri Indonesia (PPI)
- PB Gerwis (Gerakan Wanita Indonesia Sedar)
- Putri Budi Sejati, dan Lain-lain.

d) Dalam Bidang Hukum diperjuangkan:
   (1) Agar dalam konstitusi RIS dicantumkan:
      (a) Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi tiap warga Negara.
      (b) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan untuk tiap-tiap warga Negara.
   (2) Adanya peraturan undang-undang kerja di RIS yang melindungi pekerja pada umumnya dan pekerja wanita khususnya.

Keputusan ini dikirimkan kepada delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO (*Byeenkomst Federal Overleg)* untuk diperjuangkan di KMB (Konferensi Meja Bundar) dan salinannya kepada Pers dan gerakan-gerakan wanita seluruh dunia.

e) Dalam bidang Sosial:
   (1) Mengurus keluarga tawanan keluarga korban perjuangan.

(2) Membantu persiapan penerimaan dan lapangan kerja untuk tawanan yang sudah atau akan dibebaskan.
(3) Memberantas perbuatan yang merusak jiwa dan kesehatan rakyat.
(4) Memelihara kesehatan rakyat dengan biro konsultasi rakyat.
(5) Mengadakan tempat penitipan anak.

f) Dalam bidang ekonomi:
(1) Memperbanyak hasil produksi.
(2) Memperbanyak koperasi pemakai *(Verbruiks Cooperatie)* dan Bank-Bank koperasi.

g) Dalam lapangan pendidikan:
(1) Mengadakan rencana 3 tahun untuk pendidikan wanita termasuk pemberantasan buta huruf, kursus-kursus tentang pengetahuan umum, kenegaraan, kemasyarakatan dan lain-lain.
(2) Mengadakan bea siswa *(studiefonds)* untuk wanita.

h) Mengadakan resolusi pada tanggal 30 Agustus 1949 sebagai berikut:
(1) Menuntut Kemerdekaan yang penuh dengan tidak bersyarat dalam tahun ini juga (1949).
(2) Memperkuat resolusi kongres Pemuda Indonesia tentang penarikan tentara Belanda sebelum pengakuan kedaulatan dan mengakui hanya satu Bendera Merah Putih dan satu lagu Indonesia Raya.
(3) Menuntut dibebaskannya tawanan-tawanan akibat perjuangan Kemerdekaan.
(4) Sanggup melanjutkan perjuangan rakyat Indonesia. Resolusi ini juga dikirim kepada delegasi-delegasi

Republik Indonesia dan BFO diperjuangkan di KMB dan UNCI *(United Nation Commission on Indonesia).*

i) Mengadakan protes yang isinya sebagai berikut: Permusyawaratan wanita seluruh Indonesia yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus sampai dengan 2 September 1949 dan dikunjungi oleh kurang lebih 82 organisasi Wanita Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mendengarkan laporan-laporan dari utusan-utusan antara lain:
   (1) Pembunuhan di Solo terhadap pegawai-pegawai PMI dan pengungsi-pengungsi.
   (2) Pembunuhan 40.000 orang yang sampai sekarang belum diselesaikan di Sulawesi Selatan.
   (3) Peristiwa Gunung Sumbing tentang penembakan terhadap anak-anak dan wanita di Pasar Kembang (Solo).

j) Memprotes sekeras-kerasnya perbuatan-perbuatan kejam yang dilakukan oleh tentara Belanda yang sangat bertentangan dengan perikemanusiaan dan menuntut hukuman yang setimpal bagi mereka yang melakukan keganasan itu. Protes ini disampaikan pula kepada delegasi-delegasi RI dan BFO untuk diteruskan kepada Pemerintah Belanda serta kepada UNCI, tembusan kepada Pers dan gerakan wanita seluruh Indonesia.[9]

Dalam masa 1945-1950 KOWANI mempunyai cabang-cabang antara lain di Bogor, Solo, dan Kediri. Demikianlah kegiatan-kegiatan Pergerakan Wanita dalam masa perang kemerdekaan.

9 Lihat dalam lampiran akhir pada buku yang ditulis oleh Hikmah Diniah, *Gerwani Bukan PKI, sebuah Gerakan Femenisme Terbesar di Indonesia*. Yogyakarta: Caraswatibooks, 2007, 7-10.

Sesuai dengan, irama perjuangan dan panggilan waktu wanita Indonesia ikut berperan dalam pembelaan Negara dan Tanah Air. Meskipun demikian tidak mengabaikan kewajibannya sebagai suatu kekuatan sosial dalam ikut membangun dan mengisi negara Indonesia Merdeka.[10]

10 Hikmah Diniah, *Gerwani Bukan PKI, sebuah Gerakan Femenisme Terbesar di Indonesia*…,11.

Bab X

Perempuan pada Masa Demokrasi Liberal

A. Republik Indonesia Serikat

Setelah selesai perang kemerdekaan dan berlakunya berbagai peristiwa bersenjata selama Republik Indonesia Serikat (RIS), akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950 terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai akibat perang yang berlangsung sekian lama, banyak prasarana yang hancur dan keadaan sosial ekonomi pada umumnya sangat buruk. Timbul pula gangguan keamanan di beberapa daerah oleh gerombolan-gerombolan bersenjata yang bekerja sama dengan subversi asing. Hal ini semua sangat menghambat perbaikan sosial ekonomi.

Dalam suasana tersebut di atas, Pergerakan Wanita Indonesia yang selama tahun 1945 sampai dengan 1949 memusatkan perhatian dan tenaganya pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, menganggap perlu mengadakan konsolidasi agar dapat dengan baik menghadapi tugas dalam bidang sosial ekonomi maupun politik. Dirasakan perlu menciptakan suatu badan yang dapat menghubungkan organisasi wanita Indonesia

untuk kerja sama yang baik dengan saling menghargai ideologi masing-masing.[1]

Untuk mencapai hal tersebut, maka Badan Kontak yang berkedudukan di Jakarta bersama-sama dengan pengurus KOWANI mengadakan Kongres Wanita Indonesia ke-VIII di Jakarta pada tanggal 24-28 November 1950. Pada Kongres tadi Badan Kontak dan KOWANI menggabungkan diri dengan nama ”Kongres Wanita Indonesia” nama tersebut tidak boleh disingkat. Kongres merupakan kekuasaan yang tertinggi membawahi suatu Majelis Permusyawaratan yang terdiri dari wakil-wakil pusat organisasi anggota. Untuk melaksanakan keputusan-keputasan Kongres dan Majelis Permusyawaratan dibentuk suatu Sekretariat sedangkan di tempat-tempat yang dipandang perlu diadakan seorang konsul yang dipilih oleh organisasi-organisasi di tempat itu dan disahkan oleh Sekretariat.[2]

Tujuan dari Kongres Wanita Indonesia ke-VIII adalah kesempurnaan kemerdekaan Indonesia, terlaksananya hak-hak wanita sebagai manusia dan warga negara, keamanan dan ketenteraman dunia. Kongres antara lain menuntut kepada Pemerintah agar diadakan Undang-Undang Perkawinan yang melindungi kaum wanita dan menetapkan jumlah anggota wanita dan pria yang seimbang dalam Panitia Penyelidik Hukum Perkawinan.[3]

Menjelang akan diadakannya pemilihan pertama, Kongres ke-IX yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 22-25 November 1952, minta perhatian Pemerintah tentang pengangkatan wanita

1 Keikutsertaan perempuan dalam suatu organisasi-organisasi seperti Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi merupakan bentuk tanggung jawab perempuan dalam pembangunan bangsa dan juga kepentingan generasi serta cucu mereka di negeri ini. Maka tidak ayal, yang selalu menjadi agenda utama dalam setiap organisasi perempuan adalah program mempertahankan kedaulatan tanah Negara dari kolonialisme, kesejahteraan keluarga dan pengabdian kepada masyarakat. Karena organisasi perempuan bermaksud akan mengumpulkan lidi yang bertaburan menjadi satu dan berjuang bersama-sama dengan pemahaman yang sama. Lihat dalam S.T. Nastiti, *Wanita pada Masa Jawa Abad IX-XV Masehi*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, 107-126.

2 S.T. Nastiti, *Kedudukan dan Peranan Perempuan dalam Masyarakat Jawa Kuna (Abad VIII-XV Masehi)*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009, 1.

3 S.H. Widyastuti, “Perempuan Menerjang Hambatan Budaya: Catatan dari Lapangan”, *Jurnal Reformasi Ekonomi*, 8(1) 2007, 55-57.

dalam kantor pemilihan, baik di Pusat maupun di Daerah. Kepada kaum wanita Kongres menganjurkan untuk mempergunakan hak pilihnya. Terlaksananya Undang-Undang Perkawinan juga tetap diperjuangkan oleh Kongres dan diusahakan agar diangkat pula tenaga wanita dalam Pengadilan Agama.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, wanita dan anak-anak khususnya, Kongres Wanita Indonesia mendirikan Yayasan Kesejahteraan Anak dan Yayasan Hari Ibu, di samping menggiatkan kembali Yayasan Kemajuan Wanita "Seri Dharma". Yayasan-yayasan tersebut adalah suatu usaha dari Kongres Wanita Indonesia untuk mewujudkan kerja sama antara organisasi-organisasi anggota. Untuk memperingati seperempat abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia didirikan gedung Persatuan Wanita di Yogyakarta.[4]

Pergerakan wanita pada waktu itu menaruh perhatian pula terhadap perjuangan negara-negara sahabat dan pada kongresnya tahun 1952 mengeluarkan pernyataan mendukung perjuangan rakyat Tunisia untuk mencapai kemerdekaan. Sebagai Negara baru, beban Pemerintah pada masa ini sungguh berat. Selain keadaan sosial ekonomi yang masih jauh dari kondisi baik, gangguan keamanan dan persiapan untuk pemilihan umum, Indonesia masih harus pula memperjuangkan kembalinya Irian Barat. Belanda nampaknya tidak bermaksud mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia sehingga perundingan-perundingan yang diadakan selalu gagal.[5]

Pergerakan wanita Indonesia membahas pula persoalan Irian Barat dalam Kongres ke-X yang diselenggarakan di Palembang dari tanggal 2-5 Maret 1955 dan mengirimkan pernyataan kepada Menteri Luar Negeri mendukung sepenuhnya usaha Pemerintah

4 T. Nastiti, *Kedudukan dan Peranan Perempuan dalam Masyarakat Jawa Kuna (Abad VIII-XV Masehi)…*, 3-9.

5 Ufi Saraswati, "Kuasa Perempuan dalam Sejarah Indonesia Kuna", *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 10(1) 2016, 105-113.

untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Pada kongres tersebut terlaksananya Undang-Undang Perkawinan tetap merupakan perjuangan berat, sedangkan perhatian pergerakan wanita di bidang sosial nampak sekali dengan dikirimkannya permintaan kepada Menteri Kehakiman agar diadakan Pengadilan Anak dan permintaan kepada Menteri Perburuhan supaya Peraturan tentang cuti haid tetap dipertahankan.[6]

Setelah persiapan yang sekian lama dan berat akhirnya Pemilihan pertama diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, di mana 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya. Dengan selesainya pemilihan umum tersebut nampaknya masih belum juga tercapai kestabilan Pemerintah. Di Daerah timbul perasaan tidak senang karena merasa tidak puas dengan alokasi biaya pembangunan yang didapat dari Pusat. Mereka membentuk Dewan-Dewan Daerah seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat dengan pimpinan Letnan Kolonel Akhmad Husein pada tanggal 20 Desember 1956. Dewan Gajah di Medan dengan pimpinan Kolonel M. Simbolon pada tanggal 22 Desember 1956. Dewan Manguni di Manado dengan pimpinan Kolonel Ventje Sumual pada tanggal 18 Februari 1957 dan lain-lain. Perundingan dengan Belanda mengenai Irian Barat dan mengenai Uni Indonesia Belanda juga belum berhasil sehingga akhirnya pada tanggal 13 Februari 1956 Indonesia memutuskan Uni tersebut secara sepihak. Dengan keadaan yang demikian tegangnya, pada pertengahan tahun 1957 Pemerintah menyatakan berlakunya Keadaan Darurat Perang/SOB *(Staat van Oorlog en Beleg).*[7]

Dalam suasana demikian Kongres Wanita Indonesia mengadakan Kongresnya ke-XI di Surabaya pada tanggal 28-30 November 1957. Antara kongres tahun 1955 sampai dengan kongres di Surabaya tercapai beberapa hasil positif antara lain pada tahun

6 H. Widyastuti, *"Perempuan Menerjang Hambatan Budaya: Catatan dari Lapangan"…,* 59.
7 Ufi Saraswati, *"Kuasa Perempuan dalam Sejarah Indonesia Kuna"..,* 113.

1955 oleh Kepala Jawatan Agama Jawa Barat bersama-sama organisasi-organisasi anggota Kongres Wanita Indonesia tingkat propinsi di Bandung didirikan Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4). Kemudian pada tahun 1956 bersama-sama dengan Kementerian Agama diselenggarakan kursus Pendidikan Calon Anggota Pengadilan Agama.[8]

Pada kongres di Surabaya ini perjuangan untuk terlaksananya Undang-Undang Perkawinan telah meningkat sehingga pada pertengahan tahun 1958 Kongres Wanita Indonesia mengirim surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun Perdana Menteri agar membicarakan Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang telah masuk. Di dalam Majelis Permusyawaratan Kongres Wanita Indonesia, dibahas pula usul-usul kompromi antara Rancangan Undang-Undang Perkawinan dari Parlemen (Ny. Soemari) dan Rancangan Undang-Undang Perkawinan Umat Islam (dari pemerintah). Kongres memperjuangkan pula agar Hari Ibu dijadikan Hari Nasional dalam arti seperti Hari Sumpah Pemuda.

Dengan memuncaknya perjuangan untuk Irian Barat, Kongres menyatakan bahwa wanita akan ikut aktif dalam usaha pengembalian Irian Barat dan untuk itu pada tanggal 22 Desember 1957 ditandatangani Piagam Badan Kerja sama Wanita/Militer.[9]

Pada tahun 1958 krisis nasional memuncak dengan diproklamasikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) oleh Akhmad Husein pada tanggal 15 Februari 1958, disusul berdirinya Pergerakan Rakyat Semesta (PERMESTA) yang menguasai daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Keadaan yang demikian dipergunakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mengadakan subversi.

8 Lihat dalam Neng Dara Affiah, *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, 9.
9 H. Widyastuti, *"Perempuan Menerjang Hambatan Budaya: Catatan dari Lapangan"*…, 61.

Hal ini terasa pula dalam Pergerakan Wanita Indonesia. Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dalam Kongres di Surabaya berhasil duduk pula dalam pimpinan Kongres Wanita Indonesia. Sebagai organisasi yang berafiliasi pada PKI, Gerwani mendirikan "Gerakan Masa" yang anggotanya terdiri dari organisasi wanita maupun perorangan. Gerakan Masa tersebut, berusaha merongrong Kongres Wanita Indonesia.[10]

Untuk mengatasi hal ini Kongres Wanita Indonesia mengadakan rapat pada bulan Maret 1958. Pada rapat tersebut organisasi-organisasi anggota Kongres Wanita Indonesia yang juga duduk dalam Gerakan Masa dipersilahkan memilih antara Kongres Wanita Indonesia dan Gerakan Masa. Ternyata tidak ada yang meninggalkan Kongres Wanita Indonesia dan kemudian Gerakan Masa tidak terdengar lagi.

Pada permulaan tahun 1958 Kongres Wanita Indonesia menyatakan perasaan cemas terhadap PRRI dan PERMESTA. Tahun 1958 merupakan pula ulang tahun yang ke-30 bagi Pergerakan Wanita Indonesia. Untuk memperingatinya antara lain diterbitkan buku "Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia". Pada tanggal 21 Desember 1958 diselenggarakan rapat umum, diadakan beberapa resolusi dan pernyataan antara lain supaya Hari Ibu dijadikan Hari Nasional seperti hari Sumpah Pemuda. Kongres Wanita Indonesia menyatakan pula mendukung berdirinya Front Nasional Pembebasan Irian Barat dengan Badan Kerja samanya dan bertekad turut memperjuangkan pembebasan Irian Barat dalam waktu sesingkat-singkatnya.[11]

Pada Majelis Permusyawaratan tanggal 20 September 1959 Kolonel Dr. Soemarno memberi ceramah tentang gagasan Pembentukan Kesatuan Wanita Angkatan Darat yang kemudian

10 I. Ahdiah, Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat. *Jurnal Academica,* 5(2) 2013, 1085-1087.

11 Lihat dalam S. Hasbiah, "Peranan Wanita dalam Pembangunan Berwawasan Gender", *Jurnal Kajian Perempuan,* 14(1) 2009, 75-78.

menjadi KOWAD (Korps Wanita Angkatan Darat). Sebagai tindak lanjut Kongres Wanita Indonesia membentuk Panitia Delapan yang terdiri dari delapan organisasi yang bertugas menyusun usul-usul maupun pendapat tentang Kesatuan Wanita Angkatan Darat yang kemudian mendapat perhatian penuh dari Pimpinan Angkatan Darat. Dengan demikian Kongres Wanita Indonesia ikut menyumbangkan pemikiran bagi pembentukan KOWAD (Korps Wanita Angkatan Darat).[12]

Pada tahun 1959 sebagai hasil perjuangan Kongres Wanita Indonesia dengan Surat Keputusan Presiden tertanggal 16 Desember 1959 Nomor 316 tahun 1959, Hari Ibu dijadikan Hari Nasional bukan hari libur. Dalam masa tahun 1950 sampai dengan 1959 Kongres Wanita Indonesia secara aktif membina hubungan dengan organisasi-organisasi wanita luar negeri. Kongres Wanita Indonesia mengirimkan utusan-utusan ke berbagai konferensi internasional. Perlu dicatat bahwa Kowani setelah berhenti sebagai anggota WIDF *(Women's International Democratic Federation)* dan keanggotaan Organisasi Luar Negeri diserahkan kepada masing-masing organisasi.

Tahun 1959 merupakan tahun terakhir dari masa Demokrasi Liberal. Setelah hampir 10 tahun mengalami ketidakstabilan Politik akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 dengan dekret Presiden, Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku kembali. Oleh karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan Presiden Soekarno memperluas wewenang dan kekuasaannya, timbullah Demokrasi Terpimpin yang juga besar pengaruhnya terhadap Pergerakan Wanita Indonesia.[13]

12 I. Ahdiah, *Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat…,* 1089.

13 Secara konstitusional, demokrasi liberal adalah memperjuangkan hak-hak dasar individu atau melindungi hak mereka dari kekuasaan pemerintah. dalam demokrasi liberal ini pula keputusan-keputusan mayoritas dari proses perwakilan langsung diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada aturan pemerintah dan hak-hak individu. Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan system politik dan demokrasi barat seperti Amerika Serikat, Kanada dan Britania Raya. S. Hasbiah, *"Peranan Wanita dalam Pembangunan Berwawasan Gender"…,* 79.

B. Kongres Wanita di Jakarta

Kongres ini diadakan di Jakarta pada tanggal 24-28 November 1950, dengan Pimpinan KOWANI dan Badan Kontak dan dihadiri oleh wakil-wakil dari 63 Organisasi Wanita.[14]

1. Keputusan-Keputusan Kongres ke-VIII

a. Pada Kongres di Jakarta, diambil keputusan untuk menggabungkan Badan Kontak dan KOWANI serta membentuk gabungan perkumpulan Wanita Indonesia yang diberi nama "Kongres Wanita Indonesia". Nama ini tidak boleh disingkat. Kongres Wanita Indonesia ini didirikan pada tanggal 28 November 1950 dan berkedudukan di Jakarta.

b. Struktur Organisasi
   Kongres Wanita Indonesia yang pimpinannya dipilih oleh Kongres dengan suara terbanyak merupakan kekuasaan tertinggi dan di bawahnya terdapat:
   1) Majelis Permusyawaratan terdiri dari, wakil-wakil organisasi pusat. Hal-hal di luar Kongres diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan ini.
   2) Sekretariat terdiri dari Sekretaris I, Sekretaris II, Sekretaris III yang dipilih oleh Kongres dan merupakan kantor yang berkedudukan di Jakarta. Sekretariat berkewajiban:
      a) Mewakili Majelis Permusyawaratan sehari-hari.
      b) Melaksanakan keputusan-keputusan Kongres dan Majelis Permusyawaratan.
      c) Mengadakan Seksi-seksi.
   3) Konsul: Pada tempat-tempat yang dianggap perlu diadakan seorang konsul yang dipilih oleh organisasi setempat dan disahkan oleh Sekretariat.

14 S. Hasbiah, *"Peranan Wanita dalam Pembangunan Berwawasan Gender"…,* 80.

4) Cabang dihapuskan. Kongres Wanita Indonesia hanya ada di tingkat pusat dan bersifat nasional. Hubungan dengan daerah dilaksanakan melalui organisasi anggota yang mempunyai cabang-cabang di Daerah.

c. Dasar dan Tujuan

Dasar dan Tujuan Kongres Wanita Indonesia adalah:

1) Dasar: Pancasila
2) Tujuan:
   a) Kesempurnaan Kemerdekaan Indonesia.
   b) Terlaksananya hak-hak wanita sebagai manusia dan warga negara.
   c) Ketenteraman dan keamanan dunia.

d. Keanggotaan:

Keanggotaan dibagi dalam 2 bagian:

1) Anggota biasa yang terdiri dari:
   a) Organisasi-organisasi wanita yang berpusat dan bagian-bagian dari partai-partai yang mempunyai organisasi wanita sendiri.
   b) Organisasi-organisasi wanita lokal (setempat) yang sedikitnya mempunyai anggota 50 orang.
2) Anggota luar biasa terdiri dari:
   Seksi-seksi departemen urusan kewanitaan dari organisasi-organisasi atau partai-partai.

e. Hak Suara:

1) Organisasi lokal mempunyai 1 suara
2) Organisasi bercabang 2-5 mempunyai 2 suara
3) Organisasi bercabang 6-10 mempunyai 3 suara
4) Organisasi bercabang 13-15 mempunyai 4 suara, sedangkan untuk tiap kelebihan 5 cabang, ditambah 1 suara dengan jumlah maksimum 10 suara. Kelebihan 3 cabang dapat ditambah 1 suara, tetapi kurang dari 3 cabang dianggap tidak ada.

f. Waktu Kongres:
   Kongres diadakan sedikitnya Dua tahun sekali atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

g. Pengambilan Keputusan:
   1) Keputusan mengenai dasar dan tujuan hanya dapat dilakukan dengan suara bulat, lain-lain keputusan diambil dengan suara terbanyak.
   2) Keputusan-keputusan Majelis Permusyawaratan harus diambil dengan suara bulat.

h. Pada Kongres tahun 1950 ini dipilih Pimpinan Sekretariat sebagai berikut:
   Sekretaris I : Ny. Maria Ulfah Santoso SH
   Sekretaris II : Ny. Soekaptinah Soenaryo Mangunpuspito
   Sekretaris III : Ny. Soeyatin Kartowijono
   Kemudian oleh Sekretariat dipilih sebagai
   Bendahari : Ny. Theodora Walandouw.

i. Tentang Perkawinan:
   Menuntut kepada Pemerintah supaya:
   1) Diadakan Undang-Undang Perkawinan yang melindungi kaum wanita.
   2) Dalam Panitia Penyelidik Hukum Perkawinan dari Kementerian Agama diadakan perseimbangan antara anggota-anggota wanita dan laki-laki dari segala bidang/agama.
   3) Kepada organisasi-organisasi wanita dianjurkan supaya mempelajari dengan sungguh-sungguh kedudukan wanita dalam perkawinan, baik menurut hukum adat maupun hukum agama.

j. Mengenal Pemilihan Umum:
   1) Menuntut pada Pemerintah supaya Undang-Undang No. 7 tahun 1948, No. 12 tahun 1949 berlaku untuk seluruh Indonesia.

2) Dianjurkan supaya semua wanita aktif menggunakan hak memilih dalam Pemilihan Umum yang akan datang.

k. Perihal keanggotaan dari WIDF *(Women's International Democratic Federation),* Kongres Wanita Indonesia akan selalu memelihara hubungan dengan organisasi-organisasi di luar negeri, tetapi tidak menjadi anggota dari gabungan apapun juga. Hal itu diserahkan kepada organisasi masing-masing. Oleh sebab itu KOWANI akan keluar dari WIDF.

2. Hal-Hal Lain

Panitia Kongres terdiri dari:

Ketua : Ny. S. Kumpul
Wakil Ketua : Ny. S. Sukemi
Penulis I : Ny. Roeslan Abdulgani
Penulis II : Ny. Sujud
Bendahari : Ny. Kadiman
Pembantu : Ny. Sri Mangunsarkoro
NY. Lukman
Ny. Theodora Walandouw
Ny. Memet Tanumidjaja.[15]

3. Peristiwa-Peristiwa dan Kegiatan-Kegiatan Penting Sesudah Kongres Wanita Indonesia ke-VIII tahun 1950

a. Karena KOWANI telah berfusi dengan Badan Kontak menjadi "Kongres Wanita Indonesia" maka kepada WIDF dikawatkan bahwa KOWANI sudah bubar dan dengan demikian berhenti sebagai anggota.

b. Kongres Wanita Indonesia mengirimkan utusan ke *"Pan Pacific Women's Conference"* yang diadakan di Christchurch, New Zealand pada permulaan tahun 1951. Delegasi Indonesia

15 I. Jasimah, S.K. *Trimurti Pejuang Perempuan Indonesia.* Jakarta: Kompas, 2016, 90-92.

terdiri dari Nn. Susilowati (Ny. Riekerk) dan Nn. Tasti Kusumo Utoyo (Ny. Usodo).

c. Kongres Wanita Indonesia menganjurkan agar di tiap daerah di bentuk badan kerja sama organisasi wanita yang merupakan gabungan organisasi lokal. Mengenai namanya diserahkan kepada masing-masing daerah dan tidak perlu diseragamkan.[16]

C. Kongres Wanita di Bandung

Kongres Wanita Indonesia ke IX diadakan di Bandung dari tanggal 22 s/d 25 Desember 1952 dengan dihadiri oleh wakil semua organisasi wanita yang berpusat dari seluruh Indonesia dan organisasi wanita lokal. Dalam Kongres ini diadakan prasaran tentang *"Vak onderwijs"* oleh Nn. Erna Djajadiningrat (sekarang Ny. Sutoto) dan tentang "Penempatan tenaga wanita" oleh Sdr. Sulaiman Suriatmadja.[17]

1. Keputusan-Keputusan Kongres ke-IX

a. Struktur Organisasi :
   1) Kongres:
      Pimpinan dipilih oleh Kongres dengan suara terbanyak.
   2) Majelis Permusyawaratan yang memutuskan hal-hal di luar Kongres.
   3) Sekretariat, terdiri dari:
      a) Pimpinan
      b) Seksi Hukum, Seksi Pendidikan dan Seksi Ekonomi.

b. Dasar: Sama dengan Kongres tahun 1950.

c. Tujuan: Sama dengan Kongres tahun 1950.

d. Kongres Wanita Indonesia meminta perhatian Pemerintah tentang:

16 I. Jasimah, S.K. *Trimurti Pejuang Perempuan Indonesia…*, 97.
17 I. Jasimah, S.K. *Trimurti Pejuang Perempuan Indonesia…*, 99.

1) Pengangkatan wanita dalam kantor Pemilihan baik di Pusat maupun di Daerah.
2) Pengangkatan tenaga wanita dalam Pengadilan Agama.
3) Segera terlaksananya Undang-Undang Perkawinan.
4) Pendidikan khusus untuk pejabat yang ditugaskan mengurus soal nikah, talak dan rujuk.
5) Pembentukan panitia Pendidikan Wanita yang merancangkan sistem pendidikan wanita menuju ke arah kemerdekaan ekonomi dan sosial yang sesuai dengan kepribadian wanita.
6) Penambahan anggota wanita dalam Dewan Penasihat Jawatan Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Perburuhan.
7) Memperkeras pengawasan terhadap majalah, poster, iklan dan lain-lain, yang bertentangan dengan kesusilaan.

e. Program Kerja:
1) Hukum:
a) Menganjurkan kepada organisasi-organisasi wanita agar aktif dalam pemilihan umum.
2) a) Mendesak kepada pemerintah agar Undang-Undang Perkawinan lekas diadakan.
b) Menghubungi Kementerian-Kementerian untuk membuat statistik tentang kedudukan pegawai-pegawai wanita di tiap Kementerian/Jawatan.
3) Pendidikan:
a) Agar pendidikan rakyat, misalnya pemberantasan buta huruf dikerjakan di semua daerah.
b) Menyelidiki kemungkinan pembentukan kursus/sekolah untuk wanita dan memberi penerangan tentang hal ini.
c) Menganjurkan kepada organisasi, agar mengadakan kursus-kursus yang memberi penerangan tentang kesusilaan dan keagamaan.
d) Menyelenggarakan Panti Pengetahuan Wanita.

4) Sosial/Ekonomi:
   a) Mengadakan pekan kesehatan sepekan sebelum 17 Agustus tiap tahun.
   b) Menyelidiki gaji/upah pegawai/pekerja wanita pada Pemerintah maupun Swasta.
   c) Mengadakan penitipan anak-anak.
   d) Mengadakan biro konsultasi di daerah-daerah untuk hal-hal perburuhan, kesehatan, pendidikan dan peraturan perkawinan.
   e) Menganjurkan kepada daerah-daerah untuk mengadakan darmawisata atau pertemuan-pertemuan pada hari-hari raya untuk memupuk persaudaraan.
   f) Menyelidiki kemungkinan diadakannya Undang-Undang Pensiun dan Tunjangan bagi pekerja/ pegawai Pemerintah/ Swasta. Mengadakan pusat latihan kerja *(Work Central)* untuk mengurangi pengangguran.

f. Mengadakan usaha bersama dengan bentuk yayasan, yaitu: Yayasan Kesejahteraan Anak-Anak, Yayasan Kemajuan Wanita "Seri Derma". Kedua yayasan tersebut didirikan atas inisiatif perorangan, kemudian diakui sebagai yayasan dari Kongres Wanita Indonesia, sedangkan Yayasan Hari Ibu benar-benar didirikan oleh Kongres Wanita Indonesia menjelang seperempat abad Pergerakan Wanita Indonesia dengan modal iuran/ sokongan setiap organisasi yang tergabung dalam Kongres Wanita Indonesia.

g. Kongres Wanita Indonesia menyokong perjuangan. Kemerdekaan Rakyat Tunisia dan mengirimkan pernyataannya kepada partai Neo Destour di Tunisia, kepada panitia Pembantu Tunisia di Jakarta kepada pers dan Radio.

h. Diputuskan untuk mengadakan peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, pada tanggal

22 Desember 1953, antara lain mendirikan suatu Gedung Persatuan Wanita di Yogyakarta, sebagai Tugu Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia itu.

i. Pimpinan Sekretariat yang baru terdiri dari:

Sekretaris I	: Ny. Maria Ulfah Santoso, S.H.
Sekretaris II	: Ny. Soeyatin Kartowiyono
Sekretaris III	: Ny. Artinah Samsuddin
Bendahara	: Ny. Theodora Walandouw
Seksi Hukum/Seksi Sosial	: Ny. Toeti Harahap, S.H.
Ekonomi	: Ny. Tiff Memet Tanumidjaja
Seksi Pendidikan	: Nn. Erne Djajadiningrat (sekarang Ny. Soetoto)

2. Hal-Hal Lain

a. Daftar nama-nama organisasi yang tergabung dalam Kongres Wanita Indonesia pada tahun 1952.
   1) PB Parkiwa, Bandung (Partai Kebangsaan Indonesia Wanita)
   2) Muslimat Masyumi, Jakarta
   3) Persatuan Wanita, Pekalongan
   4) Wanita Taman Siswa
   5) Putri Narpo Wandowo
   6) Budi Istri, Bandung
   7) Persatuan Wanita Kristen Indonesia
   8) PPNI, Medan
   9) Perwani, Pangkalpinang
   10) Pikat, Manado
   11) Partai Wanita Rakyat
   12) Pucuk Pimpinan Gerakan Pemuda Islam Indonesia Bag. Putri
   13) Partai Serikat Islam Indonesia
   14) Perwani, Pontianak

15) Aisyiyah
16) Persatuan Wanita Katolik
17) Wanita Indonesia Muntok
18) Putri Budi Sejati
19) Rukun Wanita, Bandung
20) Ibu Setia, Manado
21) Muslimat, Cabang Sampang
22) Perwari, Jakarta
23) Geswani, Manado
24) PPI, Jakarta
25) Perwari, Indragiri Rengat
26) Gerwis
27) Wanita Indonesia Maluku
28) Pekerja Perempuan Indonesia
29) Persatuan Wanita Pamekasan
30) Konsulat Kongres Wanita Kabupaten Aceh Timur
31) Gabungan Wanita Indonesia Perdagangan
32) Pusat Kesatuan Wanita Indonesia Tanjung Pandan
33) Organisasi Ibu Setia Gorontalo
34) PNI Cabang Medan atau Front Wanita
35) Gabungan Wanita Indonesia Minahasa
36) Konsulat Kongres Wanita Indonesia Semarang
37) Gerakan Wanita Banyumas
38) Persatuan Tindakan Wanita Samarinda
39) Persatuan Tindakan Wanita Banjarmasin
40) Masyarakat Wanita Nganjuk
41) Ikatan Persatuan Wanita Indonesia Denpasar
42) Pemuda Putri Indonesia Bandung
43) Persatuan Wanita Indonesia Palembang
44) Peng. Permufakatan Ibu, Sumatra Timur
45) Gowani Pare
46) Gabungan Wanita Asahan Tanjung Balai
47) Persatuan Wanita Sumbawa

48) Persatuan Wanita Dompo
49) Ikatan Wanita Bima
50) Badan Majelis Permusyawaratan Wanita Surakarta
51) Istri Sedar
52) Persatuan Istri Tentara
53) Konsulat Kongres Wanita Indonesia Wonosobo
54) Perwani Cabang Jakarta
55) Konsulat Kongres Wanita Indonesia, Blora
56) Cabang Pikat Manado
57) Gabungan Wanita Malang
58) Wanita Demokrat Indonesia.

b. Panitia Kongres di Bandung

Ketua	:	Ny. Ios Wiriatmadja
Wakil Ketua I	:	Ny. Kamarga
Wakil Ketua II	:	Ny. Djuarsa
Penulis I	:	Ny. S.K. Marsono
Penulis II	:	Ny. Harun
Penulis III	:	Ny. Rohinah
Keuangan	:	Ny. Sanusi Hardjadinata
		Ny. Ipik Gandamana
		Ny. Male Wiranatakusumah
		Ny. Enoch
		Ny. Suryonegoro[18]

3. Peristiwa-Peristiwa dan Kegiatan-Kegiatan Penting Sesudah Kongres Wanita Indonesia Ke IX Tahun 1952

a. Kongres Wanita Indonesia mengirim utusan ke Seminar UNESCO mengenai kedudukan wanita di Asia Selatan yang diadakan di New Delhi dari tanggal 29 Desember 1952 sampai dengan 7 Januari 1953.

18 M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi, 2008, 109-112.

Delegasi Indonesia terdiri dari:

1) Ny. S. Kartowijono, dari Kementerian PPK dan Kongres Wanita Indonesia, sebagai Ketua.
2) Ny. Emma Puradiredja dari PARKIWA
3) Ny. Titi Memet Tanumidjaja dari Bhayangkari
4) Nn. Mr. J.M. Tumbelaka, dari PWKI (Persatuan Wanita Kristen Indonesia)
5) Nn. Suitinah (sekarang Ny. Darmadji) dari PPI/PPK (Pemuda Putri Indonesia/Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan).

b. Pada bulan Februari 1953 utusan Kongres Wanita Indonesia ke Seminar UNESCO di New Delhi melaporkan bahwa kertas kerja yang dibuat oleh Ny. Maria Ulfah Santoso, S.H., Ny. Suyatin Kartowijono dan Ny. Emma Puradiredja, yang berjudul *"The Position of Indonesian women in the Republik of Indonesia"* dan *"Women's position in Marriage Law"* disebut dalam buku *"The Status of Women in South Asia"* yang ditulis oleh Dr. A. Appadoroi dengan bantuan UNESCO dan *Asia Relations Organisation.*

c. Setelah Kongres di Bandung maka pada tanggal 22 Desember 1953, Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia dilaksanakan. Maksud dan tujuan peringatan Seperempat Abad tersebut ialah:

1) Untuk membangkitkan semangat kaum ibu di kalangan kaum wanita Indonesia.
2) Untuk menghormati dan menghibur kaum ibu.
3) Untuk mendirikan usaha-usaha bagi kesejahteraan kaum ibu yang bersifat tetap.
4) Maksud mendirikan "Gedung Persatuan Wanita" di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Hari Ibu, ialah untuk mendapat tempat pusat latihan kerja bagi para wanita menuju kepada kemerdekaan ekonomi sesuai

kepribadian wanita Indonesia; juga untuk menyediakan tempat penginapan bagi wanita yang sedang bertugas sebagai pegawai negeri, pedagang, buruh dan lain-lain.

Untuk Peringatan Seperempat Abad dibentuk Panitia Pusat di Yogyakarta sebagai berikut:

Ketua I : Ny. Sri Mangunsarkoro (Partai Wanita Rakyat)
Ketua II : Mr. Tuti Harahap (PWKI)
Ketua III : Ny. Aisiyah Hilal (Muslimat)
Ketua IV : Ny. S.K. Trimurti (Gerwis)
Penulis I : Nn. Hariati (PPI)
Penulis II : Ny. Artinah Samsuddin (Muslimat)
Bendahari I : Ny. Sutarman (Perwari)
Bendahari II : Ny. Mariati Adnan (GPII Putri), dengan dibantu oleh BP[19]

Selanjutnya Kongres Wanita Indonesia menyerukan agar peringatan ini diadakan di seluruh Indonesia. Demikian pula agar di setiap tempat diusahakan berdirinya Gedung Wanita. Dalam peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia pada tanggal 22 Desember 1953 di Istana Negara Jakarta diresmikan berdirinya Bank Koperasi Wanita. Bank Koperasi ini adalah suatu koperasi Simpan Pinjam untuk wanita Jakarta yang diprakarsai oleh Ny. Said Suryodinoto, Ny. Mr. Maria Ulfah Santoso, Ny. S. Herman dan Ny. Titi Memet Tanumidjaja.[20]

Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia berkumandang pula di luar negeri. Perayaan diadakan antara lain di (1). Penang diketuai Kepala Perwakilan RI, Ny. Ali Mursid, (2). Mesir diketuai Istri Duta Besar Indonesia Ny. Abdulkadir, (3). Manila dengan Ketua Ny. Tjokroadisumanto istri Kuasa Usaha RI, (4). London diketuai Ny. dr. Hurustiati Soebandrio

19 M.D. Poeponegoro; N. Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993, 81-83.
20 D. Poeponegoro; N. Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993, 190.191.

istri Duta Besar RI, (5). Paramaribo dengan diadakan pameran. Juga diterima dana dan bantuan berupa mesin tik dan lain-lain.[21]

Pada tanggal 20 April 1964 di Jakarta didirikan Badan Penghubung Organisasi Wanita (BPOW) dalam rangka melancarkan aksi Pemberantasan Buta Huruf (PBH) di kalangan wanita yang diselenggarakan bersama-sama dengan Jawatan Pendidikan Masyarakat. Pembentukan BPOW tersebut segera diikuti oleh pembentukan badan kerja sama organisasi wanita di daerah tingkat II (Kabupaten) dengan berbagai nama, antara lain: Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW), Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKSOW), Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Gabungan organisasi di daerah tingkat I hanya terdapat di Jakarta.[22]

D. Kongres Wanita di Palembang

Kongres ke-X Kongres Wanita Indonesia diadakan di Palembang pada tanggal 2-5 Maret 1955 dan dihadiri oleh organisasi-organisasi wanita anggota Kongres Wanita Indonesia dan organisasi wanita setempat.

1. Keputusan-keputusan Kongres.
   a. Struktur Organisasi:
      1) Kongres
      2) Majelis Permusyawaratan
      3) Sekretariat terdiri dari 5 orang, yaitu:
         Ketua : Perorangan
         Wakil Ketua :
         Penulis I :
         Penulis II :
         Bendahara :
         } Merupakan wakil-wakil organisasi anggota Kongres Wanita Indonesia
      4) Konsul dihapuskan

21 M.D. Poeponegoro; N. Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993, 89.
22 M.D. Poeponegoro; N. Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993, 201.

b. Dasar:
   Pancasila Negara Republik Indonesia

c. Tujuan:
   1) Kesempurnaan kemerdekaan negara Republik Indonesia
   2) Terlaksananya hak-hak wanita sebagai manusia dan sebagai warga negara
   3) Ketenteraman dan keamanan dunia

d. Keanggotaan:
   1) Anggota biasa:
      a) Organisasi wanita yang berpusat
      b) Bagian wanita dari organisasi atau partai yang mempunyai organisasi wanita yang berdiri sendiri
      c) Organisasi wanita lokal yang sedikitnya mempunyai anggota 50 orang.
   2) Anggota luar biasa:
      Seksi atau departemen wanita atau Urusan Kewanitaan dari partai atau organisasi.

e. Hak Suara:
   Organisasi lokal 1 suara; organisasi yang bercabang 2-5, 2 suara; organisasi yang bercabang 6-10, 3 suara; organisasi yang bercabang 15, 4 suara. Lebih dari 15 cabang, tiap 10 cabang mendapat satu suara dengan maksimum 15 suara.

f. Pengambilan Keputusan:
   1) Keputusan-keputusan yang prinsipil (mengenai dasar dan tujuan) harus diambil dengan suara bulat.
   2) Keputusan-keputusan lain diambil dengan suara terbanyak.
   3) Pimpinan Kongres dipilih dengan suara terbanyak
   4) Hal-hal di luar Kongres diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan.

Mendesak kepada Pemerintah supaya memberikan instruksi kepada instansi-instansi daerahnya agar mengadakan kerja sama yang erat dengan organisasi-organisasi wanita dalam lapangan sosial, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

h. Setiap wanita diwajibkan agar berusaha ke arah terlaksananya hak-hak wanita. Usaha tersebut supaya dititikberatkan pada pembangunan masyarakat yang menumbuhkan *"Self-help",* dengan cara gotong royong di kalangan wanita.

i. Organisasi anggota Kongres Wanita Indonesia diwajibkan berusaha menambah pengetahuan dan memperbaiki ekonomi untuk wanita pada umumnya, dengan mempergunakan hasil penyelidikan dari Pemerintah supaya dapat bekerja secara efisien. Usaha perbaikan sosial yang bersifat pencegahan *(preventif)* dan perbaikan *(kuratif)* agar diperluas ke Desa-desa. Pelaksanaan dari usaha tersebut seperti dengan hal-hal lain diserahkan kepada organisasi anggota di Daerah masing-masing.

j. Mendesak:
   1) Supaya segera dikeluarkan Undang-Undang Perkawinan yang pokok dan khusus.
   2) Kepada Jawatan Kepolisian Negara supaya diadakan lagi Angkatan Polisi Wanita dan Polisi Susila diperkuat.
   3) Kepada Menteri Kehakiman supaya diadakan pengadilan anak, dan mengirim ahli hukum Indonesia untuk mempelajari soal itu di Luar Negeri.
   4) Kepada Menteri Perburuhan dan Menteri Negara Urusan Perencanaan disampaikan keputusan Kongres Wanita Indonesia untuk mempertahankan peraturan hadiah.

5) Kepada Menteri Luar Negeri dikirim pernyataan mendukung sepenuhnya usaha Pemerintah untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia.

k. Agar ditentukan syarat-syarat bagi pegawai yang ditempatkan di luar Negeri, sebagai berikut:

1) Pegawai laki-laki yang ditempatkan di Luar Negeri sedapat mungkin yang telah kawin dengan wanita Indonesia dan menjunjung tinggi kebudayaan Nasional.

2) Istri dari semua pegawai yang ditempatkan di Luar Negeri, perlu diberi pendidikan dalam bahasa asing, cara bergaul dan etiket, kebudayaan Nasional dan pergerakan wanita.

2. Pimpinan Sekretariat baru masa 1955-1957:

Ketua	: Ny. Mr. Maria Ulfah Santoro (perorangan)
Wakil Ketua	: Ny. Mr. Nani Soewondo (Perwari)
Penulis I	: Ny. Artinah Samsuddin (Muslimat)
Penulis II	: Ny. Theodora Walandouw (PWKI)
Bendahari	: Nn. Muljati (PPI sekarang Kolonel Muljati)
Ketua Komisi Hukum	: Ny. Mr. Tuti Harahap.

3. Peristiwa-peristiwa dun kegiatan-kegiatan penting sesudah Kongres ke-X tahun 1955.

a. Tahun 1955/1956.

1) Pada bulan Oktober 1955 oleh Kepala Jawatan Agama Jawa Barat di Bandung bersama organisasi anggota Kongres Wanita Indonesia tingkat Propinsi, didirikan Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP 4). Dalam bulan Maret 1956 di Jakarta dibentuk oleh Kepala Jawatan Agama bersama organisasi anggota Kongres Wanita Indonesia, Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian

(P5). Kemudian menyusul pembentukan P 5/BP 4 di Kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa. Kongres Wanita Indonesia mendukung pembentukan Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP 4), karena BP 4 melanjutkan pekerjaan yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda telah dirintis, mula-mula oleh Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-Anak Indonesia (KPKPAI) dan kemudian menjadi Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPIP).

2) 20 Mei 1956 Peresmian Gedung Persatuan Wanita di Yogyakarta, yang dihadiri oleh Sekretariat Kongres Wanita Indonesia, Ny. Maria Ulfah Santoso dan Nn. Muljati.
3) 17 Agustus sampai dengan 17 November 1956, Yayasan Hari Ibu menyelenggarakan kursus Pembangunan Masyarakat Desa yang diikuti oleh 20 orang wanita.
4) September 1956, mengirim peninjau ke Seminar *Status of Women Commission* dari UN di Moskwa, yaitu ply. Mr. Tuti Harahap dan Nn. Muljati, sedangkan dari Kementerian Luar Negeri diutus Nn. Mr. Laili Rusad.
5) Mengirim 7 orang utusan ke USA atas undangan Pemerintah Amerika Serikat, yaitu: Ny. K. Sojono Prawirobismo (Bhayangkari), Ny. Sutedjo (PSII Wanita) Ny. Syamsuridjal (Yayasan Kesejahteraan Anak-Anak), Ny. Sh. Said (Partai Wanita Rakyat) Ny. Zaenal Abidin (GPII Putri), Ny. D. Soeharto (Yayasan Hari Ibu dan Ny. S. Kartowijono Perwari).
6) Oktober 1956, menerima undangan dari *Sovyet Women's Committee* untuk mengadakan peninjauan

dan 10 orang berangkat, yaitu: Ny. Maruto Nitimihardjo (Yayasan Seri Darma), Ny. Emma Sumanegara (Parkiwa), Ny. Abdulgani Surjokusumo (Wanita Demokrat), Nn. Siti Mudiyah (PPI), Ny. Kusnafsiah Slamet (Gerwani), Ny. Lutan Madjid (Perwamu), Ny. Abdurachman (Wanita Indonesia), Ny. Wahid Sutan Radjolelo (Wanita Nasional), Ny. Djuarsa (Budi Istri), dan Ny. Mahjudin (Persit).

7) 11 November 1956, pernyataan berhubung dengan keadaan internasional. Kongres Wanita Indonesia mengeluarkan pernyataan yang mengutuk tindakan-tindakan kekerasan senjata:
   a) Israel terhadap Mesir
   b) Inggris dan Perancis terhadap Mesir dalam persengketaan mengenai terusan Suez.
   c) Rusia terhadap Hongaria
8) November 1956. Komisi Hukum dari Kongres Wanita Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Agama, menyelenggarakan kursus dan ujian Pendidikan Calon Anggota Wanita Pengadilan Agama. Diikuti oleh 40 pengikut, 27 orang lulus, yang ijazahnya disahkan oleh Kementerian Agama.
9) 22 Desember 1956 bertepatan dengan peringatan Hari Ibu diresmikan Gedung Wanita Jakarta, di Jalan Diponegoro 26. b. Tahun 1957:
   a) Maret 1957, Kongres Wanita Indonesia mengutus Ny. Rusiah Sardjono S.H. sebagai wakil Kongres Wanita Indonesia ke sidang Status of Women Commission U.N. di New York.
   b) 9-11 Mei 1957, Ny. dr. Soebandrio dan Nn. Sunarin mewakili Kongres Wanita Indonesia dalam konferensi pendahuluan dari 5 negara

penyelenggara Konferensi Wanita Asia Afrika yang diadakan di Karachi, Pakistan.

c) Agustus 1957, mengirim 3 wakil Kongres Wanita Indonesia ke Seminar Wanita Asia di Bangkok, Thailand mengenai *"Increased Participation of Asian Women in Publik Life"* yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Utusan terdiri dari: Ny. Mr. Maria Ulfah Santoso, Ny. Mr. Nani Soewondo dan Ny. Yetty Rizali Noor.

4. Membentuk panitia yang bertugas untuk mempelajari hal-hal yang bersangkutan dengan polisi wanita dan peningkatannya.
5. Kementerian Agama mengangkat 12 (Duabelas) orang lulusan Kursus Pendidikan Calon Anggota Wanita Pengadilan Agama menjadi anggota Pengadilan Agama, yaitu:
   a. Ny. Samsuri di Lamongan,
   b. Ny. Abu Amar di Mojokerto,
   c. Ny. Murtinah Nur di Bondowoso,
   d. Ny. Prayitno di Temanggung,
   e. Ny. M. Titi Humam di Banjarnegara,
   f. Ny. Marnani di Pekalongan,
   g. Ny. Sunaryono di Sidorejo,
   h. Ny. Wasinah di Kendal,
   i. Ny. Arifiah Khaeri di Tegal,
   j. Ny. Surtati Saputro di Tegal.
   k. Ny. A.R.C. Salim Maemunah di Malang,
   l. Ny. Munatun Priyoatmojo di Purwodadi.
6. Mengadakan Majelis Permusyawaratan Kilat pada tanggal 10 November 1957 untuk membicarakan rencana kerja sama Kongres Wanita Indonesia dengan BKSPM (Badan Kerja sama Pemuda Militer) mengenai persoalan Irian Barat serta undangan untuk menghadiri Musyawarah Nasional

Pembangunan (Munap) yang akan diadakan pada tanggal 25 November 1957.[23]

E. Kongres Wanita di Surabaya

Kongres Wanita Indonesia ke-XI diadakan di Surabaya pada tanggal 28 -30 November 1957.

1. Keputusan-keputusan Kongres
   a. Struktur Organisasi:
      1) Kongres (Pimpinan Kongres dipilih oleh Kongres dengan suara terbanyak).
      2) Majelis Permusyawaratan (memutuskan hal-hal di luar Kongres).
      3) Sekretariat (terdiri dari 7 orang).
   b. Dasar:
      Pancasila Negara Republik Indonesia.
   c. Tujuan :
      1) Kesempurnaan kemerdekaan negara Republik Indonesia.
      2) Terlaksananya hak-hak wanita sebagai manusia dan sebagai warga negara.
      3) Ketenteraman dan keamanan dunia.
   d. Keanggotaan:
      1) Anggota biasa:
         Organisasi yang berpusat sedikitnya mempunyai 5 cabang di lima daerah kabupaten dan mempunyai Anggaran Dasar yang bertujuan memperjuangkan nasib wanita pada umumnya.
      2) Anggota luar biasa:
         a) Organisasi lokal yang mempunyai Anggaran Dasar yang bertujuan memperjuangkan nasib

23 D. Poeponegoro; N. Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI…,* 203.

wanita pada umumnya dan mempunyai anggota sedikitnya 100 orang.

b) Organisasi wanita khusus yang berpusat dan mempunyai sedikitnya 5 cabang di Lima Daerah Kabupaten.

3) Penerimaan anggota:

Penerimaan keanggotaan dijalankan melalui surat komisi penyaring yang terdiri atas 5 orang, yaitu:

a) Ketua Sekretariat Kongres Wanita Indonesia atau wakilnya dan 1 anggota Sekretariat dan 3 anggota Kongres Wanita Indonesia lain yang dipilih secara bergiliran oleh Majelis Permusyawaratan dan mempunyai masa kerja antara 2 Majelis Permusyawaratan.

b) Anggota disahkan oleh Majelis Permusyawaratan setelah melalui masa penyaringan 3 bulan.

4) Kewajiban anggota:

a) Membayar uang pangkal

b) Membayar uang iuran

c) Tiap anggota berkewajiban memupuk dan memelihara persatuan dalam Kongres Wanita Indonesia dan mencegah segala tindakan yang dapat memecahkan persatuan Kongres Wanita Indonesia.

d) Anggota Kongres Wanita Indonesia tidak dapat menjalankan kegiatan-kegiatan masal dalam masyarakat baik yang bersifat tetap maupun insidentil yang dapat dikerjakan bersama oleh Kongres Wanita Indonesia.

e) Anggota yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dalam a, b, c, d, diberi peringatan 2 kali oleh Sekretariat Kongres Wanita Indonesia

dan jika masih belum berhasil dimajukan pada Majelis Permusyawaratan.

e. Hak hadir:
   1) Sekretariat Kongres Wanita Indonesia termasuk Komisi-komisi (Seksi-seksi).
   2) Anggota biasa
   3) Anggota luar biasa
   4) Yayasan-yayasan yang tergabung dalam Kongres Wanita Indonesia**.**
   5) Panitia-panitia.

f. Hak suara:
   1) Organisasi yang bercabang 5 mendapat 2 suara
   2) Organisasi yang bercabang 6 sampai 10 mendapat 3 suara
   3) Organisasi yang bercabang 11 sampai 15 mendapat 4 suara. Lebih dari 15 cabang, tiap 10 cabang mendapat 1 suara dengan maksimum 15 suara.
   4) Anggota luar biasa tidak mempunyai suara dan hanya dapat berbicara jika diizinkan oleh Pimpinan Sidang.

g. Pengambilan Keputusan:
   1) Keputusan-keputusan yang prinsipil (mengenai dasar dan tujuan) harus diambil dengan suara bulat.
   2) Keputusan-keputusan lain diambil dengan suara terbanyak.

h. Sebagai tindak lanjut dari prasaran Ny. S.K. Trimurti mengenai kesukaran-kesukaran psikologis pada wanita yang bekerja, diadakan seksi perburuhan dalam Kongres Wanita Indonesia yang akan mempelajari dan menyelidiki masalah wanita yang bekerja serta soal-soal lain yang berhubungan dengan itu.

i. Kongres Wanita Indonesia mengeluarkan pernyataan mengenai:
   1) Perjuangan pengembalian Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia, dan
   2) Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap).

j. Kongres Wanita Indonesia mendesak kepada Pemerintah supaya segera dikeluarkan Undang-Undang perkawinan.

k. Komisi Hukum dari Kongres Wanita Indonesia akan segera mengeluarkan suatu brosur mengenai kedudukan wanita Indonesia dalam masyarakat.

l. Mendesak kepada Menteri Agama supaya tenaga-tenaga lulusan kursus Pendidikan Calon Anggota Pengadilan Agama segera ditempatkan, karena dari 27 orang wanita yang lulus baru 12 orang ditempatkan.

m. Didirikan suatu Panitia Khusus berhubung dengan perjuangan rakyat Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia, Panitia itu terdiri dari:
   1) Perwari, (Persatuan Wanita Republik Indonesia) sebagai Ketua
   2) Wanita Demokrat
   3) Muslimat Masyumi
   4) Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia)
   5) Perwamu (Persatuan Wanita Murba)
   6) PPI (Pemuda Putri Indonesia)
   7) GPII Putri (Gerakan Pemuda Islam Indonesia Putri)
   8) Bhayangkari
   9) Persit

n. Kongres memilih delegasi Indonesia ke Konferensi Wanita Asia Afrika di Colombo yang terdiri dari Sepuluh orang.

o. Kongres Wanita Indonesia membentuk Panitia yang akan meninjau masalah *"Cross boys"* dan penyelesaiannya.

Pelaksanaannya diserahkan kepada Yayasan Kesejahteraan Anak-anak diketuai oleh Ny.Syamsuridjal.

p. Pimpinan Sekretariat baru masa tahun 1957-1961.
   Ketua : Mr. Maria Ulfah Santoso, (perorangan)
   Wakil Ketua : Ny. Rohanah Zainal Abidin Achmad (GPII Putri)
   Penulis I : Ny. Muharam Wiranatakusumah (Bhayangkari)
   Penulis II : Ny. Tjitjih Sujud (perwari),
   Bendahari I : Ny. Mudikdio (Gerwani),
   Bendahari II : Ny. Artinah Samsudin (Muslimat),
   Pembantu : Ny. Mien Wuwungan.

2. Peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan penting sesudah Kongres ke-XI tahun 1957
   a. Tanggal 22 Desember 1957, ditandatangani Piagam Kerja sama Badan Kerja sama Pemuda Militer (BKSPM) dan Wanita. Kongres Wanita Indonesia yang diwakili oleh panitia khusus Irian Barat:
      Ny. S. Kartowijono (Perwari),
      Ny. Gani Suryokusumo (Wanita Demokrat),
      Ny. Lutan Madjid (Perwamu),
      Nn. Sarifah Lena (PPI),
      Ny. Djaka Semedi (Persit),
      Ny. Mariyati Adnan (Muslimat Masyumi),
      Ny. Zainal Hakam (GPII Putri),
      Ny. Wahyudi (Bhayangkari).

      Piagam tersebut menegaskan bahwa wanita Indonesia dan Pemuda/Militer bersama-sama dengan seluruh rakyat bertekad bulat untuk membebaskan rakyat Irian Barat dari cengkeraman penjajahan Belanda dengan segala konsekuensinya.

b. Tahun 1958

1) Membubarkan Panitia Khusus Irian Barat dan meminta supaya tiga puluh organisasi yang berpusat menjadi anggota Front Nasional Pembebasan Irian Barat.
2) Pada permulaan tahun 1958 Kongres Wanita Indonesia menyerukan kepada Pemerintah dan rakyat Indonesia untuk bertindak sebijaksana mungkin supaya tidak terjadi pengorbanan yang sia-sia, lebih-lebih pengorbanan jiwa berhubungan dengan pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan Permesta (Perjuangan Rakyat Sementara.
3) Pada tanggal 3 Februari 1958, Kongres Wanita Indonesia mengirim delegasi ke Konferensi Asia Afrika di Colombo (Sri Lanka), dari tanggal 15 s/d 24 Februari 1958. Delegasi terdiri dari: Ny. Mr. Maria Ulfah Santoso, (Ketua), Ny. dr. Hurustiati Subandrio, Ny. Mr. Nani Suwondo, Ny. Kartini K. Radjasa Nn. Soehartini, Ny. Suyono Prawirobismo, Ny. S.K. Trimurti, Ny. Iljas Sutan Pangeran (dari Badan Usaha).
4) Maret 1958, Kongres Wanita Indonesia mengirim utusan kepada Jawatan Kepolisian Negara yang terdiri dari: Ny. Mr. Maria Ulfah Santoso (Ketua), Ny. M. Muharam Wiranatakusumah (Penulis I), Ny. Artinah Samsudin (Bendahara II) untuk menyampaikan keputusan Kongres Wanita Indonesia yang diambil pada Majelis Permusyawaratan tanggal 2 Maret 1958 mengenai Polisi Wanita, berupa:
    a) Salinan laporan Panitia Peninjauan Polisi Wanita, yang dibentuk oleh Kongres Wanita Indonesia pada tahun 1957.

b) Nota tentang status Polisi Wanita
c) Lampiran pada nota polisi Wanita serta Bagan Operasionilnya.

5) Maret 1958 Kongres Wanita Indonesia mengadakan latihan Kader Wanita Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) yang diselenggarakan oleh Yayasan Hari Ibu di Gedung Persatuan Wanita Yogyakarta dengan bantuan tenaga dari Jawatan Pendidikan Masyarakat (Ny. Kartono Mangunkusumo) dan bantuan keuangan dari Biro Pembangunan Masyarakat Desa yang berada di bawah Perdana Menteri (Bapak Ir. H. Djuanda).
6) Maret 1958, diadakan rapat Kongres Wanita Indonesia untuk memecahkan soal Gerakan Masa yang anggotanya terdiri dari perorangan dan organisasi wanita. Gerakan massa tersebut dipelopori oleh Gerwani (berafiliasi dengan PKI) yang berusaha merongrong Kowani. Diputuskan supaya mereka yang duduk dalam Gerakan Masa, memilih antara Kongres Wanita Indonesia dan Gerakan Masa. Ternyata tidak ada yang keluar dari Kongres Wanita Indonesia, kemudian Gerakan Masa tidak terdengar lagi.
7) Tanggal 16 Agustus 1958 dibentuk BKS Wamil (Badan Kerja sama Wanita/ Militer).
8) Tanggal 24 Agustus 1958, mengadakan Seminar mengenai masalah wanita yang bekerja dan mengenai peranan wanita dalam rumah tangga serta masyarakat.
9) Pertengahan tahun 1958, Sekretariat Kongres Wanita Indonesia mengirim surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Perdana Menteri untuk membicarakan rancangan Undang-Undang Perkawinan yang telah disampaikan. Diusulkan kompromi antara:

a) Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang bersifat Peraturan Umum (usul Parlemen melalui Ny. Sumari).
b) Rancangan Undang-Undang Perkawinan Umat Islam (usul Pemerintah).

Usul kompromi tersebut disampaikan oleh: Persit, Sahati, Wanita Universitas, Perwari, Wanita Demokrat, PWKI, Wanita Rakyat, Bhayangkari, Gerakan Wanita Sosialis, dan PPI.

10) Mengirim surat dan delegasi ke Kementerian Dalam Negeri agar IGO *(Inlandse Gemeente Ordonantie)* segera dicabut sesuai dengan persamaan hak antara pria dan wanita dalam menduduki jabatan negeri.
11) Pada sidang pleno BKS Wamil tanggal 19 September 1958 disusun pokok-pokok tata tertib, program perjuangan dan pedoman kerja dari pengurus harian.
    a) Tujuan BKS Wamil:
       Menghimpun kekuatan-kekuatan Nasional, khusus wanita dan militer secara riel dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat.
    b) Bentuk BKS Wamil adalah Badan Kerja sama antara militer dan organisasi-organisasi fungsional wanita yang tidak mengurangi kedaulatan organisasi masing-masing.
    c) Anggota BKS Wamil di pusat terdiri dari organisasi-organisasi wanita yang berpusat dan militer.
    d) BKS Wamil bertugas mengerahkan tenaga wanita untuk turut melaksanakan program Front Nasional Pembebasan Irian Barat Pusat.
    e) Pengurus harian, sebagai berikut:

Ketua : Kolonel Sambas Atmadinata
Let. Kol. Soewardi Brototanoyo
Wakil Ketua I : Ny. Burdah Jusupadi
Ny. Gani Suryokusumo
Wakil Ketua II : Ny. S. Kartowiyono
Wakil Ketua III : Ny. S. Nurjanah
Ny. Raimah Raib
Penulis I : Nn. S. Lena
Penulis II : Ny. Waluyo Soegondo
Bendahari I : Ny. Rakena Thaher
Bendahari II : Ny. Wahid Hasyim
Pembantu I : Ny. Umi Sarjono
Bendahari II : Ny. Jakasemedi
Bendahari III : Nn. Mimi Soedarmo.

12) September 1958, Gedung dan Usaha *Roemer Visser Vereniging* di Jl. HOS. Cokroaminoto No. 67 Jakarta diambil alih oleh Kongres Wanita Indonesia dan dijadikan Yayasan Daya Wanita, dengan Ketuanya dari Kongres Wanita Indonesia yaitu Theodora Walandouw. Selanjutnya penjualan bunga Kartini ditetapkan menjadi usaha Yayasan Daya Wanita.
13) November 1958, mengadakan peringatan 30 tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, dibentuk Panitia yang diketuai oleh: Ny. Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito dari Yayasan Hari Ibu. Acara peringatan adalah sebagai berikut:
    a) 16-18 Desember 1958, hari Kebaktian dengan pemeriksaan kebersihan umum oleh Badan Penghubung Organisasi Wanita Jakarta Raya.
    b) 21 Desember 1958 siang, rapat umum di Gedung Olah Raga.
    c) 21 Desember 1958 malam, kesenian diselenggarakan bersama dengan Panitia Hari Sosial.

d) 22 Desember 1958 pagi, pameran diselenggarakan oleh Badan Penghubung Organisasi Wanita di Gedung Wanita Jakarta. Juga Bank Koperasi Wanita menyelenggarakan pameran di Gedung Wisma Nusantara dari tanggal 19-22 Desember 1958.

e) Peresmian Gedung Wisma Mulia, di Jalan Bidara Cina oleh: Yayasan Daya Wanita. Gedung tersebut dimaksudkan sebagai perumahan bagi perawatan wanita tua dan telantar.

f) 22 Desember 1958 malam, diadakan resepsi di Gedung Wanita.

g) Dalam rapat umum di Gedung Olah Raga, diadakan empat resolusi dan dua pernyataan:
   (1) Resolusi mengenai ekonomi, kebutuhan bahan pokok sehari-hari.
   (2) Resolusi mendesak kepada Konstituante untuk mencantumkan hak-hak wanita dalam hukum keluarga selaras dengan kepribadian bangsa Indonesia.
   (3) Resolusi mengenai Undang-Undang Perkawinan supaya segera dibahas dan diundangkan.
   (4) Resolusi supaya hari Ibu dijadikan Hari Nasional dalam arti seperti Hari Sumpah Pemuda.
   (5) Pernyataan kesatu:
   Menentang sekeras-kerasnya dilakukannya percobaan Bom A dan H oleh negara manapun juga. Menyetujui dan menganjurkan dipergunakannya tenaga atom untuk maksud damai, sebagai kekuatan untuk pembangunan. Meneruskan kepada seluruh dunia terutama

wanitanya untuk terlaksananya prinsip tersebut.

(6) Pernyataan kedua:
Mendukung berdirinya Front Nasional Pembebasan Irian Barat dengan BKS-BKSnya. Bertekad bulat turut memperjuangkan pembebasan Irian Barat dalam waktu sesingkat-singkatnya.

14) Dalam rangka Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita disusun buku ”Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia” dengan bantuan Departemen Penerangan.

c. Tahun 1959:
1) Membentuk panitia sandang pangan untuk merencanakan distribusi sandang pangan.
2) Mengajukan calon untuk MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara).
3) Menentukan bahwa Kongres Wanita Indonesia tidak turut merayakan Hari Wanita Internasional tanggal 8 Maret, tetapi menyerahkan perayaan hari tersebut kepada masing-masing organisasi.
4) Membentuk Panitia Perumus Kebudayaan Nasional untuk membahas peranan wanita dalam meningkatkan kebudayaan Nasional.
5) Setelah mendengar ceramah Kolonel Dr. Soemarno mengenai Kesatuan Wanita Angkatan Darat pada Permusyawaratan Kongres Wanita Indonesia tanggal 20 September 1959, dibentuk Panitia Kesatuan Wanita Angkatan Darat oleh Kongres Wanita Indonesia, terdiri dari 8 (Delapan) organisasi yang diketuai oleh Ny. M. Wahyudi (dari Bhayangkari). Adapun Delapan Organisasi tersebut adalah Bhayangkari,

Persit Muslimat Masyumi, PWKI (persatuan Wanita Kristen Indonesia), PPI (Pemuda Putri Indonesia), Muslimat NU, Wanita Katolik dan Wanita Universitas. Panitia tersebut telah menyusun usul-usul atau pendapat yang kemudian mendapat perhatian dari Pimpinan Angkatan Darat. Pada tahun 1960 oleh Pimpinan Angkatan Darat dibentuk Panitia Penasihat Pembentukan Korps Wanita Angkatan Darat.

6) Pada tahun 1959, setelah diperjuangkan diangkat lagi 2 (Dua) orang wanita di Pengadilan Agama.
7) Tanggal 13 Desember 1959, Kongres Wanita Indonesia mengadakan Seminar mengenai Kebudayaan Nasional dengan prasaran-prasaran dari: Persit, Wanita Demokrat, dan Perwari.[24]

F. Masa Demokrasi Terpimpin

Perkembangan Pergerakan Wanita dalam masa ini sangat dipengaruhi oleh situasi politik Negara bila dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Masa Demokrasi Terpimpin diawali dengan Dekret Presiden Soekarno tertanggal 5 Juli 1959. Dibentuk Lembaga-lembaga baru MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara), DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong), DPA (Dewan Pertimbangan Agung), DEPERNAS (Dewan Perancang Nasional) dan Front Nasional dengan komposisi Gotong Royong dan Nasakom (Nasionalis Agama Komunis) yang anggota-anggotanya ditunjuk atau diangkat oleh Presiden. Ketua Mahkamah Agung, Ketua MPRS, Ketua DPRGR dan Jaksa Agung diangkat menjadi Menteri. Manipol (Manifesto Politik), Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Deklarasi Ekonomi, Kepribadian Nasional ditetapkan sebagai Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pada

24 D. Poeponegoro; N. Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI…,* 209.

kenyataannya, Dekret Presiden adalah pengambilalihan seluruh wewenang Pemerintah dan pemusatan kekuasaan dalam satu tangan. Pada tahun 1963, MPRS telah mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup pemimpin Besar Revolusi.[25]

Sejak semula, PKI (Partai Komunis Indonesia) yang ingin memperkuat kedudukan politiknya, mendukung Presiden Soekarno. Dengan menggarapnya secara sistematis ditimbulkan keyakinan pada Presiden bahwa tanpa PKI ia akan menjadi lemah terhadap TNI (Tentara Nasional Indonesia). PKI dan ormas-ormasnya dapat dengan aman melakukan intimidasi dan teror politik terhadap pihak dan tokoh yang dianggap lawan serta anti Nasakom dengan tuduhan kontra revolusi, anti Bung Karno, agen Nekolim (Neo Kolonialisme) dan lain-lain. Doktrin PKI: ”Politik adalah Panglima”.[26]

Dalam masa Demokrasi Terpimpin, semua hal diatur Pemerintah sampai pada kreasi-kreasi seni dan selera hiburan. Jaminan dan perlindungan hukum tidak ada, banyak orang ditangkap tanpa diadili. Proyek-proyek mercusuar dibangun. Politik Luar Negeri menganut poros Jakarta - Peking, sehingga mempersempit ruang gerak RI di forum internasional dan memasukkan Indonesia dalam strategi politik RRC (Republik Rakyat China). Timbul gagasan ”NEFOS” *(New Emerging Forces)* sebagai tandingan ”OLDEFOS” *(Old, Established Forces)* yang mencapai puncaknya dengan Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 1 Januari 1965.[27]

Untuk membendung kekuasaan Komunis, maka di bawah pengaruh Angkatan Bersenjata (ABRI) pada tanggal 20 Oktober 1964 dibentuk ”Sekretariat Bersama Golongan Karya” (SEKBER GOLKAR) yang menjadi anggota Front Nasional. Badan ini terdiri dari golongan fungsional dan profesi yang tidak tergabung dalam

25 A. E. Agustina; Suparwoto, *S.K. Trimurti dan Pemikirannya untuk Kemajuan Bangsa Tahun 1933-1962. Journal Pendidikan Sejarah*, 2(3) 2014, 251-261.
26 A. E. Agustina; Suparwoto, *S.K. Trimurti dan Pemikirannya untuk Kemajuan Bangsa Tahun 1933-1962…*, 254.
27 A. E. Agustina; Suparwoto, *S.K. Trimurti dan Pemikirannya untuk Kemajuan Bangsa Tahun 1933-1962…*, 255.

partai-partai politik; antara lain terdiri dari ABRI, Serikat-Serikat Pekerja, Organisasi Pemuda dan Organisasi Wanita.

Suasana ”ketegangan” sudah mulai mempengaruhi pergerakan wanita sejak Gerwani berhasil duduk dalam Pimpinan Kongres Wanita Indonesia pada tahun 1957. Pengaruh Gerwani menjadi tambah besar, sejak struktur Pimpinan Kongres Wanita Indonesia diubah pada Kongres ke-XII tahun 1961 di Jakarta. Pimpinan Kongres Wanita Indonesia yang semula merupakan Sekretariat kini berubah menjadi Dewan Pimpinan yang terdiri dari 9 orang wakil organisasi yang akan memimpin secara bergilir dengan didampingi oleh seorang Ketua Koordinator. Intimidasi dan tekanan mulai dijalankan terhadap pemimpin-pemimpin organisasi wanita terutama yang anti komunis.

Selama masa 1961-1965, pergerakan wanita lebih diarahkan menjadi ”alat revolusi”. Kongres Wanita Indonesia ke-XII tahun 1961 mendukung adanya Front Nasional sebagai Badan Perjuangan Rakyat Indonesia serta minta diikutsertakan dalam Front Nasional sebagai karyawan wanita. Pada awal tahun 1962, Kongres Wanita Indonesia menjadi anggota Front Nasional. Selanjutnya setiap pengerahan masa oleh Front Nasional selalu diserahkan kepada Kongres Wanita Indonesia. Usaha pembentukan barisan-barisan Sukarelawati (Sukwati). khususnya dalam rangka melaksanakan “Dwikora” (Dwi Komando Rakyat) untuk mengganyang Malaysia sangat digiatkan.[28]

Pada Kongres Wanita Indonesia ke-XIII tahun 1964 di Jakarta, KOWANI telah mengukuhkan pemberian gelar ”Pembimbing Agung Gerakan Wanita Revolusioner Indonesia” kepada Presiden Soekarno serta mengeluarkan pernyataan yang mendukung perjuangan rakyat negara-negara NEFOS. Nama KOWANI sebagai singkatan dari Kongres Wanita Indonesia yang telah dipergunakan lagi disahkan.

28 A. E. Agustina; Suparwoto, *S.K. Trimurti dan Pemikirannya untuk Kemajuan Bangsa Tahun 1933-1962…,* 257.

Kalau pada Kongres ke-XII (tahun 1961) masih dikeluarkan desakan dan tuntutan agar Pemerintah segera mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan, tetapi pada Kongres ke-XIII (tahun 1964) di Jakarta masalah tersebut sudah tidak disinggung-singgung lagi. Dalam kenyataan, perjuangan pergerakan wanita Indonesia untuk mempertinggi derajat wanita justru menjadi kabur, karena merosotnya penghargaan terhadap wanita yang dilakukan oleh pemimpin negara. Seolah-olah wanita dianggap merupakan barang pameran dan hiasan saja. Dalam penyambutan pembesar-pembesar negara selalu ditampilkan ”Barisan Bhinneka Tunggal Ika” yang terdiri dari gadis-gadis muda dan cantik. Krisis akhlak merajalela, terutama di lapisan atas.[29]

Dalam masa ini banyak delegasi wanita dikirim ke negara komunis. Di samping itu, Kongres Wanita Indonesia telah menyelenggarakan untuk pertama kalinya Peringatan Hari Wanita Internasional pada tanggal 8 Maret 1965 antara lain dengan acara-acara seperti rapat umum di Istana Negara, Seminar TAVIP (Tahun *Vivere Pericoloso),* pengiriman bantuan ke garis depan, dan lain-lain. Sedang peringatan Hari Anak-Anak yang biasanya dilangsungkan pada tanggal 1, 2, 3, Juli ditetapkan untuk dijatuhkan pada tanggal 6 Juni, bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Soekarno.[30]

Selanjutnya KOWANI telah mengikutsertakan anggota-anggotanya dalam Pendidikan Kader Revolusi Angkatan Dwikora, Pendidikan KOTRAR (Komando Tertinggi Retooling Aparatur Negara) dan Pendidikan Kader Nasakom. KOWANI juga telah membentuk Badan Koordinasi Sukarelawati yang beranggotakan organisasi yang sudah mempunyai sukarelawati. Di samping itu KOWANI juga menyelenggarakan Resimen Wanita Task Force Front Nasional sesuai dengan penggarisan dari PB Front Nasional.

29 R. Hafid, “Perlawanan Kaum Buruh Perempuan”, *Jurnal Legalitas,* 2(1) 2009, 21-30.
30 A. E. Agustina; Suparwoto, *S.K. Trimurti dan Pemikirannya untuk Kemajuan Bangsa Tahun 1933-1962…,* 259.

Pada masa ini terbentuk 2 (dua) organisasi yaitu ”Ikatan Wanita Antar Departemen” (IKWANDEP) pada tanggal 25 Mei 1961 dan ”Badan Kerja sama Dharma Pertiwi” pada tanggal 15 April 1964. IKWANDEP beranggotakan karyawati Departemen-Departemen dan Lembaga-lembaga non Departemen, sedangkan ”Badan Kerja sama Dharma Pertiwi” beranggotakan keempat organisasi istri ABRI. Kedua organisasi tersebut dibentuk karena ingin lebih menggalang Kerja sama antara anggotanya. Bentuk organisasinya masih dalam taraf perkembangan dan belum tersusun secara vertikal. Ketika Koordinasi Wanita Golkar terbentuk, baik IKWANDEP maupun Dharma Pertiwi tercatat sebagai anggotanya.[31]

Ketegangan memuncak ketika PKI melahirkan kudeta pada tanggal 30 September 1965 yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Gerakan 30 September/PKI (G 30 S). Tujuh orang perwira tinggi ABRI dibunuh dengan kejam di Lubang Buaya. Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Kostrad segera mengambil langkah-langkah untuk pemulihan keamanan.

Setelah pecah G 30 S, aspirasi wanita yang selama ini terpendam dan terkekang mencari salurannya di luar KOWANI. Karenanya timbul aksi dari Koordinasi Wanita KAP-GESTAPU (Komando Aksi Pengganyangan Gestapu) pada akhir tahun 1965 yang kemudian menemukan bentuknya pada tahun 1966 dalam KAWI (Kesatuan Aksi Wanita Indonesia).

Sementara itu, Majelis Permusyawaratan KOWANI tanggal 29 Oktober 1965, telah memecat GERWANI sebagai anggota karena terlibat G 30 S, namun pembersihan ke dalam Dewan Pimpinan KOWANI baru diadakan pada tahun 1966. Selanjutnya dalam Mukernas Golkar pada bulan Desember 1965, telah diputuskan struktur Golkar terbagi dalam 10 (Sepuluh) Koordinasi termasuk

31 S. Kirom, ”Buru dan Kekuasaan: Dinamika Perkembangan Gerakan Serikat Pekerja di Indonesia (Masa Kolonial-Orde Lama)”, *Journal Pendidikan Sejarah*, 1(1) 2015, 9-15.

Koordinasi Wanita. Sejak itu Koordinasi Wanita Golkar mulai diaktifkan. Demikianlah suasana pada masa 1960-1965 yang mempengaruhi dan tercermin dalam perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia.

Dalam masa 1960-1965 dilangsungkan 2 (Dua) Kongres Wanita Indonesia yaitu Kongres ke XII (1961) dan Kongres ke XIII (1964) di Jakarta. Dalam Kongres ke XII terjadi perubahan yang penting yaitu perubahan Sekretariat Kongres menjadi Dewan Pimpinan Kongres. Pada sistim sekretariat, sekretariat hanya merupakan Badan Pelaksana dari semua keputusan atau anjuran Kongres dan Majelis Permusyawaratan serta tidak dapat menentukan kebijaksanaan sendiri. Sedang Dewan Pimpinan mempunyai wewenang menentukan kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.[32]

Selama masa 1961-1965, hubungan Kongres Wanita Indonesia dengan gabungan organisasi wanita daerah mulai diadakan melalui saluran kepala daerah. Pada Kongres ke XIII wakil-wakil dari gabungan organisasi wanita daerah juga diundang. Kemudian dengan bantuan para Gubernur daerah-daerah yang belum mempunyai gabungan organisasi wanita di tingkat propinsi (dati I) segera membentuknya. Hubungan Kongres Wanita Indonesia dengan gabungan organisasi wanita di daerah merupakan hubungan administratif.

1. Peristiwa-peristiwa penting dan kegiatan menjelang Kongres ke-XII
   a. Mengusulkan 9 orang calon dari Kongres Wanita Indonesia untuk duduk dalam Dewan Kebudayaan Nasional.
   b. Mengusulkan kepada pimpinan Angkatan Darat pembentukan ”Panitia Penasihat Kesatuan Wanita Angkatan Darat” serta pengangkatan 2 orang calon dari Kongres Wanita

32 S. Kirom, “Buru dan Kekuasaan: Dinamika Perkembangan Gerakan Serikat Pekerja di Indonesia (Masa Kolonial-Orde Lama)”…, 13.

untuk ”Tenaga Inti Kesatuan Wanita Angkatan Darat” yaitu Ny. Kartimi Tambunan Maulani dan Nn. Mulyati (sekarang Kol. Mulyati). Sebagai hasil dari saran-saran KWI tersebut, maka:

1) Dengan Surat Keputusan KASAD, No: Kpts-381/3/1960 tertanggal 23 Maret 1960 dibentuk suatu ”Panitia Penasihat Pembentukan Corps Wanita Angkatan Darat” yang terdiri dari:
   a) Nn. Rahyu Paramita Abdurachman dari PMI sebagai Ketua.
   b) Ny. Soemarno dari PMI
   c) Ny. Maria Ulfah S.H. dari pimpinan KOWANI
   d) Ny. K. Soewarno dari KOWANI/Persit
   e) Ny. Sunaryo Mangunpuspito dari KOWANI/ Muslimat Masyumi.
   f) Ny. Kwari Sosrosumarto dari KOWANI/Wanita Katolik.
   g) Ny. S.M. Sudarman dari KOWANI/Wanita Demokrat Indonesia.
2) Ditetapkan ”Tenaga Inti KOWAD” yang terdiri dari 5 orang anggota dan 2 orang di antaranya adalah merupakan calon yang diajukan oleh Kongres Wanita Indonesia.

c. Menetapkan penyelenggara Kongres Wanita Indonesia ke XII di Yogyakarta pada tanggal 24-26 Desember 1960, tetapi kemudian diundur ke tahun 1961 dan bertempat di Jakarta.

d. Membentuk *Steering Committee* dengan tugas menyusun acara Kongres, rencana perubahan Anggaran Dasar Kongres Wanita Indonesia, tata tertib Kongres dan tata cara pemilihan.

e. Mengajukan usul-usul yang konkret berdasarkan pengalaman mengenai penyaluran bahan sandang pangan kepada Pemerintah.

f. Mengadakan Majelis Permusyawaratan selama tahun 1960-1961 pada tanggal 24 Januari 1960, 21 Februari 1960, 19 Juni 1960, 28 Agustus 1960, 4 Desember 1960 dan 13 Januari 1961.

g. Catatan :
Muslimat Masyumi pada bulan Agustus 1960 membubarkan diri, sehingga keanggotaannya dalam Kongres Wanita Indonesia terhenti.[33]

2. Kongres Wanita Indonesia ke-XII, pada tahun 1961 di Jakarta.
Diadakan di : Gedung Wanita, Jalan Diponegoro 26 Jakarta, pada tanggal 6 sampai dengan 9 Februari 1961.
Pimpinan : Ny. Maria Ulfah S.H.
Ny. Memet Tanumijaya
Ny. Burdah Yusupadi
Ny. Mahmudah Mawardi
Ny. Dr. Hurustiati Subandrio
Hadir : Wakil-wakil dari 40 organisasi wanita.
Keputusan-keputusan Kongres ke-XII, tahun 1961
a) Kongres Wanita Indonesia susunannya diubah menjadi berikut:
(1) Kongres
(2) Majelis Permusyawaratan
(3) Dewan Pimpinan.
b) Dewan Pimpinan KOWANI terdiri dari 9 orang yang dipilih oleh Kongres sekaligus dan sedapat mungkin mencerminkan segala aliran dari Kongres Wanita Indonesia.

33 S. Kirom, "Buru dan Kekuasaan: Dinamika Perkembangan Gerakan Serikat Pekerja di Indonesia (Masa Kolonial-Orde Lama)"…, 17.

Diangkat seorang Ketua Koordinator yang dipilih di antara 9 orang pimpinan tersebut dan disahkan oleh Kongres.

c) Kongres Wanita Indonesia menerima dan menghargai setinggi tingginya amanah PJM Presiden Panglima Tertinggi atau Pemimpin Besar Revolusi Indonesia sebagai pedoman perjuangan wanita, bahwa kaum wanita Indonesia sesuai dengan kodratnya harus melaksanakan perjuangan bersama-sama kaum pria dalam menyelesaikan revolusi Nasional, ialah menciptakan masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur.

d) Kongres mendukung sepenuhnya Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap pertama, sebagaimana diputuskan oleh MPRS dalam Ketetapannya No. II/MPRS/ 1960 serta menyatakan kesediaannya untuk ikut serta dalam pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana dan menghimpun tenaga wanita dalam kesatuan gerak.

e) Kongres Wanita Indonesia mendukung adanya Front Nasional sebagai Badan Perjuangan Rakyat Indonesia. Kongres Wanita Indonesia minta diikutsertakan dalam Front Nasional sebagai Karyawan Wanita.

f) Kongres Wanita Indonesia mendukung sepenuhnya keputusan dan kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia mengenai pengembalian wilayah Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan RI dengan menanggung segala akibatnya.

g) Kongres Wanita Indonesia menganggap sudah tiba waktunya agar pemerintah segera mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan yang demokratis yang dapat melindungi dan menjamin kesejahteraan keluarga.

h) Kongres Wanita Indonesia mendukung sepenuhnya keputusan dan sikap Pemerintah Republik Indonesia

untuk menyokong perjuangan kemerdekaan rakyat Kongo, Aljazair dan Laos sesuai dengan semangat Konferensi Asia Afrika di Bandung.

i) Memberi tugas kepada organisasi-organisasi wanita setempat untuk memelihara dengan baik peninggalan dan tempat-tempat bersejarah di daerahnya masing-masing terutama mengenai pahlawan-pahlawan wanita.

j) Berusaha mendirikan ”Museum Perjuangan Wanita”.

k) Memberi kekuasaan kepada Pimpinan Baru Kongres Wanita Indonesia untuk meninjau kembali Peraturan atau Anggaran Dasar dari Badan-Badan Usaha bersama Kongres Wanita Indonesia (Yayasan-Yayasan, Panitia-Panitia, Komisi-Komisi dan lain-lain).

l) Kongres mengesahkan pembentukan Yayasan Daya Wanita yang merupakan usaha penampungan bekas perkumpulan ”Roumer Visser”, dengan Ketua Ny. Theodora Walandouw dan Wakil Ketua Ny. Jo Chaerul Saleh.

m) Memberi tugas kepada Majelis Permusyawaratan Kongres Wanita. Indonesia membuat program yang berisikan:
   (1) Piagam Hak-hak Wanita yang telah diputuskan oleh Kongres Wanita Indonesia.
   (2) Ketetapan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) ke-I dan II mengenai Pola Pembangunan Semesta Berencana Tahapan Pertama Tahun 1961-1969.

n) Pada Kongres ke-XII itu telah dipilih sebagai Dewan Pimpinan:
   (1) Dr. Ny. Hurustiati Subandrio (ISWI) sebagai Ketua Koordinator.
   (2) Ny. Burdah Yusupadi (Wanita Demokrat Indonesia)
   (3) Ny. Maria Ulfah SH (PASI)
   (4) Ny. Titi Memed Tanumidjaja (Bhayangkari)

(5) Ny. Mudikdio (Gerwani)
(6) Ny. Mahmudah Mawardi (Muslimat NU)
(7) Drg. Ny. Yetty Rizali Noor kemudip diganti oleh Ny. Hutasoit (Perwari)
(8) Ny. Widya Latief (Persit KCK)

o) Dalam Kongres ini pada tanggal 7 Februari 1961 diadakan Diskusi Panel mengenai "Wanita dan Kepribadian Nasional", dengan pimpinan Ny. Wahyudi, Ny. S. Kartowijono dan Nn. Aisah.

Pokok-pokok pembahasan:

(1) Kepribadian Nasional oleh Prof. Dr. Slamet Imam Santoso.
(2) Kebudayaan dan kepribadian Nasional oleh Dr. Ny. Hurustiati Subandrio.
(3) Etika Agama dalam pembinaan kepribadian Nasional, oleh Dr. H. Mukti
(4) Peranan dan tugas wanita dalam pembinaan kepribadian Nasional oleh Bapak Mohammad Said.
(5) Peranan dan tugas ibu dalam pembinaan kepribadian Nasional, oleh Ny. Sumargono, dengan pembahas-pembahas oleh: Bapak Tartib Prawirodiharjo, Prof. Dr. Notohamijoyo, dan Ny. Emma Puradiredja.

p) Beberapa rumusan Diskusi Panel yang menjadi resolusi Kongres antara lain:

(1) Pelaksanaan tugas wanita dalam pembinaan kepribadian Nasional ialah dengan mengikutsertakan wanita dalam pelaksanaan pembangunan semesta berencana sebagai yang ditetapkan oleh MPRS, terutama di dalam bidang-bidang pendidikan dalam rumah tangga, sekolah dan masyarakat.
(2) Mengajukan kepada pemerintah agar menyempurnakan Badan Permufakatan Nasional kesejahteraan keluarga untuk memikirkan dan memberikan bimbingan

mengenai kesejahteraan keluarga dalam membina kepribadian Nasional melalui sekolah rendah sampai sekolah menengah atas dan masyarakat sesuai dengan jiwa Pancasila.

(3) Untuk melindungi kebudayaan nasional terhadap pengaruh kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan selera dan kepribadian Indonesia harus dikembangkan kebudayaan Nasional yang menuju kebudayaan masyarakat sosialis Indonesia dengan memupuk serta mengadakan pertukaran kebudayaan daerah dan mendirikan Balai Budaya.

(4) Harus diakui, bahwa penyiaran Agama kalau dibandingkan dengan pengajaran dan pendidikan pengetahuan-pengetahuan lainnya baik di sekolah maupun di masyarakat belum memuaskan karenanya maka dianjurkan kepada Pemerintah c.q. Departemen Agama supaya lebih menyempurnakan penyiaran dan Pendidikan Agama.

3. Peristiwa-peristiwa penting dan kegiatan setelah Kongres ke-XII (1961-1964)

   a. Pada tanggal 27 Maret sampai dengan 7 April 1961, Kongres Wanita Indonesia mengirim utusan-utusan ke *"Asian Regional Conference"* dan Seminar dari *Associated Country Women of the World* di Universitas Malaya Kualalumpur, yaitu:

      1) Ny. Muharam Wirangtakusurnah (Bhayangkari)
      2) Nn. Malahayati Abdullah (Pemuda Putri Indonesia)

      Seminar itu diselenggarakan oleh National *Association of Women's Institutes, Federation of Malaya,* yang diketuai oleh Raja Perempuan Perlis.

   b. Untuk mempergiat usaha pemberantasan buta huruf, maka pada tanggal 21 April 1961 (Hari Kartini), diadakan

perlombaan pemberantasan buta huruf antar organisasi-organisasi wanita dengan bekerja sama dengan Jawatan Pendidikan Masyarakat.

c. Sehubungan dengan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) untuk membebaskan Irian Barat yang diucapkan Presiden Soekarno di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961, maka Kongres Wanita Indonesia menyatakan kesanggupannya melaksanakan komando tersebut.

d. Pada bulan April 1962 dikirim Misi Muhibah dari Kongres Wanita Indonesia ke Malaya (sekarang Malaysia) diketuai oleh Dra. Ny. M. Wahyudi (Bhayangkari). Turut serta dalam Misi tersebut, ialah:
   - Ny. Tuti Subrata dari PASI
   - Ny. Astrawinata dari Wanita Demokrat/Marhaenis
   - Ny. Rochana Zainal Abidin Achmad dari GPII Putri
   - Ny. Abednego dari PWKI
   - Ny. Tan Hwie Kiat dari ISWI
   - Ny. Andreas Sastrohusodo dari Perwari
   - Ny. Kartono Mangunkusumo dari Yayasan Hari Ibu
   - Ny. K. Soewarno dari Persit KCK
   - Ny. Lies Said dari Majalah Wanita (Wartawan)
   - Ny. Asnawi dari Majalah Keluarga (Wartawan)

   Setiap orang peserta diberi kesempatan mengadakan hubungan dengan organisasi yang sejenis.

e. Pada awal tahun 1962 Kongres Wanita Indonesia masuk Front Nasional.

f. Dalam memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April 1962, Kongres Wanita Indonesia selain mengajak dan menyerukan kaum wanita untuk mengenang perjuangan beliau juga menganjurkan agar mempergiat pelaksanaan TRIKORA.

g. Dari tanggal 31 Agustus sampai dengan 1 September 1962 diadakan "Musyawarah Front Nasional" dan Kongres Wanita Indonesia hadir yang membahas:
   (1) Tindak lanjut perjuangan pembebasan Irian Barat
   (2) Tindak lanjut pemulihan keamanan
   (3) Masalah sandang pangan

h. Dalam tahun 1963 Kongres Wanita Indonesia mengadakan seminar tentang wanita, *landreform,* dan musyawarah ekonomi.[34]

34 S. Kirom, "Buru dan Kekuasaan: Dinamika Perkembangan Gerakan Serikat Pekerja di Indonesia (Masa Kolonial-Orde Lama)"…, 9-15.

Bab XI

Konsolidasi Organisasi Perempuan di Indonesia

A. Dewan Pimpinan Kongres

Diadakan : Jakarta, tanggal 24 sampai dengan 28 Juli 1964.
Pimpinan : Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia.
Hadir:

- 200 orang wakil dari organisasi-organisasi anggota Kongres Wanita Indonesia.
- 200 orang utusan dari daerah-daerah termasuk Irian Barat.
- 30 orang tamu-tamu dari Luar Negeri yaitu dari: Uni Soviet, Philipina, RRT (sekarang RRC/Republik Rakyat Cina), Korea, Vietnam, Cekoslowakia, Hungaria, Yugoslavia, dan Republik Demokrasi Jerman

Prasaran-prasaran:

- ”Revolusi Makanan Indonesia”, oleh Menteri Kesehatan Dr. Satrio.
- ”Memperhebat Ketahanan Revolusi Nasional dengan memperhebat usaha Swa Sembada Pangan”, oleh. Menteri Sosial Rusiah Sardjono SH dan prasaran dari Menteri Pertanian dan Agraria Soejana SH.

a. Keputusan-keputusan Kongres ke-XIII (1964)

1) Mengesahkan perubahan singkatan Kongres Wanita Indonesia menjadi KOWANI

2) Penyempurnaan Anggaran Dasar Kongres Wanita Indonesia antara lain:
   a) Pedoman Kongres Wanita Indonesia ialah Manifesto Politik Republik Indonesia (pasal 2).
   b) Kongres diadakan setiap 3 tahun sekali (pasal 5).
   c) Majelis Permusyawaratan bersidang sekurang-kurangnya 4 bulan sekali (pasal 6).
   d) Keanggotaan (pasal 8):
      Anggota biasa sekurang-kurangnya mempunyai 5 cabang.
3) Pidato Presiden Soekarno pada pembukaan Kongres (tanggal 24 Juli 1964 di Istana Olah Raga) menjadi landasan pokok program perjuangan KOWANI selanjutnya baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.
4) Mendukung pemberian gelar oleh Gerakan Wanita Marhaenis Indonesia kepada Presiden/Pemimpin Besar Revolusi kita sebagai ”Pembimbing Agung Gerakan Wanita Revolusioner Indonesia”.
5) Membentuk suatu barisan sukarelawati yang bertekad bulat, ampuh serta siap siaga sewaktu-waktu melaksanakan setiap Komando Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno baik untuk tugas-tugas tempur maupun yang lain dalam rangka DWIKORA mengganyang Malaysia.
6) Mendukung sepenuhnya anjuran Presiden untuk menjadi pelopor dan Sukarelawati Swasembada Pangan, terutama dalam menghadapi proyek neo-kolonialisme ”Malaysia”.
7) Agar wanita diikutsertakan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan operasi-operasi ekonomi atau Bidang Pangan, pada pemerintahan, lembaga-lembaga, badan-badan lainnya mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

8) Memegang teguh Pancasila sebagai landasan Pendidikan Nasional serta menjadikan Pancasila sebagai batu ujian kejujuran revolusioner di lapangan pendidikan.
9) Menjadi pemrakarsa bagi penyelenggaraan konferensi wanita Asia Afrika ke-II bersama seluruh wanita Asia Afrika lainnya secara gotong-royong.
10) Mendukung perjuangan rakyat negara-negara NEFO *(New Emerging Forces).*
11) Menjadikan hari lahir Presiden tanggal 6 Juni sebagai Hari Kanak-Kanak Nasional.
12) Susunan Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) yang terpilih untuk jangka waktu tahun 1964-1967:
    a) Dr. Ny. Hurustiati Subandrio (ISWI) sebagai Ketua Koordinator.
    b) Ny. Yo Chaerul Saleh (PERWARI)
    c) Ny. Bambang Supeno (PERSIT KCK), yang kemudian diganti oleh Ny. Latif Hendraningrat.
    d) Ny. D. Sukahar (Bhayangkari) yang kemudian diganti Ny. Suyono Prawirobismo
    e) Ny. Malftnudah Mawardi (Muslimat NU)
    f) Ny. Mudikdio (Gerwani)
    g) Ny. Kartini Radjasa BA (Gerakan Wanita Marhaenis)
    h) Dra. Ny. B. Simorangkir (PKWI)
    i) Ny. C. Suparni Muliono SH (Wanita Katolik RI).[1]

B. Anggota Kowani

Anggota Kowani pada tahun 1964 adalah sebagai berikut:
1) Gerakan Wanita Marhaenis
2) Muslimat N.U.

1 Syahfitri Anita, *Gerakan Perempuan: Tinjauan Sejarah (Sebagai Pengantar Diskusi Lingkar Studi Perempuan).* Jakarta: Bulan Bintang, 2006, 89-90.

3) Gerwani
4) Bhayangkari
5) Persit KCK
6) Persatuan Istri Angkatan Udara (PIA)
7) Yalasenastri
8) Pemuda Putri Indonesia (PPI)
9) Wanita Katolik RI
10) PWKI
11) Perwamu
12) Perwari
13) Wanita Perti
14) PSII Wanita
15) Pertiwi
16) Sahati
17) Pikat
18) Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
19) Putri Narpowandowo
20) Budhi Istri
21) Pasundan Istri (PASI)
22) Gerakan Wanita Sosialis (GWS)
23) Aisyiyah
24) Wanita Rakyat
25) Wanita Taman Siswa
26) Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI)
27) Wanita Indonesia
28) Powsa
29) Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI)
30) Wanita Gajah Mada
31) Rukun Wanita Indonesia
32) Putri Budi Sejati
33) Wanita Nasional
34) Wanita Baperki

35) Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI)
36) Persatuan Istri Teknisi

C. Ikatan Pegawai Wanita Antar Departemen

Atas prakarsa dari wakil-wakil organisasi karyawati dari 7 Departemen yaitu Departemen Penerangan, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Kejaksaan, Departemen Agama, Departemen PDK dan Departemen Perindustrian, pada tanggal 25 Mei 1961 dibentuk organisasi federasi ”Ikatan Pegawai Wanita Antar Departemen” (IKWANDEP).

IKWANDEP adalah merupakan organisasi pegawai wanita (karyawati di Departemen/Lembaga non Departemen/Perusahaan Negara serta menitikberatkan aktivitasnya dalam peningkatan kesejahteraan pegawai wanita. Tujuan mendirikan IKWANDEP ialah:

a. Ikut serta memperjuangkan perbaikan nasib kaum wanita Indonesia pada umumnya dan para karyawati khususnya.
b. Membina dan memupuk persatuan serta persaudaraan sesama karyawan dan karyawati khususnya.
c. Memperjuangkan penghargaan serta pengembangan karier pada karyawati dalam bidang tugasnya masing-masing.

Latar belakang dari terbentuknya IKWANDEP adalah permasalahan “Kedudukan Wanita sebagai pegawai”, antara lain:

a. Masih terdapatnya kebijaksanaan dalam Departemen/ Lembaga/ Perusahaan Negara yang kurang menguntungkan pegawai wanita:
    1) Kurang memberikan kepercayaan kepada pegawai-pegawai wanita untuk jabatan-jabatan penting dalam Departemen/ Lembaga-Lembaga.

2) pengiriman delegasi untuk kepentingan wanita yang terdiri dari pria.

b. Perlunya penyempurnaan pelaksanaan peraturan kepegawaian bagi pegawai wanita.

Susunan Pengurus IKWANDEP yang pertama adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Ny. S. Koempoel (Departemen Penerangan)
Wakil Ketua	:	Nn. Aisah (Departemen Dalam Negeri)
Sekretaris Jenderal	:	Ny. Yoyoh Wartomo SH (Departemen Kesehatan).
Bendahari	:	Ny. Rustamadji (Departemen Penerangan)
Pembantu Umum	:	Ny. Djamari Amin (Departemen Agama)
		Ny. Lena Karim (AURI)
		Ny. Erni (GARUDA)

Pembina organisasi adalah Menteri Nakertranskop pada saat itu yaitu Dr. Awaludin dan kemudian diteruskan oleh Laksamana Laut Mursalim. Penasihat adalah Ny. Maria Ulfah Soebadio SH., Dra. Ny. S.K. Trimurti, Drg. Ny. Yetty Rizali Noor dan Ny. Suwarni Salyo SH.

Pada tahun 1964 IKWANDEP telah memberikan gelar "Ibu Agung" kepada Ibu Negara Fatmawati Soekarno. Ketika Sekber Golkar terbentuk, IKWANDEP menggabungkan diri di dalamnya dan kemudian dikelompokkan sebagai anggota pada Koordinasi Wanita.

Sesuai dengan anjuran Dr. Awaludin dan Laksamana Mursalim, pada tahun 1971 nama IKWANDEP diganti menjadi PERSATWI (Persatuan Tenaga Kerja Wanita Indonesia) dengan maksud agar ruang lingkup keanggotaannya tidak hanya Departemen/non Departemen/Lembaga Tinggi Negara dan PN, tetapi juga Swasta.[2]

2 Gadis Arivia, *Soekarno dan Gerakan Perempuan: Kepentingan Bangsa Versus Kepentingan Perempuan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2000, 12-13.

D. Badan Kerja Sama Dharma Pertiwi

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia maka secara berturut-turut telah terbentuk organisasi istri Tentara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

a) Persit didirikan pada tanggal 3 April 1946 di Purwakarta.
b) Bhayangkari didirikan pada tanggal 17 Agustus 1949 di Yogyakarta.
c) PIA Ardhya Garini didirikan pada tanggal 25- November 1956 di Bandung.
d) Yalasenastri didirikan pada tanggal 27 Agustus 1957 di Surabaya.[3]

Dengan telah terbentuknya organisasi istri TNI dari semua Angkatan dan Kepolisian RI, maka sekitar tahun 1959 telah dimulai adanya persatuan dan Kerja sama yang berbentuk Pekan Olah Raga Istri Angkatan Bersenjata (PORISAB). Setelah wilayah Irian Barat kembali ke pangkuan RI, maka kerja sama tersebut dilanjutkan dengan pengiriman-pengiriman anggota dari ke 4 organisasi istri ABRI ke Irian Barat sebanyak 2 tahap, untuk melancarkan suatu misi Pemerintah yang disebut "Operasi Pertiwi" dalam rangka membangun Irian Barat. Tahap pertama dilaksanakan pada bulan Oktober 1963, sebanyak 16 orang Ibu dan tahap kedua pada tahun 1964, sebanyak 4 orang Ibu. Sebagai hasil dari operasi Pertiwi ini, Pemerintah mengirimkan 20 orang wanita asli Irian Barat ke Jakarta untuk mengikuti kursus pengetahuan rumah tangga dan kewanitaan yang diselenggarakan. oleh Pemerintah. Kursus tersebut diselenggarakan dua kali di Jakarta dengan tenaga pengajar dan pengasuh yang terdiri dari anggota-anggota organisasi istri ABRI.[4]

3 Gadis Arivia, *Soekarno dan Gerakan Perempuan: Kepentingan Bangsa Versus Kepentingan Perempuan…*, 16.
4 Lihat dalam Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003, 15-18.

Sebagai tindak lanjut dari peristiwa tersebut, maka pada tanggal 15 April 1964 pukul 12.00, bertempat di Gedung Panti Perwira Jakarta, ditandatangani naskah Keputusan Bersama tentang berdirinya "Badan Kerja Sama Dharma Pertiwi" (BKS Dharma Pertiwi) oleh para Ketua Umum ke 4 organisasi istri ABRI yaitu oleh: Ny. S.R. Lasmindar (Persit Kartika Chandra Kirana), Ny. Susilo (Yalasenastri), Ny. Budiardjo (PIA Ardhya Garini), dan Ny. B. Suwito (Bhayangkari). Perlu diketahui bahwa pada waktu itu Ketua umum organisasi istri ABRI belum dijabat secara fungsional.[5]

Sejak saat itu ke 4 organisasi tersebut telah menjalankan kegiatan yang sama sifat dan tujuannya serta mengadakan kerja sama di bidang sosial. Kejadian ini diikuti oleh daerah dengan terbentuknya BKS Dharma Pertiwi yang bersifat lokal dan tidak ada hubungannya satu sama lain.

E. Peranan Wanita dalam pengganyangan Gestapu/PKI

Setelah peristiwa G 30 S, pada 1 Oktober 1965 Mayor Jenderal TNI Soeharto selaku Panglima KOSTRAD segera mengambil langkah-langkah untuk pemulihan ketertiban dan keamanan. Proses pemulihan keamanan dan ketertiban ternyata mengalami hambatan, terutama karena sikap Presiden Soekarno sendiri seolah-olah melindungi PKI.[6]

Timbul KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), yang kemudian melancarkan demonstrasi-demonstrasi. Di samping itu timbul KAP GESTAPU (Komando Aksi Pengganyangan GESTAPU) yang terdiri dari Partai Politik dan Organisasi Masa, dengan Ketua

5 Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial…,* 19.
6 Siti Musidah Mulia; *Anik Farida, Perempuan dan Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, 209.

Haji Subchan Z.E. dan Sekjen Harry Chan SH. Pada tanggal 30 Oktober 1965 Corps PII Wati (Eksponen KAPPI) menghubungi HMI Wati (Eksponen KAMI) untuk mengadakan pertemuan dengan ormas-ormas wanita guna menjaga kemungkinan menggalang aksi di kalangan wanita. Pada tanggal 3 November 1965, rapat KAP GESTAPU telah memutuskan untuk menyelenggarakan demonstrasi wanita dan Corps PII Wati/HMI Wati diminta menyelenggarakan pelaksanaannya.[7]

Selanjutnya atas usaha Corps PII Wati bersama HMI, maka pada tanggal 5 November 1965 berhasil diadakan pertemuan dengan ormas-ormas wanita bertempat di kantor PMKRI Jalan Samratulangi No. 1. Hadir wakil-wakil dari organisasi-organisasi: Wanita Katolik, Wanita Marhaenis (OSA-USEP), Wanita Islam, Aisyiyah, Muslimat NU. GERWAPSI, Wanita Perti, Corps PII Wati dan HMI Wati. Pertemuan tersebut membahas rencana pelaksanaan demonstrasi wanita Ibu Kota yang akan menyampaikan resolusi atau pernyataan kepada Menteri Pangab Jenderal Soeharto dan PB Front Nasional. Selanjutnya dibentuk panitia pelaksana yang terdiri dari Ketua Ny. H. Asmah Syahroni (Muslimat NU), Sekretaris Nn. Sri Syamsiar BA (sekarang Dra. Ny. Sri Syamsiar Issom) Corps PII Wati).

Dengan persiapan yang singkat pada tanggal 8 November 1965 apel dan demonstrasi wanita Ibu Kota dapat dilaksanakan. Demonstrasi diikuti oleh kurang lebih 25000 masa wanita seperti: Muslimat NU, Gerwapsii, Wanita Perti, Fatayat NU, Wanita Marhaenis, Wanita Islam, Wanita Al Irsyad, Wanita Katolik yang diikuti pula oleh masa pemudi/pelajar/mahasiswi antara lain HMI Wati (Himpunan Mahasiswa Islam), Corps PII Wati, PMMI (Persatuan Mahasiswa Muslimin Indonesia) Wati, PPSK (Persatuan Pelajar Sekolah Kristen) PMKRI (Persatuan Mahasiswa Katolik, Republik Indonesia) Putri, IMM (Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah).

7 Siti Musidah Mulia, *Anik Farida, Perempuan dan Politik…,* 211.

SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia) serta PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia) dan lain-lain.[8]

Apel diadakan di lapangan Banteng dan 3 orang pembicara telah memberikan sambutan, dari wakil golongan agama (Ny. Asmah Syahroni), wakil golongan nasional (Ny. Gani Suryokusumo) dan wakil pemudi/pelajar putri/mahasiswi (Nn. Aniswati sekarang Ny. Aniswati Machnan). Kemudian masa wanita bergerak dengan tertib menuju markas KOSTRAD dengan didahului oleh Corps Genderang PII Jakarta Raya.[9]

Masa diterima langsung oleh Menteri Pangab Jenderal Soeharto. Di depan Menteri Pangab Mayor Jenderal Soeharto, atas nama para demonstran wanita Ibu Kota, Ny. S.Y. Arudji Kartawinata telah membacakan resolusi kepada Menteri Pangab yang isinya sebagai berikut:

a. Pernyataan setia kepada Bung Karno dan kesiapsiagaan untuk menyelamatkan Pancasila dari rongrongan baik, dari Nekolim maupun Kontra Revolusi Gestapu/ PKI beserta ormas-ormasnya dan antek-anteknya.
b. Mengetuk hati nurani Bung Karno untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia dari pengaruh moral yang negatif dengan segera membubarkan PKI/ Gerwani dan ormas-ormasnya yang bernaung di bawahnya. Kepada Menteri PDK didesak untuk mengambil alih sekolah-sekolah Gerwani seluruh Indonesia karena sekolah tersebut mendidik generasi muda menjadi manusia tidak bermoral dan tidak ber-Tuhan.[10]

Setelah itu masa wanita menuju Front Nasional, dan disambut/ diterima oleh Wakil Sekjen Front Nasional Brig. Jend. Djuhartono. Di depan Brig. Jend. Djuhartono, masa wanita diwakili oleh Ny. C. Mustamiruddin (Wanita Katolik) membacakan resolusi yang

8 Siti Musidah Mulia; *Anik Farida, Perempuan dan Politik…*, 100.
9 Sukanti Suryocondro, *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1984, 105-109.
10 Lihat dalam Vivi Widyawaty, *Laporan Konferensi Nasional Perempuan II POKJA (Masyarakat Kerja) Perempuan Mahardika*. Jakarta: Gramedia, 2006, 198-199.

sama isinya dengan yang disampaikan kepada menteri Pangab Mayor Jenderal Soeharto.[11]

F. Wanita Sekretariat Bersama Golkar

Sebagai reaksi terhadap pertumbuhan demokrasi terpimpin yang tidak sehat, pada tanggal 20 Oktober 1964 dibentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya yang menghimpun organisasi-organisasi fungsional dan profesi yang tidak berafiliasi dengan partai politik. Mula-mula anggota Sekber Golkar berjumlah 61 Organisasi, yang kemudian berkembang menjadi 291 organisasi termasuk organisasi wanita.

Dalam Musyawarah Kerja Nasional ke I Sekber Golkar pada tanggal 9 sampai dengan 11 Desember 1965 di Cibogo dalam bidang konsolidasi organisasi diputuskan penggolongan koordinator anggota Sekber Golkar dalam 10 koordinasi termasuk Koordinasi Wanita. Pimpinan Koordinasi Wanita Sekber Golkar yang pertama merupakan Presidium tersusun sebagai berikut:

- Ny. Soedarsono SH (Yalasenastri)
- Ny. H. Rabs Syansyuridjal (Wakil Islam)
- Ny. Emma Puradiredja (PAST) kemudian diganti oleh Ny. SR Tambunan
- Ny. Ch. Pangemanan (Wanita MKGR)
- Ny. Ina Lokollo (Wanita Satya Praja) kemudian diganti oleh Ny. Chamsinah Ali Dahlan.

Sebagai Sekretaris Jenderal Ny. Jusra Lubis (Putri Alwashliyah) yang kemudian diganti oleh Nn. Yohani Amien (Wanita GTP). Waktu itu telah terdaftar 23 organisasi wanita yang tergabung dalam Koordinasi Wanita Sekber GOLKAR:

1. Yalasenastri
2. Wanita Islam

11 Vivi Widyawaty, *Laporan Konferensi Nasional Perempuan II POKJA (Masyarakat Kerja) Perempuan Mahardika…,* 200-209.

3. Wanita MKGR (Wanita Musyawarah Keluarga Gotong Royong)
4. PASI (Pasundan Istri)
5. Wanita Satya Praja
6. Putri Alwashliyah
7. Wanita GTP (Wanita Gerakan Tenaga Pembangunan)
8. IKWANDEP (Ikatan Pegawai Wanita antar Departemen)
9. HMI Wati (Himpunan Mahasiswa Islam)
10. Corps PII Wati (Pelajar Islam Indonesia)
11. Masjiatul Aisyah
12. Wanita IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)
13. IBI (Ikatan Bidan Indonesia)
14. Wanita Corps Tendean
15. Sabarati/Berunawati
16. Dharma Pertiwi
17. POWSA (Persatuan Organisasi Wanita Setanah Air)
18. Ikatan Perawat Indonesia
19. PIKAT (Percintaan Ibu kepada Anak Temurunnya)
20. Dharma Karini
21. Perwari
22. GWS (Gerakan Wanita Sosialis)
23. Putri Narpowandowo.[12]

G. Era Orde Baru

Tahun 1966 menandakan berakhirnya era Soekarno dan Orde Lama serta permulaan Orde Baru dan era Pembangunan. Gerakan 30 September/ PKI menimbulkan pergolakan hebat di dalam masyarakat disebabkan ketidakpuasan dengan kebijaksanaan yang diambil oleh Presiden Soekarno sebagai Pemimpin besar revolusi dalam menyelesaikan peristiwa tersebut. Pergolakan dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI)

12 Vivi Widyawaty, *Laporan Konferensi Nasional Perempuan II POKJA (Masyarakat Kerja) Perempuan Mahardika*…lampiran.

yang didirikan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1965 oleh Tujuh Belas Organisasi Mahasiswa dari berbagai tempat. Bentuk kesatuan aksi tersebut merupakan wujud pergerakan baru yang maksudnya mengadakan aksi-aksi bersama untuk mengamankan dasar dan falsafah Negara (Pancasila) dan membantu ABRI dalam menumpas G 30 S. Lahirnya KAMI segera disusul oleh terbentuknya Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI) dan lain-lain.[13]

Tiga hal yang diajukan sebagai tuntutan yang terkenal dengan nama Tritura (Tri Tuntutan Rakyat), yaitu:

1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia
2. *Retooling* Kabinet Dwikora
3. Penurunan harga-harga[14]

Aksi-aksi tersebut demikian memuncaknya sehingga pada tanggal 11 Maret 1966 keluar Surat Perintah Presiden Soekarno yang kemudian terkenal dengan nama "Supersemar" (Surat Perintah Sebelas Maret) yang menugaskan kepada Jenderal TNI Soeharto untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban. Jenderal Soeharto segera mengambil langkah-langkah demi Keamanan Nasional berdasarkan garis yang adil dan benar dari Tri Tuntutan Rakyat itu. Sebagai tindakan pertama pada tanggal 12 Maret 1966 PKI dinyatakan sebagai partai terlarang bersama dengan segenap organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan partai tersebut.[15]

13 Siti Fatimah, "Perempuan dan Kekerasan pada Masa Orde Baru", *Demokrasi*, VI(2) 2007, 99-100.

14 Pada tuntutan pembubaran Partai Komunitas Indonesia (PKI) ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Soekarno dengan alasan Negara baru saja merdeka dan belum stabil untuk mengambil suatu kebijakan selain merumuskan UUD 1945 dan aturan yang lain. Sehingga banyak organisasi perempuan yang mengalami pembungkaman dan diskriminasi dari ruang lingkup publik maupun politiknya. Baru pada tahun 1978 ada pergerakan perempuan secara internasional besar-besaran yang memberikan pengaruh terhadap pemerintahan saat itu. Muhadjir Darwin, "Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa ke Masa", *Jurnal Ilmu Sosial and Politik*. 7(3) 2018, 287.

15 Siti Fatimah, "Perempuan dan Kekerasan pada Masa Orde Baru"…, 99.

Dunia Pergerakan Wanita mengharapkan KOWANI mengambil prakarsa dan memberi bimbingan dalam keadaan tidak menentu itu. Sekalipun GERWANI telah dipecat dari keanggotaan KOWANI dalam Majelis Permusyawaratan tanggal 29 Oktober 1965, akan tetapi selama Dr. Ny. Hurustiati Soebandrio masih menjabat Ketua Koordinator KOWANI sulit diharapkan perubahan-perubahan yang cepat dalam tubuh KOWANI. Bahkan KOWANI masih memperingati Hari Wanita Internasional tanggal 8 Maret 1966. Baru setelah keluarnya "Supersemar" dan dilakukan penahanan terhadap sejumlah Menteri Kabinet Dwikora diantaranya Dr. Soebandrio, maka dr. Ny. Hurustiati Soebandrio tidak dapat aktif lagi. Untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua KOWANI kepada Ny. Mahmudah Mawardi dipercayakan untuk menjabat sebagai Ketua Periodik pada tanggal 14 Maret 1966. Kebijaksanaan tersebut disahkan dalam Majelis Permusyawaratan KOWANI tanggal 15 April 1966. Pada sidangnya itu Majelis juga memutuskan untuk selekasnya mengadakan Kongres Luar Biasa dengan maksud mengadakan konsolidasi ke dalam.[16]

Selama memegang jabatan Ketua Koordinator sejak tahun 1961-1965, Dr. Ny. Hurustiati Soebandrio dinilai telah mengarahkan KOWANI ke suasana pengaruh blok sosialis atau komunis yang antara lain dapat dibuktikan dengan banyaknya pengiriman delegasi-delegasi wanita ke negara-negara komunis dan peringatan Hari Wanita Internasional. Kuatnya kedudukan sebagai Ketua Koordinator dianggap menjadi penyebab bahwa keputusan-keputusan dan sikap KOWANI didominasi oleh pendirian Ketua Koordinator. Oleh karena itu Kongres Luar Biasa KOWANI yang berlangsung dari tanggal 30 Mei sampai dengan 1 Juni 1966 di Jakarta memutuskan untuk meniadakan jabatan Ketua Koordinator dan mengganti sistem pimpinan KOWANI dengan Ketua Periodik

16 Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2005, 61-62.

yang bergilir antara semua anggota Dewan Pimpinan. Dengan sistem ini hendak dicegah pengaruh yang berlebihan oleh satu orang Ketua (Koordinator) KOWANI.[17]

Pada tahun-tahun berikutnya KOWANI terus mengadakan konsolidasi ke dalam dan meningkatkan kegiatan agar dalam masa Orde Baru dapat menjadi wadah penghimpun aspirasi kaum wanita Indonesia. Dengan organisasi-organisasi wanita di luar KOWANI diletakkan dasar-dasar kerja sama. Terutama dengan Koordinasi Wanita Sekber Golkar dan KAWI diadakan Badan Musyawarah untuk melaksanakan peringatan-peringatan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat Nasional secara bersama-sama.

Atas anjuran Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah dirintis pembentukan Komisi Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI) yang tugasnya adalah menunjang pergerakan wanita dengan cara mengumpulkan data dan mengadakan penelitian tentang keadaan dan kedudukan wanita serta memberi rekomendasi atas dasar penelitian dan data tersebut. Keanggotaan KNKWI terdiri dari unsur Pemerintah, pergerakan wanita dan ahli-ahli perorangan serta unsur pergerakan wanita yang pada waktu itu aktif dalam pembentukan KNKWI adalah KOWANI, Koordinasi Wanita Sekber Golkar dan KAWI. Untuk pertama kali KNKWI memilih pengurus yang sifatnya suatu presidium terdiri dari unsur pergerakan wanita dan Pemerintah pada tanggal 16 Desember 1968.[18]

Dengan masuknya kembali Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terbuka lagi kesempatan untuk menempatkan wakil Indonesia dalam *United Nations Commission*

17 Lihat dalam hasil penelitian Pujiati (2007), hasis temuan tesisnya mengatakan bahwa anggota KOWANI adalah yang paling besar dan dominan dalam memberikan pengaruh terhadap aktivitas politik perempuan pada masa orda baru. Lihat pada tesisnya Pujiati, *Kelestarian Perjuanan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI): Analisis pada Masa Kolonial dan Pascakolonial*. Tesis, Universitas Sains Malaysia, 2007, 8-9.

18 Mursidah, "Gerakan Organisasi Perempuan dalam Bingkai Sejarah", *Jurnal Kajian Gender*, 4(1) 2013, 92.

on the Status of Women. Melalui KNKWI diusulkan kepada Pemerintah agar wakil Indonesia dalam Komisi tersebut diambil dari unsur pergerakan wanita. Hal ini berhasil dengan ditunjuknya Drg. Ny. Yetty Rizali Noor (tahun 1971-1974) dan Ny. Suwarni Saljo, S.H. (tahun 1974-1978) untuk mewakili Indonesia dalam *United Nations Commission on the status of Women*. Sebelumnya yang ditunjuk untuk mewakili Indonesia dalam Komisi tersebut adalah wanita pejabat tinggi antara lain Nn. Laili Rusad, S.H. dan Ny. Artati Marzuki, sedangkan Ny. Rusiah Sarjono, SH dan Nn.' Endang Sulbi, S.H. (Ny. Suska) selain pejabat tinggi juga mendapat dukungan dari KOWANI.

Sebagai salah satu acara dalam memperingati "Empat Puluh Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia" oleh KOWANI diselenggarakan simposium "Re-Evaluasi Pergerakan Wanita Indonesia" pada tanggal 29 dan 30 Januari 1969 di Jakarta, dengan mengundang peserta dari kalangan luas. Sistem Ketua Periodik dalam struktur pimpinan KOWANI tetap dipertahankan pada Kongres KOWANI ke-XV yang diselenggarakan pada tanggal 18 sampai dengan 20 Februari 1970 di Jakarta. Sementara itu Pemerintah Orde Baru telah mulai melaksanakan Repelita ke-I dan bertekad untuk menyukseskan pembangunan melalui akselerasi modernisasi dengan mengikutsertakan seluruh rakyat. Suasana pembangunan membawa perubahan-perubahan secara cepat dan menuntut pula partisipasi kaum wanita secara lebih mantap dan terarah. Menjelang diselenggarakannya Kongres KOWANI ke-XVI timbul pemikiran di kalangan sejumlah organisasi-organisasi anggota KOWANI, agar KOWANI menyusun program kerja yang terarah. Untuk melaksanakan program kerja itu perlu pimpinan yang kesinambungannya tidak terputus dan oleh karena itu perlu ditetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Pemikiran tersebut diterima dalam Kongres KOWANI ke-XVI yang berlangsung dari tanggal 15 sampai dengan 18 Mei

1974 di Jakarta. Dalam Kongres itu dipilih 11 anggota Dewan Pimpinan, termasuk Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang juga mempunyai wewenang eksekutif. Dalam sistem ini tidak lagi diadakan Majelis Permusyawaratan setiap 4 atau 5 bulan untuk mengukuhkan Ketua Periodik, tetapi sidang Majelis Permusyawaratan diadakan jika dianggap perlu dalam menyusun kebijaksanaan yang prinsipal.[19]

Suatu perkembangan yang menggembirakan adalah meningkatnya kegiatan di kalangan wanita yang disalurkan melalui sarana organisasi wanita dan yayasan. Peningkatan kegiatan itu dapat pula kita saksikan pada BKS DHARMA PERTIWI yang dibentuk pada tahun 1964 dan sejak tahun 1966 bernaung di bawah pembinaan Hankam ABRI. Kemudian pada tahun 1972 berubah menjadi ”Dharma Pertiwi”. Kegiatan kekaryaan Dharma Pertiwi dilakukan melalui berbagai forum, seperti MPR, DPR, DPRD Tingkat I dan Tingkat II, Golkar, Kowani, BPOW/BKOW, Musyawarah Perguruan Swasta, GOPTKI dan KNKWI.

Organisasi-organisasi wanita Islam pada tanggal 2 Juli 1967 mendirikan ”Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Perempuan Islam Indonesia” (BMOPII) yang kemudian pada tanggal 11 Mei 1969 diganti namanya menjadi ”Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI). Di dalam wadah ini organisasi-organisasi wanita Islam mengadakan usaha-usaha bimbingan dan pembinaan bagi para anggotanya serta merintis hubungan dengan organisasi-organisasi lain, baik di dalam maupun di Luar Negeri.[20]

19 Wasisto Raharjo Jati, “Historisitas Politik Perempuan Indonesia”, *Paramita,* 24(2) 2014m 206-209.

20 Stigma yang terbangun terhadap segala aktivitas perpolitikan perempuan adalah tidak sejalan dengan pergerakan rezim yang memerintah yang kemudian menimbulkan ketakutan bagi perempuan Indonesia untuk bertindak. Perempuan banyak mengalami diskriminasi dan pemberantasan dalam organisasi dengan cara memenjarakan dan dibunuh. Fenomena ini membuat Negara tidak stabil dan mengalami krisis keadilan terhadap perempuan. Mursidah, “Gerakan Organisasi Perempuan dalam Bingkai Sejarah”…, 95.

Pada tahun 1973 terbentuk Badan Kerja sama Wanita Kristen Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari organisasi Wanita Katolik, Kristen, Biarawati dan Organisasi-organisasi Wanita Gereja. Pada tanggal 5 Agustus 1974 dibentuk organisasi Dharma Wanita, suatu organisasi persatuan yang anggota-anggotanya terdiri dari organisasi-organisasi istri Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Departemen-departemen dan lembaga-lembaga non departemen. Salah satu usaha Dharma Wanita adalah membimbing dan membina Organisasi Istri Pegawai dalam rangka peningkatan partisipasinya guna menyukseskan pembangunan Nasional. Ada beberapa organisasi istri Pegawai Negeri Sipil yang sebelum Dharma Wanita didirikan telah masuk menjadi anggota KOWANI dan setelah Dharma Wanita terbentuk tetap menjadi anggota KOWANI.

Sejak memasuki Orde Baru Pemerintah Indonesia menganut lagi politik Luar Negeri yang bebas dan aktif. Pembangunan dilakukan dalam hubungan dengan dunia luar yang terbuka dan terutama menggalang Kerja sama regional yang terwujud dalam ASEAN. Dalam iklim ini KOWANI meningkatkan hubungan internasionalnya dengan menjadi anggota *International Council of Women* (ICW) sejak tahun 1973. Di samping itu juga merintis hubungan dengan organisasi-organisasi wanita di lingkungan negara-negara ASEAN.[21]

Tahun Wanita Internasional 1975 harus dicatat sebagai peristiwa penting yang berhasil meningkatkan perhatian Pemerintah dan masyarakat terhadap pergerakan wanita dan menumbuhkan keyakinan bahwa kaum wanita merupakan potensi untuk pembangunan. Indonesia mengirim delegasi ke *World Conference of the International Women's Year* di Mexico City (19 Juni sampai dengan 2 Juli 1975) yang mengikutsertakan unsur-unsur Kowani, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan KNKWI, di samping

21 Wasisto Raharjo Jati, "Historisitas Politik Perempuan Indonesia"…, 208.

utusan-utusan dari unsur Pemerintah. *World Conference of the International Women's Year* antara lain menghasilkan suatu *"World Plan of Action",* suatu program kegiatan untuk jangka waktu sepuluh tahun yang sasarannya adalah agar dalam waktu itu wanita dapat mencapai kemajuan sehingga dapat berpartisipasi penuh dalam segala kegiatan kemasyarakatan. Kepada negara-negara anggota PBB diserukan untuk membentuk suatu *"National Plan of Action"* berdasarkan program sedunia tersebut.[22]

Pada tanggal 13 sampai dengan 18 Desember 1976 atas prakarsa Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua Tyanas Twani (Panitia Nasional Tahun Wanita Internasional 1975) di Jakarta diselenggarakan lokakarya yang diikuti oleh semua unsur pergerakan wanita Indonesia, wakil-wakil Pemerintah dan lain-lain organisasi kemasyarakatan, yang berhasil menyusun "Rencana Kegiatan Nasional Wanita Indonesia" (RKNWI). Diharapkan RKNWI akan menjadi rencana induk untuk kegiatan-kegiatan kewanitaan, terutama untuk mempersiapkan laporan pada Konferensi Wanita Sedunia kedua yang oleh PBB direncanakan akan diselenggarakan pada pertengahan tahun 1980 di Teheran. Berhubung dengan situasi politik di Iran yang tidak menguntungkan itu, Iran dengan resmi sudah menarik kembali kesediaannya untuk menjadi penerima konferensi. Maksud Konferensi Wanita Sedunia Kedua itu adalah untuk mengadakan penilaian terhadap apa yang telah dicapai di masing-masing Negara dalam bidang kewanitaan Selama Lima Tahun pertama sejak tahun 1975.

Sebagai acara penutup dalam rangka kegiatan selama International Women's Year 1975 pada tanggal 15 sampai dengan 19 Desember 1975 diadakan Seminar *"The Integration of Women in Development"* disusul dengan *"Meeting of Asean Women Leaders and International Women's Year Post Conference"* pada tanggal 19 sampai dengan 22 Desember 1975. Baik seminar

22 Wasisto Raharjo Jati, "Historisitas Politik Perempuan Indonesia"…, 210.

maupun konferensi dihadiri oleh wakil-wakil dari Negara-Negara ASEAN. Dalam konferensi tersebut dilahirkan gagasan untuk membentuk suatu organisasi kerja sama antara wanita-wanita ASEAN yang akan diberi nama *ASEAN Confederation of Women's Organizations* atau disingkat ACWO.[23]

Bahwa kerajinan dan industri rumah tangga yang merupakan salah satu lapangan usaha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga, masyarakat dan bangsa perlu ditingkatkan dan dikembangkan dengan membentuk suatu badan yang bertujuan mengembangkan usaha kerajinan dan industri rumah tangga yang bersifat Nasional. Badan ini dimaksud adalah berstatus non pemerintah dengan dukungan penuh Pemerintah dan beranggotakan unsur-unsur KOWANI, organisasi-organisasi pengusaha kerajinan, seniman, tokoh masyarakat yang bergerak atau cinta terhadap usaha-usaha kerajinan dan lain-lain, sedangkan instansi Pemerintah yang bersangkutan merupakan pembina-pembina. Badan ini bertugas membantu Pemerintah untuk mengembangkan usaha-usaha kerajinan dan industri rumah tangga serta memelihara kelestarian seni budaya. Badan ini akan mengadakan kerja lama sebaik-baiknya dengan Instansi Pemerintah dan swasta serta organisasi-organisasi lainnya yang berhubungan dengan usaha pengembangan kerajinan. Untuk menunjang usaha meningkatkan dan pengembangan kerajinan dan industri rumah tangga diserahkan kepada Pemerintah untuk memberikan perhatian pada masalah-masalah seperti:

a. Perkreditan; hendaknya kredit-kredit yang diberikan kepada pengusaha lemah benar-benar dapat diterima kepada yang berhak dengan persyaratan dan prosedur yang mudah dijangkau.
b. Bahan baku; bahan baku merupakan unsur yang sangat penting dalam produksi yang kelestariannya perlu dipertahankan dengan harga yang layak dan mudah didapat.

23 Lihat dalam Sita Aripurnami, "Jelajah Perempuan untuk Demokrasi di Indonesia", Afirmasi: *Jurnal Pengembangan Pemikiran Feminis*, 2(2) 2014, 214.

c. Produksi; produksi kerajinan perlu diarahkan sesuai dengan bahan-bahan yang tersedia serta diperhatikan mutunya.
d. Teknologi; dalam produksi diperlukan teknologi *(appropriate technology*) yang diarahkan pada padat karya tanpa mengabaikan *efficiency.*
e. Pemasaran; pemerintah perlu menciptakan pasar dalam negeri kebijaksanaan keharusan memakai produksi dalam negeri untuk barang-barang yang dibeli oleh pemerintah khusus hasil kerajinan dan industri rumah tangga.
f. Tata niaga; perlu diciptakan saluran tata niaga yang efisien dan sehat.
g. Promosi; Pemerintah perlu menggalakkan usaha promosi ke Luar Negeri dan dalam negeri seperti mendirikan pusat-pusat promosi memberikan ruang di pasar-pasar dan pusat pariwisata, menciptakan saluran tata niaga yang efisien dan sehat.
h. Perlindungan; agar usaha kerajinan dan industri rumah tangga dapat berkembang dengan pesat, Pemerintah perlu memberikan perlindungan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berupa larangan atau kebijaksanaan impor dan perpajakan.
i. Pendidikan dan latihan; di sektor kerajinan dan industri rumah tangga untuk masyarakat pedesaan supaya mendapat prioritas yang segera diikuti dengan bimbingan dan penyuluhan.
j. Koperasi; bentuk usaha koperasi ini agar dibantu dan dibina sebaik-baiknya untuk mempertahankan sifat usaha gotong royong pada masyarakat pedesaan menjadi unit ekonomi yang kuat.[24]

24 Wasisto Raharjo Jati, "Historisitas Politik Perempuan Indonesia", *Jurnal Paramita,* 24(2) 2014, 206.

Bab XII

Gerakan Perempuan Berbasis Masyarakat

A. Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita

1. Latar Belakang Lahirnya BMOIWI

Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia dinyatakan berdiri secara resmi pada tanggal 2 Juli 1967 di Jakarta dengan nama ”Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Perempuan Islam Indonesia” yang disingkat menjadi BMPII. Kemudian pada tanggal 11 Mei 1969 nama tersebut diubah menjadi ”Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Islam Wanita Indonesia” yang disingkat BMOIWI. Pembentukan Badan Musyawarah tersebut didasarkan atas surat izin rapat dan pertemuan dari Dandim Jaya Pusat No. SID/306/4/1967.

Ditinjau dari segi latar belakang dan motivasinya, maka berdirinya Badan Musyawarah tersebut jelas tidak dapat dipisahkan dari proses lahirnya Orde Baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Secara idiel, BMOIWI melanjutkan peranan dan ”Badan Permusyawaratan Wanita Islam Indonesia” yang didirikan di Jakarta pada tanggal

13 Maret 1958. Adapun para pemrakarsa adalah Ny. H. RABS Syamsuridjal, Ny. Mahmudah Mawardi, dan Ny. S. Gitoatmodjo. Kemudian gagasan para pemrakarsa tersebut didukung oleh tokoh-tokoh dari organisasi wanita Islam seperti Muslimat NU, Wanita Syarikat Islam, Wanita Islam, Wanita Perti, Wihdatul Muslimat, dan Wanita Gasbindo.[1]

2. Dasar, Tujuan, dan Usaha

Organisasi ini berdasarkan Islam dan berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuannya adalah untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta terbinanya ukhuwah Islamiyah. Usaha-usaha yang dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

a. Meningkatkan kesadaran beragama dan bernegara
b. Mengadakan kerja sama yang bermanfaat untuk kepentingan bersama
c. Mengadakan ceramah-ceramah, diskusi-diskusi, tentang keagamaan, kewanitaan dan kemasyarakatan.
d. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan.

3. Struktur Organisasi

a. BMOIWI adalah berbentuk federasi organisasi yang beranggotakan organisasi-organisasi Islam wanita yang bersifat Nasional yang mempunyai cabang-cabang di Daerah.

1 Pembentukan BMOIWI ini adalah hasil ide dan dorongan bersama-sama tokoh-tokoh organisasi Muslimat NU, Wanita Islam, Wanita Syarikat Islam, Wihdatul Muslimat dan Wanita Perti. Sejak awal berdirinya organisasi ini, sudah mengadakan beberapa agenda ekrja nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain sebagai pelopor dimulainya pelatihan manasik haji di Indonesia, penerapan Keluarga Berencana (KB) melalui forum-forum pengajian di delapan lokasi di Jawa Barat dan Jawa Timur. Lihat dalam Budi Susanto, *Politik dan Postkolonialitas di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2003, 179.

b. Hubungan BMOIWI dengan badan kerja sama musyawarah organisasi Islam wanita di Daerah adalah bersifat informatif, konsultatif, dan koordinatif.
c. Pimpinan BMOIWI merupakan Presidium yang beranggotakan 7 (Tujuh) anggota, yang merupakan pimpinan kolektif yang memimpin secara periodik. Masa kerja Presidium adalah 3 tahun dan dipilih oleh Musyawarah Anggota.

4. Kegiatan

Sesuai dengan sifat dan bentuk organisasi ini yaitu sebagai wadah untuk mempersatukan pendapat dengan musyawarah maka Badan Musyawarah hanya menggariskan kebijaksanaan umum sedangkan kegiatan operasionalnya diserahkan kepada masing-masing organisasi anggota. Oleh sebab itu tidak banyak kegiatan operasional yang ditangani.

Melanjutkan perjuangan dari kaum wanita Islam yang telah dirintis sejak tahun 1954 untuk diadakannya Undang-Undang Perkawinan. Semenjak Badan ini berdiri maka perjuangan terhadap tuntutan Undang-Undang Perkawinan adalah merupakan suatu kegiatan yang paling menonjol. Semenjak dibicarakannya Rancangan Undang-Undang sampai dimasukkannya RUU Perkawinan Nasional oleh Pemerintah ke DPR pada tahun 1973, maka Badan Musyawarah ini ikut pula secara aktif membahasnya dan hasilnya disalurkan kepada fraksi-fraksi Islam di DPR dan Pemerintah.

Selain hal tersebut juga ikut memperjuangkan adanya Hakim-Hakim Wanita di Pengadilan Agama dengan maksud agar keputusan yang diambil oleh Pengadilan tersebut selalu adil untuk kedua belah pihak yang bersengketa yaitu pihak istri dan suami. Dengan dinyatakannya keluarga berencana sebagai program Nasional, maka Badan Musyawarah ini telah menyelenggarakan kursus-kursus orientasi keluarga berencana yang ditekankan pada bagaimana pandangan ajaran Islam terhadap keluarga berencana.

Mengenai beredarnya film-film porno di Ibu Kota, BMOIWI menemui Menteri Penerangan untuk meminta perhatiannya agar film-film semacam itu dan bacaan yang cabul dilarang, karena berpengaruh negatif terhadap pembinaan generasi muda. Suatu simposium tentang "Peningkatan Pelayanan Perjalanan Haji Wanita" telah pula diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kartini pada tahun 1976. Sebagai tindak lanjut pula dibentuk suatu Lembaga Penyuluhan Jemaah Haji Wanita. Usaha ini mendapat tanggapan yang positif dari Pemerintah, khususnya Pemerintah DKI Jakarta Raya dan Badan ini diikutsertakan dalam Majelis Bimbingan Haji. Lembaga Penyuluhan Haji Wanita ini pada tiap-tiap musim haji giat memberikan penyuluhan khusus kepada calon jemaah wanita. Sebelumnya tidak ada penyuluhan semacam itu yang khusus dari penyuluhan wanita untuk jemaah haji.

Menghadiri Seminar *On the Role of Women in Handicraft* yang diselenggarakan di Bangkok pada tahun 1976. Pada tahun 1976 Badan ini telah menerima undangan melalui Menteri Kesra, untuk mengikuti Seminar *on the Role of Women and Employment* yang diselenggarakan di Kualalumpur (Malaysia). Mengikuti Seminar Penyusunan Rencana Kegiatan Nasional Wanita Indonesia (RKNWI) pada bulan Desember tahun 1976 yang diselenggarakan di Jakarta oleh Menteri Kesra di Jakarta selaku Ketua Umum Panitia Nasional tahun Wanita Internasional di Jakarta. Pada tahun 1976 telah menerima tamu dari Malaysia yaitu Menteri Kebajikan Malaysia.

Badan Musyawarah ini telah mengajukan usul kepada Pimpinan Majelis Ulama Indonesia agar di dalam Majelis tersebut didudukkan wakil-wakil dari Ulama wanita. Pada akhir 1976 berhasil mengumpulkan dana untuk para korban bencana alam di Jawa Timur. Pada bulan Januari 1977 Badan ini telah menerima tamu wakil dari *International Business and Profesional Women Association*

(IBPWA). Mereka banyak menanyakan tentang kedudukan wanita Muslim di dalam rumah tangga dan masyarakat.

Badan musyawarah telah mengajukan pula beberapa usul kepada Menteri Muda Urusan Peranan wanita, Ny. L. Soetanto, S.H., agar Pemerintah menempatkan lebih banyak wanita pada jabatan yang menentukan *(decision Maker).* Pada tanggal 26 dan 27 Juli 1978, menyelenggarakan Lokakarya mengenai "Metode Dakwah Pembangunan" bertempat di Gedung Kiblat Center Jalan Agus Salim Jakarta.[2]

5. Keanggotaan

Organisasi-organisasi yang menjadi anggota BMOIWI adalah:

1) Wanita Islam
2) Muslimat NU
3) Wanita Syarekat Islam
4) Aisyiyah
5) Wanita Perti
6) Wihdatul Muslimat
7) Gasbiindo Putri
8) Korps PII Wati
9) Persistri
10) KOHATI (Korps HMI Wati)
11) Wanita KBIM
12) POWSA
13) Wanita Al Irsyad
14) Fatayat NU
15) Wanita Al Wasliyah
16) Putri Al Irsyad
17) Nasyiyatul Aisyiyah
18) Pelajar Putri Al Irsyad

6. Susunan Presidium BMOIWI Periode 1977-1980

Dra. Ny. H. Zubaidah Muchtar	(Wanita Sarekat Islam)
Ny. H. Farida Afif	(Wanita Al Irsyad)
Dra. Ny. Maftuchah Yusuf	(Aisyiyah)
Ny. H. Asmah Sjahroni	(Muslimat NU)
Ny. Norma Aminuddin	(Wanita Perti)
Ny. H. Chadidjah Razak	(Wanita ISlam)
Nn. Nurhayati Jamas	(KOHATI/HMI)

2 Budi Susanto, *Politik dan Postkolonialitas di Indonesia…,* 181.

Dewan Penasihat: Ny. H. RABS-Syarnsuridjal
Ny. H. Mahmudah Mawardi
Ny. Yati Arudji Kartawinata.[3]

B. Komisi Nasional Kedudukan Wanita

Pada tahun 1966 setelah Indonesia mempunyai Pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Salah satu Badan Pelengkap PBB adalah ECOSOC *(Economic and Sosial Council)*, yang antara lain membawahi beberapa komisi di antaranya *Commission on the Status of Women.* Masing-masing negara anggota PBB dianjurkan membentuk suatu Komisi Nasional Kedudukan Wanita *(National Commission on the Status of Women)*. *Commission on the Status of Women* setiap 2 tahun sekali mengadakan sidang yang diatur oleh PBB. Dalam sidang-sidang itu dilaporkan hasil-hasil penelitian tentang status dan kemajuan wanita di negara-negara anggota PBB khususnya dan wanita sedunia pada umumnya. Sedangkan tugas Komisi Nasional ialah meneliti kedudukan dan keadaan wanita di negara-negara yang bersangkutan mengadakan inventarisasi dalam segala bidang guna mengetahui dan menentukan apa yang dibutuhkan untuk memajukan kaum wanita yang diharapkan dapat memegang peranannya sebagai tenaga pembangunan masyarakat dan bangsa. Berdasarkan hasil-hasil tersebut disampaikan rekomendasi-rekomendasi kepada Pemerintah maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan.

PBB lewat Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York menganjurkan agar selekas mungkin didirikan "Komisi Nasional Kedudukan Wanita Indonesia" tersebut dan mengusahakan duduknya kembali Indonesia dalam *Commission on the Status of Women* di PBB. Pada akhir tahun 1967 anjuran

3 Budi Susanto, *Politik dan Postkolonialitas di Indonesia…*, 183.

PTRI itu disampaikan kepada KOWANI yang segera menghubungi Sekretaris Jenderal Departemen Sosial, Ny. Rusiah Sardjono, S.H. yang menyambut anjuran PTRI dengan baik.[4]

1. Proses Pembentukan KNKWI

Atas prakarsa Departemen Sosial dan KOWANI, diadakan rapat pada tanggal 15 Desember 1967 di Departemen Luar Negeri yang dihadiri oleh 3 federasi organisasi wanita yaitu Kowani, KAWI dan Koordinasi Wanita Sekber Golkar, juga beberapa tokoh perorangan wanita dan wakil Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman dan Departemen Sosial, untuk membicarakan usaha pembentukan KNKWI.

Sebagai tindak lanjut, maka dibentuk Panitia *Ad Hoc* yang terdiri dari Dra. Ny. Maftuchah Jusuf (KOWANI), Ny. Aisyah Aminy, S.H. (KAWI) dan Ny. Soedarsono, S.H. (Koordinasi Wanita Sekber Golkar) yang bertugas menyusun konsep Peraturan Dasar KNKWI.

Selanjutnya 3 federasi tersebut telah mengirim delegasi yang terdiri dari: Dra. Ny. Maftuchah Jusuf (KOWANI), Ny. Aisyah Aminy, S.H. (KAWI) dan Ny. Maria Ulfah Subadio, S.H. (Koordinasi Wanita Sekber Golkar) untuk menghubungi pemerintah yaitu Menteri Kesejahteraan Rakyat pada tanggal 27 Juni 1968. Sebagai hasil keluarlah Surat Keputusan Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat No. 34/Kpts/Kesra/VII/1968 tertanggal 31 Juli 1968, mengenai pembentukan KNKWI sebagai badan semi pemerintah.

Setelah keluar Surat Keputusan Menteri Kesra tersebut baru pada tanggal 29 November 1968 diadakan pertemuan antara 3 Federasi wanita atas undangan KOWANI sebagai Ketua Periodik Panitia Musyawarah 3 Federasi, untuk membicarakan langkah-langkah selanjutnya dalam pembentukan KNKWI. Pertemuan

4 Julia Suryakusuma, *Ibuisme Negara-Konstruksi Sosial Keperempuanan* Orde Baru. Jakarta: Komunitas Bambu, 2009, 17.

tersebut menentukan ”Dasar-dasar dan Prosedur Pemilihan Anggota KNKWI” dan dari unsur pergerakan wanita ditetapkan jumlahnya 21 orang.

Pelaksanaan pemilihan anggota KNKWI dari unsur pergerakan wanita dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 1968 oleh Panitia 9 yang mewakili 3 Federasi berlandaskan keputusan-keputusan di atas. Anggota Panitia 9 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dra. Ny. B. Simorangkir (Kowani)
2. Ny. Andras S. (Kowani)
3. Dra. Ny. Maftuchah Jusuf (Kowani)
4. Ny. Syamsinur Adnus (KAWI)
5. Ny. Latjuba (KAWI)
6. Nn. Mien Yubhar (KAWI)
7. Ny. Rubiono Kertopati, S.H. Sekber Golkar)
8. Ny. Gadis Rasyid (Sekber Golkar)
9. Nn. Sri Syamsiar, B.A. sekarang Dra. Ny. Sri Syamsiar Issom (Sekber Golkar).

Pada tanggal 16 Desember 1968 diadakan rapat pertama KNKWI antar 21 anggota dari unsur pergerakan wanita. Diadakan pemilihan 3 pimpinan KNKWI dari unsur pergerakan wanita, yaitu: Dra. Ny. Muaftuchah Jusuf, Nn. Endang Sulbi, S.H. (sekarang Ny. Suska), dan Ny. Syamsinur Adnus serta Sekretaris Jenderal Dra. Ny. M. Wahyudi.[5]

2. Struktur Organisasi

a. Keanggotaan

Pada saat didirikan KNKWI jumlah anggotanya adalah 30 orang yang terdiri dari: 21 orang yang mewakili organisasi wanita dan tergabung pada Federasi yang ada dan 7 orang wakil dari Pemerintah/Departemen (Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan,

5 Julia Suryakusuma, *Ibuisme Negara-Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru…,* 18-19.

Luar Negeri, Kehakiman, Agama, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, dan Kesehatan) serta 2 orang ahli.

Makin luasnya masalah yang dihadapi KNKWI sejak tahun 1975 diputuskan untuk menambah anggota dari unsur Pemerintah/ Departemen yang banyak menangani soal-soal kewanitaan dan yang telah menunjuk wakilnya adalah: Departemen Penerangan, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian.

b. Pimpinan

Pimpinan bersifat kolektif, merupakan Presidium dengan Ketua Periodik yang bergilir.

c. Seksi-seksi

Seksi Moril dan Agama, Seksi Pendidikan dan Kebudayaan, Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Tenaga Kerja dan Politik, Seksi Hukum dan Keluarga.

d. Kegiatan-kegiatan dan usaha

1) Diselesaikan suatu survey yang dianjurkan oleh PBB tentang *"Family Responsibilities of Working Mothers",* yang dilaksanakan bersama oleh KNKWI dan Departemen Sosial (cq. BPPS Yogyakarta) dalam tahun 1971.
2) Diikutsertakan oleh Pemerintah (Departemen Luar Negeri dan Departemen Sosial)' dalam hal-hal yang menyangkut *"Status of Women"* yang merupakan program PBB (ECOSOC).
3) *Survey on the Status of Women and Family Planning* yang diminta oleh PBB dengan bekerja sama dengan FIS-UI, Departemen Sosial, BKKBN, KOWANI, dan KESRA.
4) Memberikan bekal materi kepada wakil Indonesia dalam UN *Commission on the Status of Women* dalam Sidang ke XXIV UNCSW di Geneva.
5) Membantu Pemerintah (Departemen Luar Negeri dan Departemen Sosial) mengolah dan menanggapi resolusi-resolusi hasil Sidang ke XXIV UNCSW, bagaimana dan apa

yang sebaiknya dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, di antaranya:

a) Agar ASEAN diikutsertakan dalam sidang-sidang PBB
b) Agar dibentuk ASEAN *Council on the Status of Women* dan mengadakan kerja sama antar negara-negara ASEAN di bidang usaha-usaha peningkatan kedudukan wanita di negara-negara ASEAN.

6) Mengumpulkan data-data tentang wanita dalam pendidikan formal di Indonesia (1971 dan 1972).
7) Mengumpulkan data tentang wanita dalam pendidikan di Indonesia (1972).
8) Mengadakan Seminar tentang "Kedudukan Wanita dan Keluarga Berencana" bersama KOWANI dan Wanita Golkar, tanggal 1-2 Juni 1973, di Jakarta.
9) Menanggapi RUU tentang Perkawinan dan memberikan usul-usul.
10) Dalam rangka peringatan 25 tahun *"Universal Declaration of Human Rights"* diperingati pada tanggal 10 Desember 1973, dan sesuai pula dengan anjuran Sekretaris Jenderal PBB agar negara-negara anggota PBB mengadakan peringatan sesuai dengan keadaan setempat, serta agar *Declaration on the Elimination against Women* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa setempat, maka KNKWI telah:

    a) Menterjemahkan deklarasi tersebut ke dalam bahasa Indonesia dan mencetaknya.
    b) Menyusun buku "Pelaksanaan pernyataan tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita di Indonesia".

11) Mengadakan statistik wanita dalam Badan Legislatif (1974).

12) Mengumpulkan peraturan-peraturan tentang perlindungan tenaga kerja wanita Indonesia (1975).
13) Menterjemahkan *"World Plan of Action"* ke dalam bahasa Indonesia dan mencetaknya.
14) Menyampaikan usul-usul kepada Pemerintah tentang *World Population Year* dan *International Women's Year.*
15) Meningkatkan usaha pembentukan kerja sama wanita ASEAN. Mendukung usul yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Sosial dalam "4th *meeting of ASEAN Permanent Committee on Socio-Cultural Activities*" mengenai kerja sama wanita ASEAN.
16) Mengusulkan kepada Pemerintah agar wanita diikutsertakan dalam delegasi RI ke Sidang Majelis Umum PBB ke XXX.
17) Menyampaikan usul-usul penyempurnaan Pelita II bersama KOWANI.
18) Bekerja sama dengan YTKI – FES menyelenggarakan Seminar tentang "Integrasi wanita dalam Pembangunan", di Jakarta pada tanggal 19-22 Maret 1975.
19) Mengadakan penelitian mengenai Studi Pendidikan Bekal Hidup bagi wanita Jakarta 1976 dengan mengambil daerah sample Palmerah Jakarta Barat.
20) Diikutsertakan oleh Dirjen Transmigrasi dalam peninjauan ke proyek-proyek transmigrasi Lampung tahun 1976.
21) Bersama-sama dengan KOWANI menyusun tanggapan mengenai *"Draft Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women"* Tahun 1976.
22) Diikutsertakan dalam: Penyusunan Laporan Hasil Inventarisasi Status dan Kegiatan Wanita Indonesia, tahun 1976.
23) Bekerja sama dengan Departemen Agama mengadakan Penelitian tentang "Peranan kaum ibu dalam Pendidikan Agama di dalam rumah tangga dan pengaruh peranan itu terhadap usaha pembangunan Bangsa dan Negara".

Pelaksanaan langkah pertama di desa Belendung dan Cisereh Kabupaten Tangerang Jawa Barat.

24) Diikutsertakan dalam *team Survey* Peranan Wanita dalam usaha perbaikan gizi yang diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan/Ditjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat.
25) Memberikan usul-usul terhadap Garis-garis Besar Haluan Negara.
26) Bekerja sama dengan Departemen Sosial (cq Ditjen Bina Sosial) UNICEF – KNKWI melaksanakan:
    a) Pengumpulan data di daerah Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pamekasan Jawa Timur dalam rangka kegiatan Pilot Proyek Peningkatan Peranan dan Fungsi Wanita dalam Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat.
    b) Lokakarya di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka Kegiatan Pilot Proyek Peningkatan Peranan dan Fungsi Wanita dalam Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat.
27) Menjadi pimpinan Panitia Tahun Internasional Anak-Anak tahun 1979.
28) Seminar dan Lokakarya, Konferensi Nasional Regional maupun Internasional yang diikuti oleh utusan dan wakil dari KNKWI:
    a) *Regional Seminar on the Status of Women and Family Planning* 20-30 Juni 1973 di Yogyakarta.
    b) *UN Forum on the participation of Women and Development di New York.*
    c) *Consultation Conference on Women and Development* di Bangkok (1974).
    d) *World Population Conference* di Bukarest (1974).
    e) *Preliminary meeting of the International Women's Year* di Manila (1975).

f) *International Women's Year Conference di Mexico City* (1975).
g) *Asean Seminar on Participation of Women and integration in Development* di Jakarta (1975).
h) *Asean Women Leaders and International Women's Year Post Conference meeting* di Jakarta (1975).
i) *First Meeting of the Sub-Committee on Women* (Asean) di Manila (1976).
j) Lokakarya Rencana Kegiatan Nasional Wanita Indonesia (13-18 Desember 1976).
k) Seminar tentang: "Penyusunan Kebijaksanaan ke arah Peningkatan Partisipasi Wanita dalam Pekerjaan yang berupah (Jakarta, 3-6- November 1976).
l) Lokakarya Peranan Wanita Desa sebagai Tenaga Produktif dalam Pembangunan pedesaan (11 sampai dengan 14 Desember 1976).
m) Lokakarya Pengembangan Sosial Masyarakat Pedesaan (14 November 1977).
n) Mengikuti sebagai delegasi Indonesia ke Sidang UNCSW ke-27 di New York (1978).
o) *Training Course on Techniques of Participation for Women* yang diselenggarakan oleh *Asia and Pacific Center for Women and Development* di Bangkok (1978).
p) *Regional Training Seminar on Development Planning for Women* yang diselenggarakan oleh Asia *and Pacific Center for Women and Development d*i Bangkok (1978).[6]

6 Julia Suryakusuma, Ibuisme Negara-Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru…, 20-21.

C. Dharma Wanita

1. Latar Belakang Kelahiran Organisasi

Sebagaimana digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Merdeka berdaulat dan bersatu dalam suatu kehidupan Bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, berdaulat, adil dan damai.[7]

Tujuan Nasional tersebut hanya dapat dicapai melalui pembangunan yang direncanakan dengan baik dan realistis serta dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh dan terus-menerus. Untuk dapat melaksanakan pembangunan itu secara berdayaguna dan berhasil dapat diperlukan adanya Pemerintah yang stabil, berwibawa, dan berkelangsungan sehingga dengan demikian dapat terjamin penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara teratur dan berkelangsungan.[8]

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan antara lain tergantung dari kesempurnaan aparatur Pemerintah sedang kesempurnaan aparatur Pemerintah itu pada pokoknya tergantung pada kesempurnaan Pegawai Republik Indonesia. Pegawai Republik Indonesia yang sempurna adalah pegawai yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, bersih, berkualitas tinggi dan tanggung jawab

7 Dharma wanita pada dasarnya dibentuk untuk menjadi penopang program pembangunan pemerintah seperti kegiatan sosial berupa amal, latihan baris berbaris untuk bela Negara, peningkatan ekonomi rumah tangga serta kegiatan lain yang berbau sosial pemerintahan. Sebab dharma wanita harus mencerminkan sikap perempuan yang berkonsep ibuisme. Lihat dalam Julia Suryakusuma, *Ibuisme Negara Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2009, 23-24.

8 Julia Suryakusuma, *Ibuisme Negara-Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru…*, 26.

sebagai unsur utama Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat. Uraian ringkas sebagaimana tersebut di atas kiranya jelaslah bahwa betapa luasnya pembangunan yang harus kita laksanakan dan betapa beratnya tugas yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Republik Indonesia yang untuk melaksanakannya memerlukan pemusatan segala perhatian dan pikiran serta memerlukan pengerahan segala dana dan daya.[9]

Untuk menjamin suksesnya pelaksanaan Pembangunan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dan SAPTA KRIDA Kabinet Pembangunan II maka seluruh rakyat termasuk istri Pegawai Republik Indonesia berkewajiban untuk turut serta secara aktif menurut bidangnya masing-masing. Dalam hubungan ini maka salah satu usaha yang dapat dan harus dilakukan oleh istri Pegawai Republik Indonesia adalah mendukung perjuangan dan menyukseskan suaminya dalam mengemban tugasnya sebagai Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat. Agar dukungan istri Pegawai tersebut dapat lebih terarah dan lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu dibentuk suatu wadah untuk menghimpun dan membimbing usaha dan kegiatan para istri sehaluan dengan usaha serta kegiatan Pegawai Republik Indonesia. Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka dibentuklah organisasi Dharma Wanita pada tanggal 5 Agustus 1974.[10]

9 Julia Suryakusuma, *Ibuisme Negara-Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru…*, 27.

10 Meskipun merupakan organisasi atau perkumpulan dari perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya anggota keluarga agar mencapai kesejahteraan nasional. Beberapa pedoman yang dirancang dan menjadi komitmen bersama adalah 1) wanita sebagai istri pendamping suami; 2) wanita sebagai ibu rumah tangga; 3) wanita sebagai penerus Keturunan dan pendidik anak; 4) wanita sebagai pencari nafkah tambahan; 5) wanita sebagai warga Negara dan anggota masyarakat. Julia Suryakusuma, *Ibuisme Negara-Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru…*, 28.

2. Asas dan Tujuan

a. Dharma Wanita berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta berpedoman pada Garis-garis Besar Haluan Negara.

b. Tujuan Dharma Wanita adalah masyarakat adil dan makmur yang berkeseimbangan antara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Struktur Organisasi

Organisasi Dharma Wanita menganut asas teritorial yang dibagi dalam 3 tingkat yaitu:

1) Tingkat Pusat yang dipimpin oleh Presidium Dharma Wanita dan Pengurus Harian Dharma Wanita Pusat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Negara Republik Indonesia.
2) Tingkat Daerah yang dipimpin oleh Pengurus Daerah Dharma Wanita yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Propinsi.
3) Tingkat Cabang yang dipimpin oleh Pengurus Cabang Dharma Wanita, yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Kabupaten/ Kotamadya.
4) Pada Tingkat Pusat di samping adanya Presidium Dharma Wanita dan Pengurus Harian Dharma Wanita Pusat maka ada pula:
   - Pembina Utama yaitu Bapak Presiden.
   - Penasihat Utama yaitu Ibu Tien Soeharto.
   - Penasihat yaitu Ibu Nelly Adam Malik.
   - Dewan Pimpinan Pusat yaitu Dewan Pembina Korpri Pusat

4. Kegiatan/ Usaha/ Program

Untuk mencapai tujuan Dharma Wanita yaitu Masyarakat adil dan makmur yang berkeseimbangan antara material dan spiritual maka Dharma Wanita berusaha antara lain:

a. Membimbing dan membina organisasi istri Pegawai dalam rangka pemupukan pengembangan rasa persatuan dan kesatuan serta rasa senasib dan seperjuangan.
b. Membimbing dan membina organisasi istri Pegawai dalam rangka peningkatan partisipasinya guna menyukseskan pembangunan Nasional sesuai dengan kodrat dan kedudukan wanita Indonesia sebagai istri dan ibu rumah tangga.
c. Menyelenggarakan pendidikan terhadap istri Pegawai untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab ber-Negara sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

5. Hubungan dengan Dunia Internasional

Untuk menjalin hubungan kerja sama dengan dunia internasional, Dharma Wanita bersama-sama dengan organisasi wanita yang lain seperti KOWANI dan Dharma Pertiwi telah melaksanakan berbagai kegiatan antara lain:

1. Menghadiri *First Meeting of the Asean Sub Committee on Women* di Manila yang diadakan pada tanggal 7 sampai dengan 10 Juni 1976.
2. Pada tanggal 21 Juli 1976 mengikuti kompetisi bowling yang diadakan oleh *Asean Women Circle.*
3. Menghadiri pertemuan dengan Menteri Kebajikan Malaysia yang diadakan oleh Departemen Sosial pada tanggal 4 Oktober 1976.
4. Menghadiri pertemuan dengan Dr. Hendriks yang diadakan oleh Departemen Sosial pada tanggal 7 Maret 1977.
5. Mengikuti peninjauan tentang emansipasi wanita di Negeri Belanda pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 5 November 1977.

6. Lain-Lain

Organisasi Dharma Wanita adalah suatu organisasi yang bersifat persatuan, yang anggota-anggotanya terdiri dari organisasi - organisasi istri Pegawai yang ada pada masing-masing Departemen dan Lembaga baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Dengan terbentuknya Dharma Wanita identitas organisasi pegawai yang ada pada masing-masing Departemen dan Lembaga tidak hilang. Organisasi istri Pegawai yang ada pada tingkat Pusat, tetap mempunyai hubungan dengan organisasi istri Pegawai dengan Instansi vertikalnya di Daerah, sepanjang mengenai urusan rumah tangganya sendiri.

Organisasi-organisasi istri Pegawai yang menjadi anggota Dharma Wanita terdiri dari 19 organisasi:

a) Tat Twam Asi : Departemen Sosial
b) Dian Artharini : Gabungan Organisasi Wanita Bank Pemerintah
c) Pertiwi : Departemen Dalam Negeri
d) Periska Tani : Departemen Pertanian
e) Yustikarini : Departemen Kehakiman
f) Perwanida : Departemen Agama
g) Idhata : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
h) OWD Dutika Handayani : Departemen Luar Negeri
i) Rian : Departemen Perindustrian
j) Riwpu : Departemen Pekerjaan Umum
k) Bhakti Wanita : Sekretariat Negara, Lembaga-lembaga Pemerintah non Departemen dan Kesekretariatan Lembaga-lembaga Tinggi Negara.
l) Dharma Bhakti : Departemen Kesehatan
m) Ardhyaksa Dharma Karini : Kejaksaan Agung

n) Eka Dharma Santi : Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
o) Sandya Kara Murti : Departemen Perhubungan
p) Niaga Ekasari : Departemen Perdagangan dan Koperasi.
q) Dian Ekawati : Departemen Penerangan
r) Ikatan Wanita Pertambangan : Departemen Pertambangan dan Energi.

Anggota-anggota Dharma Wanita Pusat yang duduk dalam lembaga legislatif yaitu:

Anggota MPR : 1) Ibu E.N. Soedharmono
2) Ibu L. Radius Prawiro
Anggota DPR : Ibu Gandi, S.H.[11]

D. Women's International Club

WIC didirikan pada tanggal 11 Maret 1950 di Jakarta atas prakarsa Ny. Soewarni Pringgodigdo dan Ny. Martha Galbraith serta merupakan suatu organisasi yang tidak berdasarkan Agama dan politik.

Tujuan dari WIC adalah:

1. Memupuk persahabatan dan saling pengertian antara wanita berbagai bangsa.
2. Membantu perkembangan budaya dari wanita pada umumnya.
3. Meningkatkan pendidikan dan perbaikan sosial bagi wanita dan anak-anak.

Untuk mencapai tujuan ini WIC:

1. Mengadakan pertemuan-pertemuan pada waktu-waktu tertentu bagi anggotanya.
2. Menyelenggarakan pertunjukan kesenian.

11 Fatkhurrohman, *Pembubaran Partai Politik di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2010, 125-134.

3. Mengadakan suatu perpustakaan.
4. Menerbitkan suatu majalah.
5. Membina hubungan dengan organisasi yang mempunyai tujuan serupa di dalam maupun di Luar Negeri.
6. Mengadakan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan hukum.

Anggota WIC terdiri dari 50 % wanita Indonesia dan 50 % wanita berbagai bangsa yang sebagian besar adalah istri anggota Corps Diplomatik. Ibu Negara menjadi pelindung Nasional WIC, istri Gubernur DKI Jakarta juga menjadi pelindung, sedangkan anggota kehormatan adalah: istri Wakil Presiden, istri Ketua MPR, istri Menteri Luar Negeri, istri Kepala Misi Diplomatik.

Pada waktu ini WIC Jakarta mempunyai kira-kira 700 orang anggota. Pengurus WIC juga 50 % terdiri dari wanita Indonesia dan 50 % wanita berbagai bangsa dan selalu seorang wanita Indonesia sebagai Ketua.

Women International Club bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan yang secara teratur mengadakan pertemuan untuk saling memperkenalkan kebudayaan Indonesia dan kebudayaan berbagai bangsa. Kegiatan yang menonjol adalah Bazaar Natal (Christmas Bazaar) yang diselenggarakan bersama dengan perwakilan-perwakilan asing dan selalu mendapat hasil yang besar. Hasil tersebut dibagi-bagikan kepada badan-badan sosial.[12]

E. Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak

GOPTKI pada mulanya bernama GTKI (Gabungan Taman Kanak-Kanak Indonesia) didirikan pada tanggal 5 April 1957 di Jakarta. Keanggotaannya terdiri dari perorangan, tetapi pada Kongres GTKI

12 Muhadjir Darwin, *Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa ke Masa. Ilmu Sosial dan Politik.* 7(3) 2011, 289.

tahun 1965 anggotanya terdiri dari Organisasi/ Yayasan/ Lembaga/ Badan Pendidikan yang menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak. Pada tahun 1970, nama GTKI diubah menjadi GOPTKI.

Tujuan GOPTKI ialah dengan bekerja sama dengan Pemerintah berusaha dalam mengembangkan dan meningkatkan serta menyempurnakan Pendidikan prasekolah agar dapat membina kanak-kanak kelak menjadi warga negara RI yang berjiwa Pancasila. GOPTKI berbentuk badan kerja sama antar organisasi-organisasi termasuk Yayasan, Lembaga-Lembaga dan Badan Pendidikan yang bergerak dalam lapangan pendidikan prasekolah.[13]

GOPTKI mempunyai struktur organisasi dari tingkat Pusat, tingkat Daerah di Propinsi, tingkat Cabang di Kabupaten dan tingkat Ranting di Kecamatan. Pada tahun 1978 ini GOPTKI di tingkat Pusat didukung oleh 16 organisasi anggota yaitu: 1). Bhayangkari, 2). Persit Kartika Chandra Kirana, 3). Airyiyah, 4). Pertiwi, 5). Jalasenastri, 6). Wanita Katolik, 7). Perwari, 8). Perwanas, 9). Wanita Taman Siswa, 10). PIA Ardhya Garini, 11). PWKI, 12). PASI, 13). Tat Twam Asi, 14). Periska Postel, 15). Muslimat NU, 16). IWKA, dengan Ketua Koordinator Ny. Marzaman dari Bhayangkari.

Mengingat jumlah Taman Kanak-Kanak di seluruh Indonesia yang masih sangat terbatas, maka kegiatan GOPTKI diarahkan untuk mengembangkan jumlah Taman Kanak-Kanak dan sekaligus meningkatkan mutunya. Di samping itu GOPTKI berusaha memperingati Hari Kanak-Kanak Indonesia. Di kalangan pendidikan prasekolah dikenal tiga komponen pendidikan prasekolah (tiga Komponen Penpras) yaitu pimpinan pendidikan dan kebudayaan bagian Penpras, GOPTKI dan IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia) yang secara periodik menyelenggarakan Rakerdik Penpras (Rapat Kerja Pendidikan Prasekolah).[14]

13 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Jakarta: Lintas Katulistiwa, 2016, 15-16.

14 Muhadjir Darwin, *Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa ke Masa. Ilmu Sosial dan Politik…,* 291.

F. Badan Pembina Kegiatan Sosial

Badan Pembina Koordinasi dan Pengawasan Kegiatan Sosial disingkat BPKKS merupakan perluasan dari Badan Kerja sama Panti-Panti Asuhan/BKSPA yang didirikan pada tahun 1963 dengan restu Gubernur DKI Jakarta Brigjen Dr. Soemarno. BKSPA ini dirintis dan dikelola oleh para Ibu yang bekerja secara sukarela terpanggil oleh kewajiban untuk menolong sesama manusia, dan terdorong oleh rasa tanggung jawab sosial untuk menjalankan peranannya yang hakiki yakni memberikan pertolongan kepada sesama manusia. Hal ini merupakan bagian dari kebudayaan dan pandangan hidup berdasarkan Pancasila. Para tenaga sukarela *(Volunteer)* ikut serta membantu Pemerintah menanggulangi masalah-masalah sosial.

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari cara bekerja dalam BKSPA, oleh Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta Raya Letjen KKO Ali Sadikin dengan Surat Keputusan Gubernur No. A/10/N/16 tertanggal 20 April 1966 usaha tersebut diperluas sehingga mencakup semua kegiatan sosial di seluruh wilayah Jakarta Raya dengan nama BPKKS, singkatan dari Badan Pembina Koordinasi dan Pengawasan Kegiatan Sosial DKI Jaya dengan Ketua Ny. A.H. Nasution.

Jakarta Raya adalah pelopor dalam peningkatan organisasi BKSPA menjadi BPKKS, sebagai suatu badan yang merupakan wadah kerja sama antara usaha Pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan aktivitasnya di bidang kesejahteraan sosial untuk segala macam kegiatan.

Pola kerja BPKKS meliputi:

1) Bimbingan dan Pembinaan
2) Penyantunan
3) Pelayanan
4) Koordinasi dan Pengawasan[15]

15 Saakia E. Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI.* Yogyakarta: Galang Press, 2010, 41-42.

Pengorganisasi BPKKS adalah sebagai berikut: Untuk tiap jenis kegiatan dibentuk badan Kerja sama ataupun koordinasi tersendiri dengan pengawasannya sendiri. Semua badan Kerja sama/ koordinasi itu dikoordinasi lagi oleh satu badan yang merupakan pengurus dari semuanya. Pengurusan terdiri dari Pengurus inti dan Pengurus Pleno. Pengurus inti meliputi bidang dana, bidang kebendaharaan, hubungan masyarakat, bidang pengelolaan, perencanaan dan pendidikan, bidang kesehatan, pelayanan tenaga sukarela *(volunteer service)* dan administrasi, sedangkan untuk Pleno ditambah dengan Ketua-Ketua BKS, seperti BKSPA, BKUTN (Badan Koordinasi Urusan Tuna Netra), BKPW (Badan Koordinasi Panti-panti Werdha) dan lain-lain.[16]

Semenjak tahun 1970 telah dibentuk pula BPKKS di daerah Jawa Barat, pada tahun 1975 di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tahun 1976 di Kalimantan Barat, kemudian menyusul Jawa Timur, Bali, Bengkulu, Sumatra Barat dan Maluku. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan BPKKS dan organisasi sosial lainnya di seluruh Indonesia, mulai dirasakan perlu adanya wadah tingkat Nasional yang mempunyai tugas menampung permasalahan dalam ruang lingkup *(scope)* nasional pula. Maka pada Musyawarah Nasional kesatu pada tahun 1970 di Jakarta, yang dihadiri oleh organisasi-organisasi sosial tingkat nasional termasuk BPKKS Jakarta (yang sedang menemui bentuk peningkatan ke tingkat nasional) dibentuklah Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS).

Tujuan DNIKS adalah:

1) Mengusahakan terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atas dasar tanggung jawab sosial bersama.
2) Melakukan Kerja sama internasional untuk perwujudan kesejahteraan sosial dalam rangka masyarakat dunia damai dan sejahtera. Hubungan kerja DNIKS dengan daerah

16 Wasisto Raharjo Jati, *Historisitas Politik Perempuan Indonesia…*, 207.

dilakukan melalui BPKKS yang telah terbentuk. Diharapkan dalam waktu dekat ini di tiap daerah dapat terbentuk suatu BPKKS sehingga memudahkan hubungan.[17]

Pada tahun 1961 Pemerintah mengeluarkan "Undang-Undang tentang barang" yang secara umum mengatur barang sebagai produk yang diperdagangkan. Dalam pasal-pasalnya diatur secara umum tentang standarisasi mutu, labeling, pengamatan dan lain-lain. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut belum ada, sehingga masyarakat belum merasakan manfaatnya. Diadakan dalam berbagai usaha berupa pameran dan lain-lain baik oleh Pemerintah maupun Swasta untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pemakaian barang-barang produksi dalam Negeri. Hal itu membawa pengaruh yang positif terhadap produsen dalam Negeri. Mereka harus meningkatkan mutu produksinya untuk dapat menarik perhatian konsumen yang telah bertambah kritis dan untuk dapat bersaing dengan barang *import.* Dengan adanya peningkatan pemakaian produksi dalam Negeri di satu pihak dan perlunya perlindungan masyarakat konsumen di lain pihak, di samping perlunya pembatasan barang-barang *import* oleh Pemerintah, timbul gagasan untuk mendirikan suatu organisasi konsumen.

Pencetus gagasan adalah Ny. Lasmidjah Hardi. Kemudian pada tanggal 11 Mei 1973 didirikan Yayasan Lembaga Konsumen di Jakarta. Pengurus Harian yang pertama adalah: Ny. Lasmidjah Hardi (Ketua), Ny. Sunarso SH (Wakil Ketua), Dra. Ny. Kartina Suyono Prawirabisma (Sekretaris), Permadi SH (Wakil Sekretaris), Ny. H. Soemarno (Bendahara), Ny. D. Sumiskum (anggota). Pendirian Yayasan Lembaga Konsumen dikukuhkan dengan akta notaris dan surat Keputusan Gubernur DKI JAYA. Maksud dan tujuan Yayasan Lembaga Konsumen adalah memberi bimbingan dan perlindungan

17 Wasisto Raharjo Jati, *Historisitas Politik Perempuan Indonesia….,* 208.

kepada konsumen menuju kepada kesejahteraan keluarga. Dalam menuju tercapainya tujuan tersebut, Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen memberi penerangan-penerangan kepada masyarakat. Mula-mula melalui organisasi wanita kemudian meluas melalui RT, Kelurahan, Kecamatan, Kantor dan sebagainya. Jalan yang ditempuh ialah dengan memberikan ceramah-ceramah penerangan dalam surat kabar, majalah, radio dan televisi. Usaha-usaha Yayasan Lembaga Konsumen ialah menyadarkan masyarakat konsumen di Indonesia akan haknya sebagai konsumen, yaitu hak informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengar pendapatnya dan terjamin keselamatan dirinya dalam penggunaan barang yang dibelinya. Untuk menjamin hak-hak tersebut Yayasan Lembaga Konsumen mengusulkan kepada Pemerintah agar dikeluarkan peraturan-peraturan mengenai standarisasi, pengawasan mutu, labeling, pengemasan, dan lain-lain untuk melindungi konsumen.[18]

G. *Asean Women Circle*

Asean Women Circle (AWC) didirikan pada tanggal 8 Agustus 1975 Jakarta. Tujuan dari AWC adalah:

1. Meningkatkan saling pengertian dan Kerja sama antara wanita Asean.
2. Memperkenalkan kepada anggotanya dan masyarakat umumnya tentang aspirasi dan tujuan-tujuan dari ikatan bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas:

1. Diselenggarakan pertemuan-pertemuan pada waktu-waktu tertentu bagi anggotanya untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam bidang sosial budaya dan bidang lain-lainnya yang mempunyai ciri-ciri Asean.

18 Wasisto Raharjo Jati, *Historisitas Politik Perempuan Indonesia…,* 208.

2. Ditingkatkan penerangan mengenai segi-segi sosial budaya negara-negara Asean.

Anggota *Asean Women Circle* terdiri dari:

1. Istri Pejabat pegawai Departemen Luar Negeri RI
2. Wanita berbangsa Asean yang bertempat tinggal di Jakarta.
3. Istri bekas Pejabat/ Pegawai Perwakilan Indonesia di Luar Negeri. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut di atas *Asean Women Circle* membantu melancarkan hubungan baik antar bangsa Asean.[19]

Walaupun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia dianggap bertitik tolak pada Kongres Perempuan Indonesia pertama yang diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 1928 namun seperti diuraikan dalam Bab Pertama nampak kaitan yang erat dengan organisasi-organisasi wanita Indonesia sebelum tahun tersebut, bahkan nampak pula inspirasi yang didapat dari perjuangan para wanita pahlawan nasional Indonesia yang memberi teladan dan dorongan kepada wanita Indonesia untuk turut berjuang merebut kemerdekaan tanah air dan kemudian membangunnya menjadi Negara dan bangsa yang makmur dan sejahtera.

Dari masa ke masa seperti dibahas dalam Buku ini, sejarah menunjukkan bahwa Pergerakan Wanita Indonesia merupakan bagian esensial yang tidak dapat dipisahkan dari Pergerakan Kebangsaan Indonesia. Pada tahun 1928, dijiwai oleh Sumpah Pemuda, disadari pula bahwa wanita pun harus bersatu untuk dapat menyumbangkan pikiran dan tenaganya bagi Pergerakan Kebangsaan Indonesia pada umumnya dan perbaikan kedudukan wanita Indonesia pada khususnya. Sebagai langkah permulaan diselenggarakanlah Kongres Perempuan Indonesia yang pertama

19 Saakia E. Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan…,* 43.

pada tanggal 22 Desember 1928 dengan motto "Merdeka melaksanakan Dharma".[20]

Walaupun melalui berbagai hambatan dan tantangan selama masa penjajahan Belanda dan dalam suasana yang sangat terkekang pada masa pendudukan Jepang namun wanita Indonesia secara diam-diam berhasil mempersiapkan diri untuk ikut serta mewujudkan Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada waktu itu wanita Indonesia serempak bersatu kembali dengan semboyan "100 % Merdeka, 100% berdiri di belakang Pemerintah RI".

Semboyan tersebut tidak merupakan kata-kata hampa tetapi langsung dilaksanakan dengan terjunnya laskar-laskar wanita dalam perjuangan fisik di samping berjuang di garis belakang, yaitu dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Dalam masa pembangunan, Kongres Wanita Indonesia sebagai wadah dari Kesatuan Pergerakan Wanita selalu berusaha membantu Pemerintah dalam berbagai bidang. Ketika Gerakan 30 September 1965 PKI berusaha menumbangkan Pemerintah Indonesia, Kongres Wanita Indonesia pun tidak luput dari rongrongan dan pengkhianatan melalui Gerwani sebagai kaki tangannya PKI. Namun demikian Kongres Wanita Indonesia berhasil berbenah diri dan segera bersatu kembali.[21]

Bertubi-tubi tantangan telah dihadapi, berbagai cobaan telah di dalam namun Kongres Wanita Indonesia terbukti dapat mengatasi itu semua merupakan tantangan masa depan baik bagi Pergerakan Wanita khususnya maupun bagi wanita Indonesia umumnya untuk bersama-sama Pemerintah menjadikan kenyataan segala sesuatu yang tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya tercantum tujuan Negara untuk

20 Wasisto Raharjo Jati, *Historisitas Politik Perempuan Indonesia…,* 210.
21 Rachel Rinaldo, Ironic Legacy: the New Order and Indonesian Women's Groups. *Jurnal Outskirta,* 10(2) 2002, 128-129.

meningkatkan kesejahteraan untuk setiap warga negara dan dalam hal ini persamaan hak dan kewajiban bagi wanita dan pria tidak ada diskriminasi dalam Pembukaan UUD 1945.

Wanita Indonesia merasa bersyukur bahwa kedudukannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian menjelang Pelita III peranannya lebih dipertegas dalam GBHN (Garin-garis Besar Haluan Negara) yang diputuskan oleh Sidang Umum MPR 1978.[22] Persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan bagi wanita dan pria untuk berpartisipasi dalam Pembangunan memang mutlak diperlukan untuk terlaksananya Pembangunan yang cepat dan menyeluruh.

22 Saakia E. Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan…*, 44.

Bab XIII

Pemberdayaan Perempuan Kontemporer

A. Perempuan dalam Budaya Tradisional

Perempuan dalam budaya tradisional masyarakat Jawa tanpa disadari memiliki harkat dan martabat yang setingkat lebih tinggi di atas laki-laki sebagaimana yang dikenal dengan istilah *bapa lantaran nan biyung lambaran* artinya bahwa dalam meneruskan garis keturunan, istrilah yang memegang peranan penting. Penghormatan kepada perempuan ini tampak dalam ungkapan *surga berada di bawah telapak kaki ibu.* Ridha Allah bergantung kepada ridha ibu. Durhaka kepada ibu dan bapak adalah termasuk *sabil mubikat* tujuh dosa yang sangat besar.[1] Penghormatan ini sebagaimana dilukiskan melalui salah satu sosok perempuan yang namanya tidak akan pernah lepas dari ingatan umat manusia yaitu Maryam (Q.S. Ali-Imran: 42). Selain itu diceritakan juga profil perempuan dalam al-Qur'an yang taat termasuk di dalamnya Ratu Bilqis.

Perempuan tidak hanya dipandang secara sempit terbatas pada sikap-sikap kereligiusannya. Perempuan sebagai makhluk sosial dituntut pula untuk mengabdikan dirinya sebagai anggota

1 Damardjati Supadjar, *Kongres Kebudayaan 1991 Budaya Spiritual pada Masa Lalu, Kini dan yang akan Datang*. Jakarta: Direktorat jenderal Kebudayaan, 1993, 169.

masyarakat melalui potensi-potensi yang dimilikinya. Berkaitan dengan filsafat pendidikan Jawa dalam Dimyati Huda (2015) berupaya menemukan gagasan menjadi orang Jawa yang beradab, artinya mengetahui cara beradab dan sepenuhnya sadar akan posisi sosial. Seorang Jawa yang diakui adalah sosok dan tahu tatanan, oleh karena itu seorang anak belum dianggap Jawa apabila menjadi orang Jawa belum berbudaya karena anak belum mengerti tempatnya tatanan (seharusnya berbudaya Jawa) begitu juga orang yang tidak mengindahkan tatanan Jawa, mereka dianggap bukan orang Jawa.[2] Dengan demikian bagaimana kita lihat budaya Jawa sangat kuat tatanan sosial maupun filosofinya.

Perbedaan derajad perempuan dan laki-laki sebenarnya terletak pada bangunan sosial yang membentuknya. Dalam Zulkarnaini Abdullah (2003:121) disebutkan bahwa: Laki-laki dan perempuan dilahirkan sama, laki-laki dan perempuan tidak dilahirkan agar jenis yang satu menguasai dan mengalahkan jenis yang lain. Mereka dilahirkan sama akan tetapi mereka sendiri yang menetapkan posisi-posisi tertentu kepada jenis kelamin tertentu dalam kehidupan sosialnya.[3] Dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 34 Allah berfirman:

> *"Kaum laki-laki adalah Qawwamun (pemimpin) bagi kaum perempuan, sebab Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (kaum laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Maka perempuan yang saleh adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri saat (suami) tidak ada. Sebab Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatir nusyuznya*

2 M. Dimyati Huda, "Peran Dukun terhadap Perkembangan Peradaban Budaya Masyarakat Jawa", *Jurnal Ikadbudi*, 4(10) 2015, th.
3 Zulkarnaini Abdullah, "Mengapa Harus Perempuan? Menguak Isu Keperawanan, Derajat, Psikologi dan Dosa Warisan Perempuan", *Jurnal el-Saq*, 7(2) 2003, 121.

(melanggar kewajiban suami istri), nasihatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Ayat tersebut dijadikan alasan kebanyakan orang untuk mengatakan bahwa laki-laki telah dilebihkan kedudukannya dari perempuan oleh agama *Qawwamun* secara general dapat diartikan para pemimpin, pelindung, penanggung jawab, atau orang yang mengurus dan bertindak atas nama urusan orang lain. Para Mufassir, terutama mufassir klasik memberikan pengertian yang senada dengan pengertian tersebut. Dalam Tafsir Ibnu Katsir juga menyatakan bahwa laki-laki lebih utama dan lebih baik dari kaum perempuan, pemberi keputusan atas tindakan dan pemberi peringatan apabila ia menyeleweng karena itu kenabian dan pimpinan agung dikhususkan bagi laki-laki.[4]

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sebenarnya dapat dipahami jika ditinjau dari konteks zaman atau lingkungan peradaban di mana mereka hidup. Laki-laki mendapat kesempatan yang lebih besar dari perempuan dalam hal pendidikan, sosial ekonomi, politik dan sebagainya. Tetapi kenyataan saat ini dengan fasilitas teknologi global terutama dalam bidang informasi, komunikasi dan transportasi telah memberikan kemudahan-kemudahan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan fisik yang menjadi alasan, misalnya perempuan tidak dapat menempuh perjalanan jauh untuk menuntut ilmu.

4 Zulfa Insiyah, "Analisis Keseteraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Musdah Mulia dalam Konsep Pembaruan Keluarga Islam di Indonesia", *Indonesian Journal of Islamic Law,* 1(2) 2019, 39-49.

B. Strategi Pembinaan Sosial

Perempuan sebagai bagian dari masyarakat tentu memiliki ciri khas yang tidak terdapat pada kaum laki-laki yaitu dalam hal kemampuannya sebagai penerus generasi. Perempuan sebagai warga masyarakat mempunyai hak, kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria untuk memantapkan kehidupan bangsa dan bernegara serta kehidupan beragama berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[5] Peranan perempuan dalam pembangunan berkembang selaras dan serasi dengan perkembangan tanggung jawab dan peranannya dalam mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia.

Sehubungan dengan hal tersebut maka kedudukannya di dalam masyarakat dan peranannya dalam pembangunan perlu ditingkatkan serta diarahkan, sehingga dapat meningkatkan partisipasinya bagi pembangunan bangsa sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai perempuan yang dalam hidupnya memiliki peranan yang biasa disebut Panca Darma Putri, yakni sebagai pendamping suami, sebagai pengelola keluarga, penerus keturunan dan pendidik anak, pencari nafkah tambahan dan sebagai warga masyarakat.[6]

Perempuan jika melaksanakan peranannya dengan baik maka ia akan bisa mengembangkan sumber daya yang berkualitas.

5 Dalam penelitian Andi Kasmawati, hak perempuan dalam UUD 1945 telah diperjuangkan jauh sebelum Indonesia memiliki dasar UUD 1945. Sebagaimana telah disepakati pasca Indonesia merdeka pada pertemuan *Word Conference International Year of Women PBB* yang inti hasil dari pertemuan itu adalah hak perempuan dengan pria adalah sejajar kedudukannya. Beberapa aspek yang disetarakan adalah 1) prinsip persamaan bersifat substantive yaitu persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sebagai hak untuk sama dengan laki-laki; 2) prinsip non diskriminasi antara laki-laki dengan perempuan. Konversi tersebut menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan; 3) prinsip kewajiban Negara berkewajiban melaksanakan dan merumuskan aturan di setiap negaranya. Lihat lebih lengkap dalam kajian Andi Kasmawati, "Perlindungan Hak Perempuan dalam Perspektif Keadilan Gender", *Seminar Nasional LP2M UNM*, 2017, 539-542.

6 Ahmad Suhendra, "Rekonstruksi Peran dan Hak Perempuan dalam Organisasi Masyarakat Islam", *Musawa*, 11(1) 2012, 48; bisa juga dilihat dalam Mansour Fakih, "Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender" dalam Mansour Fakih dkk., *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000, 46.

Fakta ini menunjukkan bahwa perempuan sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar dan kemampuannya perlu dikembangkan melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan serta ketahanan mental spiritual agar dapat lebih memanfaatkan kesempatan berperan aktif di segala bidang kehidupan.

Perempuan yang sudah beremansipasi, terutama guru, penulis, sarjana, pemikir, seniman, dan sebagainya, memberikan kontribusi tidak saja secara langsung, tetapi juga secara kumulatif kepada kemajuan dan perkembangan Negara. Sebagai ibu-ibu cenderung mengorientasikan anak-anak ke arah dan motivasi untuk meraih prestasi. Kaum perempuan yang berprestasi, sebagai ibu-ibu menjadikan masyarakat secara kumulatif lebih maju, berkembang dan dinamis dibanding dengan kaum perempuan (tradisional) dan bahkan lebih maju dari pada laki-laki yang berprestasi.[7]

Kendatipun kaum perempuan telah banyak memperlihatkan prestasinya dalam berbagai bidang, kenyataan menunjukkan bahwa belum terwujud dunia di mana kaum laki-laki dan perempuan sama dan sederajat secara mutlak. Namun demikian, jelas keputrian baru yang memadukan peran ganda keibuan dan kerja, keputrian dan prestasi sedang tumbuh. Memperhatikan kehidupan manusia dalam masyarakat yang semakin pluralistik termasuk juga dalam bidang moralitas membuat manusia harus berhadapan dengan berbagai pandangan moral yang saling bertentangan sehingga seseorang harus menentukan pandangan moral yang baik itu orang membutuhkan pendidikan etika dan agama dalam kehidupan sehari-hari.[8] Terlebih-lebih pada abad XXI yang sudah diliputi oleh mitos globalisasi, industri, komunikasi, kecantikan, dan berbagai problem serta perubahan-perubahan lain.

7 Mazhar ul-Haq Khan, *Wanita: Islam Korban Patologi Sosial*. Bandung: Pustaka Pelajar, 1994, 247.

8 Jacob, *Masa Depan Mempelajari Menyongsong dan Mengubahnya*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991, 177.

Abad XXI yang oleh Neisbitt dan Aburdens disebut sebagai abad perempuan menuntut perempuan memiliki sikap moral yang mapan untuk menopang kehidupannya terutama bagi perempuan yang memiliki peran ganda, di satu sisi perempuan harus mendarmabaktikan potensinya kepada arah pembangunan dan di pihak lain harus memperhatikan pendidikan anak-anak dan keluarganya.

Perempuan dalam prospek feminisme sosial masyarakat Jawa dapat mengambil inspirasi dari perjuangan keraton Yogyakarta seperti ungkapan Purwadi (2007) bahwa perjuangan Keraton Yogyakarta merupakan manifestasi dari konsep Narendra Agung Binathara, Mbahu dhendha nyakrawati, ambeg adil paramarta, memayu hayuning bawana, sebuah tanggung jawab kekuasaan agar mengutamakan keselarasan, keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, kemurahan dan keramahan dunia.[9] Konsep ini dapat digunakan bagi kaum perempuan yang berkiprah sebagai perempuan yang mengisi pembangunan dengan selalu tanggung jawab mengutamakan keselarasan dan kesejahteraan sesuai dengan tujuan negara yang termaktub dalam alinea 4 UUD 1945 "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia."

C. Refleksi Masalah Perempuan

Dengan memperhatikan pengertian di atas sudah selayaknya kalau perempuan dihargai, dijunjung tinggi derajatnya karena perempuan memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh kaum pria yaitu melahirkan anak yang akan menyambung cita-cita

9 Purwadi, *Sejarah Raja-Raja Jawa.* Yogyakarta: Media Abadi, 2007, 542.

hidupnya. Namun kenyataannya tidak semua lapisan masyarakat memandang tinggi keberadaan perempuan, sebagaimana terjadi pada peradaban masyarakat lampau.

Pada era modern ini perempuan menghadapi dua tantangan. Pertama, berasal dari dirinya sendiri, yaitu berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam keluarga khususnya. Kedua, ilmu dan teknologi, terutama bagi perempuan yang berperan ganda. Perempuan dituntut untuk meningkatkan peranan dan potensinya dengan melakukan berbagai cara salah satunya melalui pendidikan formal maupun non formal Dalam Negeri maupun di Luar Negeri.[10]

Perempuan sebagai pendidik dituntut memberikan pendidikan kepada anak-anaknya atau bahkan kepada generasi muda dengan pendidikan yang lebih terarah terutama dalam mempersiapkan kepribadian anak sehubungan dengan gencarnya pendidikan yang hanya menekankan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan ilmu pengetahuan inilah maka diperintahkan pula seorang perempuan untuk menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru. Hal ini karena orang tua sebagai penyebab kehadiran manusia di dunia dan yang telah memberikan bekal kepada anak-anaknya. Guru merupakan orang yang telah memberi petunjuk tentang kebaikan. Apabila darma tersebut ditunaikan dengan sebaik-baiknya tanpa pamrih maka akan menjadi sarana mencapai ketenteraman. Dengan ilmu yang telah diperoleh itu manusia bisa mengembangkan potensinya dan dengan ilmu pula akan menambah produktivitas kerja.

10 Beberapa perempuan yang tercatat dalam sejarah perjuangan Indonesia dan berprestasi seperti Tjut Nyak Dien, Tjut Mutia ataupun Martha Krina Tiahahu, nyai Ahmad Dahlan dan sebagainya. R.A Kartini juga dapat menjadi bukti nyata sumbangsih perempuan terhadap negeri ini, Ia melakukan negosiasi politik feminitas dalam salah satu cara perjuangannya. Kartini menggunakan peran domestik sebagai strategi jenius dengan pola *accommodating protest* yaitu mensejajarkan egalitarianism pribumi dengan kolonial melalui ranah domestik tradisi keperempuanan. Lihat kehebatan perempuan Indonesia dalam Indah Ahdiah, "Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat", *Jurnal Academica,* 5(2) 2013, 1085-1086.

Kepemilikan kekayaan bagi seorang perempuan kini juga merupakan suatu tuntutan untuk ikut menunjang kehidupan perekonomian keluarga dengan cara bekerja. Perempuan yang ikut mencari nafkah tambahan juga merupakan salah satu pengembangan sumber daya manusia karena suatu saat tidak jarang perempuan akhirnya menjadi pemimpin yang selalu siap terlibat dalam persaingan hidup yang semakin keras dan penuh tantangan.[11]

Perempuan tidak cukup hanya memiliki kekayaan, anak dan kepandaian, tetapi juga harus memiliki keluhuran budi. Keluhuran budi itu di antaranya keimanan perempuan terhadap Tuhannya maksudnya perempuan harus percaya penuh bahwa Tuhan yang Maha Esa. Keimanan kepada Tuhan harus meresapi dan meliputi pikirannya, perasaannya, perkataannya dan perbuatannya. Keimanan itu akan menumbuhkan rasa taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam arti perempuan harus selalu ingat pada sifat-sifat Tuhan. Ketaatan itu dapat mewujudkan sikap perempuan yang sabar dan tawakal terhadap segala yang diberikan Tuhan baik senang maupun susah. Orang yang hidupnya ditopang dengan sikap sabar dan akan mempunyai arah hidup yang jelas yang pada akhirnya akan menemukan kebahagiaan.[12] Untuk melakukan suatu perubahan bukanlah hal yang mudah dengan berdasar pada keberadaan manusia yang terlahir di dunia bukan karena

11 Keterlibatan perempuan pernah diteliti oleh Asti Inawati (2014) yang menghasilkan temuan bahwa perempuan memiliki andil besar dalam mempertahankan kebudayaan, kinerja, prestasi kearifan lokal. Hal tersebut dibuktikan dengan mengaktualisasikan dirinya ke dalam lingkungan publik. Peran perempuan dalam mempertahankan budaya adalah melakukan intervensi terhadap kebijakan publik. Lihat lebih lengkap Asti Inawati, "Peran Perempuan dalam Mempertahankan Kebudayaan Jawa dan Kearifan Lokal", *Musawa*, 13(2) 2014, 205.

12 Secara intelektual, banyak perempuan tidak kalah saing dengan laki-laki bahkan di atasnya. Namun kelemahan perempuan pada aspek emosional yang lebih dan sensitif. Namun hal demikian, bukan merupakan konstruk sosial tapi memang telah difitrahkan oleh Tuhan agar perempuan memiliki sifat sopan dan lemah lembut. Sifat emosional perempuan digambarkan sama seperti kapas yang mudah terbang dan halus. Karena sifat emosional demikian, perempuan bukan hanya memiliki pontensi fisika yang indah, melainkan juga pola emosional yang lembut. Maka tidak dapat dipungkiri, bahwa perempuan memiliki segudang kelebihan di atas laki-laki. Lihat Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani, 2005, 91.

kemauan dan kemampuan manusia sendiri namun campur tangan Tuhan sangat besar nilainya untuk menetapkan manusia sebagai hamba-Nya yang telah terencana dengan penetapan karya Agung Syang Hyang Dumadi Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isi dengan penetapan hukum QS Adz-Dzariat (57) manusia sebagai hamba-Nya.

Selain hal di atas amanah terbesar manusia diciptakan tidak lain sebagai khalifah Allah (QS. Al-Baqarah: 30) dengan tujuan mencari keridhaan-Nya (QS Ali Imran: 15) dalam meniti jalan keseimbangan untuk kehidupan di dunia dan akhirat (QS. Asy-Syura: 20, Adh-Dhuha: 4) atau keseimbangan untuk kebutuhan esoteris (batiniah) dan eksoteris (lahiriah) yang kesemuanya itu untuk mendapatkan surga (Ali Imran: 15). Surga diperuntukkan bagi manusia yang taat baik laki-laki maupun perempuan dengan Pengesaan kepada Tuhan untuk memberi penyegaran dalam kehidupan bermasyarakat. Kemerdekaan bagi kaum perempuan adalah kebebasan dan hilangnya diskriminasi, seperti pesan Al-Quran surat Al-Hujurot ayat 13 seluruh manusia tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit dan perbedaan yang bersifat *given* lainnya. Tidak ada yang lebih mulia di hadapan Tuhan kecuali ketakwaan. Selain itu surat Al-Ahzab ayat 35 yang mensejajarkan kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang artinya:

> *Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki perempuan yang mu'min laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya.*

Ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan *gender* yang lebih lanjut Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan keputusan Menteri Nomor 232/2003 pada 29 Desember 2003 tentang panduan umum pengarusutamaan gender di Tingkat Propinsi dan Kotamadya/ Kabupaten. Selain Itu

UU Amandemen konstitusi UUD 1945 pasal 28 ayat H "setiap orang berhak mendapatkan kemudahan, dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan" Undang-undang tersebut telah memberi kekuatan hukum atas kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagai warga negara yang sama kedudukannya.[13]

D. Pentingnya Pendidikan dan Pelatihan bagi Kaum Perempuan

Abuddin Nata (2009:149) menyampaikan bahwa Pendidikan merupakan media atau sarana yang berfungsi menyalurkan, gagasan, pemikiran, nilai-nilai budaya, agama, sistem politik, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya yang sudah diakui oleh masyarakat dan Negara. Pendidikan terhadap perempuan sangat penting mengingat sudah didudukkan pada posisi yang sangat tinggi dalam berperan aktif dan partisipasinya dalam pembangunan. UU mengamanahkan pemberian kesempatan kepada kaum perempuan yang menetapkan kuota 30 % untuk menjadi calon legislatif namun pada kenyataannya perjuangan perempuan belum memenuhi kuota tersebut bahkan jumlah anggota DPR RI periode 2014-2019 lebih sedikit dibanding periode 2009-2014. Pada periode 2009-2014 sejumlah 101 orang atau 17.86 % sedangkan periode 2014-2019 hanya 79 orang atau 14 %. Peran publik masih didominasi laki-laki meskipun pada individu tertentu perempuan menunjukkan keberhasilannya. Megawati Sukarno Putri yang menjadi presiden perempuan di Indonesia, Cory Aquino yang pernah menjadi presiden di Filipina, Margaret Tatcher mantan perdana menteri Inggris, selain itu Benazir Butho

13 L.M. Lapian, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, 198-199.

dari Pakistan, Begum Khalida Zia dari Bangladesh dan Tensu Ciller dari Turki yang pernah menjadi perdana menteri di Negaranya.[14]

Kondisi perempuan yang termarginalkan perlu dipecahkan dengan jalan Mengadakan program mentor formal untuk para wanita dalam peningkatan kompetensi yang dimiliki. Pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan sebagaimana Uwes (2003) menyebutkan bahwa pendidikan itu adalah pelayanan bagi pengembangan potensi terdidik secara optimal sesuai fitrah yang dimilikinya. Pendidikan adalah suatu hal yang urgen merupakan proses seseorang untuk mencapai cita-cita mulai yang diinginkan berdasar pada *humanistic,* rasa kemanusiaan, toleransi dan penghormatan yang lebih efektif tanpa memandang ras, warna kulit, perbedaan agama dan perbedaan jenis kelamin. Pengembangan kompetensi dapat diimplementasikan melalui seminar, sarasehan, diskusi panel, baik dalam pendidikan formal maupun non formal.[15]

Berkaitan dengan hal tersebut di atas menurut Simomora (1995) pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan dalam dua waktu yang dibagi menjadi 2 yaitu *pre service training* dan *in service training.* Sedangkan Qodri Azizi (2003) menyampaikan bahwa pendidikan dalam pengertian bahasa disebut *the process of training and developing the knowledge, skills, mind, character etc. Special by formal schooling* (proses melatih dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan pikiran dan perilaku.[16]

14 Julasih Kusharyanto, *Potensi Perempuan Amerika Tinjauan Feminisme*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, 50-58.
15 Sanusi Uwes, *Visi dan Misi Pondasi Pendidikan dalam Perspektif Islam,* Logos. Ciputat, 2003, 33-36.
16 Qodri Azizy, *Pendidikan Agama Untuk Membangun Etika Sosial*, Aneka Ilmu. Semarang: Aneka Ilmu, 2003, 19-20.

Daftar Pustaka

Abdullah T. dkk., *Indonesia dalam Arus Sejarah 5: Masa Pergerakan Kebangsaan.* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2010.

Abdullah, Zulkarnaini. "Mengapa Harus Perempuan? Menguak Isu Keperawanan, Derajat, Psikologi dan Dosa Warisan Perempuan", *Jurnal el-Saq,* 7(2) 2003.

Abtrobus, O. *the Global Momen's Movement.* Bangladesh: the University Press, 2004.

Affiah, Neng Dara. *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Ahdiah, Indah. "Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat", *Jurnal Academica,* 5(2) 2013.

Ahmad, Leila. *Wanita dan Gender dalam Islam: Akar-Akar Historis Perdebatan Modern.* Jakarta: Lentera, 2000.

Aini, Robi'ul Afif Nurul. "Analisa Kritis Teori Feminisme Liberal dalam Konstruksi Pendidikan Islam Perspektif Kesetaraan Gender", *Tahdzib,* 19(2) 2018.

Ainiyah, Qurratul. "Urgensi Pendidikan Perempuan dalam Menghadapi Masyarakat Modern", *Halaqa: Islamic Education Journal,* 1(2) 2017.

Allan, Kenneth. *Contemporrary Sosial and Sociological Theory: Visualizing Sosial Words.* London: Pine Forge Perss, 2006.

Amar, Syahrur. "Perjuangan Gender dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia pada Abad ke XIX", *Fajar Historia,* 1(2) 2017.

Aminah, Sutan Siti. "Gender, Politik, dan Patriarki Kapitalisme dalam Perspektif Feminis Sosialis", *Jurnal Politik Indonesia,* 1(2) 2012.

Andika, Mayola. "Reinterpretasi Aya Gernder dalam Memahami Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual dalam Penafsiran)", *Musawa,* 17(2) 2018.

Anita, Syahfitri. *Gerakan Perempuan: Tinjauan Sejarah (Sebagai Pengantar Diskusi Lingkar Studi Perempuan).* Jakarta: Bulan Bintang, 2006.

ANRI, *Laporan-Laporan tentang Gerakan Protes di Jawa pada Abad XX.* Jakarta: Arsip Nasional RI, 1981.

Anshori, Sodiq. "Konstribusi Pengetahuan Sosial dalam Pendidikan Karakter", *Jurnal Edueksos,* III(2) 2014.

Anshoriy, HM. N. *Matahari Pembaruan: Rekam Jejak KH. Ahmad Dahlan,* Jakarta: Niaga Swadaya, 2010.

Anwar, M. Zainal. "Organisasi Perempuan dan Pembangunan Kesejahteraan", Jurnal Sosiologi Reflektif, 8(1) 2013.

Arif, Zahra Zaini. "Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia", *Indonesian Journal of Islamic Law,* 1(2) 2019.

Aripurnami, Sita. "Jelajah Perempuan untuk Demokrasi di Indonesia", *Afirmasi: Jurnal Pengembangan Pemikiran Feminis,* 2(2) 2014.

Arivia, Gadis. *Feminisme: sebuah Kata Hati.* Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006.

_____ *Soekarno dan Gerakan Perempuan: Kepentingan Bangsa Versus Kepentingan Perempuan.* Jakarta: Bulan Bintang, 2000.

Asmarani, Ratna. "Perempuan dalam Perspektif Kebudayaan", *Jurnal Sabda,* 12(1) 2017.

Asnawi, Habib Shulton, dkk. *Hak Asasi Manusia di Indonesia; Kajian Terhadap Hak-hak Pendidikan Kaum Perempuan di Indonesia*, dalam Ni'matul Huda dan Suparman Marzuki (ed.), Yogyakarta: Pascasarjana FH UII dan FH UII Press, 2011.

_____. "Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Mengembalikan Keadilan HAM Kaum Perempuan", *Jurnal al-Ahwal*, 12(2) 2011.

_____. "Politik Hukum Kesetaraan Kaum Perempuan dalam Organisasi Masyarakat Islam di Indonesia", *Jurnal Masawa*, 11(1) 2012.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,* edisi revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Aziz, Asmaeny. *Feminisme Profetik,* Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.

Azizy, Qodri. *Pendidikan Agama Untuk Membangun Etika Sosial, Aneka Ilmu.* Semarang: Aneka Ilmu, 2003.

Azra, Azyumardi. *Biografi Sosial-Intelektual Ulama Perempuan: Pemberdayaan Historiografi,* dalam Jajat Burhanuddin, *Ulama Perempuan Indonesiaa.* Jakarta: PPIM, 2001.

Badri, *Pembangunan Hukum Perspektif Gender melalui Kesetaraan Hak, Sumber Daya dan Aspirasi. Jurnal Justisia,* 3(2) 2018.

Balckbburn, Susan. *Women and the State in Modern Indonesia.* Cambridge: Cambridge Universitas Press, 2004.

Beddu, Muhammad Juni. "Nilai-Nilai Gender dalam Perspektif Histori Pewarisan dari Era Pra-Islam hingga Era Islam", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender,* 18(1) 2019.

Benmetan, Thomas. "Analisis Framing Sosok Gusti Kanjeng Ratu Pembayun dalam Majalah Digital Detik Edisi 182", *Jurnal e-Komunikasi,* 4(1) 2016.

Burhanuddin, J; O. Fathurahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Cokrominoto, *Analisa Situasi Wanita Indonesia.* Jakarta: Kantor Menteri Negara UPW.

Condronagoro, R.T. *Riwayat Laskar Putri Indonesia di Surakarta.* Surakarta: Wirjowitono, 1976.

Darini, Ririn. "Kiprah Perempuan Majapahit di Ruang Politik", *Patrawidya,* 20(1) 2019.

Darini, Ririn. "the Gait of Majapahit Women in Political Space", *Patrawidya,* 20(1) 2019.

Darwin, Muhadjid. "Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa ke Masa", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,* 7(3) 2004.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Cut Nyak Din.* Jakarta: Publishing, 1996.

_____, *Sejarah Daerah Jawa Barat.* Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1979.

Dewi, Desak Made Sintha Kurnia; Luh Putu Lila Wulandari; D.D. Wirawan, "Determinan Sosial Kerentanan Perempuan terhadap Penularan IMS dan HIV", *JPH Recode,* 2(1) 2018.

Dewi, Hastuti. "Demokratisasi dan Dekonstruksi Ideologi Gender Orde Baru", *Musawa,* 16(1) 2017.

Dewi, Kurniawati Hastuti. "Demokratisasi dan Dekonstruksi Ideologi Gender Orde Baru", *Musawa,* 16(1) 2017.

Diniah, Hikmah. *Gerwani Bukan PKI, sebuah Gerakan Femenisme Terbesar di Indonesia.* Yogyakarta: Caraswatibooks, 2007.

Djoeffan, Sri Hidayati. "Gerakan Feminisme di Indonesia: Tantangan dan Strategi Mendatang", *Jurnal Mimbar,* 3(XVII) 2001.

Duhayatin, Siti Ruhaini. "Wacana Perempuan dalam Muhammadiyah", *Media Inovasi, 45(3) edisi khusus,* 2005.

Eagly, Alice H.; Christa Nater dkk., "Gender Stereotypes have Changed: A Cross-Temporal Meta-Analysis of U.S. Publik Opinion Polls from 1946-to 2018", *American Psychologist,* 75(3) 2020.

Edwar, Valentina Edellwiz; Sarwit Sarwono; Yayah Chanafiah, "Perempuan dalam Cerita Calon Arang Karya Pramoedya Ananta Toer Perspektif Feminis Sastra", *Jurnal Ilmiah Korpus,* 1(2) 2017.

Effendi, Prihatin.; Deve Ratnasari, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Pro Hukum,* 7(2) 2018.

Engels, Friedrich. *the Origin of the Family, Private Property and the State.* New York: International Publishers, 1972.

Engineer, Asghar Ali. *the Right of Woman in Islam.* Farid Wajidi; Cici Farkha Assegaf (terj.) *Hak-hak Perempuan dalam Islam.* Yogyakarta: Benteng Budaya, 1994.

Fakih, Mansour. "Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender" dalam Mansour Fakih dkk., *Membincang Feminisme: Diskursis Gender Perspektif Islam.* Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.* Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Farhan, *R.A. Kartini.* Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2010.

Farricha, Dian. *Sosiologi Hukum dan Gender, Interaksi Perempuan dalam Dinamika Norma dan Sosio Ekonomi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010.

Fatimah, Siti. "Perempuan dan Kekerasan pada Masa Orde Baru", *Demokrasi,* VI(2) 2007.

Fatkhurrohman, *Pembubaran Partai Politik di Indonesia.* Malang: Setara Press, 2010.

Fauzie; Lusi Margiani' Agus Fahri, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia.* Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993.

Febrian, Rizky; Eko A.B. Oemar, "Analisis Visual Tokoh Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji Wayang beber Pacitan melalui Pendekatan Semiotika", *Jurnal Pendidikan Seni Rupa,* 4(3) 2016.

Fiona Macdonald, "Hijra: Gender Ketiga yang unik dari Asia Selatan", diakses tanggal 23 Oktober 2020, https://www.bbc.com/indonesia/vert-cul-42053739

Flynn, Christine. *Feminist Theories and Sosial Work: Approaches and Applications.* New York: The Haworth Press, 2011.

Frederich, M.A. *Phychological Changes During Pregnancy.* Contemporaro, 27(2) 1977.

French, M. *Beyond Power on Women, Men and Morals.* New York: Ballantine Books, 1985.

Freud, Sigmund. *New Introductory to Psychanalysis,* New York: W. Nortan, 1965.

Freud, Sigmund. *The Ego and the Id,* New York, US: Norton, 1960, 3; lihat juga dalam C. George Boeree, *General Psychology.* Yogyakarta: Prismasphie, 2008.

Gardiner, M. Oey. *Perempuan Indonesia: Dulu dan Kini.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Hafid, R. "Perlawanan Kaum Buruh Perempuan", *Jurnal Legalitas,* 2(1) 2009.

Hafidz, Muhammad. "Rasisme dalam Masyarakat Pascakolonial: Analisis Wacana Kritis terhadap Novel-Novel Woodson", *Jurnal Humanus,* 4(1) 2016.

Hanapi, Agustin. "Peran Perempuan dalam Islam", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies,* 1(1) 2019.

Hanapi, Agustin. "Peran Perempuan dalam Islam", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies,* 1(1) 2015.

Handayani C.S.; A. Novianto, *Kuasa Wanita Jawa.* Yogyakarta: LKiS, 2004.

Handayani, Triastuti. "Mewujudkan Keadilan Gender melalui Perlindungan Hukum terhadap Perempuan", *Jurnal Rechtstaat Nieuw,* 1(1) 2018.

Hasan, Fuad. *Ensiklopedi Nasional Indonesia.* Jakarta: Delta Pamungkas, 2004.

Hasbiah, S. "Peranan Wanita dalam Pembangunan Berwawasan Gender", *Jurnal Kajian Perempuan,* 14(1) 2009.

Hasyim, Syafiq. *Bebas dari Patriarkhisme Islam,* Depok: KataKita, 2010, 35-36; lihat juga dalam Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam.* Yoygkarta: Pustaka Pelajar, 2010

Hendratmoko, Taufik; Dedi Kuswandi; Punaji Setyosari, "Tujuan Pembelajaran Berlandaskan Konsep Pendidikan Jiwa Merdeka Ki Hajar Dewantara", *Jurnal Jinotep,* 3(2) 2017.

Hidayati, Nuril. "Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer", *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender,* 14(1) 2018.

Hidayati, Nurul. "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)", *Muwazah,* 7(2) 2015.

Hoesin, Rushdy. "Terobosan Soekarno dalam Perundingan Linggarjati", Jakarta: Buku Kompas, 2010.

Huda, M. Dimyati. "Peran Dukun terhadap Perkembangan Peradaban Budaya Masyarakat Jawa", *Jurnal Ikadbudi,* 4(10) 2015.

Ida, H. "Feminisme Indonesia dalam Lintasan Sejarah". *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial,* 8(2) 2018.

Ima, H.N.; Hadi Soewito, *Lahirnya Kelasykaran Wanita dan Wirawati Catur Panca,* Jakarta: Yayasan Wirawati Catur Panca, 1992.

Imoh, Grade O. “Aplication of Development Communication in Africa’s Rural Development-Need for A Paradigm Shift”, *Global Journal of Ars Humanities and Sosial Sciences,* 6(1) 2013.

Inawati, Asti. “Peran Perempuan dalam Mempertahankan Kebudayaan Jawa dan Kearifan Lokal”, *Musawa,* 13(2) 2014.

Indra, Hasbi. *Potret Wanita Shalehah,* Jakarta: Penamadani, 2005.

Indradjaja, Agustijanto. “Ideal Perception of Javanese Women During Hindu-Buddhist Period: Reflection on the Statues of Women”, *Purbawidya: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi,* 6(2) 2017.

Indrasari, Tjandraningsih. “Mengidentifikasi Persoalan Perempuan”, *Jurnal Analisis Sosial*. *AKATIGA*, 3(2) 1996.

Insiyah, Zulfa. “Analisis Keseteraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Musdah Mulia dalam Konsep Pembaruan Keluarga Islam di Indonesia”, *Indonesian Journal of Islamic Law,* 1(2) 2019.

Ismawati, Esti. “Mapping Status and Roles of Javanese Women in Indonesian Literary Texts”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya,* 20(2) 2018.

Jacob, *Masa Depan Mempelajari Menyongsong dan Mengubahnya.* Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Jacobs, Ary.; L.C. Razavieh, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan,* A. Furchan (terj.), Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Janis L.I.; L. Mann, *Decision Making: a Psychological Analysis of Conflict, Choice and Commitment.* New York: the Free Press, 1979.

Jannah, Hasanatul. “Pemberdayaan Perempuan dalam Spiritualitas Islam (Suatu Upaya Menjadikan Perempuan Produktif)”, *Jurnal Karsa,* 19 (2) 2011.

Jasimah, I. *S.K. Trimurti Pejuang Perempuan Indonesia.* Jakarta: Kompas, 2016.

Jati, Wasisto Raharjo. "Historisitas Politik Perempuan Indonesia", *Paramita,* 24(2) 2014.

Jaya, Dadang. "Gender and Feminism: A Research from the Perspective of Islamic Studies", *at-Tatbiq: Jurnal al-Ahwal al-Syakhshiyyah,* 4(1) 2019.

Jovani, Audra. "Perkembangan Gerakan Politik Perempuan di Indonesia", *Jurnal Pamator,* 7(1) 2014.

Karim, Abdul. "Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan)", *Fikrah,* 2(1) 2014.

Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium.* Jakarta: Gramedia, 1988.

Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme.* Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Kasmawati, Andi. "Perlindungan Hak Perempuan dalam Perspektif Keadilan Gender", *Seminar Nasional LP2M UNM,* 2017.

Kementerian Pembangunan dan Pendayagunaan Perempuan, *Rangkuman Pembangunan Perspektif Gender,* Jakarta: Dian Rakyat, 2002.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender.* Jakarta: Lintas Katulistiwa, 2016.

Khan, Mazhar ul-Haq. *Wanita: Islam Korban Patologi Sosial.* Bandung: Pustaka Pelajar, 1994.

Khu, Stanley. "Teka teki Poliandri: Kritik Antropologi atas Sosiologi", *UMBARA: Indonesian Journal of Antropology,* 1(1) 2016.

Ki Nayono, *Yogya Benteng Proklamasi.* Yogyakarta: Badan Musyawarah Musea tth.

Kirom, S. "Buru dan Kekuasaan: Dinamika Perkembangan Gerakan Serikat Pekerja di Indonesia (Masa Kolonial-Orde Lama)", *Journal Pendidikan Sejarah,* 1(1) 2015.

Kluytmans, Frits. *Perilaku Manusia: Pengantar Singkat tentang Psikologi,* (terj.) Samsunuwiyati Mar'at, Bandung: Refika Aditama, 2006.

KOWANI, *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Kung, Hans. *Freud and the Problem of God,* New Heaven: Yale University Press, 1990.

Kusharyanto, Julasih. *Potensi Perempuan Amerika Tinjauan Feminisme.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

Kutha, Nyoman Ratna. *Sastra dan Cultural Studies: Representasi Fiksi dan Fakta.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Lakey, Paul N. "Acculturation: a Review of the Literature", *Intercultural Communication Studies*, 12(2) 2002.

Lapian, A.B. *Indonesia dalam Arus Sejarah: Masa Pergerakan Kebangsaan.* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011.

_____ *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Laski, Harold J. *the State in Theory and Practice.* New York: the Viking Press, 2001.

Luthfiyah, Nafsiyatul. "Feminisme Islam di Indonesia", *Esensi,* 16(1) 2015.

Mansur Fakih, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Marwati, Djoenet P; Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda,* Jakarta: Balai Pustaka, 2009.

Marzali, Amri. "Agama dan Kebudayaan", *Umbara: Indonesian Journal of Antropology,* 1(1) 2016.

Mas'udi, "Akar-Akar Teori Konflik: Dialektika Konflik; Core Perubahan Sosial dalam Pandangan Karl Mark dan George Simmel", *FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan,* 3(1) 2015.

Michele, Lyn Ford; Parker, "Introduction: thingking about Indonesian Women and Work", Woment and Work in Indonesia. New York: Routledge, 2008.

Moedjanto, G. *Indonesia Abad ke XX.* Yogyakarta: Canisius, 1992.

Moertono, Soermarsaid. *Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX*. Yogyakarta: Gramedia, 1984.

Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender,* Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Mufty, Siti Hasanah Syaiful. *Kongres Wanita Indonesia dalam Pergerakan dan Perjuangan Wanita Indonesia selama 70 Tahun.* Jakarta: C.V. Agung Lestari, 1999.

Muhsin, Amina Wadud. *Qur'an and Women.* Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 1994, 84.

Mulia, Siti Musidah; Anik Farida, *Perempuan dan Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Mulyadi, Achmad. "Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas)", *al-Ihkam,* VII(1) 2009.

Mulyani, Suzanna. *Kongres Wanita Indonesia Merdeka Melaksanakan Dhahrma.* Jakarta: Warta Kowani, 2015.

Murata, Sachiko. *The Tao of Islam,* (terj.) Rahmani Astuti; M.S. Nasrullah, Bandung: Mizan, 1999.

Mursidah, "Gerakan Organisasi Perempuan dalam Bingkai Sejarah", *Jurnal Kajian Gender*, 4(1) 2013.

Mursidah, "Gerakan Organisasi Perempuan Indonesia dalam Bingkai Sejarah", *Muwazah,* 4(1) 2012.

Mus, Mawaddah. "Analisis Feminisme Radikal Novel Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari", *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra,* 3(1) 2016.

Muslifah, Siti. "Akulturasi Budaya Timur Tengah ke Indonesia dan Pengaruhnya dalam Kesusastraan (Studi Kasus pada Serat Centhini)", *Jurnal CMES,* VI(1) 2013.

Muslih, Mohammad. "Integrasi Keilmuan: Isu Mutakhir Filsafat Ilmu" , *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam.* 4(2) 2016.

Mustadho, Muhammad Ali. "Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif the Theory of Limit Muhammad Syahrur", *Gender Quality: International Journal of Child and Gender Studies,* 4(1) 2018.

Nashir, Haedar. *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

_____. *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan.* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1999.

_____. *Pragmatisme Politik Kaum Elit,* Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Nastiti, S.T. *Kedudukan dan Peranan Perempuan dalam Masyarakat Jawa Kuna (Abad VIII-XV Masehi).* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009.

Nastiti, S.T. *Wanita pada Masa Jawa Abad IX-XV Masehi,* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.

Novalia, Elva. "Perkembangan Objek Wisata Goa Selomangleng di Kota Kediri Tahun 1992-2007", *Avatara,* 3(2) 2015.

Novianti, Ida. "Dilema Kepemimpinan Perempuan dalam Islam", *Jurnal Studi Gender dan Anak,* 3(2) 2008.

Nugroho, Artino Dwi. "Iconography Traditional Architecture in Java in Relief Lara Jonggrang temple Prambanan", *Literasi,* 2(1) 2012.

Nugroho, Riant. *Gender dan Strategi Pengurus Utamanya di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Nurjanah, Esti. "Peran Hajjah Rangkayo Rasuna Said dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Indonesia", dikutip dari buku Adi Sudirman, *Sejarah Lengkap Indonesia.* Yogyakarta: Diva Press, 2014.

Nurland, Farida. "Strategies for Improving Women's Participation in Politics and Sosial Life", dalam A.W. Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana.* Jakarta: Kompas, 2005.

Oakley, Ann. *Sex and Societie.* Englan: Gower Publishing Company, 2012.

Pane, Armijn. *Habis Gelap Terbitlah Terang.* Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Parsons, Talcott. *the Present Status of Structural Functional Theory in Sociology.* New York: the Pass Press, 1975.

Poeponegoro, M.D. N. Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V.* Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Poerwandari, Kristi. *Indonesian Women in a Changing Society.* Seoul: Ewha Women University Press, 2005.

Prasetyo, Banu; Umi Triyanti, "Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial", *Prosiding SEMATEKSOS,* 2018.

Pudjianto, Rizky. "Perempuan Jawa: Representasi dan Modernitas", *Indonesian Journal of Sociology and Education Policy,* 2(2) 2017.

Pujiati, *Kelestarian Perjuanan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI): Analisis pada Masa Kolonial dan Pascakolonial.* Tesis, Universitas Sains Malaysia, 2007.

Purwadi, *Sejarah Raja-Raja Jawa.* Yogyakarta: Media Abadi, 2007.

Qibtiyah, Mariatul. "*Rethinking* Peran Perempuan dalam Keluarga", *Journal Karsa,* 23(1) 2015.

Rahayu, Lina Meilinawati; Aquarini Priyatna; Ani Rachmat; Baban Banita, "Pemahaman Peristiwa Sejarah melalui Visualisasi Kisah Cut Nyak Dien sampai di Kabupaten Sumedang", *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat,* 2(5) 2018.

Rahmawati, "Potret Kuota Perempuan di Parlemen", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.* 7(3) 2004.

Ratih, I G.A.A. "Jejak-Jejak Perbincangan Perempuan dalam Sejarah", *Jurnal Perempuan,* 6(3) 2009.

Retnani, Siti Dana Panti. "Feminisme dalam Pemkembangan Aliran Pemikiran dan Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Principium,* 1(1) 2017.

Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008.* Jakarta: Serambi, 2008.

Ricklerfs, *Sejarah Indonesiai Modern.* Yogyakarta: UGM Press, 2011.

Ridjal, Fauzie; Lusi Margiani; Agus Fahri Husein, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia.* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.

Rinaldo, Rachel. *Ironic Legacy: the New Ordder and Indonesian Woment's Groups. Jurnal Outskirta,* 10(2) 2002.

Ritzer, George. *Modern Sociological Theory,* New York: McHraw-Hill, 1996.

_____; Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory.* Jakarta: Kencana, 2008.

Robinson, Kathryin. *Women in Asia: Tradition, Modernity Globalisation.* Australia: Allen and Unwin, 2000.

_____. "Islam, Gender and Politics in Indonesia", dalam *Islamic Perspective on the New Millennium.* Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2004.

Rokhimah, Siti. "Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender", *Muwazah,* 6(1) 2015.

Ruth A. Wallace (ed.), *Feminism and Sociological Theory: Key Issues in Sociological theory.* London: Sage Publucation, 1989.

Saraswati, Ufi. "Kuasa Perempuan dalam Sejarah Indonesia Kuna", *Jurnal Sejarah dan Budaya,* 10(1) 2016.

Sembiring, Jimmi Joses. *Hak dan Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru.* Jakarta: Visimedia, 2016.

Shofa, Abd Mu'id Aris. "Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia dalam Bingkai Pancasila", *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan,* 1(1) 2016.

Soejono; Sulistywati, *Sosiologi Pendidikan.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Soetanto, Himawan. *Yogyakarta 19 Desember 1948 Jenderal Spoor (Operatie Kraai) Versus Jenderal Sudirman (Perintah Siasat No. 1).* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Soetjipto, Ani Widyani. *Politik Perempuan Bukan Gerhana.* Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2005.

Soetjipto, Ani. "Perempuan dalam Politik Formal: Perdebatan Kajian Teori Feminis", *Jurnal Perempuan,* 17(4) 2012.

Sondarika, Wulan. "Peranan Wanita dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Masa Pendudukan Jepang", *Jurnal HISTORIA,* 5(2) 2017.

Steurs, Cora Vreede De. *The Indonesian Woman, Struggles and Achievements.* Den Hagg: Mouton, 1960.

Stuers C. (pen.) *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian.* Depok: Komuntas Bambu, 2008.

Stuers, Cora Vreede De. *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*, Yogyakarta: Kibar Press, 2008.

Suarmini, Ni Wayan.; Siti Zahrok; Dyah Satya Yoga Agustin, "Peluang dan Tantangan Peran Perempuan di Era Revolusi Industri 4.0", *Prosiding SEMATEKSOS 3* 2016.

Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Quran.* Yogyaakrta: LKiS, 1999.

Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an.* Yogyakarta: LKiS, 1999.

Sudewa, Alex. "Sastra dan Perkembangan Politik di Jawa Abad XVIII", *Jurnal Humaniora,* XIII (3) 2001.

Suhandjati, Sri. *Ensiklopedi Islam dan Perempuan: dari Aborsi hingga Misogini.* Bandung: Nuansa, 2009.

Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Suhendra, Ahmad. "Rekonstruksi Peran dan Hak Perempuan dalam Organisasi Masyarakat Islam", *Musawa,* 11(1) 2012.

Sujati, Budi.; Ilfa Harfiatul Haq, "Gerakan Perempuan di Jawa (1912-1941)", *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah,* 2(1) 2020.

Sukanto, Suryochondro. *Perkembangan Gerakan Wanita di Indonesia,* dalam Mayling Oey Gardiner; Mildred Wagemann; Evelyn Suleeman; Sulastri, *Perempan Indonesia Dulu dan Kini.* Jakarta: Gramedia, 2000.

Sukri, Sri Suhandjati. *Ragam Pemberdayaan Perempuan Versi Organisasi Perempuan Islam Indonesia,* Semarang, Balai Penerbit dan Pengembangan Agama, 2010.

Sumartono, "Dinamika Perubahan Sosial dalam Teori Konflik", *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis,* 5(1) 2016.

Summers, Larry. *the Age of Secular Stagnation: What it Is and What to Do About it,* dalam artikel Refli Zulfikar, "Tantangan Turbulensi Ekonomi Global terhadap Ekonomi Politik Internasional Indonesia", *JIEP,* 17(2) 2017.

Supadjar, Damardjati. *Kongres Kebudayaan 1991 Budaya Spiritual pada Masa Lalu, Kini dan yang akan Datang.* Jakarta: Direktorat jenderal Kebudayaan, 1993.

Supadjar, Damardjati. *Nawang Sari: Butir-Butir Renungan Agama, Spiritual dan Agama.* Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.

Supadjar, Damardjati. *Nawangsari,* Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1993.

Supartono Widysiswoyo, *Sejarah Indonesia dan Sejarah Dunia.* Jakarta: Intan Pariwara, 1991.

Surkusuma, Julia I, "the State and Sexsuality in New Order Indonesia", London: Duke University Press, 1996.

Suryakusuma, Julia I. *Sex, Power and Nation: an Anthology of Writings 1970-2003.* Jakarta: Metafor Publishing, 2004.

Suryakusuma, Julia. *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru.* Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.

Suryakusuma, Julia. *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Depok: Komunitas Bambu, 2011.

Suryakusuma, Julia. *Ibuisme Negara-Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru.* Jakarta: Komunitas Bambu, 2009.

Suryakusuma, Julia. *Ibuisme Negara-Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru.* Jakarta: Komunitas Bambu, 2009.

Suryocondro, Sukanti. *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Press, 1984.

Susanto, Budi. *Politik dan Postkolonialitas di Indonesia.* Yogyakarta: Kanisius, 2003.

Suwardana, Hendra. "Revolusi Industri 4.) Berbasis Revolusi Mental", *Jurnal Ilmiah Teknik dan Manajemen Industri,* 1(2) 2018.

Suwondo, Bambang. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.* Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978

Suyochondro, Sukanti. "Perkembangan Gerakan Wanita di Indonesia", Jakarta: Gramedia, 2000.

Syaifuddin Zuhri, "Membincang Peran Ganda Perempuan dalam Masyarakat Industri", *Jurisprudence,* 8(2) 2018.

Thoyeb, M.T. *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa.* Jakarta: Upakara Sentosa Sejahtera, 2004.

Tridewiyanti, Kunthi. "Gender Equality and Justice in Field of Politics: the Importance of Participation and Representation of Women in Legislative", *Journal Legislasi Indonesia,* 9(1) 2012.

Tuapattinaya, Yolanda Imelda Fransisca; Sri Hartati, "Pengambilan Keputusan untuk Menikah Beda Etnis: Studi Fenomenologis pada Perempuan Jawa", *Jurnal Psikologi Undip,* 13(1) 2014.

Turama, Akhmad Rizqi. "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons", *OUFONI,* 13(2) 2020.

Turner, H.J. *The Structure of Sociological Theory.* Belmont: Wadsworth Publishing, 1998.

Umar, Nasrudin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Quran.* Jakarta: Dian Rakyat, 2010.

Utami, Santi Wijaya Hesti. "Kesetaraan Gender: Langkah Menuju Demokratisasi Desa, Yogyakarta: IP. Lappera Indonesia, 2001.

Uwes, Sanusi. *Visi dan Misi Pondasi Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Logos. Ciputat, 2003.

Wahid, Marzuki. *Kebangkitan Ulama Perempuan dalam Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia: Kumpulan Tulisan Terkait Materi Kongres Ulama Perempuan Indonesia.* Cirebon: Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017.

Wahyudi, Very. "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender", *Politea,* 1(1) 2018.

Walidain, Amaliatul; Novia Kencana, "Peranan Politik Gerakan Perempuan dari Masa ke Masa (Studi: tentang Sejarah

Organisasi PKK di Indonesia)", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Global,* 04(1) 2019.

Wallace, Ruth A.; Alisan Wolf, *Contemporary Sociological Theory Continuing the Classical Tradition.* New Jersey: Englewood Cliffs, 1995

Wandi, Gusri. "Rekonstruksi Maskulinitas: Menguak Peran Laki-Laki dalam Perjuangan Kesetaraan Gender", *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender,* V(2) 2015.

Wibowo, Dwi Edi. "Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender", *Jurnal Mawazah,* 3(1) 2011.

Widyastuti D.A.R.; Nuswantoro; T.P. Sidhi, "Literasi Digital pada Perempuan Pelaku Usaha", *Jurnal Aspikom,* 3(1) 2016.

Widyastuti, S.H. "Perempuan Menerjang Hambatan Budaya: Catatan dari Lapangan", *Jurnal Reformasi EKonomi,* 8(1) 2007.

Widyawaty, Vivi. *Laporan Konferensi Nasional Perempuan II POKJA (Masyarakat Kerja) Perempuan Mahardika.* Jakarta: Gramedia, 2006.

Wieringa, Saakia E. *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI.* Yogyakarta: Galang Press, 2010.

Wieringa, Saskia E. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia.* Jakartaa: Garba Budaya, 1999.

Wieringa, Saskia Eleonora. *Penghancuran Gerakan Prempuan di Indonesia.* Jakarta: Garba Budaya, 1999.

Wieringa, Saskia. *Penghancuran Gerakan Permepuan: Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI.* Yogyakarta: Galang Press, 2010.

Wilson, E.O. "Biologi and the Sosial Sciences", *Daedalus,* 106(4) 1977.

Wolf, Naomi. *Mitos Kecantikan: Kala Kecantikan Menindas Perempuan.* Bandung: Niagara, 2004.

Wulan, Tyas Retno. "Pemetaan Gerakan Perempuan di Indonesia dan Implikasinya terhadap Penguatan Publik Sphere di Pedesaan", *Jurnal Studi Gender,* 3(1) 2008.

Yafie, Helmi Ali. *Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan Indonesia.* Jakarta: KUPI, 2017.

Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

Indeks

A

agamawan 39
Akulturasi Budaya 75, 76

D

Dharma Wanita 14, 19, 162, 230, 248, 249, 250, 251, 252, 253

E

emansipasi 13, 17, 67, 83, 154, 251

G

Gerakan Istri Tiga A 111
globalisasi 47, 50, 54, 267

H

HAM 13, 132
heteroseksual 39
HIV/AIDS 23

I

Ideologi Modern 57
industrialisasi 16, 17, 19, 20

J

Jawa Hokokai 111, 113, 115

K

keibuan 72, 267
Ketidakadilan Gender 6, 10
ketidaksetaraan gender 11, 25
Khadijah 43
kodrat 3, 4, 6, 42, 48, 251, 266
kodrat perempuan 3
Kongres Perempuan 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 113, 260
Kosmologi 41
KOWANI 120, 125, 138, 139, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 159, 162, 171, 201, 204, 213, 214, 227, 241, 243

L

Laskar Wanita 121, 124, 128, 129, 133, 146
legislatif 13, 146, 156, 253, 272

M

materialistis 76, 79, 80, 121
menstruasi 32, 33, 48
Modernitas 46, 75

N

nrimo ing pandum 51, 52

O

Orde Baru 14, 15, 19, 20, 21, 129, 132, 134, 135, 224, 225, 227, 228, 230, 235, 240, 241, 242, 247, 248, 249
organisasi Islam 229, 236, 237

P

pangandika 45
patriarki 9, 34, 38, 39
pemberdayaan 10
Peradaban Nusantara 47
Pergerakan Perempuan 101, 109
Periodesasi Gender 15
Pertiwi 162, 202, 216, 219, 220, 224, 229, 230, 251, 252, 255
polisi Wanita 193

S

sabil mubikat 263
Spiritual 44, 263, 291
Superego 28

T

Teori Feminisme 36, 37
teori fungsionalis struktural 31
Teori Gender 27
Teori Konflik 34, 36
Teori Psikoanalisa 27
Teori Sosio-Biologis 31
Tokoh Pejuang Perempuan 57
Tokoh Revolusi Perempuan 57

W

Women Circle 251, 259, 260

Y

yudikatif 13

Tentang Penulis

Dr. H. M. Dimyati Huda, M.Ag., lahir di Blitar Jawa Timur, 23 Maret 1974. Dimyati adalah seorang doktor Antropologi Agama dan dosen tetap di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia. Ditasbihkan oleh IAIN Kediri sebagai pakar di bidang Antropologi Agama. Selama kariernya, Dimyati dianugerahi sebagai dosen yang ahli di bidang Antropologi Agama.

Dimyati dikukuhkan sebagai Doktor Ilmu Sosial (spesifikasi Budaya Spiritual Islam Jawa-UNMER Malang). Bukan hanya skop nasional, setelah meraih gelar Doktor, Ia menyelesiakan pendidikan luar negeri di berbagai perguruan tinggi terkenal seperti Scool Manajemen University Singapore tahun 2012, Turky Fatih University tahun 2013, Yalarajabat University Thailand tahun 2014, Madinah University tahun 2016, Kolej University antarbangsa Selangor tahun 2017 dan Tohoku University Jepang tahun 2018.

Selain aktif mengajar, Ia juga melakukan penelitian. Beberapa penelitian Dimyati banyak diterbitkan di jurnal bereputasi, seperti *the Variation of Javanese Islamic Society in the Existence of Paranormal* diterbitkan di *Journal of Development Research;* penelitian lain berjudul *Teosofi Tariqa and its Principles, Rituals*

and Rationality as a Teligious Movement yang publis di Jurnal Teosofi. Masih banyak karya-karya Dimayati, terutama tentang budaya dan keislaman seperti *Peran Budaya Masyarakat Islam Jawa terhadap Kerukunan Umat Beragama,* dan juga *Masyarakat Islam Jawa dalam Perdukunan.*

UNU BLITAR
Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

RETHINKING PERAN PEREMPUAN DAN KEADILAN GENDER

Sebuah Konstruksi Metodologis
Berbasis Sejarah dan Perkembangan Sosial Budaya

www.cendekiapress.com
penerbitcendekiapress
cendekiapress
cendekiapress

Perbedaan laki-laki dan perempuan, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat, telah menimbulkan perdebatan dan diskusi yang cukup panjang bahkan masih menyimpan masalah. Perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) ini telah melahirkan interpretasi budaya, yang kemudian dikenal dengan istilah *gender*.

Berbicara *gender*, fakta empiris memperlihatkan bahwa perempuan adalah phak yang lebih banyak mendapatkan bentuk-bentuk ketidakadilan *gender*, semisal berupa marginalisasi perempuan, penempatan perempuan pada subordinasi, *stereotype* (pelabelan), kekerasan (*violence*) terhadap perempuan, dan beragam kasus lainnya yang sering kita dengar.

Buku ini hadir mengajak pembacanya "berwisata", untuk memikirkan kembali (*rethinking*) emansipasi kaum wanita, dalam hubungannya dengan partisipasi kebangsaan dan dinamika masyarakat. Karena bagaimanapun, permasalahan *gender* ini sangat mempengaruhi pembangunan suatu negara. Harapannya, tentu saja agar perjuangan kesetaraan *gender* di Indonesia segera dapat direalisasikan, dalam rangka membangun tatanan sosial yang lebih berkeadilan.

Dr. H. M. Dimyati Huda, M.Ag., adalah seorang doktor Antropologi Agama, dan dosen tetap di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia. Penulis ditasbihkan sebagai pakar di bidang Antropologi Agama oleh IAIN Kediri.

Pria kelahiran Blitar ini, dikukuhkan sebagai Doktor Ilmu Sosial (spesifikasi Budaya Spiritual Islam Jawa-UNMER Malang). Bukan hanya skop nasional, setelah meraih gelar Doktor, penulis menyelesiakan pendidikan luar negeri di berbagai perguruan tinggi terkenal seperti Scool Manajemen University Singapore tahun 2012, Turky Fatih University tahun 2013, Yalarajabat University Thailand tahun 2014, Madinah University tahun 2016, Kolej University antarbangsa Selangor tahun 2017, dan Tohoku University Jepang tahun 2018.

cendekia
CV Cendekia Press

ISBN 978-623-6659-75-5
9 786236 659755